



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 yang merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Banten dapat kami sampaikan tepat pada waktunya. Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Terkait substansi dan waktu penyampaian LPPD didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pasal 17, pasal 24 dan pasal 25, yang menjelaskan bahwa LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Pelaksanaan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Semoga segala upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh *stakeholder* sebagai pilar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mewujudkan visi Kota Tangerang Selatan “*terwujudnya tangsel kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi*” selama Tahun 2017 mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan secara bertahap dan berkesinambungan serta mendapat ridho Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Tangerang Selatan, Maret 2017
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Dasar Hukum	I-1
B. Gambaran Umum Daerah	I-5
C. Kondisi Geografis Daerah.....	I-5
D. Gambaran Umum Demografis.....	I-9
E. Kondisi Ekonomi.....	I-11
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	II-1
A. Visi dan Misi	II-1
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	II-4
C. Prioritas Daerah	II-10
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	III-1
A. Urusan Konkuren	III-2
a. Ringkasan Urusan Wajib yang dilaksanakan.....	III-2
A. Urusan Wajib Yang Melaksanakan Pelayanan Dasar	III-2
A.1 Urusan Pendidikan	III-3
A.1.1. Dinas Pendidikan.....	III-4
A.1.2. Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman	III-6



A.2. Urusan Kesehatan.....	III-7
A.2.1. Dinas Kesehatan	III-7
A.2.2. Rumah Sakit Umum.....	III-17
A.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III-23
A.3.1. Dinas Pekerjaan Umum.....	III-23
A.3.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-27
A.3.3. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.....	III-27
A.4. Urusan Perumahan kawasan Permukiman	III-31
A.4.1. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	III-31
A.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	III-34
A.5.1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	III-34
A.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	III-35
A.5.3. Satuan Polisi Pamong Praja	III-37
A.6. Urusan Sosial	III-38
A.6.1. Dinas Sosial	III-38
B.6.2. Sekretariat Daerah.....	III-40
B. Urusan wajib yang tidak Melaksanakan pelayanan dasar.....	III-41
B.1. Urusan Ketenagakerjaan.....	III-41
B.1.1. Dinas Ketenagakerjaan.....	III-41
B.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III-42
B.2.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	III-43
B.3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-44
B.3.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	



Anak dan Keluarga Berencana	III-45
B.4. Urusan Pangan	III-45
B.4.1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	III-46
B.5. Urusan Pertanahan	III-47
B.5.1. Dinas Permukiman dan Pertanahan	III-47
B.6. Urusan Lingkungan Hidup	III-49
B.6.1. Dinas Lingkungan Hidup	III-49
B.7. Urusan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil ..	III-53
B.7.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III-53
B.8. Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ..	III-54
B.8.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III-54
B.8.2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	III-55
B.9. Urusan Perhubungan	III-56
B.9.1. Dinas Perhubungan	III-56
B.9.2. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	III-60
B.10. Urusan Komunikasi dan Informatika	III-60
B.10.1. Dinas Komunikasi dan Informatika	III-60
B.11. Urusan Koperasi dan UMKM	III-62
B.11.1. Dinas Koperasi dan UMKM	III-62
B.12. Urusan Penanaman Modal	III-64
B.12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III-64
B.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	III-66
B.13.1. Dinas Pemuda dan Olahraga	III-66
B.14. Urusan Statistik	III-69
B.14.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	III-69
B.14.2. Dinas Komunikasi dan Informatika	III-69
B.15. Urusan Persandian	III-70



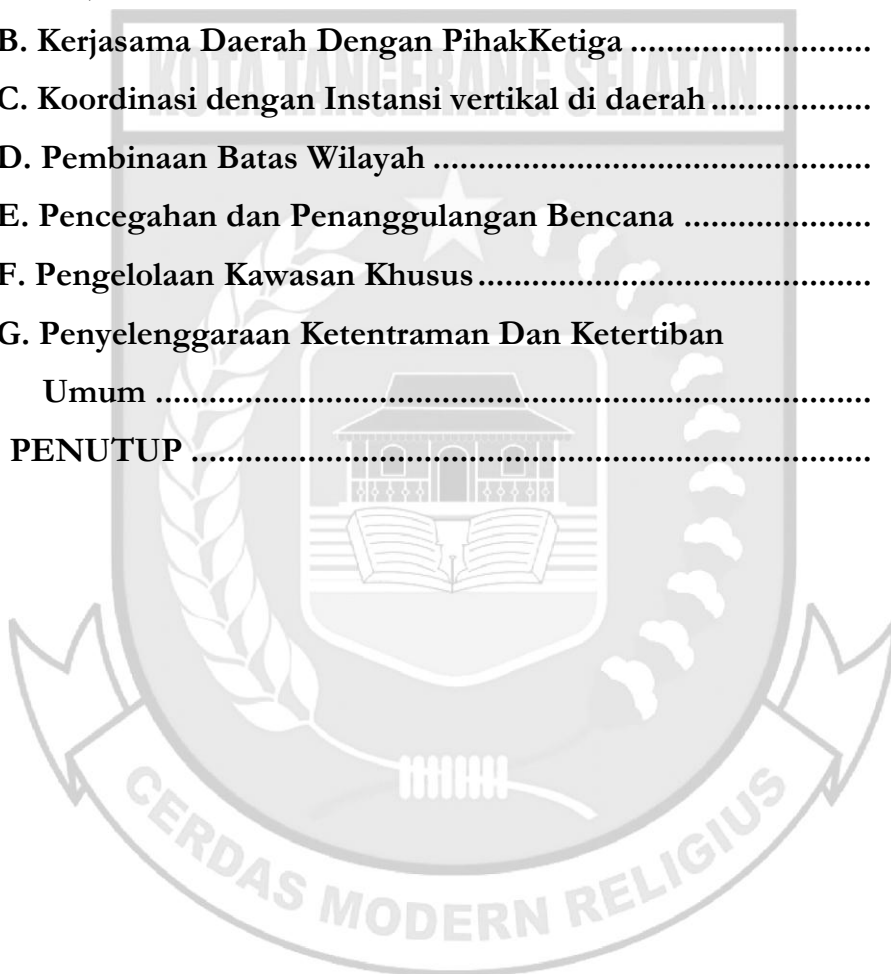
B.15.1. Dinas Komunikasi dan Informatika	III-70
B.16. Urusan Kebudayaan	III-70
B.16.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	III-70
B.17 Urusan Perpustakaan	III-71
B.17.1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	III-71
B.18 Urusan Kearsipan	III-72
B.18.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	III-72
B. RINGKASAN URUSAN PILIHAN	III-73
B.1. Urusan Kelautan dan Perikanan	III-73
B.1.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan	III-73
B.2. Urusan Pariwisata	III-74
B.2.1. Dinas Pariwisata	III-74
B.3. Urusan Pertanian	III-76
B.3.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan	III-76
B.4. Urusan Perdagangan	III-77
B.4.1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	III-77
B.4.2. Sekretariat Daerah	III-79
B.5. Urusan Perindustrian	III-80
B.5.1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	III-80
C. RINGKASAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA	III-81
C.1. Urusan Perencanaan	III-83
C.1.1. Sekretariat Daerah	III-83
C.1.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	III-83
C.2. Urusan Keuangan	III-84
C.2.1. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	III-84
C.2.2 Badan Pendapatan Daerah	III-87



C.3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	III-88
C.3.1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	III-88
C.3.2 Sekretariat Daerah	III-89
C.4. Urusan Penelitian dan Pengembangan	III-90
C.4.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	III-90
C.5. Urusan Sekretariat DPRD	III-90
C.5.1 Sekretariat DPRD	III-90
C.6. Urusan Sekretariat Daerah	III-92
C.6.1 Sekretariat Daerah	III-92
C.6.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	III-96
C.6.3 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	III-97
C.7. Urusan Inspektorat	III-98
C.7.1 Inspektorat	III-98
C.8. Urusan Kecamatan	III-99
C.8.1 Kecamatan Ciputat	III-99
C.8.2 Kecamatan Ciputat Timur	III-101
C.8.3 Kecamatan Pamulang	III-103
C.8.4 Kecamatan Serpong	III-105
C.8.5 Kecamatan Serpong Utara	II-108
C.8.6 Kecamatan Setu	III-110
C.8.7 Kecamatan Pondok Aren	III-112
C.8.8 Sekretariat Daerah	III-114
C.9. Urusan Pemerintahan Umum	II-115
C.9.1 Sekretariat Daerah	III-115
C.9.2 Badan KESBANGPOL	III-116
C.10 Urusan Sekretariat Umum	III-117



BAB IV	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017	IV-1
BAB V	TUGAS PEMBANTUAN	V-1
	A. Tugas Pembantuan yang Diterima	V-1
	B. Tugas Pembantuan yang Diberikan	V-49
BAB VI	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
	A. Kerjasama Antar Daerah.....	VI-1
	B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	VI-4
	C. Koordinasi dengan Instansi vertikal di daerah	VI-5
	D. Pembinaan Batas Wilayah	VI-7
	E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI-8
	F. Pengelolaan Kawasan Khusus	VI-10
	G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	VI-12
BAB VII	PENUTUP	VI-1





DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan	I-7
TABEL I.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017	I-10
TABEL I.3	Komposisi Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2017	I-10
TABEL I.4	Indikator Makro Kota Tangerang Selatan Tahun 2011- 2016	I-22
TABEL II.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021	II-2





DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1 Peta Wilayah Kota Tangerang Selatan	I-8
GAMBAR I.2 Grafik Jumlah SE. 2016	I-12



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kota Tangerang Selatan yang dibentuk menjadi daerah otonom baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, resmi berdiri sejak tanggal 26 November 2008. Setelah dipimpin oleh 3 (tiga) orang Penjabat Walikota, maka periode berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.36-261 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, telah ditetapkan Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Drs. H. Benyamin Davnie sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pertama periode 2011-2016 dan dilantik oleh Gubernur Banten atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 April 2011. Selanjutnya untuk periode kedua tahun 2016-2021, Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.36-3489 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Tangerang Selatan dan Nomor : 132.36-3490 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang dilantik oleh Gubernur Banten atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 2016.

Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai pelaksanaan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Terkait substansi dan waktu penyampaian LPPD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pasal 17, pasal



24 dan pasal 25, bahwa LPPD disampaikan kepada Pemerintah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

LPPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 merupakan laporan pelaksanaan APBD Tahun 2017, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan azas desentralisasi telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Terminologi dari desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (otonomi) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka otonomi daerah merupakan sebuah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain penyelenggaraan azas desentralisasi, daerah juga menyelenggarakan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota kepada kelurahan untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 1 angka 11).

Penyusunan LPPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 didasarkan kepada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120.04/10174/OTDA Tentang Manual Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan; (Lembaran Daerah Kota

- Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0311, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016; (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1111)
 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

B. Gambaran Umum Daerah

Gambaran umum Kota Tangerang Selatan yang terkait dengan kondisi geografis daerah dan gambaran umum demografis didasarkan pada data kondisi fisik dan administratif daerah serta data-data statistik hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017.

C. Kondisi Geografis Daerah

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'30" Lintang Selatan yang secara administratif terdiri dari tujuh kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, luas wilayah Kota

Tangerang Selatan adalah seluas 147,19 Km² atau 14.719 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Wilayah Kota Tangerang Selatan di antaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggarahan dan Sungai Cisadane sebagai batas wilayah di sebelah barat. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah timur memberikan peluang Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota strategis di sekitar Ibukota Negara. Selain itu juga merupakan daerah yang memiliki posisi strategis dari sisi ekonomi karena menjadi daerah yang secara geografis menghubungkan wilayah Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat.

Luas wilayah masing-masing kecamatan tertera dalam Tabel C.1, dimana Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha atau 20,30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan Kecamatan dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Setu dengan luas 1.480 Ha atau 10,06% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan.

Tabel I.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Serpong	2,404	16,33%
2	Serpong Utara	1,784	12,12%
3	Ciputat	1,838	12,49%
4	Ciputat Timur	1,543	10,48%
5	Pamulang	2,682	18,22%
6	Pondok Aren	2,988	20,30%
7	Setu	1,480	10,06%
Kota Tangerang Selatan		14,719	100,00%

Sumber: RTRW Kota Tangerang Selatan, 2013-2031

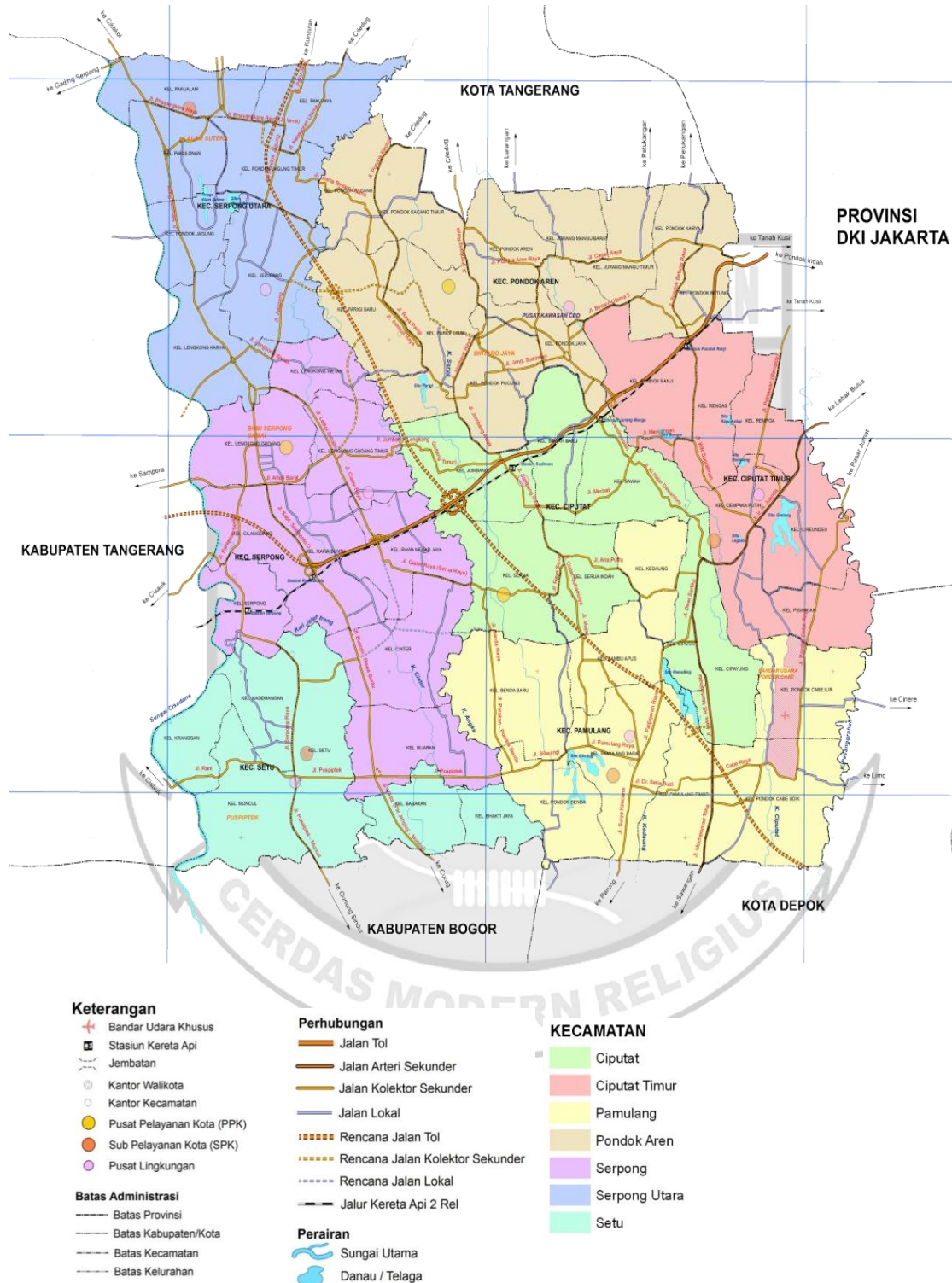
Luas wilayah masing-masing kelurahan dengan luas di atas empat ratus hektar terletak di Kecamatan Pamulang, yaitu Pondok Cabe Udik dan Pamulang Barat, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Paku Jaya. Kelurahan dengan luas wilayah di bawah seratus lima puluh hektar terletak di Kecamatan Serpong, yaitu Cilenggang dan Serpong, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Jelupang. Kelurahan dengan luas wilayah paling besar adalah Pondok Cabe Udik dengan luas 483 Ha sedangkan kelurahan dengan luas wilayah paling kecil adalah Jelupang dengan luas 126 Ha.

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah, dimana sebagian besar wilayah memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan rata-rata 0 – 3 % sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 meter dari permukaan laut (DPL).

Secara garis besar kemiringan lahan terbagi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Kemiringan antara 0 – 3 % meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara;
2. Kemiringan antara 3 – 8 % meliputi Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu.

GAMBAR I.1
PETA WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN



D. Gambaran Umum Demografis

Penduduk mempunyai peran penting dalam penentuan percepatan pembangunan daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi tata kelola pemerintahan dan pembangunan, penduduk atau masyarakat tidak lagi sekedar menjadi objek melainkan memiliki peran sebagai subjek atau yang turut serta sebagai salah satu stakeholder penyelenggara tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di samping pemerintah dan dunia usaha atau swasta. Dalam aspek ekonomi, penduduk juga memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen.

Berdasarkan data BPS Kota Tangerang Selatan, jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 adalah sebesar 1.593.812 jiwa. Kecenderungan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun di Kota Tangerang Selatan selain disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk secara alamiah juga tidak terlepas dari kecenderungan migran masuk yang disebabkan oleh tumbuhnya pengembangan perumahan-perumahan di Kota Tangerang Selatan serta daya tarik daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Jakarta.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 adalah jumlah penduduk laki-laki **802.908** orang dan jumlah penduduk perempuan **790.904** orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel I.2.

TABEL I.2

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
MENURUT KECAMATAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Penduduk (orang)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Setu	42.850	40.972	83.777	104,54
2	Serpong	88.066	89.611	177.677	98,34
3	Pamulang	172.525	169.443	341.968	101,89
4	Ciputat	118.166	114.393	232.559	103,37
5	Ciputat Timur	104.039	102.690	206.729	101,39
6	Pondok Aren	191.831	187.522	379.353	102,37
7	Serpong Utara	85.476	86.273	171.749	99,15
Jumlah		802.908	790.904	1.593.812	101,60

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2017

Dari data jumlah penduduk berdasarkan usia, sebagian besar penduduk Kota Tangerang Selatan adalah umur produktif (15-64 tahun). Hal ini jika dapat dimanfaatkan secara optimal maka akan menjadikan sumber daya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara masif di Kota Tangerang Selatan. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yang lebih rinci dapat dilihat pada Tabel I.3 berikut

Tabel I.3

Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0-4	73.822	9,49%	71.420	9,33%	145.242	9,41%
5-9	68.160	8,76%	64.762	8,46%	132.922	8,61%
10-14	57.065	7,34%	54.761	7,15%	111.736	7,24%
15-19	60.821	7,82%	63.522	8,30%	124.343	8,06%
20-24	66.132	8,50%	68.185	8,91%	134.317	8,70%
25-29	72.656	9,34%	74.475	9,73%	147.131	9,53%
30-34	74.668	9,60%	75.924	9,92%	150.592	9,76%
35-39	71.229	9,16%	72.398	9,46%	143.627	9,31%
40-44	65.111	8,37%	63.340	8,27%	128.451	8,32%
45-49	54.708	7,03%	53.061	6,93%	107.769	6,98%
50-54	42.448	5,46%	39.637	5,18%	82.085	5,32%
55-59	32.134	4,13%	27.403	3,58%	59.549	3,86%
60-64	17.977	2,31%	14.070	1,84%	32.047	2,08%
65-69	10.358	1,33%	9.752	1,27%	20.110	1,30%
70-74	5.467	0,70%	5.857	0,77%	11.324	0,73%
75+	4.945	0,64%	7.019	0,92%	11.964	0,78%

Jumlah	777.713	100,00%	765.496	100,01%	1.593.812	100,00%
--------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

Sumber : Kota Tangerang Selatan dalam Angka, 2017

E. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Sektor Unggulan

Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu wilayah otonom di Provinsi Banten memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam hal pengembangan sektor tersier. Berdasarkan hasil analisis LQ Kota Tangerang Selatan dibandingkan dengan Provinsi Banten, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Tangerang Selatan memiliki kemampuan yang relatif jauh lebih tinggi dibanding kategori yang sama di tingkat Provinsi Banten pada tahun 2015. Hal tersebut bisa dilihat melalui nilai LQ yang sebesar 3,39. Nilai LQ sebesar 3,39 artinya bahwa proporsi penciptaan nilai tambah kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kota Tangerang Selatan 3,39 kali lebih besar daripada proporsi penciptaan nilai tambah sektor tersebut di Provinsi Banten.

Untuk beberapa kategori yang masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tangerang Selatan sehingga diperlukan pasokan atau impor dari luar wilayah Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2015, dari 17 kategori pembentukan PDRB ternyata 8 kategori yang harus mengandalkan impor dari luar wilayah Tangerang Selatan. Kedelapan kategori tersebut adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Pertambangan dan Penggalian, kategori Industri Pengolahan, kategori Pengadaan Listrik dan Gas, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, kategori Transportasi dan Pergudangan, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

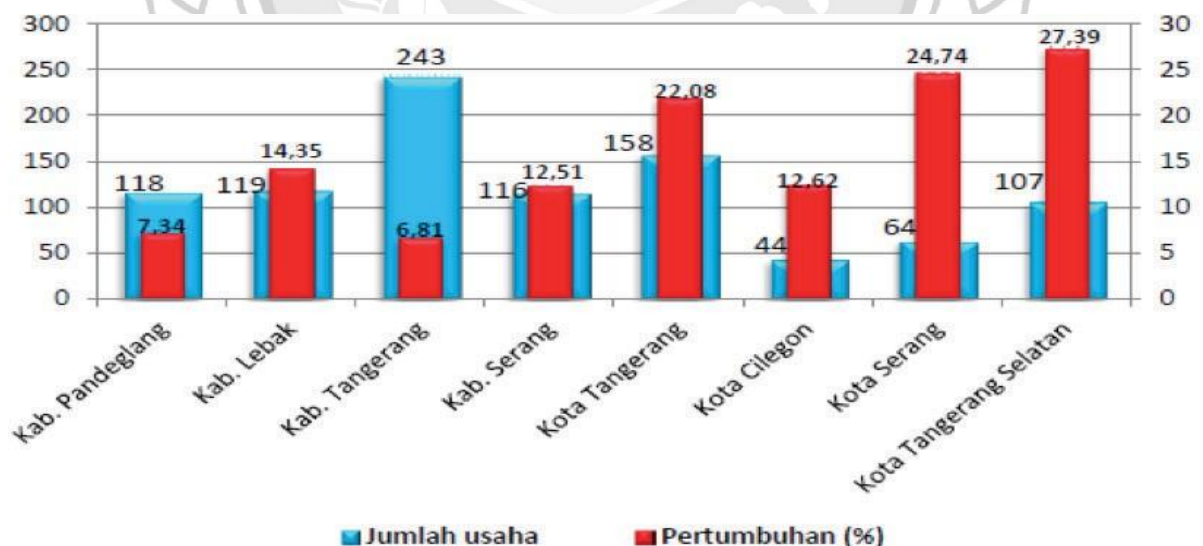
Sebagai kota penyangga DKI Jakarta dan juga sebagai kota mandiri, pekerja di Kota Tangerang Selatan banyak menggantungkan hidupnya pada sektor tersier. Hasil analisis LQ data PDRB menyatakan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah basis perdagangan dan jasa-jasa. Hal ini disebabkan

oleh besarnya peranan sektor tersebut dalam pembentukan nilai tambah di Kota Tangerang Selatan. Konsentrasi pemerintah terhadap sektor tersier akan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan memperhatikan juga sektor-sektor lain sebagai pendukung perekonomian.

Saat ini Kota Tangerang Selatan berupaya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang salah satunya dengan melakukan penggalan potensi daerah. Sektor yang paling dominan memberikan kontribusi dalam struktur PAD adalah pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, khususnya optimalisasi pemungutan pajak hotel, yang disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Jumlah usaha hasil Sensus Ekonomi 2016 di Kota Tangerang Selatan sebesar 105.773 usaha. Dilihat dari pertumbuhan jumlah usaha, Kota Tangerang Selatan merupakan kota dengan peningkatan jumlah usaha paling tinggi yaitu sebesar 27,39 persen dibanding tahun 2006, sebagaimana tersaji pada Gambar I.2 dibawah ini.

Gambar I.2. Grafik Jumlah Usaha SE 2016 (ribu) dan Pertumbuhannya terhadap SE2006 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2017

Dilihat dari jenis usaha, 100.271 usaha atau 94,80 persen merupakan usaha menengah kecil (UMK) dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 116.096 orang, dan sisanya sebanyak 5.502 usaha atau 5,20 persen adalah usaha menengah besar (UMB) dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 234.478 orang.

Jumlah usaha menurut kategori lapangan usaha yang terbanyak adalah usaha perdagangan, yaitu sebesar 44.196 jenis usaha atau 41,78 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 109.456 orang. Jenis usaha urutan kedua adalah usaha akomodasi dan rumah makan, yaitu sebesar 26.910 jenis usaha atau 25,44 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 53.136 orang. Adapun jumlah usaha paling sedikit dibandingkan jenis usaha lain di Kota Tangerang Selatan adalah pertambangan, hanya sebesar 3 jenis usaha dengan penyerapan jumlah tenaga kerja sebesar 303 orang.

Berdasarkan Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan, koperasi seluruhnya pada tahun 2016 berjumlah 519 unit yang terdiri dari koperasi angkutan, distribusi, inkra, kopkar, simpan pinjam, koppas, KUD, Kopti, PD K5, Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koppontren, Kopwan, KJKS, pensiunan, Koptan, TNI/ polri, profesi dan koperasi lainnya.

ANEKA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI

Fasilitas Hotel Dan Perbankan

Fasilitas akomodasi berupa hotel dari mulai kelas melati hingga hotel berbintang cukup memadai tersedia di Kota Tangerang Selatan. Hotel dan penginapan yang dapat digunakan di antaranya Hotel Bintaro di Pondok Aren, Hotel BSD, Hotel Santika dan Hotel Melati di Serpong dan Serpong Utara, Wisma Tamu Puspiptek di Setu, Hotel Ciputat dan Pondok Wisata Situ Gintung di Ciputat dan Ciputat Timur.

Kota Tangerang Selatan sangat mudah diakses dari berbagai daerah dan kawasan. Bandara Soekarno- Hatta, jaringan jalan tol yang saling terkoneksi antar kawasan, jalur kereta api yang memiliki akses sampai di pusat-pusat bisnis dan perkantoran di Jakarta, seperti Kawasan JL Thamrin-Sudirman, Manggarai, Tanah Abang, serta sarana transportasi yang menunjang seperti Taxi, bus antar kota maupun kendaraan umum lainnya. Dengan mobilitas warga yang tinggi dan dukungan infrastruktur yang ada, maka prospek investasi Hotel sangat menjanjikan di Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, keberadaan lembaga keuangan dan perbankan juga sangat penting dalam menunjang aktivitas perekonomian daerah di Kota Tangerang Selatan. Pada saat ini, terdapat sejumlah bank pemerintah dan swasta dilengkapi fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), sehingga memudahkan transaksi, seperti Bank BJB, Mandiri, BCA, CIMB, Sinarmas dan lain-lain.

Aktivitas Perekonomian

Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang berada dibawah Kepala Daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah serta mengalokasikannya guna peningkatan kesejahteraan rakyatnya serta pemberdayaan Pemerintah Daerah. Dilihat dari kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun, secara umum terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7 persen setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah.

Dalam jangka panjang, pembangunan di Kota Tangerang Selatan difokuskan untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari sektor jasa, perdagangan dan hotel restoran yang saat ini rata-rata pertumbuhannya masih sangat kecil yaitu sebesar 1 persen. Sedangkan

Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial yang saat ini pertumbuhannya relatif baik, yaitu 16 persen pertahun. Seiring peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak yang sesuai dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kota Tangerang Selatan.

Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih akan terus diperkuat di Kota Tangerang Selatan adalah melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Peningkatan kerjasama antara pemerintahan dan swasta perlu mendapat dukungan dari semua pihak terkait, karena melihat karakteristik ekonomi Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah primadona dunia usaha lokal maupun internasional dalam berinvestasi mengembangkan usahanya yang bergelut dibidang industri, jasa, perdagangan, hotel dan restoran, sehingga dengan keberadaan jumlah perusahaan yang cukup banyak maka potensi dana CSR yang bisa dicapai cukup besar.

Fasilitas Perekonomian

Semenjak sembilan tahun terbentuk, Kota Tangerang Selatan sudah memiliki beberapa kawasan industri dan perdagangan. Luas yang disediakan untuk zona industri di Kota Tangerang Selatan adalah seluas 2218,31 hektar dengan 2386 unit industri yang termanfaatkan. Sedangkan luas yang disediakan untuk kawasan industri adalah seluas 1284 hektar dengan 1614 unit industri yang termanfaatkan.

Kawasan perdagangan di Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi dua, yaitu kawasan dengan skala kota dan lokal serta kawasan perdagangan jasa. Luas yang disediakan untuk kawasan perdagangan skala kota dan lokal adalah seluas 1050 hektar, sedangkan untuk kawasan perdagangan jasa seluas 1224,79 hektar. 3502,31 hektar dengan 2386 unit perusahaan. Terdaftar ada 12 (dua belas) pasar tradisional yang berada di tanah milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Selain kawasan perindustrian dan perdagangan, Kota Tangerang Selatan juga memiliki kawasan pergudangan di Taman Tekno, dalam kawasan Taman Tekno saat ini ada kurang lebih 1.696 perusahaan. Lahan kawasan pergudanganpun terbagi menjadi dua, yaitu lahan yang disediakan untuk kawasan pergudangan, sebesar 2218,31 hektar dengan perusahaan 2.386 unit dan lahan yang disediakan untuk zona gudang, sebesar 4,2 Ha.

POTENSI PEMBANGUNAN

Kota Tangerang Selatan telah berhasil membangun kerjasama pemerintah dan swasta untuk membangun bersama-sama menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota yang nyaman/ layak huni (liveable city). Keberhasilan tersebut mendapat penghargaan dari The Eastern Regional Organization for Planning and Housing (EAROPH) yang merupakan organisasi non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Cita-cita Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang berwawasan ramah lingkungan atau sering disebut sebagai Green City perlu segera diwujudkan. Taman-taman kota tidak hanya di tanah lapang dan ruang terbuka hijau (RTH), tetapi juga jalur pemisah dan di persimpangan jalan raya. Green city memang bukan hanya kota yang hijau berkat taman-taman kota yang indah di RTH, tetapi juga didukung oleh planning and design atau perencanaan dan rekayasa.

Untuk mewujudkan green city, tidak hanya menata bangunan, tetapi juga menyediakan green infrastructure. Kota Tangerang Selatan harus berkonsep kota hijau. Dengan begitu, tidak saja mengatur atau menata bangunan menuju green building, tetapi harus didukung dengan akses jalan, hal ini terkait dengan efisiensi penggunaan lahannya. Sudah saatnya bangunan-bangunan di Kota Tangerang Selatan berciri green building. Salah satu parameternya adalah gedung tersebut hemat energi.

Visi Kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi merupakan sebuah konsep kota yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga di dalamnya untuk melakukan kegiatan atau mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Kota cerdas didasari atas perkembangan teknologi dan pola pikir dari manusia. Perkembangan teknologi yang tidak akan pernah berhenti, sehingga konsep kota cerdas pun tidak akan pernah berhenti berkembang

Guna mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi cerdas (Smart City) dan kota yang layak huni (Liveable City) tentunya perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan lebih profesional, modern, maju dan akuntabel, sehingga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

POTENSI WISATA

Di Tangerang Selatan terdapat beberapa lokasi kunjungan wisata. Jenis wisata yang tawarkan beraneka ragam di antaranya wisata alam, wisata budaya, wisata belanja dan wisata kuliner.

Wisata Alam Dan Air

Beberapa lokasi wisata alam yang bisa dikunjungi di antaranya Wisata Tanah Tingal, Kandank Jurank Doank, dan Kampung Dongeng merupakan lokasi wisata alam yang terletak di Ciputat. Ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan terutama oleh anak-anak, mulai dari membuat keramik, mengenal jenis binatang, memberi makan binatang, panen padi, flying fox, bermain kano dan pengamatan burung (birdwatching) hingga pertunjukan dongeng. Terdapat juga penginapan lengkap dengan kafe dan kolam renang. Wisata Kampung Maen merupakan wisata di Family Park Alam Sutera Serpong Utara

perpaduan antara dunia pendidikan dan hiburan anak, dimana proses edukasi disajikan dalam bentuk permainan/ games yang interaktif.

Selain itu, juga terdapat taman/ hutan kota di Serpong yang juga dimanfaatkan sebagai lokasi rekreasi, seperti hutan kota di wilayah BSD, taman kota yang terdapat di Jl. Letnan Sutopo dekat Sekolah Al-Azhar BSD dan taman kota yang terletak di Taman Tekno, Buaran dekat MAN Insan Cendekia.

Wisata air, seperti kolam renang, pemancingan, taman air tersebar di berbagai wilayah, seperti Family Park Kampung Aer di Alam Sutera Serpong Utara, Ocean Park di BSD Serpong, Wisata Air Pulau situ Gintung Ciputat Timur, serta kolam renang dan pemancingan yang terdapat di banyak kecamatan. Hampir di semua kecamatan juga terdapat situ-situ yang dapat dijadikan tempat rekreasi namun sebagian besar masih harus ditata ulang.

WISATA BELANJA, KULINER DAN HIBURAN

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan adalah wilayah urban dan salah satu fenomena yang menyertai kehidupan urban adalah belanja dan kuliner.

Kuliner

Mulai dari Pamulang, Pondok Aren, Bintaro hingga Alam Sutera dan BSD, jajanan restoran dan kafe bisa ditemukan di sepanjang jalan. Jenis kuliner yang bisa ditemukan sangat beragam dari makanan tradisional berbagai daerah, makanan cepat saji, hingga fine dining. Masih banyak peluang investasi yang dapat dikembangkan di bidang rumah makan dan restoran di Kota Tangerang Selatan. Setiap hari terutama hari libur, banyak warga yang berburu kuliner baik dari kelas kaki lima sampai kelas hotel, dari yang tradisional sampai internasional. Setiap hari deretan mobil mewah selalu memenuhi setiap rumah makan dan restoran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi investasi di bidang kuliner sangat besar.

Mall & Pusat Perbelanjaan

Mulai dari Pamulang, Pondok Aren, Bintaro hingga Alam Sutera dan BSD, jajaran restoran dan kafe bisa ditemukan di sepanjang jalan. Jenis kuliner yang bisa ditemukan sangat beragam dari makanan tradisional berbagai daerah, makanan cepat saji, hingga fine dining. Masih banyak peluang investasi yang dapat dikembangkan di bidang rumah makan dan restoran di Kota Tangerang Selatan. Setiap hari terutama hari libur, banyak warga yang berburu kuliner baik dari kelas kaki lima sampai kelas hotel, dari yang tradisional sampai internasional. Setiap hari deretan mobil mewah selalu memenuhi setiap rumah makan dan restoran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi investasi di bidang kuliner sangat besar.

WISATA BUDAYA

Budaya

Masyarakat Kota Tangerang Selatan memiliki budaya campuran Betawi dan Sunda. Dalam keseharian, masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Betawi atau bahasa Sunda. Oleh karena itu, kesenian masyarakat Kota Tangerang Selatan pun beraneka ragam sesuai dengan latar belakang budaya. Karakter kesenian yang ada di Kota Tangerang Selatan adalah perpaduan antara seni budaya Betawi dan Sunda. Beberapa kesenian yang berkembang sampai saat ini adalah Seni Musik Gambang Keromong dan Tari Krecek yang merupakan tarian pergaulan yang banyak berkembang. Pada beberapa wilayah banyak yang masih dihuni oleh pelaku kesenian seperti Lenong dan Topeng, seperti Bapak Bolot. Acara kesenian modern seperti pertunjukan musik juga kerap diselenggarakan terutama di pusat perbelanjaan, sebagai contoh di Taman Jajan BSD kerap diadakan pertunjukan musik jazz yang dikenal sebagai Jajan Jazz.

Cagar Budaya

Kota Tangerang Selatan memiliki banyak potensi obyek wisata yang menarik. Mulai dari situs budaya yang mempunyai nilai sejarah di antaranya adalah Keramat Serpong, Makam Raden Pakpak, Abah Saleh Cipeucang, Keramat Pamulang, Makam Ki Rebo dan Raden Mas Ulung, Jombang Keramat, Taman Bahagia Abri, Makam Ki Buyut Raden Sostro Wijoyo, Sumur Tujuh, Situs Daan Mogot, Makam Pahlawan Seribu Serpong, Tugu Peringatan Cilenggang, Buyut Kejaren, Keramat Tajug, dan Keramat Asem. Bangunan lain yang mempunyai nilai budaya adalah rumah-rumah adat perpaduan budaya Cina dan Betawi seperti di daerah Maruga Ciputat dan rumah adat betawi yang banyak dijumpai di daerah Parigi dan Jombang.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas perkembangan pembangunan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluasluasnya.

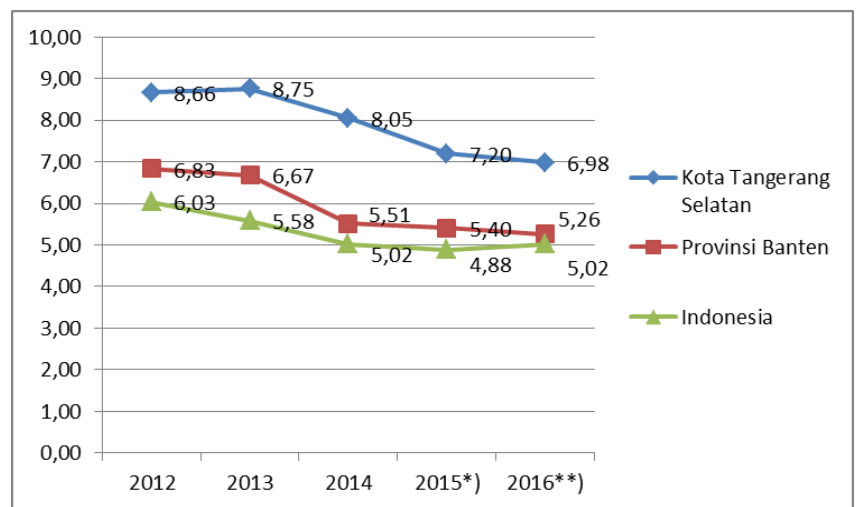
Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Kota Tangerang Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2012-2016) mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan tahun 2016 mencapai 6,98 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 7,20 persen, hal ini disebabkan karena terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Listrik dan Gas sebesar 13,21 persen, disusul oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan serta usaha Konstruksi dengan laju pertumbuhannya masing-masing sebesar 9,57 persen dan 9,20 persen. Sedangkan

seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali industri pengolahan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,33 persen.

Menurunnya laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (LPE) pada tahun 2016 memberi gambaran bahwa telah terjadi peningkatan produksi barang dan jasa oleh para pelaku ekonomi di Kota Tangerang Selatan walaupun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan inflasi sektoral (dilihat dari perkembangan indeks implisit PDRB) sebesar 1,33 persen, maka dapat dikatakan telah terjadi perbaikan pendapatan masyarakat Kota Tangerang Selatan pada umumnya. Jika disertai dengan pemerataan pendapatan, hal tersebut dapat secara langsung memperbaiki tingkat daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli inilah yang akan menjadi salah satu faktor utama penggerak perekonomian di Kota Tangerang Selatan.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di provinsi Banten maka Kota Tangerang Selatan mempunyai LPE paling tinggi mulai tahun 2012 sampai dengan 2016. Tahun 2016 LPE Kota

Grafik I-3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012-2016 (persen)



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Tangerang Selatan sebesar 6,98 persen, diikuti oleh Kota Serang sebesar 6,22 persen, Kabupaten Lebak sebesar 5,70 persen, Kabupaten Pandeglang sebesar 5,49 persen, Kabupaten Tangerang sebesar 5,32 persen dan Kota Cilegon sebesar 5,05 persen serta Kabupaten Serang sebesar 5,00 persen. Jika dibandingkan dengan LPE Provinsi Banten maupun Indonesia, terdapat perbedaan yang cukup berarti.

Tahun 2016 LPE Provinsi Banten sebesar 5,26 persen sedangkan LPE angka Nasional sebesar 5,02 persen.

Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui indikator makro Kota Tangerang Selatan. Tabel berikut menguraikan beberapa indikator makro strategis Kota Tangerang Selatan untuk dapat melihat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas.

Tabel I.4. indikator makro Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016

No.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	1,35	1,39	1,44	1,49	1,54	1,59
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	3,67	3,59	3,51	3,44	3,36	3,28
3	Indeks Pembangunan Manusia / IPM	76,99	77,68	78,65	79,17	79,38	80,11
4	Rata-rata Lamanya Sekolah / RLS (tahun)	10,87	11,09	11,48	11,56	11,57	11,58
5	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	n.a.	12,79	13,24	13,58	13,61	14,08
6	Angka Harapan Hidup / AHH (tahun)	72,07	72,09	72,10	72,11	72,12	72,14
7	Kemampuan Daya Beli (Juta Rp) (PPP)	14,04	14,13	14,21	14,36	14,588	14,97
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE (%)	8,81	8,66	8,75	8,50	7,25	6,98
9	PDRB Atas Dasar Harga berlaku (Trilyun Rp)	34,89	39,07	44,35	50,21	56,04	60,72
10	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Trilyun Rp)	33,21	36,09	39,25	42,59	45,68	48,64
11	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	25,92	28,02	30,72	33,63	36,32	37,73
12	Tingkat Inflasi	5,13%	4,44%	10,02%	10,57%	3,24%	2,61%
13	Tingkat Kemiskinan	1,50%	1,33%	1,75%	1,62%	1,69%	1,67%
14	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	98,50%	98,67%	98,25%	98,38%	98,31%	98,33%
15	Tingkat Pengangguran	11,98%	8,07%	4,56%	6,92%	6,23%	6,80%
16	Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	667	639	650	705	729	685.782

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Berdasarkan data yang diuraikan pada **Tabel I-4**, secara umum indikator makro ekonomi Kota Tangerang Selatan periode 2011-2016 menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa

tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Adapun penjelasan data-data pada tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,47% pertahunnya. Secara absolut jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011 sebanyak 1.346.102 orang, hingga tahun 2016 mencapai angka 1.543.209 orang. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut menyebabkan kepadatan penduduk semakin meningkat pula, pada tahun 2012 sebanyak 9.122 jiwa/km² menjadi 10.484 jiwa/km² pada tahun 2016. Jumlah penduduk serta laju pertumbuhannya setiap tahun dapat dilihat pada Grafik I-2.

Grafik I-2 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) Kota Tangerang Selatan Periode 2011-



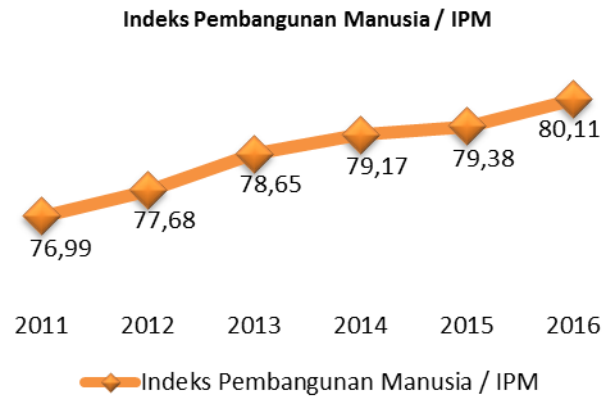
2016

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia, merupakan indeks gabungan dari tiga komponen ‘penilai’ kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baru mencapai 80,11. Kondisi ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2015 yang sebesar 79,38. Jika

digolongkan menurut pencapaian skor, maka angka IPM Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 termasuk golongan angka IPM tinggi.

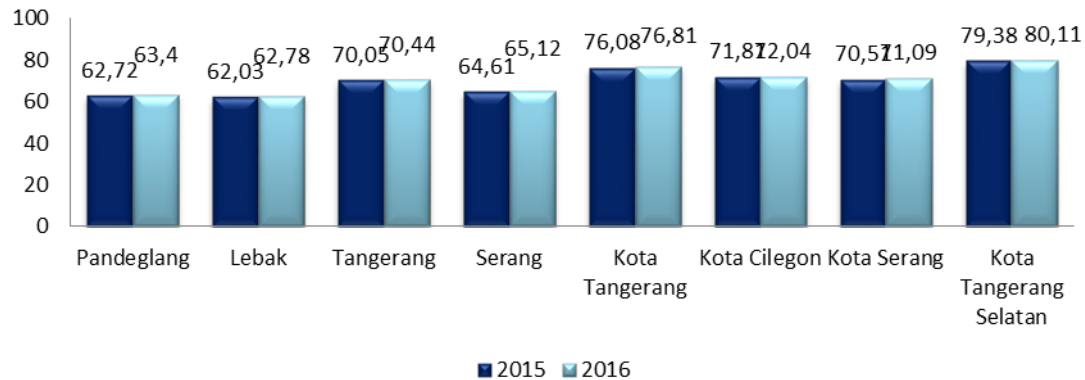
Grafik I-3. Indeks Pembangunan Manusia / IPM Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2016



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota se-Provinsi Banten, maka pencapaian pembangunan manusia di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 maupun tahun 2015 berada pada peringkat pertama. Dilihat dari unsur komponen IPM, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2016 di Kota Tangerang Selatan adalah yang paling tinggi dibanding Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten yaitu sebesar 72,14 tahun, disusul Kota Tangerang sebesar 71,34 tahun dan Kabupaten Tangerang sebesar 69,37 tahun. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kota Tangerang Selatan berumur 72 tahun.

Grafik I - 4. Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Komponen IPM dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2015-2016

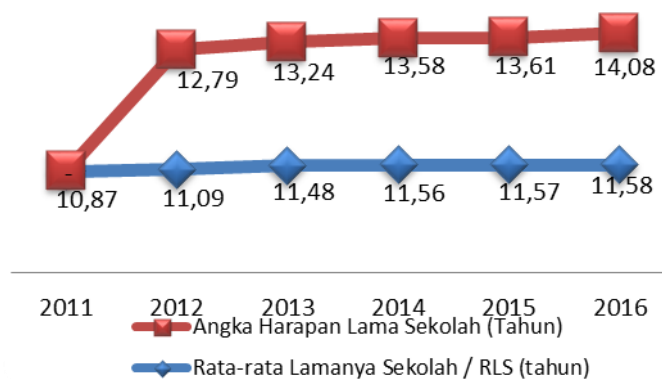


Su

mber : BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2017

Rata-rata lama sekolah di Kota Tangerang Selatan sebesar 11,58 tahun, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Tangerang Selatan mencapai 11 tahun yaitu jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat kelas 3). Rata-rata

Grafik I-5. Rata-rata Lamanya Sekolah / RLS (tahun) dan Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

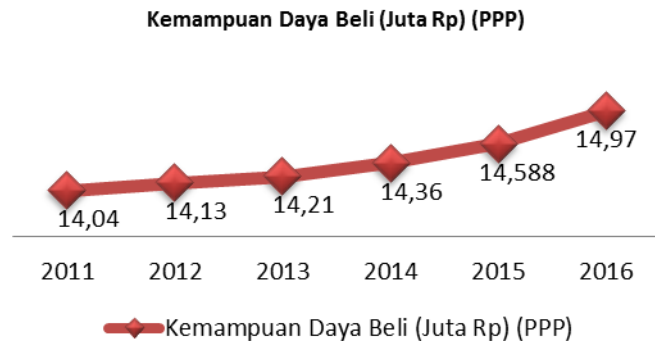


Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Lama Sekolah (MYS) di Kota Tangerang Selatan juga merupakan yang tertinggi dibanding kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Banten yaitu dengan sebesar 11,58 tahun, disusul oleh Kota Tangerang sebesar 10,28 tahun, Kota Cilegon sebesar 9,68 tahun dan Kota Serang sebesar 8,60 tahun. Sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Lebak sebesar 6,19 tahun dan Kabupaten Pandeglang sebesar 6,62 tahun.

Kemampuan daya beli merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup secara layak. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Angka indeks tingkat daya beli

Grafik I-6 Kemampuan Daya Beli (Juta Rp) (PPP) Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2016



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

(PPP) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Semakin besar angka indeks PPP maka semakin tinggi pula kesempatan masyarakat untuk dapat memenuhi standar kehidupan yang layak. Pada tahun 2016, angka konsumsi perkapita riil yang disesuaikan Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar Rp. 14.972.000. Dengan demikian, maka indeks tingkat daya beli masyarakat Kota Tangerang Selatan mencapai 83,34. Angka tersebut mengindikasikan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai jalan untuk memenuhi standar kehidupan yang layak baru mencapai 83,34 persen dari pencapaian maksimal.

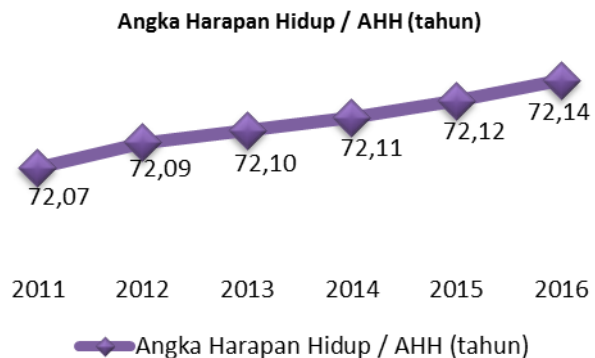
Pada tahun 2016 angka harapan hidup penduduk Kota Tangerang Selatan sebesar 72,14. Angka ini menunjukkan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang Selatan (bayi) yang lahir pada tahun 2016 mempunyai peluang/harapan untuk

hidup selama 72,14 tahun. Dengan indeks harapan hidupnya sebesar 80,21. Indeks angka harapan hidup merupakan indeks penyusun IPM yang menggambarkan pembangunan manusia di bidang kesehatan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencapaian pembangunan di bidang kesehatan pada tahun 2016 baru mencapai 80,21 persen dari kondisi ideal. Angka indeks harapan hidup yang lebih besar dibandingkan tahun 2015 (80,19) menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan semakin membaik.

Pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang Selatan sebesar 6,98 persen. Artinya, pada tahun 2016 total nilai tambah riil (tidak dipengaruhi perubahan harga) yang tercipta dari hasil produksi barang dan jasa di Kota Tangerang Selatan tumbuh sebesar 6,98 persen

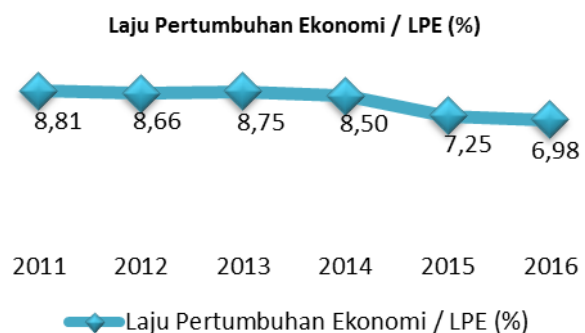
dan mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2015. Terciptanya pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (LPE) pada tahun 2016 memberi gambaran bahwa telah terjadi peningkatan produksi barang dan jasa secara riil oleh para pelaku

Grafik I-7 Angka Harapan Hidup / AHH (tahun) Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2016



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Grafik I-8. Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE (%) Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2016



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

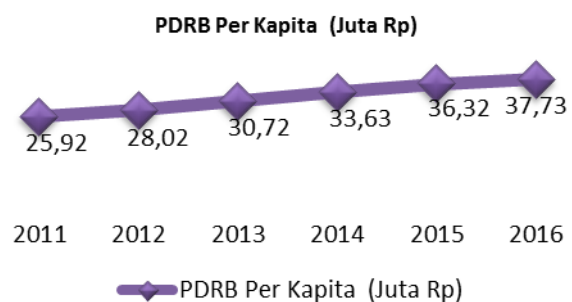
kegiatan ekonomi di Tangerang Selatan dan peningkatannya lebih kecil dari tahun sebelumnya. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi terjadi di lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan, sedangkan lapangan usaha Jasa-jasa mengalami kenaikan yaitu tahun 2015 laju pertumbuhannya sebesar 7,23 persen naik menjadi 8,11 persen sedangkan lapangan saha Lainnya naik dari 7,75 persen tahun 2015 naik menjadi 7,85 persen tahun 2016.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2016, secara agregat PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan mencapai 38,10 juta rupiah atau senilai US\$ 2.822,10, meningkat 4,95 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 36,52 juta rupiah (US\$ 2.690,37). Peningkatan tersebut, lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya selama periode 2012-2015 berturut-turut sebesar 8,10 persen, 9,65 persen, 9,16 persen, dan 8,23 persen.

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Apabila diperhatikan perkembangan daya beli masyarakat yang diasumsikan setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang dikoreksi oleh angka inflasi, maka daya beli masyarakat di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,05 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 1,08 persen. Namun, kondisi perubahan daya beli tahun 2016 lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode 2012-2014.

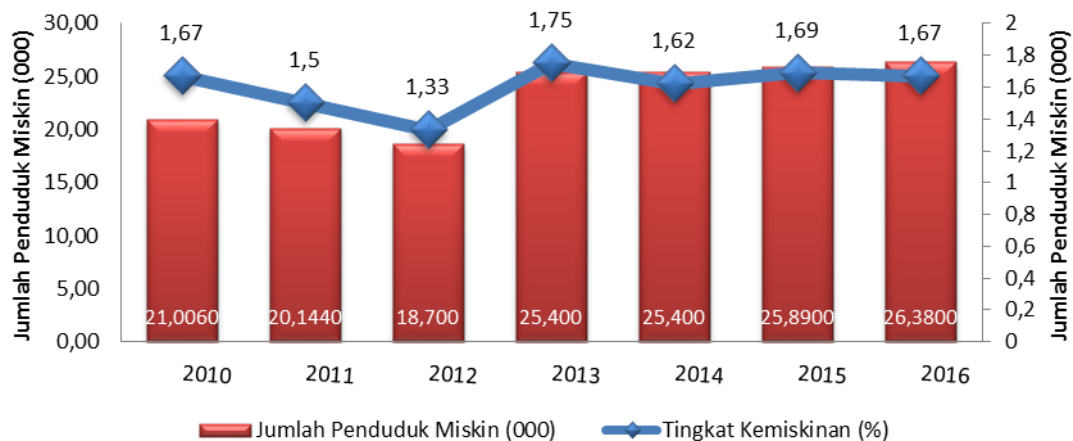
Grafik I-9. PDRB Per Kapita (Juta Rp) Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2016



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 sebesar 1,67 persen. Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 tersebut lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun yang sama karena berada di bawah tingkat kemiskinan di Provinsi Banten sebesar 5,42 persen beritu pula jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,86 persen. Tingkat perbandingan Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten maka Kota Tangerang Selatan adalah yang paling sedikit.

Grafik I - 10. Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 – 2016



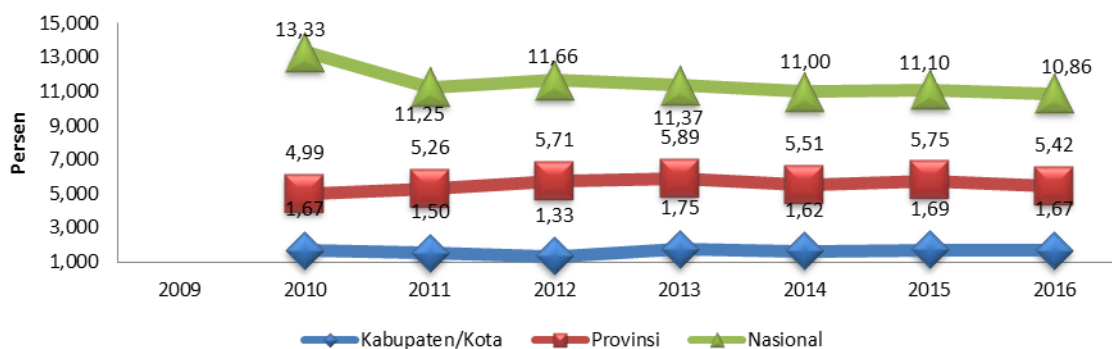
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Jika dilihat kondisinya dari waktu ke waktu, tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan sebesar 1,67 persen. Empat tahun berikutnya tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan naik menjadi 1,69 persen pada tahun 2015. Kenaikan tersebut hanya bersifat sementara karena tahun 2016 tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan kembali menurun dan penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2016.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan relevan dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dan Nasional. Penurunan tingkat kemiskinan merupakan kondisi baik yang diharapkan. Oleh

karena itu, kondisi relevan yang terjadi merupakan kondisi relevan yang membaik. Pada **Grafik I.11** ditunjukkan relevansi tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan terhadap Provinsi Banten dan Nasional tahun 2010 – 2016. Pada **Grafik I.11** terlihat bahwa pola pergerakan tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Nasional memiliki arah yang sama. Pada tahun 2010 – 2016 tingkat kemiskinan di semua level memiliki kecenderungan sedikit menurun, kemudian pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di semua level meningkat.

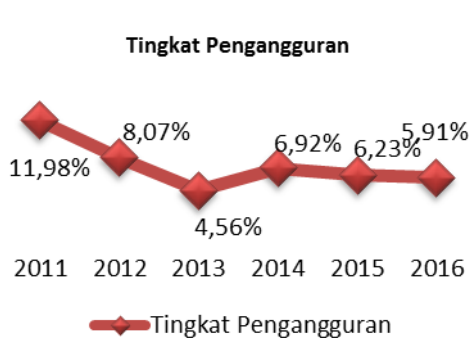
Grafik I-11. Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kota Tangerang Selatan Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2010-2016



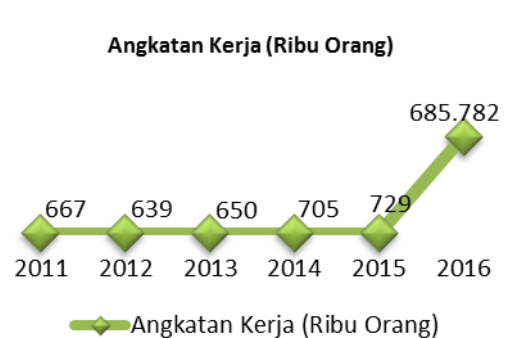
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang Selatan dari tahun 2014 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 jumlah pengangguran tercatat sebanyak 6,92 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 6,13 persen. Pada tahun 2016 jumlah pengangguran di Kota Tangerang Selatan tercatat sebanyak 5,91 persen.

Grafik I-12. Tingkat Pengangguran Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2016



Grafik I-13 Angkatan Kerja (Ribuan Orang) Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2016



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai di masa depan. Visi Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah:

“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”

Makna dan arti kata yang tersebut dalam Visi di atas adalah:

Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Kota Cerdas	Mengandung makna bahwa prinsip yang dikedepankan dan menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas, yang mencerminkan konsepsistematis, efisiensi, efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun <i>smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living</i> dan <i>smart governance</i> . Upaya dalam mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin akan memaksimalkan manfaat aspek teknologi dan inovasi.
Kota Berkualitas	Memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan oleh semua <i>stakeholder</i> yang ada di wilayah adalah sebuah standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek. Sumberdaya manusia yang kompeten, kondisi infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan, lingkungan yang ditata dengan mengedepankan prinsip berkesinambungan dan mendukung produktifitas warga, penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan kaidah-kaidah <i>good governance</i> , dan kehidupan sosial masyarakat yang madani dan mencerahkan, adalah batasan kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai standar tersebut konsep pembangunan berbasis kewilayahan, inovasi dankolaborasi dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.

Kota Berdaya Saing	Membawa pesan bahwa yang ingin dituju adalah sebuah kota yang memiliki berbagai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini diterjemahkan melalui penyediaan transportasi publik yang baik, kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang, serta mekanisme pelayanan perijinan yang mencerminkan prinsip <i>excellent service delivery</i> . Inovasi adalah pintu utama untuk mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih dan berdaya saing.
Berbasis Teknologi dan Inovasi	Untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya saing diupayakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan system sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 yang merupakan gambaran mengenai cara bagaimana visi akan dicapai. Misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1 Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
- 2 Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
- 3 Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
- 4 Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
- 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	
1	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing	Mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya .	1.1	Meningkatnya partisipasi dan mutu pendidikan dasar
			1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			1.3	Meningkatnya kualitas angkatan kerja
			1.4	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk

No	Misi	Tujuan	Sasaran	
			1.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender
2	Meningkatkan Infrastruktur kota yang fungsional	Meningkatkan aksesibilitas transportasi dan infrastruktur kota yang lebih fungsional.	2.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah
			2.2	Meningkatnya transportasi wilayah yang optimal
3	Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan sarana dan prasarana kota layak huni berwawasan lingkungan.	3.1	Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan
			3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			3.3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
4	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan	Menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan.	4.1	Meningkatnya investasi
			4.2	Meningkatnya perekonomian perkotaan
			4.3	Meningkatnya produk unggulan daerah
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel.	5.1	Meningkatnya konsistensi perencanaan penganggaran dan pembangunan
			5.2	Meningkatnya pelayanan publik
			5.3	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
			5.4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

B.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, meliputi:

No	Sasaran	Strategi
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya		
1	Meningkatnya partisipasi dan mutu pendidikan dasar	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akselerasi penyelenggaraan pendidikan di kecamatan yang angka partisipasi pendidikannya masih rendah• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan• Menyiapkan formasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan• Memperkuat dan mengembangkan pendidikan non formal dan informal
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat• Meningkatkan apresiasi terhadap pelaku/atlet olahraga disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang memadai
3	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	<ul style="list-style-type: none">• Memperluas lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausaha baru• Meningkatkan peran serta kepemudaan
4	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong keluarga mandiri dan sejahtera
5	Meningkatnya pengarusutamaan gender	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong peran perempuan untuk lebih aktif dalam pembangunan
Tujuan 2 : Meningkatkan aksesibilitas transportasi dan infrastruktur kota yang lebih fungsional		
6	Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kapasitas dan kualitas untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah dan energi guna mendukung kegiatan perekonomian dan layanan pemerintahan• Meningkatkan pengelolaan infrastruktur pemukiman, sumberdaya air dan lingkungan sehat• Meningkatkan rasio saluran drainase dan trotoar yang berkualitas• Mengupayakan pencegahan dan pengendalian banjir secara efektif dengan mengintegrasikan kegiatan konservasi, pendayagunaan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat

No	Sasaran	Strategi
7	Meningkatnya transportasi wilayah yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan transportasi umum yang aman dan memadai • Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
Tujuan 3: Meningkatkan sarana dan prasarana kota layak huni berwawasan lingkungan		
8	Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan persampahan, dengan kebijakan yang diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sampah
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerangka regulasi penataan ruang dan data spasial • Mewujudkan ruang-ruang publik yang mendorong aktivitas dan kreatifitas masyarakat.
10	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemanfaatan SDA, lingkungan dan energi yang seimbang dan berkelanjutan • Mendorong aparatur dan swadaya masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban lingkungan dan penanggulangan bencana • Melakukan pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat
Tujuan 4 : Menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan		
11	Meningkatnya investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaborasi pendanaan pembangunan
12	Meningkatnya perekonomian perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan mengaktifkan UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya • Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi local • Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
13	Meningkatnya produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya
Tujuan 5 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan refromasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel		
14	Meningkatnya konsistensi perencanaan penganggaran dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan
15	Meningkatnya pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja dan efektifitas pelayanan publik pemerintah daerah
16	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi anggaran daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
17	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas sistem dan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan diimbangi dengan optimalisasi sistem dan manajemen tata kelola pemerintahan • Membangun layanan yang ramah dan menarik dengan

No	Sasaran	Strategi
		<p>pengembangan sistem informasi disemua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik menuju cyber city</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memelihara Rutin/Berkala sarana/prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

B.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi pembangunan daerah, disusun arah kebijakan daerah yang dijabarkan melalui arah kebijakan dan program berdasarkan pada Misi 1 sampai dengan Misi 5, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

No	Arah Kebijakan	Program
Misi 1 :Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing		
1	• Meningkatkan pendidikan non-formal	• PAUD dan Pendidikan Non Formal
	• Meningkatkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dua belas Tahun	• Pendidikan Sekolah Dasar • Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	• Meningkatkan pengelolaan pelayanan dan mutu pendidikan	• Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
	• Meningkatkan kualitas informasi dan budaya baca	• Pengembangan budaya baca
2	• Mengembangkan mutu pelayanan kesehatan	• Pengembangan pelayanan kesehatan
	• Mengembangkan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan puskesmas	• Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
	• Penyediaan dan pengawasan perbekalan kesehatan	• Penyediaan dan pengawasan obat , makanan dan perbekalan kesehatan
	• Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak, remaja dan lansia.	• Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
	• Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	• Program perbaikan gizi masyarakat
	• Memberdayakan masyarakat agar hidup sehat	• Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
	• Mengembangkan sumber daya manusia kesehatan	• Pengembangan SDM kesehatan
	• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, komplementer dan penanggulangan penyakit menular-tidak menular	• Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer
	• Meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit	• Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD

No	Arah Kebijakan	Program
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan infrastruktur pemukiman, sumberdaya air dan lingkungan sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat
	<ul style="list-style-type: none"> • Membina dan memasyarakatkan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan manajemen dan pemasyarakatan olahraga
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana dan prasarana olahraga
3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produkyifitas, kesempatan dan lembaga ketenaga kerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja • Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha • Kerjasama Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran serta kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan peran serta kepemudaan
	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
4	<ul style="list-style-type: none"> • Membina masyarakat dalam menciptakan keluarga sejahtera dan mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Berencana • Pengendalian Penduduk
5	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan kepada perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat lembaga PUG dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
Misi 2 :Meningkatkan Infrastruktur kota yang fungsional		
1	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan dan jembatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
	<ul style="list-style-type: none"> • Menata lingkungan terpadu permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Lingkungan Terpadu
	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan lingkungan sehat perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan Sehat Perumahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan infrastruktur permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur permukiman • Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman • Pengembangan Penyediaan dan Pengelolaan PJU
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola air bersih dan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sarana air bersih dan air limbah
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong
	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah dan Menangani 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian banjir
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola dan mengkonversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber daya air lainnya
2	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelayanan angkutan

No	Arah Kebijakan	Program
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan dan mengamankan lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pengamanan lalu lintas • Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sarana prasarana perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Transportasi Masal 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Transportasi Masal
Misi 3 :Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan		
8	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan teknologi pengolahan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pengelolaan persampahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Fasilitas Pengangkut Sampah dan Sosialisasi pengurangan volume dari sumber sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sampah terpadu
9	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan RTH
	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan Tata Ruang Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Tata Ruang
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan, pengendalian dan memanfaatkan Ruang sesuai Tata Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pemanfaatan ruang
	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan Pencemaran ,Perusakan Lingkungan Hidup dan pengelolaan mutu laboratorium LH 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi dan mengkonservasi Sumber Daya Alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
10	<ul style="list-style-type: none"> • Memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> • Menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan bahaya kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektifitas tanggap darurat dan mitigasi menghadapi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Bencana Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pendidikan politik masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan politik masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan wawasan kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wawasan kebangsaan
Misi 4 :Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan		
10	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan investasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan kualitas pelayanan perijinan yang bermutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pelayanan Perijinan
11	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kelembagaan, iklim usaha dan kewirausahaan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Koperasi • Pengembangan UMKM
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan IKM dan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri
	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi konsumen dan mengamankan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

No	Arah Kebijakan	Program
	• Membina pedagang kecil	• Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
	• Meningkatkan ekspor	• Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	• Meningkatkan ketahanan pangan	• Peningkatan Ketahanan Pangan • Pengembangan Perikanan • Pengembangan pertanian • Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu
	• Meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar	• Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional
	• Meningkatkan Jaminan Sosial	• Bantuan dan Jaminan Sosial
	• Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	• Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	• Memberdayakan kelembagaan kesejahteraan sosial	• Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
	• Mendorong peran serta, lembaga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	• Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
12	• Mengembangkan kemitraan untuk mendukung pengembangan MICE	• Pengembangan Ekonomi Kreatif
	• Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	• Program pengembangan Pemasaran Pariwisata
	• Mengembangkan dan mengelola Kebudayaan	• Pengembangan dan Pengelolaan kebudayaan
Misi 5 :Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.		
13	• Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	• Perencanaan Pembangunan Daerah
	• Menata Kelembagaan dan Tata Kerja Pemerintahan	• Penguatan kelembagaan dan tata kerja organisasi pemerintah daerah
	• Meningkatkan kerjasama pembangunan	• Kerjasama pembangunan dan kewilayahan
	• Menata peraturan perundang-undangan serta menerbitkan regulasi dan menyelaraskan peraturan-peraturan di daerah	• Penataan peraturan perundang-undangan
	• Melayani Bantuan Hukum dan HAM	• Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
	• Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan DPRD	• Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan • Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
	• Meneliti dan mengembangkan daerah serta melakukan koordinasi di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik	• Penelitian dan Pengembangan
	• Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	• Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan
	• Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi	• Penguatan akuntabilitas kinerja instansi

No	Arah Kebijakan	Program
	pemerintahan	pemerintahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Membina dan mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Manajemen Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Manajemen Kepegawaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem tata kelola pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Perubahan • Penguatan tata laksana
	<ul style="list-style-type: none"> • Menata Administrasi Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Administrasi Kependudukan • Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi wilayah yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemetaan Wilayah • Pengembangan data dan informasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Peran Kecamatan dan Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Komunikasi dan Mengembangkan Informasi dan Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Sistem Persandian
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pemanfaatan TI 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Teknologi dan Informasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Memelihara Rutin/Berkala sarana/prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan, Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan • Pelayanan Kearsipan

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

C. PRIORITAS DAERAH

Prioritas program pembangunan 2016-2021 dalam rangka menunjang pencapaian sasaran, tujuan terhadap visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 yang terdiri dari rencana pembangunan, pengembangan dan peningkatan yang sudah masuk ke dalam 108 program yang telah disusun. Berikut merupakan matrik Prioritas Program Pembangunan 2016-2021.

Tabel 2.3 Matriks Prioritas Program Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
	A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Urusan Pendidikan	1	PAUD dan Pendidikan Non Formal	Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pendidikan	2	Pendidikan Sekolah Dasar	APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pendidikan	3	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pendidikan	4	Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Uji Kompetensi Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Kesehatan	5	Pengembangan pelayanan kesehatan	Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Persentase akreditasi unit Labkesda	Dinas Kesehatan
			Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit	Rumah Sakit Umum
Urusan Kesehatan	6	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Persentase alat kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
			Jumlah puskesmas yang terbangun	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Jumlah bangunan posyandu yang dibangun	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Jumlah bangunan puskesmas yang dikembangkan	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Jumlah puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Jumlah Bangunan PPKT	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Persentase Gudang terbangun	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Jumlah Rumah Sakit Tingkat Kecamatan dibangun	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Jumlah Puskesmas yang	Dinas Bangunan dan

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			direhabilitasi	Penataan Ruang
			Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit	Rumah Sakit Umum
Urusan Kesehatan	7	Penyediaan dan pengawasan obat , makanan dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan reagen dan bmlp laboratorium di puskesmas dan labkesda	Dinas Kesehatan
			Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan
			Persentase resep sesuai dengan formularium	Rumah Sakit Umum
Urusan Kesehatan	8	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan balita	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan lansia	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Dinas Kesehatan
Urusan Kesehatan	9	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	Dinas Kesehatan
			Persentase Remaja putri yang mendapat TTD	Dinas Kesehatan
Urusan Kesehatan	10	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif	Dinas Kesehatan
			Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit	Rumah Sakit Umum
Urusan Kesehatan	11	Pengembangan SDM kesehatan	Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih	Dinas Kesehatan
			Persentase SDM	Rumah Sakit Umum

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	
Urusan Kesehatan	12	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional	Dinas Kesehatan
			Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan
			Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direpson	Dinas Kesehatan
Urusan Kesehatan	13	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan	Dinas Kesehatan
			Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS	Dinas Kesehatan
			Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	Dinas Kesehatan

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Urusan Kesehatan	14	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas BLUD	Dinas Kesehatan
			Persentase kepuasan pasien yang disurvei	Rumah Sakit Umum
Urusan Kesehatan	15	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	Dinas Kesehatan
			Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	Dinas Kesehatan
			Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	Dinas Kesehatan
			Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar	Rumah Sakit Umum
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16	Pembangunan jalan dan jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum
			Jalan lingkungan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum
			Pedestrian jalan yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	Pengendalian banjir	luas genangan yang tereduksi	Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18	Pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber daya air lainnya	Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku	Dinas Pekerjaan Umum
			Kapasitas debit sungai /tandon	Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	Bappeda
			Tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang beserta rencana teknisnya melalui peta analog dan	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			peta digital	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20	Pengelolaan sarana air minum dan air limbah	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Persentase pelayanan air minum	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Tersedianya sarana dan prasarana gedung non perkantoran	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Terlayannya masyarakat dalam pengurusan kajian dan rekomendasi teknis serta sertifikat laik fungsi	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22	Pengendalian dan pemanfaatan ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	23	Penataan Lingkungan Terpadu	Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terbangunnya sarana penunjang permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Penyediaan rumah susun sederhana sewa (unit)	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	Pengembangan infrastruktur permukiman	Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Tersedianya data rumah dan perumahan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Persentase terlayannya masyarakat dalam	Dinas Perumahan, Permukiman dan

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			pengurusan pengesahan pertelaan rumah susun	Pertanahan
			Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	25	Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Pengembangan dan Pembangunan TPU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terpeliharanya sarana TPU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Pembinaan kelembagaan pengelolaan TPU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	26	Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU	Penambahan jumlah PJU terbangun	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Respon time kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	28	Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 20 Menit terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	29	Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota	Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	Satpol PP
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	Satpol PP
			Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	Satpol PP
			Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang	Satpol PP
			Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih	Satpol PP
Urusan Sosial	31	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar	Dinas Sosial
Urusan Sosial	32	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan	Dinas Sosial
			Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan	Setda
			Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Setda
			Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	Setda
	B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Urusan Ketenagakerjaan	33	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja siap pakai	Dinas Ketenagakerjaan
Urusan Ketenagakerjaan	34	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Ketenagakerjaan
Urusan Ketenagakerjaan	35	Kerjasama Hubungan Industrial dan	Menurunnya Angka perselisihan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
n		Perlindungan Ketenagakerjaan		
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36	Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	DPMPPPAKB
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37	Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	DPMPPPAKB
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	IPG dan IDG	DPMPPPAKB
			Jumlah Kelurahan Ramah Anak	DPMPPPAKB
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Pemanfaatan Inovasi TTG Dalam Pemberdayaan Masyarakat	DPMPPPAKB
			Persentase Peran serta Lembaga/Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	DPMPPPAKB
Urusan Pangan	40	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			AKG dan AKP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Urusan Pertanahan	41	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya laporan kebutuhan lahan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terfasilitasinya dan pendampingan kegiatan	Dinas Perumahan, Permukiman dan

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			pengadaan tanah untuk pembangunan	Pertanahan
			Terlaksananya pengadaan tanah untuk : kantor kelurahan, kawasan pertanian terpadu, dan Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terlaksananya pengadaan tanah untuk : Infrastruktur Dasar, Kawasan Perdagangan dan Lapangan Olah Raga	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar dan Non Gedung Perkantoran	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran/ fasilitas pemerintah bagi masyarakat dan Non Infrastruktur Dasar	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Tersusunnya dokumen teknis rencana	Dinas Perumahan, Permukiman dan

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			pengadaan tanah	Pertanahan
			Tersusunnya laporan kebutuhan lahan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi Tahapan Pengadaan Tanah	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terfasilitasinya Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Urusan Lingkungan Hidup	42	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	persentase penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
			Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengendalian dan pengawasan terhadap B3 dan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
			Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup	43	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			Pilot Project kampung iklim (kampung Hijau di 7 kecamatan)	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup	44	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah peningkatan partisipasi aktif masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Fasilitasi Peningkatan Nilai ADIPURA	Dinas Lingkungan Hidup

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah penghargaan Nasional maupun lokal terkait pelestarian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup	45	Pengembangan pengelolaan persampahan	Persentase pengangkutan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup	46	Pengelolaan Sampah terpadu	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan KK	Disdukcapil
			Cakupan penerbitan KTP	Disdukcapil
			Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Disdukcapil
			Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Disdukcapil
			Rasio Pasangan Berakta Perkawinan	Disdukcapil
			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan	Disdukcapil
			Jumlah Data dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	Disdukcapil
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48	Pengendalian Penduduk	Pengendalian Urbanisasi Penduduk	Disdukcapil
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49	Keluarga Berencana	Proporsi Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 Tahun	DPMPPPAKB
			Menurunnya Unmet Need	DPMPPPAKB
			Meningkatnya Kesertaan ber- KB	DPMPPPAKB
			Meningkatnya Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Ber-KB	DPMPPPAKB
			Meningkatnya Produk Unggulan UPPKS	DPMPPPAKB
Urusan Perhubungan	50	Pengembangan pelayanan angkutan	Jumlah uji kir	Dinas Perhubungan
Urusan Perhubungan	51	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah titik pengendalian dan	Dinas Perhubungan

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			pengaturan lalu lintas	
Urusan Perhubungan	52	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi	Dinas Perhubungan
Urusan Perhubungan	53	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika	54	Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase Penyebaran Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Cakupan pembangunan, operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD	seluruh OPD
Urusan Koperasi dan UKM	55	Pengembangan Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang dibina	Dinas Koperasi dan UKM
			Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP	Dinas Koperasi dan UKM
			Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	Dinas Koperasi dan UKM
			Jumlah koperasi yang terfasilitasi	Dinas Koperasi dan UKM
Urusan Koperasi dan UKM	56	Pengembangan UKM	Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UKM	Dinas Koperasi dan UKM
			Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UKM	Dinas Koperasi dan UKM
			Pembinaan wirausaha UKM dan Calon Wirausaha UKM	Dinas Koperasi dan UKM
			Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
			Peningkatan Akses Pembiayaan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
			Pengawasan, Pengembangan Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM
Urusan	57	Pembinaan pedagang	Jumlah Lokasi Penataan	Dinas Koperasi dan

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Koperasi dan UMKM		kaki lima dan asongan	Pedagang Kaki Lima dan Asongan	UKM
			Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
Urusan Penanaman Modal Daerah	58	Pengembangan investasi	Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Penanaman Modal Daerah	59	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	60	Pengembangan peran serta kepemudaan	Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan	Dispora
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	61	Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Calon Wirausaha Muda	Dispora
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	62	Pengembangan manajemen dan masyarakatan olahraga	Pembinaan Manajemen dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat	Dispora
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	63	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga	Dispora
			Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga	Dispora
Urusan Statistik	64	Pengembangan data dan informasi	Cakupan data dan informasi SKPD	seluruh OPD
			Ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan	Bappeda
Urusan Persandian	65	Optimalisasi Sistem Persandian	Cakupan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Cakupan Penyiapan, Pemanfaatan dan Pengembangan SDM Sandi, Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Kebudayaan	66	Pengembangan dan Pengelolaan kebudayaan	Jenis Budaya Yang Dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan	67	Pengembangan budaya	Jumlah Pengunjung	Dinas Perpustakaan

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Perpustakaan		baca	Perpustakaan Tahunan	dan Arsip Daerah
			Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Urusan Kearsipan	68	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Tertatanya arsip seluruh perangkat daerah dan unit kerja	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
C URUSAN PILIHAN				
Urusan Kelautan dan Perikanan	69	Pengembangan Perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Urusan Pariwisata	70	Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Dinas Pariwisata
Urusan Pariwisata	71	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata
Urusan Pertanian	72	Pengembangan pertanian	Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Presentase Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Urusan Pertanian	73	Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu	Penambahan Sarana Prasarana Kawasan Pertanian Terpadu	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Urusan Perdagangan	74	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Pengawasan Barang dan Jasa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Stabilitas harga kebutuhan pokok	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan Kesadaran Perijinan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah UTTP yang diawasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Rapat Koordinasi TPID dan Jumlah pendataan/pencacahan Indeks harga Konsumen	Setda
Urusan Perdagangan	75	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah produk yang dipasarkan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Perindustrian	76	Pengembangan Industri	Cakupan binaan kelompok industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Cakupan binaan kelompok industri kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah pelaporan informasi industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	D	URUSAN PENUNJANG		
Urusan Perencanaan	77	Pengembangan pemetaan Wilayah	Terwujudnya pengembangan peta wilayah	Setda
			Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pengembangan pemetaan wilayah	Setda
			Penegasan Batas Daerah/Kecamatan/Kelurahan	Setda
			Pembakuan Nama Rupabumi	Setda
			Cakupan pemetaan tematik wilayah sesuai kebutuhan SKPD	seluruh OPD
Urusan Perencanaan	78	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	Bappeda
			Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian program RPJMD	Bappeda
			Tersedianya dokumen evaluasi capaian SDG's	Bappeda
			Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian smart city	Bappeda
			Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan	seluruh OPD
Urusan Keuangan	79	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya laporan neraca aset sesuai ketentuan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Urusan Keuangan	80	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Terealisasinya target pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendalian, pengelolaan keuangan dan pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan Keuangan	81	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya dokumen Raperda APBD sesuai ketentuan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Tersusunnya laporan pengendalian keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan	seluruh OPD
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82	Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Persentase ASN yang terlayani dalam data dan informasi manajemen ASN	BKPP
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	83	Pengembangan Sistem Manajemen sumber daya aparatur	Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD	seluruh OPD
			Tersedianya kebijakan tentang penataan SDM/ASN	Setda
Urusan Penelitian dan Pengembangan	84	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan	Bappeda
			Jumlah koordinasi penelitian dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan	Bappeda
			Terwujudnya pengembangan inovasi daerah	Bappeda
Urusan Sekretariat DPRD	85	Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran	Sekretariat DPRD
			Persentase Fasilitasi Pembahasan Perda / Non Perda	Sekretariat DPRD
			Persentase Fasilitasi Fungsi Pengawasan	Sekretariat DPRD
Urusan Sekretariat Daerah	86	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah	Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah	Setda
Urusan Sekretariat Daerah	87	Kerjasama pembangunan dan kewilayahan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ekonomi Daerah	Setda
			Jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan BUMD dan BLUD	Setda
			Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	Bappeda dan Setda

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Urusan Sekretariat Daerah	88	Penataan peraturan perundang-undangan	Program Pembentukan Peraturan Daerah	Setda
			Terlaksananya Pembahasan RAPERWAL antara SKPD pemrakarsa dengan Tim Asistensi Pembahasan RAPERWAL	Setda
			Harmonisasi dan Sinkronisasi RAKEPWAL	Setda
			Terlaksananya Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setda
			Terlaksananya Fasilitasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setda
			Terlaksananya Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Setda
			Terlaksananya program Pemerintah Pusat di Kota Tangerang Selatan	Setda
Urusan Sekretariat Daerah	89	Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Terlaksananya Bimbingan Teknis Hukum Formil Aparatur	Setda
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Desiminasi RANHAM SKPD Kota Tangerang Selatan	Setda
			Terselenggaranya penyuluhan Hukum	Setda
			Tertanganinya perkara hukum di lingkungan pemerintahan	Setda
			Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum	Setda
Urusan Sekretariat Daerah	90	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Setda
			Terlaksananya Koordinasi Internal dan Eksternal Serta Audiensi Dengan Masyarakat	Setda

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Urusan Sekretariat Daerah	91	Manajemen Perubahan	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur (ASN)	BKPP dan Setda
			Meningkatnya penerapan/internalisasi kode etik dan Kode Prilaku dalam Penguatan Budaya Kerja	BKPP dan Setda
Urusan Inspektorat	92	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat
			Prosentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Inspektorat
			Jumlah SKPD yang predikat sakin minimal B	Inspektorat
			Level Implementasi SPIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Inspektorat
			Level Implementasi SPIP SKPD	Inspektorat
				Inspektorat
			Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat
			Prosentase Pejabat Yang melaporkan LHKPN	Inspektorat
			Prosentase ASN yang melaporkan LHKASN	Inspektorat
			Indeks Persepsi Korupsi	Inspektorat
			Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja bebas korupsi	Setda
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Setda
Urusan Kecamatan	93	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan peran kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Seluruh Kecamatan
			Cakupan wilayah peningkatan kapasitas pemerintahan dan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan	Setda

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Urusan Pemerintahan Umum	94	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Capaian kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja	seluruh OPD
Urusan Pemerintahan Umum	95	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di masing-masing SKPD	Setda dan seluruh OPD
Urusan Pemerintahan Umum	96	Penguatan tata laksana	Tersedianya SOP Teknis dan administrasi pemerintah	Setda
Urusan Pemerintahan Umum	97	Pendidikan politik masyarakat	Jumlah Pembinaan Politik Masyarakat	Kesbangpol
Urusan Pemerintahan Umum	98	Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Pembinaan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Toleransi Kerukunan dan Kerjasama antar Umat Beragama, Nilai-nilai religius, sosial dan solidaritas serta Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kesbangpol
Urusan Sekretariat Umum	99	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	seluruh OPD
	E	PROGRAM STRATEGIS KEWILAYAHAN		
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Jumlah Pembangunan Comunity Center/komunitas kreatif skala kecamatan	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Urusan Pendidikan	100	Pendidikan Sekolah Menengah Atas/SMK	Penambahan Ruang Kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khusus teknologi	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
		Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar terbangun	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Urusan Kesehatan		Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Bangunan RSUD (Gedung 3)	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
			Bangunan Gedung 2 RSUD Tangsel	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Jumlah Gedung Perpustakaan Skala Kota dan Skala Kecamatan	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Bangunan Depo Arsip	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Urusan Perhubungan	101	Peningkatan Transportasi Massal	Peningkatan sarana prasarana transportasi massal	Dinas Perhubungan
Urusan Pariwisata, Urusan Koperasi UKM, Urusan Perindustrian	102	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon tangsel	Dinas Pariwisata, Dinkop UKM, Disperindag
Urusan Lingkungan Hidup	103	Pengelolaan RTH	Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase taman terpelihara	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Perdagangan	104	Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional	Jumlah kawasan perdagangan tradisional yang dikelola	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Revitalisasi Pasar	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Urusan Pangan		Peningkatan Ketahanan Pangan	Manajemen Logistik	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Disperindag
Urusan Kesehatan	105	Pelayanan jaminan kesehatan nasional	Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN	Dinas Kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106	Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong	Kapasitas Debit Saluran	Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Komunikasi dan	107	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

URUSAN	NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Informatika			Peningkatan Tata Kelola Teknologi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Peningkatan SDM Teknologi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Sosial	108	Bantuan dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga/Individu Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Umum		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021





BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah selama Tahun 2017 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah yaitu : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka sistematika dan materi pokok penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 didasarkan kepada implementasi seluruh SKPD yang dikelompokkan kedalam urusan wajib dan urusan pilihan.

A. URUSAN KONKUREN

a. RINGKASAN URUSAN WAJIB

1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

- 1) SEKRETARIAT DAERAH;
- 2) SEKRETARIAT DPRD;
- 3) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- 4) INSPEKTORAT;
- 5) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- 6) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN;
- 7) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;
- 8) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
- 9) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- 10) BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- 11) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- 12) DINAS KOPERASI DAN UKM;
- 13) DINAS PARIWISATA;
- 14) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP;
- 15) DINAS KETENAGAKERJAAN;
- 16) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- 17) DINAS PEKERJAAN UMUM;
- 18) DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG;
- 19) DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN;
- 20) DINAS PERHUBUNGAN;



- 21) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- 22) DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- 23) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;
- 24) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- 25) DINAS KESEHATAN;
- 26) DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- 27) DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH;
- 28) DINAS SOSIAL;
- 29) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA;
- 30) RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN;
- 31) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- 32) KECAMATAN PAMULANG;
- 33) KECAMATAN PONDOK AREN;
- 34) KECAMATAN CIPUTAT;
- 35) KECAMATAN CIPUTAT TIMUR;
- 36) KECAMATAN SERPONG;
- 37) KECAMATAN SERPONG UTARA;
- 38) KECAMATAN SETU;

URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A.1. PENDIDIKAN

Penyelenggara Urusan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 2) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.



A.1.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

A.1.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal,
2. Program Pendidikan Dasar,
3. Program Pendidikan Menengah Pertama
4. Program Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan,

A.1.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.	6.211.401.410	5.147.022.200	82,86%.
Peningkatan mutu dan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat	2.453.349.000	1.860.210.500	75,82%
Peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan	1.032.499.000	790.677.000	76,58%
Peningkatan mutu dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.725.553.410	2.496.134.700	91,58%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Harapan Lama Sekolah	14,04 tahun	14,18 tahun	101%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TMT
APM PAUD	25,20%	30,20%	120%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TMT

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2 Program Pendidikan Sekolah Dasar

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pendidikan Sekolah Dasar	172.173.277.511	91.600.037.549	53,20%
Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	999.265.000	927.507.000	92,82%
Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	1.120.524.500	988.065.200	88,18%
Penyelenggaraan BOSDA SD/MIN (159 kegiatan)	43.602.693.150	37.399.179.549	85,77%
Peningkatan Sarana dan Prasarana SD	55.188.845.033	52.285.285.800	94,74%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	99,99%	99,99%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TST

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3 Program Pendidikan Menengah Pertama.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pendidikan Menengah Pertama	72.211.535.472	62.561.850.540	86,64%
Penyelenggaraan Bosda di 22 SMP N dan 1 MTPN	28.741.580.000	25.210.521.720	87,71%
Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.562.446.168	1.199.483.000	76,77%
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	12.573.058.072	10.364.289.600	82,43%
Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	592.871.232	577.034.500	97,33%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS	96,80%	93,73%	97%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TT

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

4 Program Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Pendidikan	41.145.297.850	39.317.645.050	95,56%
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	38.502.468.050	37.245.476.050	96,74%
Peningkatan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.759.061.200	1.398.982.000	79,53%
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan	883.768.600	673.187.000	76,17%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Uji Kompetensi Guru	70	65,12	93%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TT

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



A.1.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Penyerepan DAK Pendidikan di triwulan pertama tidak bisa mencapai 20% di sebabkan oleh:
(1) penerima DAK adalah Pihak Swasta sedangkan Rekening berada di belanja modal (seharusnya di belanja hibah), (2) keterlambatan aturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat terkait dana DAK memberikan konsekuensi dana DAK di triwulan berikutnya tidak bisa diajukan kembali.
- Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan.

2. Solusi

- Merencanakan DAK sesuai dengan kebutuhan dan dituangkan dalam DPA sesuai dengan kode rekening.
- Optimalisasi kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

A.1.2. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

A.1.2.1. Program dan Kegiatan

- Program Pendidikan Sekolah DasarProgram Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

A.1.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1 Program Pendidikan Dasar.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pendidikan Sekolah Dasar	124.058.843.500	121.466.788.499	97,91
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Ciputat	19.985.630.200	18.831.453.754	94,22
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Ciputat Timur	21.688.870.200	21.610.290.600	99,64
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Pamulang	21.224.699.000	20.559.899.900	96,87
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Setu	10.342.084.600	9.905.998.545	95,78
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Serpong	5.045.847.000	5.029.630.200	99,68
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Serpong Utara	15.705.364.200	15.665.331.200	99,75
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Pondok Aren	26.814.348.300	26.749.126.300	99,76
Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (DAK)	3.252.000.000	3.115.058.000	95,79

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Sekolah Dasar terbangun	17	19	112%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TMT

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2 Program Pendidikan Menengah Pertama.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.642.876.500	14.286.200.600	97,56
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama	14.642.876.500	14.286.200.600	97,56

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun	0	5	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.1.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
 - a. Sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan masih perlu ditingkatkan.
 - b. Pembangunan Tambah Ruang Kelas ada yang dilaksanakan secara bertahap.
2. Solusi
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan.
 - b. Menganggarkan dan melanjutkan pembangunan tambah ruang kelas di tahun berikutnya hingga dapat berfungsi.

A.2. KESEHATAN

Penyelenggara Urusan Kesehatan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kesehatan, 2) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang dan 3) Rumah Sakit Umum. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

A.2.1. Dinas Kesehatan

A.2.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan pelayanan kesehatan,
2. Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,
3. Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan
4. Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga,



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

5. Program perbaikan gizi masyarakat,
6. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan,
8. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular,
9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer,
10. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD,
11. Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat,
12. Pelayanan jaminan kesehatan nasional,

A.2.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengembangan pelayanan kesehatan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pelayanan kesehatan	2.859.997.400	2.527.420.901	88,37%
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	2.559.997.400	2.306.268.401	90,09%
Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	300.000.000	221.152.500	73,72%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas	11	11	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase akreditasi unit Labkesda	30%	30%	100%	Dinas Kesehatan	TST

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. Program Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	32.631.629.600	28.490.677.021	87,31%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	32.631.629.600	28.490.677.021	87,31%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase alat kesehatan sesuai standar	70%	70%	100%	Dinas Kesehatan	TST

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3. Program Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	21.282.160.000	19.380.068.505	91,06%
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	15.204.460.000	13.614.624.270	89,54%
Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya	6.011.700.000	5.699.604.235	94,81%
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	66.000.000	65.840.000	99,76%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda	95%	95%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	90%	100	111%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

4. Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga,	4.569.515.250	3.998.866.250	87,51%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan	650.861.000	648.761.000	99,68%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	237.360.000	237.360.000	100,00%
Pelayanan Kesehatan Remaja	156.535.000	156.535.000	100,00%
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	116.060.000	115.955.000	99,91%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi	74.950.000	74.950.000	100,00%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah	55.115.250	54.115.250	98,19%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BAGi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)	1.237.979.000	943.360.000	76,20%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BAGi BAYi dan Balita (DAK)	1.208.345.000	1.009.880.000	83,58%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BAGi Anak Sekolah (DAK)	183.060.000	143.700.000	78,50%
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)	448.160.000	417.760.000	93,22%
Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK)	201.090.000	196.490.000	97,71%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	38	48		Dinas Kesehatan	TT
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	1,2	1,5		Dinas Kesehatan	TT
Cakupan pelayanan kesehatan balita	0,97	0,972	100%	Dinas Kesehatan	TMT
Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan pelayanan lansia	9	9	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan pelayanan kesehatan remaja	0,8	0,8764	110%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

5. Program perbaikan gizi masyarakat,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program perbaikan gizi masyarakat	3.163.355.200	3.037.010.600	96,01%
Pelayanan Gizi Masyarakat	174.473.500	173.425.300	99,40%
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	428.371.500	424.152.900	99,02%
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita	2.034.500.500	1.989.285.700	97,78%
Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK)	66.320.000	46.640.000	70,33%
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)	59.640.000	48.929.200	82,04%
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)	400.049.700	354.577.500	88,63%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	65%	88%	135%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase Remaja putri yang mendapat TTD	20%	21%	105%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

6. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
	9.937.189.300	9.272.210.800	93,31%
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat	8.643.120.000	8.113.062.000	93,87%
Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan	431.750.000	428.055.000	99,14%
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK)	862.319.300	731.093.800	84,78%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif	52 kelurahan	52 kelurahan	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	53%	53%	100%	Dinas Kesehatan	TST

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1.015.439.300	812.702.646	80,03%
Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	1.015.439.300	812.702.646	80,03%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

8. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	6.828.030.944	6.315.102.479	92,49%
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	684.209.000	683.483.400	99,89%
Peningkatan Imunisasi	652.136.194	648.557.200	99,45%
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	772.992.400	752.175.800	97,31%
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.927.752.000	2.844.271.225	97,15%
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	963.000.000	701.801.004	72,88%
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)			
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)	604.175.750	467.863.250	77,44%
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)	101.150.600	95.750.600	94,66%
Peningkatan Imunisasi (DAK)	52.030.000	50.930.000	97,89%
Pelayanan Kesehatan Jiwa	49.660.000	49.345.000	99,37%
Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)	20.925.000	20.925.000	0,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional	100%	69,00%	69%	Dinas Kesehatan	TT
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	0,92	92,00%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	0,75	1	133%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

9. Program Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
------------------	-----------	----------------	-----



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	23.755.337.550	12.376.279.874	52,10%
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	127.921.000	123.319.000	0,00%
Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan	4.034.956.100	799.888.700	19,82%
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	261.116.000	238.796.000	91,45%
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	741.206.100	732.532.900	98,83%
Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu	3.768.040.400	904.888.600	24,01%
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus	184.720.000	174.532.500	94,48%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Setu	191.658.000	164.338.492	85,75%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Keranggan	393.954.000	352.549.158	89,49%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Bakti Jaya	342.036.900	326.702.031	95,52%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Serpong I	373.751.000	342.931.321	91,75%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Serpong II	348.646.000	317.604.088	91,10%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Rawa Buntu	299.669.000	236.294.444	78,85%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pamulang	340.525.000	307.820.314	90,40%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Benda	393.485.700	297.596.436	75,63%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Benda Baru	361.663.000	360.596.415	99,71%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Ciputat	198.097.000	167.973.032	84,79%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Kampung Sawah	370.000.000	361.370.956	97,67%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Jombang	299.389.300	260.873.069	87,14%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Situ Gintung	158.165.000	151.251.059	95,63%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Ciputat Timur	393.476.500	306.431.708	77,88%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pisangan	161.776.000	151.251.059	93,49%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Rengas	337.268.400	287.747.873	85,32%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Ranji	278.638.500	188.279.217	67,57%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Aren	340.916.000	298.241.049	87,48%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Jurang Mangu	434.640.000	382.241.983	87,94%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Parigi	234.176.500	226.735.206	96,82%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Betung	293.301.200	221.226.879	75,43%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Pucung	295.831.000	250.911.255	84,82%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur	329.075.800	288.506.790	87,67%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Jagung	381.283.000	366.504.504	96,12%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Paku Alam	376.386.000	373.346.865	99,19%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Sawah Baru	269.406.000	231.396.769	85,89%
Penyelenggaraan Operasional UPT Farmasi	516.675.400	350.548.647	67,85%
Penyelenggaraan Operasional UPT Labkesda	690.788.500	671.721.444	97,24%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Lengkong Wetan	50.000.000	30.541.567	61,08%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Cabe Ilir	50.000.000	33.333.200	66,67%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Bambu Apus	50.000.000	34.338.044	68,68%
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	2.769.660.000	273.351.000	9,87%
Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK	1.234.725.250	623.058.800	50,46%
Jaminan Persalinan (DAK)	922.222.000	31.333.500	3,40%
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)	13.510.000	13.510.000	100%
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)	142.582.000	119.864.000	84,07%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan	80%	80%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan	32,%	55,78%	174%	Dinas Kesehatan	TMT
Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS	50,%	0,00%	0%0,00%	Dinas Kesehatan	TT
Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan	62%	91,59%	148%	Dinas Kesehatan	TMT
Cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	47%	47%	100%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

10. Program Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	271.600.000	271.030.000	99,79%
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	271.600.000	271.030.000	99,79%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah puskesmas BLUD	1	0	0%	Dinas Kesehatan	TT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

11. Program Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	1.441.380.200	1.275.512.500	88,49%
Pengawasan Air Bersih di Masyarakat	153.440.000	150.920.000	98,36%
Penyehatan Tempat-tempat Umum	436.020.000	406.362.500	93,20%
Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas	179.230.000	174.180.000	97,18%
Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan	79.850.000	77.850.000	97,50%
Penyehatan Lingkungan Pemukiman	26.120.000	23.120.000	88,51%
Pengamanan Limbah Medis	211.900.000	211.900.000	100,00%
Peningkatan STBM	60.840.000	59.920.000	98,49%
Pengendalian Lingkungan Sehat (DAK)	293.980.200	171.260.000	58,26%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	40%	67%	168%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	54%	85%	157%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	65%	80%	124%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	85%	100	118%	Dinas Kesehatan	TMT
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	10	16	160%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

12. Program Pelayanan jaminan kesehatan nasional,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pelayanan jaminan kesehatan nasional	37.366.137.202	29.918.395.153	80,07%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru	1.842.563.330	1.672.764.160	90,78%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat	3.828.985.424	2.863.152.214	74,78%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur	1.257.046.084	922.769.281	73,41%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang	1.973.093.450	1.464.669.370	74,23%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu	1.313.781.850	1.146.748.110	87,29%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah	1.211.316.200	967.995.416	79,91%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan	530.768.290	471.991.209	88,93%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam	841.860.880	746.086.650	88,62%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang	4.210.517.892	3.504.454.179	83,23%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi	1.145.174.260	1.004.872.259	87,75%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan	784.680.799	698.262.756	88,99%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren	3.057.980.266	2.647.075.982	86,56%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda	1.822.547.157	1.485.893.166	81,53%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung	1.275.056.250	1.126.994.848	88,39%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung	1.421.000.875	1.046.308.759	73,63%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur	1.140.845.507	930.850.447	81,59%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung	647.095.049	533.759.837	82,49%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji	1.058.396.560	701.350.945	66,27%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu	1.333.288.871	1.116.421.542	83,73%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas	790.774.683	638.974.448	80,80%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong	2.899.109.370	2.022.865.940	69,78%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II	475.069.250	380.327.850	80,06%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu	631.951.502	497.017.635	78,65%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gantung	956.709.329	689.977.850	72,12%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya	774.900.074	636.810.300	82,18%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru	141.624.000	-	0,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN	52%	59,90%	115%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.2.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun Permasalahan yang dihadapi sehingga 5 indikator tidak tercapai adalah karena:

- 1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
 - a) Kompetensi petugas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan ibu (hamil, bersalin, nifas) dan bayi baru lahir belum maksimal.
 - b) Target yang terlalu rendah dari tahun sebelumnya
- 2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
 - a) Pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda bahaya pada bayi (0-11 bulan) masih kurang.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- b) Target yang terlalu rendah dari tahun sebelumnya.
- 3) Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar Nasional
 - a) Ketersediaan sumber daya yang belum terlatih sesuai standart kementerian kesehatan
 - b) Sarana dan prasana program yang belum optimal
 - c) Dukungan pembiayaan yang belum memadai
 - d) Manajemen mencatatkan pelaporan yg belum dilakukan dengan disiplin dan berkesinambungan.
- 4) Jumlah puskesmas BLUD
 - a) Penetapan puskesmas BLUD baru dapat diketahui pada tahun 2018, namun pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada 4 puskesmas yaitu Puskesmas Ciputat, Puskesmas Pondok Aren, Puskesmas Benda barudan Puskesmas Pamulang
- 5) Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS
 - a) Hal ini disebabkan masih dalam proses tahapan penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan SOP pencairan jasa pelayanan darah serta penandatanganan MOU antara Dinas Kesehatan, PMI dan Rumah Sakit Se Kota Tangerang Selatan.

2. Solusi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

- 1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
 - a) Lebih meningkatkan kompetensi petugas kesehatan melalui peningkatan kompetensi kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir melalui pelatihan, bimtek dan OJT adalah upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan dalam rangka menekan angka kematian ibu.
- 2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
 - a) Lebih meningkatkan penyebarluasan informasi melalui media penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya pada bayi (0-11 bulan) kepada masyarakat
- 3) Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar Nasional
 - a) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang terjadi di tingkat puskesmas yang sesuai dengan kondisi masing
 - b) Melakukan intervensi atau kegiatan tindak lanjut dalam mengatasi masalah yang telah teridentifikasi diatas`
 - c) Melakukan pembinaan dan pendampingan pada kegiatan program yg menemui permasalahan
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur dan terjadwal
 - e) Menyusun laporan hasil kegiatan untuk di analisa dan dilaporkan kepada pimpinan untuk di ambil langkah-langkah kebijakan bila diperlukan demi tercapainya sasaran dan target program yg belum tercapai pada tahun berikutnya.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- f) seluruh kegiatan tersebut diatas telah tercermin atau terimplemasikan pada kegiatan yg ada pada DPA kegiatan program seksi P2PM Tahun anggaran 2018.
- 4) Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS
 - a) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan darah.
 - b) Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaksanaan pembiayaan darah
 - c) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PMI Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Rumah Sakit SeKota Tangerang Selatan
 - d) Sosialisasi mengenai pelaksanaan Pelayanan Darah

A.2.2. Rumah Sakit Umum

A.2.2.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan pelayanan kesehatan,
2. Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,
3. Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan,
4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan,
6. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD,
7. Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat,

A.2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, menghasilkan kinerja program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan pelayanan kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pelayanan kesehatan	32.817.574.420	31.933.284.934	97,31%
Penyediaan, Pemeliharaan Bank Darah RS	1.734.628.420,00	1.635.320.680,00	94,27%
Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit	308.266.000,00	206.013.900,00	66,83%
Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	131.628.000,00	125.903.500,00	95,65%
Pengelolaan Jasa Pelayanan	28.979.082.000,00	28.314.939.754,00	97,71%
Pelayanan Kesehatan Rujukan RS / Sarana Lanjutan	1.663.970.000,00	1.651.107.100,00	99,23%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit	14	15	107%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,	30.767.769.394	29.775.861.910	96,78%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	752.561.000,00	547.598.888,00	72,76%
Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	1.474.554.722,00	1.350.099.491,00	91,56%
Pemeliharaan Laundry dan Kebersihan Rumah Sakit	2.471.699.272,00	2.449.272.150,00	99,09%
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit	4.080.760.900,00	3.633.309.276,00	89,04%
Pengadaan Sarana Prasarana Keperawatan Rumah Sakit	1.106.121.000,00	1.080.418.887,00	97,68%
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	20.882.072.500,00	20.715.163.218,00	99,20%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit	4	12	300%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3. Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	35.816.720.941	34.951.975.535	97,59%
Pengadaan Obat, makanan dan perbekalan rumah sakit.	35.816.720.941,00	34.951.975.535,00	97,59%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase resep sesuai dengan formularium	70%	96%	137%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	713.154.000	569.900.248	79,91%
Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	713.154.000,00	569.900.248,00	79,91%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit	55%	55%	100%	Rumah Sakit Umum	TST

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1.434.669.000	1.092.101.169	76,12%
Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis	814.210.000,00	587.524.279,00	72,16%
Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat dan Bidan	450.519.000,00	399.173.220,00	88,60%
Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang	169.940.000,00	105.403.670,00	62,02%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	20%	50%	249%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

6. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	24.500.000.000	21.995.437.520	89,78%
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	24.500.000.000	21.995.437.520	89,78%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase kepuasan pasien yang disurvei	72%	78%	108%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

7. Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	789.561.300	767.183.289	97,17%
Pembangunan, Pemeliharaan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	789.561.300,00	767.183.289,00	97,17%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar	100%	100%	100%	Rumah Sakit Umum	TST

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.2.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum optimalnya realisasi fisik dan keuangan yang direncanakan terjadi pada rapat rutin akreditasi mingguan 1080 orang 540 & rapat rutin akreditasi bulanan sebanyak 550 orang yang terealisasi sebanyak 367 orang
- Rendahnya realisasi keuangan kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit yang direncanakan sebanyak Rp. 308.266.000 terealisasi sebanyak Rp. 206.013.900 Belum terpenuhinya target tersebut disebabkan Rapat Rutin Akreditasi Mingguan & Rapat Rutin Akreditasi Bulanan diserap sesuai kebutuhan, karena di pertengahan tahun akreditasi memakai jasa pihak ketiga.
- Program Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan target 70% Realisasi 95,67% . Resep yang di buat sesuai dengan formularium RSU. Formularium rumah sakit merupakan penerapan konsep obat esensial di rumah sakit yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya
- Program Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD melebihi targer capaian dengan target 72% Realisasi 77,84% karena dengan diterapkannya pola pengelolaan keuangan BLUD, rumah sakit lebih fleksibel dalam mengelola pendapatan yang dipakai untuk membiayai operasional rumah sakit, sehingga banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien dapat segera diatasi dengan memanfaatkan anggaran BLUD
- Program Pengembangan pelayanan kesehatan tahun 2017 ditargetkan 14 Jenis Pelayanan yang akan sesuai SPM terrealisasi 15 pelayanan yang sudah sesuai SPM pengembangan pelayanan di dalamnya didukung oleh 5 kegiatan, salah satunya kegiatan penyediaan dan pemeliharaan bank darah rumah sakit dengan adanya kegiatan tersebut RSU mampu mengelola darah dengan lebih baik berkat adanya BDRS sehingga tadinya layanan transfusi darah belum sesuai standar sekarang sudah memenuhi standar
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis, Pagu Rp. 814.210.000 Realisasi Rp. 587.524.279 di karenakan Efesinsi, Banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah banyaknya tiket pesawat yang tidak terserap
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat dan Bidan Rp.450.519.000 Realisasi 399.173.220, Banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah banyaknya tiket pesawat yang tidak terserap
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang Pagu Rp. 169.940.000 Realisasi Rp 105.403.670 Banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah banyaknya tiket pesawat yang tidak terserap
- Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit tidak mencapai target di indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit target 4 paket realisasi 1 Paket dan realisasi Keuangan Pagu Rp. 752.561.000 realisasi Rp. 547.598.888 karena Penataan ruang kasir tidak dilaksanakan berkaitan masih dalam proses renovasi oleh Dinas bangunan melalui pihak ke-3 nya sampai dengan 31 desember 2017
- Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit pagu Rp. 4080760900 realisasi Rp. 3633309276 (89,04%) di karenakan menyesuaikan kebutuhan efesisiensi dari Bahan Bakar Minyak/ Gas Penunjang Pelayanan target 13.612 liter realisasi 10.421 liter.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

- k. Kegiatan Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Efisiensi indikator Tersedianya Publikasi Advetoriaal dan Media Informasi Rumah Sakit target 1 Paket realisasi 1 paket di pertengahan tahun pihak ke tiga putus kontrak karena Advetoriaal online nasional yang tidak dapat dilanjutkan kerjasama karena proses pembayaran yang harus dilakukan di muka bukan setelah kwitansi dan SPJ tetapi secara capaian sudah tercapai
- l. Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Rumah Sakit terjadi efisiensi pagu Rp. 95.990.000 realisasi Rp. 79.204.100 pada makan minum kegiatan dan penggandaan dokumen.

2. Solusi

- a. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran.
- b. Melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia secara bertahap disesuaikan dengan daya tampung gedung yang ada.

A.2.3. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

A.2.2.4. Program dan Kegiatan

1. Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

A.2.2.5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	119.714.559.538	55.130.787.613	46,05
Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pelayanan Kesehatan	2.218.550.000	2.074.407.400	93,50
Rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	1.913.800.000	1.796.533.000	93,87
Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 2	22.054.426.000	18.235.499.213	82,68
Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 3	58.948.611.538	-	0,00
Pembangunan Gedung PPKT	34.579.172.000	33.024.348.000	95,50

Sumber : Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah puskesmas yang terbangun	31	30	97%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Jumlah bangunan posyandu yang dibangun	47	30	64%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Jumlah puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan	3	2	67%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Jumlah Bangunan PPKT	0,39	0,44	113%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TMT



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	7	3	43%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Bangunan RSUD (Gedung 3)	2%	0%	0%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Bangunan Gedung 2 RSU Tangsel	100%	100%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.2.2.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Target capaian keuangan yang tidak tercapai pada kegiatan Pembangunan RSU kota Tangerang Selatan Gedung 2 disebabkan oleh efisiensi kontrak, penyusunan nilai HPS yang disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan.
- Belum optimalnya penyerapan paket pekerjaan *multy years* pada Kegiatan Pembangunan RSU kota Tangerang Selatan Gedung 3, dikarenakan masih dalam tahap rekomendasi dari TABG oleh Konsultan MK.
- Tidak adanya ketersediaan lahan (aset pemerintah kota) untuk pembangunan puskesmas atau posyandu yang diusulkan sesuai dengan data usulan musrenbang kelurahan.

2. Solusi

- Peningkatan koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan baik sisi anggaran maupun teknis kegiatan untuk Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.
- Melaksanakan perencanaan serta manajemen kegiatan dengan lebih baik serta melanjutkan paket pekerjaan *multy years* pada kegiatan ditahun selanjutnya untuk mengatasi permasalahan kegiatan Pembangunan RSU Kota Tangerang Selatan Gedung 3.
- Mengoptimalkan kegiatan Koordinasi Pembangunan RSU Kota Tangerang Selatan Gedung 3
- Meningkatkan koordinasi antara Dinas Bangunan dan Penataan Ruang dengan Dinas terkait lainnya.
- Mensyaratkan ketersediaan lahan milik pemerintah kota untuk kebutuhan pembangunan
- Mengupayakan penyelesaian permasalahan teknis pembangunan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan lebih maksimal
- Pelaksanaan pekerjaan dirancang lebih optimal dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu pelaksanaan.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

A.3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh; 1) Dinas Pekerjaan Umum, 2) Bappeda, dan 3) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.

A.3.1. Dinas Pekerjaan Umum

A.3.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,**
2. **Pengendalian banjir,**
3. **Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya,**
4. **Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong,**

Selama Tahun 2017, menghasilkan kinerja program sebagai berikut :

1 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	221.412.326.906,00	207.699.273.615,00	93,81%
Inspeksi Kondisi Jalan	1.451.785.300,00	1.042.054.900,00	71,78%
Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)	722.960.940,00	691.150.570,00	95,60%
Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	89.500.000,00	87.810.000,00	98,11%
Pengendalian Pemanfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air	6.160.267.300,00	6.157.700.850,00	99,96%
Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi & Peraturan Lainnya yang terkait	116.470.200,00	116.470.200,00	100,00 %
Pembangunan Jalan Wilayah I	17.606.154.232,00	16.489.674.400,00	93,66%
Pembangunan Jalan Wilayah II	12.772.944.500,00	12.030.539.500,00	94,19%
Pembangunan Jalan Wilayah III	25.734.066.480,00	24.650.451.480,00	95,79%
Pembangunan Jembatan	10.601.576.200,00	10.502.450.700,00	99,06%
Pengawasan Pembangunan Jembatan	307.739.500,00	307.347.500,00	99,87%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat	6.568.071.100,00	6.553.769.100,00	99,78%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur	8.145.039.529,00	8.127.554.100,00	99,79%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong	7.905.245.068,00	7.879.636.900,00	99,68%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong Utara	6.803.352.509,00	6.785.705.900,00	99,74%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Setu	6.566.211.053,00	6.506.844.100,00	99,10%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren	7.688.099.848,00	7.586.977.800,00	98,68%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang	8.920.535.047,00	8.901.123.500,00	99,78%
Perencanaan Pembangunan Jalan Kota	1.200.000.000,00	1.166.633.000,00	97,22%
Perencanaan Pembangunan Jembatan	900.000.000,00	883.600.400,00	98,18%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pemeliharaan Alat-alat Berat Bidang Bina Marga	440.000.000,00	435.500.900,00	98,98%
Pemeliharaan Jalan	13.918.604.000,00	13.900.627.404,00	99,87%
Pemeliharaan Jembatan	4.150.000.000,00	4.105.703.100,00	98,93%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat	2.750.000.000,00	2.746.636.200,00	99,88%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur	2.750.000.000,00	2.739.035.600,00	99,60%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong	3.397.000.000,00	3.394.306.500,00	99,92%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong Utara	3.000.000.000,00	2.996.541.800,00	99,88%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Setu	2.750.000.000,00	2.736.489.900,00	99,51%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren	3.700.000.000,00	3.692.923.700,00	99,81%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang	3.500.000.000,00	3.487.625.800,00	99,65%
Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Kontruksi	96.704.000,00	96.680.660,00	99,98%
Pengembangan dan Pengolahan Teknologi Informasi	380.000.000,00	369.360.000,00	97,20%
Penyusunan Data Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air	766.000.000,00	762.775.000,00	99,58%
Pengujian dan Penunjang Kegiatan Laboratorium Kebinamargaan	685.950.000,00	658.754.000,00	96,04%
Pemeliharaan Peralatan Pengujian Laboratorium Kebinamargaan	153.700.000,00	130.783.585,00	85,09%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah I	150.000.000,00	149.614.800,00	99,74%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah II	150.000.000,00	149.400.000,00	99,60%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah III	200.000.000,00	157.880.000,00	78,94%
Pengawasan Pembangunan Jalan Wilayah I,II,III	1.216.802.000,00	1.201.485.100,00	98,74%
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah I	922.064.000,00	902.933.200,00	97,93%
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah II	762.017.000,00	743.627.000,00	97,59%
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah III	1.490.937.000,00	1.447.144.500,00	97,06%
Pembangunan Turap Jalan	2.340.060.100,00	2.136.392.100,00	91,30%
Pemeliharaan Turap Jalan	1.500.000.000,00	1.231.387.716,00	82,09%
Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan	19.000.000.000,00	11.972.052.500,00	63,01%
Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah I	733.854.000,00	723.601.700,00	98,60%
Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah II	741.000.000,00	738.217.000,00	99,62%
Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah III	1.485.823.000,00	1.477.078.000,00	99,41%
Perencanaan Pedestrian Saluran dan Jalan	1.500.000.000,00	1.499.489.700,00	99,97%
Pemeliharaan Pedestrian Saluran dan Jalan	1.500.000.000,00	1.499.448.900,00	99,96%
Pengawasan Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan	621.793.000,00	617.629.000,00	99,33%
Pembangunan Jembatan (Ban.Keu Prov)	4.100.000.000,00	3.977.832.800,00	97,02%
Pembangunan Jalan (Ban.Keu Prov)	3.000.000.000,00	2.793.606.800,00	93,12%
Perencanaan Jalan (Ban.Keu Prov)	300.000.000,00	286.917.250,00	95,64%
Pembangunan Pedestrian (Ban.Keu Prov)	7.000.000.000,00	5.272.296.500,00	75,32%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	84%	96%	115%	Dinas Pekerjaan Umum	TMT



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Jalan lingkungan dalam kondisi baik	50%	50%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST
Pedestrian jalan yang dibangun	2%	2%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

2 Program Pengendalian Banjir

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengendalian Banjir,	37.690.401.900,00	36.059.682.982,00	95,67%
Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir	4.756.911.800,00	4.751.298.722,00	99,88%
Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane	3.511.661.500,00	3.510.868.900,00	99,98%
Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Angke	10.925.828.600,00	10.917.619.800,00	99,92%
Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Pesanggrahan	7.200.000.000,00	7.041.033.160,00	97,79%
Penanganan Banjir (Ban.Keu Prov)	11.296.000.000,00	9.838.862.400,00	87,10%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
luas genangan yang tereduksi	34%	34%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	52.615.100.701,00	52.295.708.300,00	99,39%
Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan di 7 Kecamatan	11.200.000.000,00	11.151.170.700,00	99,56%
Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Air	3.700.000.000,00	3.681.842.500,00	99,51%
Pengawasan Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air	858.104.400,00	768.746.900,00	89,59%
Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir	12.163.777.000,00	12.147.483.000,00	99,87%
Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane	15.282.559.681,00	15.161.466.600,00	99,21%
Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Angke	5.257.659.620,00	5.246.481.600,00	99,79%
Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Pesanggrahan	1.293.000.000,00	1.289.551.400,00	99,73%
Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	2.860.000.000,00	2.848.965.600,00	99,61%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku	14%	14%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST
Kapasitas debit sungai / tandon	34%	34%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

4 Program Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong	57.963.518.133,00	57.097.230.700,00	98,51%
Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan di 7 Kecamatan	33.511.289.633,00	33.338.126.500,00	99,48%
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kota	2.700.000.000,00	2.699.255.500,00	99,97%
Pengawasan Pembangunan Saluran Lingkungan Wilayah I, II & III	2.017.465.600,00	1.986.200.800,00	98,45%
Pengawasan Peningkatan Penanganan Drainase Kota	706.581.000,00	681.709.000,00	96,48%
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Wil.I, II & III	2.854.025.000,00	2.826.778.000,00	99,05%
Pembangunan Drainase Kota	6.820.156.900,00	6.795.242.200,00	99,63%
Pemeliharaan Saluran Drainase Kota	4.050.000.000,00	4.044.349.900,00	99,86%
Pembangunan Drainase Kota (Ban.Keu Prov)	5.304.000.000,00	4.725.569.200,00	89,09%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Kapasitas Debit Saluran	40%	40%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.3.1.2. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Pelaksanaan pada kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh tidak diserapnya Perjalanan Dinas dan kegiatan Monitoring Utilitas, Survey Rekomendasi Utilitas dan Sinkronisasi dan koordinasi Lintas Sektoral terkait jaringan utilitas tidak dilaksanakan dikarenakan ketersediaan waktu yang tidak mencukupi.
- Rendahnya Realisasi Keuangan pada Kegiatan Penanganan Banjir (Bankeu. Prov) disebabkan oleh efisiensi atau sisa kontrak pekerjaan, adapun fisik dilapangan dilaksanakan 100%.
- Rendahnya Realisasi Keuangan pada kegiatan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Laboratorium Kebnamargaan dikarenakan pemeliharaan alat Hummer tes tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya alat yang memenuhi spesifikasi dan pembuatan kolam tampungan untuk pengujian tidak dilaksanakan dikarenakan ketersediaan lahaanya yang digunakan untuk kepentingan lainnya (Depo Arsip).
- Rendahnya Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah III disebabkan oleh efisiensi anggaran, adapun Pemeliharaan Alat sudah dilaksanakan 100%.
- Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan terkendala oleh Pembebasan Lahan dan utilitas PLN belum dipindahkan namun pelaksanaan Pekerjaan Fisik dapat dilaksanakan 100%.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- f) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pedestrian (Bankeu. Prov) terkendala oleh lokasi dilapangan terbatas untuk pembangunan Saluran pembuang, tetapi pelaksanaan Pekerjaan Fisik dapat dilaksanakan 100%.
- g) Rendahnya Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pembangunan Drainase Kota (Bankeu. Prov) disebabkan oleh efisiensi anggaran, adapun Pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan sudah dilaksanakan 100%.

2. Solusi

- a) Terkait Kegiatan Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan akan dilakukan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait (PLN) agar utilitas tersebut dapat segera dipindahkan dan terkait lahan akan di koordinasikan kembali dengan badan pertanahan agar segera untuk di bebaskan lahannya.

A.3.2. Badan Perencanaan Pembangunan

A.3.2.1. Program dan Kegiatan

1. Perencanaan Tata Ruang

A.3.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program perencanaan tata ruang menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1 Program Perencanaan Tata Ruang

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perencanaan Tata Ruang	1,457,700,000.00	1,403,100,000.00	96.25%
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	1,457,700,000.00	1,403,100,000.00	96.25%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	100%	100%	100%	BEPEDA	TST

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.3.3. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

A.3.3.1. Program dan Kegiatan

1. Pengembangan Sarana Air Minum dan Air Limbah
2. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung,
3. Pengedalian dan Pemanfaatan Ruang,
4. Perencanaan Tata Ruang,



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

A.3.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, kinerja program yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut :

1 Pengembangan Sarana Air Minum dan Air Limbah,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Sarana Air Minum dan Air Limbah	8.421.360.000	8.026.019.000	95,31
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	3.603.500.000	3.458.380.500	95,97
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat	4.817.860.000	4.567.638.500	94,81

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	86,13%	86,13%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST
Persentase pelayanan air minum	83,50%	83,50%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

a. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan dan Gedung	288.194.302.877	177.001.521.924	61,42
Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan, Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan	979.160.700	324.189.900	33,11
Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Gedung Sekolah	3.608.072.920	3.249.737.420	90,07
Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah	7.936.653.400	5.288.580.500	66,63
Pengujian Material Struktur Bangunan / Infrastruktur	5.200.890.000	3.256.545.000	62,62
Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	39.260.198.750	33.163.765.350	84,47
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Pondok Aren	4.853.448.600	4.552.320.000	93,80
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Serpong	5.280.675.000	4.560.618.000	86,36
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Ciputat Timur	1.530.000.000	1.251.161.500	81,78
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Ciputat	5.162.909.000	4.263.034.000	82,57
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Setu	210.000.000	203.910.000	97,10
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Pamulang	1.230.000.000	1.158.677.000	94,20
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Serpong Utara	6.435.000.000	5.690.738.700	88,43
Pembangunan Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan	66.898.803.400	33.410.813.400	49,94
Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah	1.400.000.000	1.341.205.600	95,80



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pembangunan Sarpras Penunjang Perkotaan	9.667.378.400	4.417.516.640	45,70
Penataan Sarana dan Prasarana Halaman Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	8.000.000.000	7.517.558.000	93,97
Pengendalian teknis Bangunan gedung dan Bangunan Lainnya	780.570.000	235.932.250	30,23
Pembangunan Masjid Raya Tangerang Selatan	6.000.000.000	5.418.511.880	90,31
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data/Informasi Capaian Target Kinerja	121.341.300	116.152.000	95,72
Pembangunan Gedung Pelayanan Perizinan Masyarakat	20.830.260.719	31.840.400	0,15
Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu	25.020.150.000	23.238.290.000	92,88
Pembangunan kantor Ketahanan Masyarakat	1.753.880.000	1.606.153.000	91,58
Pembangunan Gedung Parkir Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan TAHAP 3	15.000.000.000	13.373.440.850	89,16
Pembangunan gedung galeri koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan	26.374.219.688	3.046.100	0,01
Penataan Bangunan Gedung	3.523.461.600	1.739.314.434	49,36
Manajemen Konstruksi pembangunan RSU kota tangerang selatan gedung 3	886.738.600	1.627.400	0,18
Manajemen Konstruksi pembangunan gedung galeri koperasi dan UKM kota tangerang selatan	549.800.000	1.735.000	0,32
Manajemen Konstruksi pembangunan gedung pelayanan perizinan masyarakat	469.678.000	2.124.700	0,45
Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Perkantoran	4.084.462.100	3.392.602.600	83,06
Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Non Perkantoran	8.196.490.200	7.731.516.000	94,33
Pembangunan Gelanggang Budaya	6.950.060.500	6.458.864.300	92,93

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran	10	19	190%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TMT
Tersedianya sarana dan prasarana gedung non perkantoran	2	6	300%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TMT
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan kajian dan rekomendasi teknis serta sertifikat laik fungsi	1	1	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

2 Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	300.000.000	222.150.000	74,05
Penyusunan Pedoman Pengendalian Ruang Kota	70.000.000	65.350.000	93,36
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Ruang	230.000.000	156.800.000	68,17

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Kesesuaian program pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	71%	71%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan	100%	100%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3 Perencanaan Tata Ruang

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Perencanaan Tata Ruang	1.078.000.000	886.062.000	82,19
Rencana Teknis Ruang Kawasan	300.000.000	273.127.000	91,04
Survey dan Pemetaan	578.000.000	541.360.000	93,66
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	200.000.000	71.575.000	35,79

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Ketersediaan rencana tata ruang beserta rencana detail dan rencana teknis	50%	50%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST
Ketersediaan NSPK Bidang Tata Ruang	30%	30%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.3.3.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Terdapat kegiatan yang gagal lelang karena tidak ada penyedia jasa yang melakukan penawaran, dan paket yang batal lelang dikarenakan dokumen perencanaan yang belum dapat direview (menunggu hasil appraisal),
- Terdapat pengadaan barang yang tidak dapat dilaksanakan karena belum tersedia dalam E-katalog.
- Tidak adanya ketersediaan lahan (aset pemerintah kota) untuk pembangunan yang diusulkan sesuai dengan data usulan musrenbang kelurahan.
- Adanya edaran mengenai moratorium pemberian hibah dan bansos dari Bawaslu Provinsi Banten terkait pembangunan yang berada pada lahan milik masyarakat



2. Solusi

- a. Melakukan penganggaran kembali ditahun berikutnya untuk kegiatan yang gagal lelang setelah dilakukan kajian/telaahan/evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya
- b. Mengusulkan pengadaan barang yang belum tersedia pada E-katalog
- c. Mensyaratkan ketersediaan lahan milik pemerintah kota untuk kebutuhan pembangunan
- d. Mengupayakan penyelesaian permasalahan teknis pembangunan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan lebih maksimal
- f. Pelaksanaan pekerjaan dirancang lebih optimal dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu pelaksanaan.
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah dan pusat mengenai kelengkapan dokumen yang harus disusun.

A.4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penyelenggara Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

A.4.1. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

A.4.1.1. Program dan Kegiatan

1. Penataan Lingkungan Terpadu,
2. Pengembangan infrastruktur permukiman,
3. Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman,
4. Pengembangan Penyediaan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

A.4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, kinerja program yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut :

- 1 **Program Penataan Lingkungan Terpadu,**



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penataan Lingkungan Terpadu	28.466.879.000,00	23.087.202.176,00	81%
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	517.175.000,00	448.486.400,00	87%
Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan	725.407.000,00	685.379.600,00	94%
Perbaikan rumah umum tidak layak huni	15.677.790.000,00	12.727.070.300,00	81%
Pembangunan Sarana Penunjang Pemukiman	6.619.500.000,00	4.831.184.876,00	72%
Penataan Lingkungan Pemukiman Perkotaan	4.927.007.000,00	4.395.081.000,00	89%

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)	335,4	112,53	34%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
Terbangunnya sarana penunjang permukiman	30	39	130%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Penyediaan rumah susun sederhana sewa (unit)	0	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni	200	206	103%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2 Pengembangan infrastruktur permukiman,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Infrastruktur Permukiman	4.427.350.000,00	2.928.064.700,00	66%
Koordinasi Pembangunan Perumahan Tapak dengan Lembaga/Badan	726.000.000,00	299.887.500,00	41%
Koordinasi Pembangunan Perumahan Susun dengan Lembaga/Badan	2.628.250.000,00	1.590.367.200,00	61%
Pembangunan dan Pengembangan Database dan Informasi Digital	448.300.000,00	418.715.000,00	93%
Koordinasi dan Fasilitasi Sertifikasi dan Peringatan Hari Besar Nasional	624.800.000,00	619.095.000,00	99%

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil	0	0	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Tersedianya data rumah dan perumahan	0	3	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	1	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan pengesahan pertelaan rumah susun	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset	10	10	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

3 Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penyediaan Dan Pengelolaan Pemakaman	4.491.856.000,00	4.122.195.881,00	91,77%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.186.438.000,00	1.160.069.865,00	98%
Penataan Taman Pemakaman Umum (TPU)	1.247.532.000,00	1.173.366.918,00	94%
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	2.057.886.000,00	1.788.759.098,00	87%

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pengembangan dan Pembangunan TPU	7	7	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terpeliharanya sarana TPU	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Pembinaan kelembagaan pengelolaan TPU	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

4 Pengembangan Penyediaan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU),

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	60.657.400.000,00	57.219.671.380,00	94,33%
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	17.580.000.000,00	17.331.744.500,00	99%
Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.367.400.000,00	6.293.664.700,00	99%
Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.410.000.000,00	1.316.545.258,00	93%
Penyambungan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU)	35.300.000.000,00	32.277.716.922,00	91%

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Penambahan jumlah PJU terbangun	2250	3509	156%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

A.4.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
 - a) Belum optimalnya kegiatan Penataan Taman Pemakaman Umum (TPU) disebabkan tidak sesuai penggunaannya kajian Peil Banjir, yang lebih sesuai dengan menggunakan kajian AMDAL.
 - b) Belum optimalnya kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman disebabkan data harga di e-katalog belum ter-update dengan harga terbaru.
2. Solusi
 - a) Merubah kajian peil banjir menjadi kajian AMDAL.
 - b) Mengupdate harga terbaru di e-Katalog.

A.5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggara Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 3) Satuan Polisi Pamong Praja.

A.5.1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

A.5.1.1. Program dan Kegiatan

1. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran,

A.5.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran menghasilkan kinerja sebagai berikut :

- 1 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	15.756.173.300	14.694.946.925	93,26%
Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	304.760.000,00	302.485.000,00	99,25%
Rekrutmen Tenaga Sukarela Pencegahan Bahaya Kebakaran	127.880.000,00	127.730.000,00	99,88%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya	7.146.998.300,00	6.507.330.500,00	91,05%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Kebakaran			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.285.570.000,00	1.284.648.475,00	99,93%
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	5.842.675.000,00	5.599.075.000,00	95,83%
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	191.706.000,00	48.450.000,00	25,27%
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	134.970.000,00	114.945.000,00	85,16%
Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	179.939.000,00	179.937.950,00	100,00%
Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Korban	541.675.000,00	530.345.000,00	97,91%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Respon time kebakaran	< 15 Menit	<20 menit	133%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TMT
Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda	100%	100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TST

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.5.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum optimalnya kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB.

2. Solusi

- Optimalisasi kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB.
- Diikutsertakan dalam Tim BKPRD.

A.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

A.5.2.1. Program dan Kegiatan

1. Penanggulangan Bencana Daerah,

A.5.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

1 Penanggulangan Bencana Daerah,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penanggulangan Bencana Daerah	1.552.536.750,00	1.520.243.650,00	97,92%
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	691.987.850,00	684.481.850,00	98,92%
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	195.379.300,00	190.919.300,00	97,72%
Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pascabencana	384.050.000,00	379.108.900,00	98,71%
Peningkatan Penanganan, Ketersediaan data Kerugian dan Kerusakan Fisik Serta Sosial Ekonomi Pascabencana	281.119.600,00	265.733.600,00	94,53%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TST

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2 Program Penanggulangan Bencana Daerah,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penanggulangan Bencana Daerah	1.067.440.250,00	1.055.045.950,00	98,84%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	534.483.950,00	524.668.350,00	98,16%
Pengadaan Logistik bagi Korban Bencana	110.872.100,00	110.859.600,00	99,99%
Fasilitasi Penanganan Kedaruratan Bencana	422.084.200,00	419.518.000,00	99,39%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 20 Menit terhadap Bencana	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TST

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.5.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Masih perlunya peningkatan infrastruktur khususnya gedung kantor BPBD yang kurang representatif dalam menunjang pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana.
- Belum optimalnya sistim pelayanan penanggulangan bencana

2. Solusi

- Diusulkan untuk dibuatkan gedung kantor baru yang representatif.
- Dalam meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana membutuhkan Sistem Infomasi kebencanaan yang tepat dan cepat.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

A.5.3. Satuan Polisi Pamong Praja

A.5.3.1. Program dan Kegiatan

1. Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota,
2. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan,

A.5.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1 Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota,	3.094.667.600	2.801.139.938	90,52%
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.944.667.600,00	2.651.148.938,00	90,03%
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penyelenggaraan Kantrantibum	150.000.000,00	149.991.000,00	99,99%

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	98%	98%	100%	Satpol PP	TMT

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2 Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan,	8.936.982.500	8.812.277.500	98,60%
Pengendalian Satlinmas Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	726.593.427,00	720.253.427,00	99,13%
Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.394.994.073,00	1.347.552.073,00	96,60%
Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	201.000.000,00	196.790.000,00	97,91%
Penyelenggaraan Bina Potensi Masyarakat	159.000.000,00	153.964.000,00	96,83%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Aparatur	6.045.805.000,00	6.000.420.000,00	99,25%
Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satpol PP	409.590.000,00	393.298.000,00	96,02%

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	30 kali	30 kali	100%	Satpol PP	TST
Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	Satpol PP	TST
Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang	62%	62%	100%	Satpol PP	TST



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih	100%	100%	100%	Satpol PP	TST
---	------	------	------	-----------	-----

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.5.3.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Sidang TIPIRING yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 7 Kegiatan terealisasi sebanyak 2 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan untuk menjaga iklim investasi, sehingga pelaku pelanggaran perda diarahkan mengurus ijin dan tidak masuk ke ranah pidana karena yang bersangkutan menyelesaikan perijinannya, dan penyidikan dihentikan.
- Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Gelar Perkara yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 5 Kegiatan terealisasi sebanyak 4 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan tidak semua pelanggaran perda dilakukan gelar perkara, hanya permasalahan rumit dan melibatkan opd lain yang membutuhkan dilaksanakannya gelar perkara.
- Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Pengamanan Demonstrasi masa yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 9 Kegiatan terealisasi sebanyak 6 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan Kegiatan demonstrasi masa bersifat insidental, sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kejadian.

2. Solusi

- Melaksanakan Perencanaan serta manajemen kegiatan dengan lebih baik.
- Penyediaan anggaran untuk kegiatan sidang tipiring, gelar perkara serta kegiatan demonstrasi masa dan kegiatan insidental tetap diperlukan karena berdasarkan data, kejadian masih sering terjadi bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.

A.6. SOSIAL

Penyelenggara Urusan Sosial di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Sosial dan 2) Sekretariat Daerah.

A.6.1. Dinas Sosial

A.6.1.1. Program dan Kegiatan

- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,**
- Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial,**
- Bantuan dan Jaminan Sosial,**

A.6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,	1.893.575.000	1.881.740.000	99,37%
Peningkatan dan Penanganan Penyandang Disabilitas	685.600.000,00	675.050.000,00	98,46%
Penanganan Penyandang Masalah Tuna Sosial	430.275.000,00	430.190.000,00	99,98%
Peningkatan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia	527.700.000,00	527.700.000,00	100,00%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial	250.000.000,00	248.800.000,00	99,52%

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar	50%	50%	100%	Dinas Sosial	TST

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	1.630.048.000	1.436.976.000	88,16%
Peningkatan Pemberdayaan bagi Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial	420.748.000,00	395.936.000,00	94,10%
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	813.700.000,00	656.740.000,00	80,71%
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	395.600.000,00	384.300.000,00	97,14%

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan	0,25	0,25	100%	Dinas Sosial	TST

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3. Bantuan dan Jaminan Sosial,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Bantuan dan Jaminan Sosial	1.200.100.000	1.199.905.000	99,98%
Perlindungan Sosial Bagi Keluaraga Rentan	300.000.000,00	299.900.000,00	99,97%
Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	457.200.000,00	457.105.000,00	99,98%
Perlindungan Sosial Terhadap Keperintisan dan Nilai-nilai Pahlawan	442.900.000,00	442.900.000,00	100,00%

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase Rumah Tangga/Individu Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial	0,8	0,8	100%	Dinas Sosial	TST

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



A.6.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Terbatasnya jumlah Tenaga Ahli bidang Kesehatan seperti Dokter Spesialis Kejiwaan, Psikologi dan Psikiater
- b. Terbatasnya Sarana Rumah Singgah.
- c. Kurang optimalnya koordinasi terkait pemulangan orang terlantar ke luar daerah

2. Solusi

- a. Menyediakan Tenaga Ahli dalam Bidang Kesehatan
- b. Menyediakan Tenaga Ahli Khusus Untuk ODK
- c. membuat SOP & MOU untuk pengantaran orang terlantar ke luar daerah (Dinsos Provinsi, Kementerian Sosial, Dishub, PO Bus AKAP, PT KAI, PT PELNI)
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah singgah

A.6.2. Sekretariat Daerah

A.6.2.1. Program dan Kegiatan

1. Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial,

A.6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	3.254.160.000,00	2.806.456.700,00	86,24%
Pembinaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	906.886.400,00	782.696.400,00	86,31%
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	1.730.471.100,00	1.546.298.100,00	89,36%
Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	616.802.500,00	477.462.200,00	77,41%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan	4	3	75%	Setda	TT
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	7	7	100%	Setda	TST
Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	2	2	100%	Setda	TST

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018



URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

B.1. KETENAGAKERJAAN

Penyelenggara Urusan Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

B.1.1. Dinas Ketenagakerjaan

B.1.1.1. Program dan Kegiatan

1. Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja,
2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha,
3. Kerjasama Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan,

B.1.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	2,100,430,000	2,062,322,515	98,19
Peningkatan Produktivitas tenaga kerja	336,930,000.00	332,212,515.00	98,60
Peningkatan Jejaring Kerjasama Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	289,400,000.00	267,530,000.00	92,44
Pelatihan Keterampilan dan Keahlian	1,474,100,000.00	1,462,580,000.00	99,22

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase tenaga kerja siap pakai	10%	10%	100%	Dinas Ketenagakerjaan	TST

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	1,777,250,000	1,753,726,000	98,68
Penyusunan dan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	1,185,350,000.00	1,172,450,000.00	98,91
Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	243,400,000.00	243,376,000.00	99,99
Persiapan penempatan dan pembinaan transmigrasi regional	348,500,000.00	337,900,000.00	96,96

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65%	65%	100%	Dinas Ketenagakerjaan	TST

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

3. Kerjasama Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Kerjasama Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1,628,942,000	1,604,623,000	98,51
Fasilitasi Persyaratan Kerja	473.245.000	473.245.000	100,00
Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	246.300.000,00	239,360,000.00	97,18
Fasilitasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	909.397.000,00	892,018,000.00	98,09

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Menurunnya Angka perselisihan Industrial	28 kasus	28 kasus	100%	Dinas Ketenagakerjaan	TST

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.1.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Belum selesainya revisi Perda Ketenagakerjaan disebabkan Perda Ketenagakerjaan Provinsi Banten yang mengatur pembagian tugas Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan belum tersedianya.

2. Solusi

Peningkatan koordinasi terkait percepatan penyusunan Perda Disnaker Provinsi Banten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B.2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:



B.2.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

B.2.1.1 Program dan Kegiatan

1. Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,
2. Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
3. Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak,

B.2.1.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,	1.712.790.000	1.628.229.000	95,06%
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	1.046.900.000	984.834.100	94,07%
Pembinaan Organisasi Perempuan	665.890.000	643.394.900	96,62%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	630 (orang)	652 (orang)	103%	DPMPPAKB	TMT

Sumber : DPMPPAKB, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	693.000.000	641.675.000	92,59%
Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan di daerah	543.000.000	530.695.000	97,73%
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	150.000.000	110.980.000	73,99%

Sumber : DPMPPAKB, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	100%	100%	100%	DPMPPAKB	TST

Sumber : DPMPPAKB, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

3. Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	2.386.675.000	2.301.185.900	96,42%
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	477.591.000	423.912.000	88,76%
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	970.196.000	962.386.000	99,20%
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	938.888.000	914.887.900	97,44%

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
IPG dan IDG	IPG 93,50- 93,78% ; IDG 64,26- 64,47%	IPG 92,59 IDG 63.17	IPG 99.03% IDG 98.30%	DPMPPPAKB	TT
Jumlah Kelurahan Ramah Anak	8	8	100%	DPMPPPAKB	TST

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.1.1.4. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Tidak tercapainya IPG dan IDG dikarenakan ada perubahan cara perhitungan IPM, laju peningkatan indeks IPM laki-laki jauh lebih meningkat secara signifikan dibandingkan dengan IPM Perempuan
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pengarusutamaan gender (PUG) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta penjualan anak dan remaja.

2. Solusi

- Untuk Semua OPD yang terkait Peningkatan IPM, diharapkan memperhatikan komponen komponen peningkatan IPM Perempuan
- Peningkatan sosialisasi dan motivasi melalui jaring aspirasi dan tutor sebaya (lembaga peduli yang ada di masyarakat).

B.3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana



B.3.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

B.3.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan,

B.3.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Program Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1.648.318.000	1.565.003.600	94,95%
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa/ Kelurahan	460.000.000	412.516.600	89,68%
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan	710.000.000	697.940.000	98,30%
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa/ Kelurahan	478.318.000	454.547.000	95,03%

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pemanfaatan Inovasi TTG Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Inovasi)	4	7	175%	DPMPPPAKB	TMT
Persentase Peran serta Lembaga/Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	70%	98,34%	140%	DPMPPPAKB	TMT

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

B.3.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Belum maksimalnya pemanfaatan wadah Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) di tingkat kecamatan.

2. Solusi

Optimalisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta melaksanakan pembinaan terhadap 7 POSYANTEK di 7 Kecamatan Kota Tangerang Selatan.

B.4. PANGAN

Penyelenggara Urusan Pangan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

A.4.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

A.4.1.1. Program dan Kegiatan

1. Peningkatan Ketahanan Pangan

A.4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Peningkatan Ketahanan Pangan	3.608.872.000	3.167.570.047	87,77%
Kerjasama Antar Daerah/Lembaga	142.900.000	114.762.840	80,31%
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	542.696.900	502.394.340	92,57%
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	154.975.000	146.935.000	94,81%
Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	294.925.000	285.014.500	96,64%
Peningkatan Mutu Pangan	196.170.000	184.770.000	94,19%
Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan	60.450.000	59.271.600	98,05%
Peningkatan Keamanan Pangan	693.862.500	639.865.835	92,22%
Koordinasi peningkatan ketahanan pangan daerah Kota Tangerang Selatan	413.662.600	234.911.000	56,79%
Promosi Ketahanan Pangan Daerah	927.030.000	851.273.532	91,83%
Pengembangan Informasi Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan	150.775.000	117.221.400	77,75%
Penyusunan Database Potensi Produk Pangan	31.425.000	31.150.000	99,12%

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	85%	85%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
AKG dan AKP	87%	87%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
Keamanan Pangan	81%	81%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
Manajemen Logistik (dokumen)	2	2	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Disperindag	TST

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2018



A.4.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Pada tahun 2017 terdapat perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga mempengaruhi jadwal pembahasan Program Legeslasi Daerah (Prolegda), akibatnya pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang direncanakan.

2. Solusi

- a. Peningkatan koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan baik sisi anggaran maupun teknis kegiatan
- b. Melaksanakan perencanaan serta manajemen kegiatan dengan lebih baik serta mengajukan kegiatan ditahun yang akan datang untuk mengatasi permasalahan program/kegiatan
- c. Bantuan Keuangan APBD Provinsi diperlukan kontribusinya sebagai upaya percepatan program/kegiatan untuk memenuhi standar pelayanan.
- d. Mendukung dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan untuk pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- e. Perlu adanya peningkatan kemampuan Kepegawaian dan Teknis Lapangan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- f. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya dan Sarana Prasarana bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- g. Mengoptimalkan setiap kegiatan
- h. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan dengan pihak swasta/lembaga lain.
- i. Penyediaan anggaran untuk kegiatan tetap diperlukan karena berdasarkan data, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan masih membutuhkan dan merencanakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

B.5. PERTANAHAN

Penyelenggara Urusan Pertanahan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.5.1.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

B.5.1.1. Program dan Kegiatan

- 1. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,**

B.5.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

- 1. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	186.101.298.055,00	124.189.219.675,00	66,73%
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar	92.437.298.055,00	62.831.916.614,00	68%
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur Dasar	91.264.000.000,00	60.085.163.061,00	66%
Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar	400.000.000,00	204.200.000,00	51%
Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran	400.000.000,00	179.210.000,00	45%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	1.200.000.000,00	558.330.000,00	47%
Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Pengadaan Tanah	300.000.000,00	230.400.000,00	77%
Inventarisasi Kebutuhan Tanah Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100%
Pengendalian Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	100%

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersusunnya laporan kebutuhan lahan	0	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terfasilitasinya dan pendampingan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan	0	6	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terlaksananya pengadaan tanah untuk : kantor kelurahan, kawasan pertanian terpadu, dan Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	1	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terlaksananya pengadaan tanah untuk : Infrastruktur Dasar, Kawasan Perdagangan dan Lapangan Olah Raga	0	2	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran	2	4	200%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar dan Non Gedung Perkantoran	2	4	200%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar	2	3	150%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran/ fasilitas pemerintah bagi masyarakat dan Non Infrastruktur Dasar	2	3	150%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah	1	3	300%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Tersusunnya dokumen teknis rencana pengadaan tanah	1	2	200%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Tersusunnya laporan kebutuhan lahan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Untuk Pembangunan	1	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi Tahapan Pengadaan Tanah	1	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terfasilitasinya Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan	3	2	67%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TT

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

B.5.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum optimalnya fasilitasi dan pendampingan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah gedung perkantoran, terkendala oleh pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Bhayangkara yang masih dalam tahap perencanaan.
- Pengadaan tanah untuk Lapangan Bola terkendala nilai ganti kerugian yang belum disepakati.
- Terjadi efisiensi pagu pada pengadaan tanah untuk perluasan lahan Cipeucang dikarenakan penyesuaian harga dengan appraisal.
- Perluasan pasar ciputat masih dalam tahap perencanaan.

2. Solusi

- Menganggarkan kembali program pengadaan tanah di tahun berikutnya.
- Melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang belum menyetujui.
- Mengoptimalkan kegiatan perencanaan dan kegiatan di tahun berikutnya.

B.6. LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.6.1. Dinas Lingkungan Hidup

B.6.1.1. Program dan Kegiatan

- Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

3. Program Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
4. Program Pengembangan pengelolaan persampahan
5. Program Pengelolaan Sampah terpadu
6. Program Pengelolaan RTH

B.6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	3.939.785.000	3.815.484.349	96,84%
Pengawasan Dokumen Izin Lingkungan	340.000.000,00	326.194.000,00	95,94%
Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	218.100.000,00	199.959.000,00	91,68%
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap B3 dan Limbah B3	325.635.000,00	318.180.000,00	97,71%
Optimalisasi Fungsi Analisis Laboratorium Lingkungan	1.896.500.000,00	1.839.810.349,00	97,01%
Pengawasan dan pengendalian pencemaran	713.500.000,00	700.467.000,00	98,17%
Fasilitasi Dokumen AMDAL, UKL UPL dan SPPL, KLHS/RPPLH	446.050.000,00	430.874.000,00	96,60%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
persentase penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan	78 Titik pantau	144 Titik pantau	185%	Dinas Lingkungan Hidup	TMT
Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan	70%	52%	74%	Dinas Lingkungan Hidup	TT
Pengendalian dan pengawasan terhadap B3 dan limbah B3	50%	80%	160%	Dinas Lingkungan Hidup	TMT
Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup	30	30 Alat Terkalibrasi, 10 Alat Laboratorium Terperlihara	#VA100%LUE!	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam,	887.583.000,00	860.643.000,00	96,96%
perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	486.283.000,00	464.253.000,00	95,47%
Fasilitasi Program Perubahan Iklim	401.300.000,00	396.390.000,00	98,78%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan	500	500	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Pilot Project kampung iklim (kampung Hijau di 7 kecamatan)	1	1 (Kecamatan Pondok Aren)	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

3. Program Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	1.214.234.500,00	1.104.314.500,00	90,95%
Fasilitasi Peningkatan Nilai Adipura	489.220.000,00	455.945.000,00	93,20%
Pemberdayaan Masyarakat Peduli Lingkungan	369.472.500,00	330.372.500,00	89,42%
Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup	355.542.000,00	317.997.000,00	89,44%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah peningkatan partisipasi aktif masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup	40%	40%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Fasilitasi Peningkatan Nilai ADIPURA	73	73	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Jumlah penghargaan Nasional maupun lokal terkait pelestarian lingkungan hidup	1 orang	1 orang	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

4. Program Pengembangan pengelolaan persampahan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pengelolaan persampahan	41.658.450.000	39.938.833.484	95,87%
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kebersihan	19.551.010.000,00	18.646.425.703,00	95,37%
Edukasi Pengelolaan Persampahan	3.277.500.000,00	3.243.291.000,00	98,96%
Peningkatan Operasi Persampahan	18.829.940.000,00	18.049.116.781,00	95,85%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase pengangkutan sampah	50%	55,30%	111%	Dinas Lingkungan Hidup	TMT

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

5. Program Pengelolaan Sampah terpadu

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengelolaan Sampah terpadu	9.342.768.000,00	9.025.831.528,00	96,61%
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	3.416.400.000,00	3.401.833.400,00	99,57%
Operasional dan Pengelolaan TPA Cipeucang	5.926.368.000,00	5.623.998.128,00	94,90%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase pengurangan sampah melalui 3R	10%	10,00%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

6. Program Pengelolaan RTH,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengelolaan RTH,	12.713.285.000,00	11.526.209.146,00	90,66%
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.023.360.000,00	6.468.841.194,00	92,10%
Pemeliharaan Taman Koridor Jalan Utama	3.013.213.000,00	2.542.721.679,00	84,39%
Pemeliharaan Taman Lingkungan	1.587.312.000,00	1.441.739.773,00	90,83%
Penanaman Ruang Terbuka Hijau dan pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati	1.089.400.000,00	1.072.906.500,00	98,49%
Pembangunan Hutan Kota Serpong Utara (Ban.Keu Prov)	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	7 kecamatan	7 KEcamatan	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Persentase taman terpelihara	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami	1,3 Km	1,3 Km	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

B.6.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Dilihat dari jumlah anggaran kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 253.141.000,- realisasi mencapai Rp. 74.800.000,- (29,55%) dan dilihat dari belum optimalnya realisasi fisik kegiatan dengan realisasi 84,42% dari target 100% disebabkan oleh: 1) efisiensi anggaran paket diklat, 2) Jabatan fungsional lingkungan hidup masih memerlukan kajian lebih lanjut di internal dinas sehingga draft perwal belum disusun



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- b) Dilihat dari jumlah anggaran kegiatan Pengendalian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 6.903.409.000,- realisasi mencapai Rp. 5.311.610.662,- (76,94%) dan dilihat dari belum optimalnya realisasi fisik kegiatan dengan realisasi 97,17% dari target 100% disebabkan oleh: 1) efisiensi dari proses pengadaan, 2) tidak terserapnya anggaran di SPPD luar daerah akibat keterbatasan undangan, 3) adanya efisiensi dari gaji Non PNS.
- c) Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengolahan sampah.

2. Solusi

- a) meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi rutin terkait perencanaan dan penganggaran serta realisasi dan jadwal pelaksanaan sehingga optimalisasi pelaksanaan pekerjaan tercapai
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan reduksi timbulan sampah dengan pola 3 R
- c) Membuat perencanaan Diklat/Pengembangan SDM dengan koordinasi atau informasi dengan BKPP dan lembaga/penyelenggara lainnya.

B.7. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.7.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

B.7.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan,

B.7.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.871.655.800 ,00	4.787.890.880 ,00	98,28%
Pelayanan Pencatatan Kelahiran	612.620.000,00	608.415.000,00	99,31%
Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	204.457.000,00	189.984.000,00	92,92%
Penataan Arsip Dokumen Catatan Sipil	632.972.700,00	626.822.700,00	99,03%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3.127.865.800,00	3.070.043.880,00	98,15%
Pelayanan Pencatatan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	60.528.900,00	60.526.900,00	100,00 %
Pengolahan Dalam Penyusunan Informasi Kependudukan	104.281.400,00	103.668.400,00	99,41%
Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan	78.030.000,00	78.030.000,00	100,00 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Inovasi Pelayanan	50.900.000,00	50.400.000,00	99,02%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Penerbitan KK	74,26%	81,64%	110%	Disdukcapi	TMT
Cakupan penerbitan KTP	73,15%	75,03%	103%	Disdukcapi	TMT
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	80,43%	82,48%	103%	Disdukcapi	TMT
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	42,19%	55,20%	131%	Disdukcapi	TMT
Rasio Pasangan Berakta Perkawinan	53,93%	55,79%	103%	Disdukcapi	TMT
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan	17,33%	17,33%	100%	Disdukcapi	TST
Jumlah Data dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1220802	1341844	110%	Disdukcapi	TMT

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.7.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Masih adanya Penduduk Kota Tangerang Selatan yang belum memahami tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2. Solusi

Melaksanakan sosialisasi dan pelayanan keliling pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

B.8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penyelenggara Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPMPPPAKB). Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.8.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

B.8.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengendalian Penduduk,

B.8.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengendalian Penduduk.	568.985.000,00	567.686.700,00	99,77%
Operasi Yustisi dan Bina Kependudukan	257.151.300,00	257.151.300,00	100,00%
Pendataan Kependudukan	311.833.700,00	310.535.400,00	99,58%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pengendalian Urbanisasi Penduduk	500	500	100%	Disdukcapil	TMT

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.8.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Perlu diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk WNA hasil pendataan terdata 586 WNA yang terdata di Kota Tangerang Selatan, dari data tersebut menunjukan masih ada beberapa WNA yang belum mempunyai dokumen administrasi kependudukan

2. Solusi

Melaksanakan sosialisasi kepada WNA tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan.

B.8.2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

B.8.2.1. Program dan Kegiatan

1. Program Keluarga Berencana

B.8.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Keluarga Berencana	4.001.400.000	3.696.366.400	92,38%
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	642.000.000	502.516.100	78,27%
Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi)	887.330.000	840.728.100	94,75%
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	317.000.000	308.667.500	97,37%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	1.607.770.000	1.513.102.700	94,11%
Pembinaan Generasi Berencana	245.500.000	242.250.000	98,68%
Pengumpulan Data dan Sosialisasi Data Mikro Keluarga	301.800.000	289.102.000	95,79%

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Proporsi Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 Tahun	2,20%	2,20%	100%	DPMPPPAKB	TST
Menurunnya Unmet Need	6,50%	6,50%	100%	DPMPPPAKB	TST
Meningkatnya Kesertaan ber- KB	70,50%	74,60%	106%	DPMPPPAKB	TMT
Meningkatnya Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Ber-KB	89,50%	90,98%	102%	DPMPPPAKB	TMT
Meningkatnya Produk Unggulan UPPKS	60,00%	61,00%	102%	DPMPPPAKB	TMT

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.8.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Berlum meratanya tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan kader Keluarga Berencana.

2. Solusi

Optimalisasi pembinaan kader KB melalui orientasi dan pelatihan Program Keluarga Berencana.

B.9. PERHUBUNGAN

Penyelenggara Urusan Perhubungan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.9.1. Dinas Perhubungan

B.9.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan pelayanan angkutan
2. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3. Program Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

4. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

5. Program Peningkatan Transportasi Massal

B.9.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Pengembangan pelayanan angkutan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pelayanan angkutan	1.088.573.000	1.060.969.000	97,46%
Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	717.618.000,00	702.356.000,00	97,87%
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	226.823.000,00	221.973.000,00	97,86%
Perencanaan Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas	144.132.000,00	136.640.000,00	94,80%

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah uji kir	35.500 unit	34.732 unit	98%	Dinas Perhubungan	TT

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

2. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	8.548.989.000	8.490.014.000	99,31%
Bimbingan Keselamatan Jalan	360.168.000,00	352.368.000,00	97,83%
Inventarisasi Data Kecelakaan	100.267.000,00	86.916.000,00	86,68%
Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas	7.032.530.000,00	6.999.656.000,00	99,53%
Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari-hari Tertentu	656.024.000,00	652.024.000,00	99,39%
Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas	350.000.000,00	349.150.000,00	99,76%
Peningkatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80%

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai untuk Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas berhasil mencapai target sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas	40	40	100%	Dinas Perhubungan	TST

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

3. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan	490.000.000	485.174.000	99,02%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	220.000.000,00	218.425.000,00	99,28%
Rehabilitasi / Pemeliharaan perlengkapan Lalu Lintas	50.000.000,00	49.928.000,00	99,86%
Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL	150.000.000,00	146.954.000,00	97,97%
Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS	20.000.000,00	19.877.000,00	99,39%
Monitoring Evaluasi Pelaporan Fasilitas LLAJ	50.000.000,00	49.990.000,00	99,98%

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi	77%	77%	100%	Dinas Perhubungan	TMT

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

4. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3.577.566.500	3.462.403.300	96,78%
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	202.500.000,00	197.785.000,00	97,67%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Lalu Lintas	320.000.000,00	285.279.800,00	89,15%
Zona Selamat Sekolah	268.125.000,00	260.425.000,00	97,13%
Pengadaan dan pemasangan Rambu-rambu lalu Lintas	270.000.000,00	268.245.000,00	99,35%
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Lalu Lintas	130.000.000,00	129.210.000,00	99,39%
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	374.000.000,00	372.770.000,00	99,67%
pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)	1.529.963.500,00	1.529.343.500,00	99,96%
Perencanaan dan Pengembangan Perparkiran dan Terminal	305.660.000,00	245.570.000,00	80,34%
Pelayanan Perparkiran dan Terminal	100.000.000,00	99.217.000,00	99,22%
Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas	50.000.000,00	47.240.000,00	94,48%
Monitoring Evaluasi Pelaporan Perparkiran dan Terminal	27.318.000,00	27.318.000,00	100,00 %

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas	33%	33%	100%	Dinas Perhubungan	TST

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

5. Pengembangan Transportasi Massal Program Penataan Administrasi Kependudukan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Transportasi Massal Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.248.534.000	1.216.045.500	97,40%
Perencanaan dan Pengembangan Transportasi	551.835.000,00	550.358.500,00	99,73%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan	191.530.000,00	176.423.000,00	92,11%
Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Angkutan	505.169.000,00	489.264.000,00	96,85%

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan sarana prasarana transportasi massal	45%	45%	100%	Dinas Perhubungan	TST

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

B.9.1.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dari uraian diatas, dapat terlihat kegiatan yang pencapaian realisasi keuangannya kurang dari 100% dan realisasi fisiknya kurang dari 98% adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pelayanan Angkutan target jumlah uji kir tahun 2017 sebanyak 35.500 unit kendaraan realisasi 34.732 unit kendaraan (98%). Dalam hal ini tidak mencapai target 100% dikarenakan :
 - a. Banyak perusahaan taksi konvensional yang pailit karena berkembangnya angkutan berbasis online, sehingga berdampak pada bangkrutnya/tutupnya usaha taksi konvensional dan tidak lagi melaksanakan uji kir kendaraannya.
 - b. Adanya beberapa perusahaan yang tidak melapor ke unit PKB ketika kendaraan tersebut dilelang, rubah status, dijual /berpindah kepemilikan ke alamat daerah lain.
2. Kegiatan Inventarisasi Data Kecelakaan, jumlah anggaran sebesar Rp. 100.267.000,- realisasi mencapai Rp. 86.916.000,- atau (86,68%) dan capaian realisasi fisik sebesar 85,66%. Hal ini dikarenakan pada sub kegiatan terdatanya dan tertanganinya kecelakaan lalu lintas di kota Tangerang selatan dilakukan efisiensi pelaksanaan rapat yang semula per triwulan menjadi per semester, sehingga terjadi silpa efisiensi belanja barang jasa makan minum dan narasumber sebesar Rp. 13.351.000,-.
3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.675.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 46.595.000,- atau (65,93) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. pada sub kegiatan forum lalu lintas dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 34.615.200,-.
4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 191.530.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 176.423.000,- atau (92,11%) dan capaian realisasi fisik sebesar 98,03%. Dalam hal ini tidak mencapai realisasi 100% dikarenakan pada sub kegiatan pembangunan halte tidak dapat dilaksanakan (0%) dikarenakan terdapat duplikasi output pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan yang dapat mengakomodir output lebih banyak dari sub kegiatan pembangunan halte pada Dinas Perhubungan yaitu 14 halte. Sehingga sesuai hasil kesepakatan bersama anggaran pembangunan halte pada sub kegiatan pembangunan halte Dinas Perhubungan dialihkan pada APBD-P 2017.

Solusi

1. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi target uji kir yang belum tercapai antara lain :
 - Melakukan pendataan kendaraan bermotor wajib uji dan kendaraan non aktif;
 - Melakukan operasi penertiban terhadap angkutan umum/kota yang belum melakukan uji keur berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan evaluasi penentuan target kegiatan uji kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan wajib uji yang ada di Kota Tangerang Selatan.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

2. Upaya yang dilakukan kedepan dalam mengatasi permasalahan poin 2 s.d 6 adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses awal perencanaan kegiatan diantaranya :
- Melakukan survey HPS terlebih dahulu dalam merencanakan anggaran suatu pekerjaan, sehingga meminimalisir terjadinya belanja barang/jasa yang terlalu besar;
 - Membuat dan mengkaji ulang ROK dan KAK/TOR pada setiap kegiatan.

B.9.2. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

B.9.2.1. Program dan Kegiatan

1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

B.9.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	40.020.150.000	37.642.751.000	94,06
Pembangunan Terminal Pondok Cabe	40.020.150.000	37.642.751.000	94,06

Sumber : Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase bangunan terminal selesai dibangun	100%	100%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT

Sumber : Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

B.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggara Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan seluruh OPD.

B.10.1. Dinas Komunikasi dan Informatika

B.10.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa,
2. Pengembangan Teknologi dan Informasi,

B.10.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa,



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	7.929.730.000	7.351.499.000	92,71%
Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan dan Pelayanan Publik	482.130.000	335.529.500	69,59%
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	6.307.260.000	5.998.872.500	95,11%
Pendokumentasian Pimpinan Daerah	1.140.340.000	1.017.097.000	89,19%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST
Persentase Penyebaran Informasi	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2018

2. Pengembangan Teknologi dan Informasi

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Teknologi dan Informasi	23.380.232.350	16.885.334.333	72,22%
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	1.859.537.350	1.780.841.850	95,77%
Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Teknologi dan Informasi	18.180.277.050	12.576.295.317	69,18%
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	473.700.000	65.866.600	13,90%
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	2.509.812.950	2.113.280.566	84,20%
Pembinaan Layanan Publik Secara Elektronik	356.905.000	349.050.000	97,80%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi	20%	15%	79%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TT
Peningkatan Tata Kelola Teknologi dan Informasi	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST
Peningkatan SDM Teknologi dan Informasi	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2018



B.10.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Kegiatan pembangunan data center belum dapat dilaksanakan karena tidak ada penyedia yang memenuhi spesifikasi sehingga kegiatan tersebut akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

2. Solusi

- a) Kegiatan pembangunan data center akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

B.11. KOPERASI DAN UMKM

Penyelenggara Urusan Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.11.1. Dinas Koperasi dan UMKM

B.11.1.1. Program dan Kegiatan

- 1. Pengembangan Koperasi**
- 2. Pengembangan UMKM**
- 3. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan,** program ini diarahkan pada Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi

B.11.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Koperasi

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Koperasi	4.226.449.000	3.990.416.400	94,42%
Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi	235.850.000	165.254.000	70,07%
Peningkatan Fasilitas Koperasi	956.004.000	890.014.000	93,10
Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi	1.903.455.000	1.827.741.000	96,02
Peningkatan dan Penilaian Mutu Koperasi	1.131.140.000	1.107.407.400	97,90

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah SDM Koperasi yang dibina	1695 SDM Koperasi	1750 SDM Koperasi	103%	Dinas Koperasi dan UKM	TMT
Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP	210	210	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	420	434	103%	Dinas Koperasi dan UKM	TMT
Jumlah koperasi yang terfasilitasi	50	29	58%	Dinas Koperasi dan UKM	TT

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018

2. Pengembangan UMKM

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan UMKM	10.883.466.500	9.595.825.400	88,17%
Fasilitasi Pengembangan Produk UMKM	432.526.000	362.054.000	83,71
Fasilitasi Pembiayaan UMKM	380.650.000	365.623.500	96,05
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1.093.220.000	1.071.046.000	97,97
Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi UMKM	100.000.000	100.000.000	100,00
Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	2.800.000.000	2.741.474.400	97,91
Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	2.219.370.000	1.732.180.000	78,05
Peningkatan Peluang Wirausaha Mikro Kecil Menengah	1.750.000.000	1.721.990.900	98,40
Pengolahan Data dan Informasi	657.700.500	566.922.500	86,20
Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	850.000.000	359.244.100	42,26
Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	600.000.000	575.290.000	95,88

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM	200	200	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	400	400	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Pembinaan wirausaha UMKM dan Calon Wirausaha UMKM	1390	1390	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	7	7	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	371	371	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Pengawasan, Pengembangan Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi	3	3	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

3. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	375.000.000	351.478.500	93,73
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	375.000.000	351.478.500	93,73

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1 lokasi	1 lokasi	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018

B.11.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Masih banyak koperasi yang belum menerapkan regulasi koperasi dalam pengelolaan kelembagaan dan usahanya
- Pengurus dan Pengawas Koperasi sebagian besar belum memiliki kemampuan dalam mengelola Koperasi
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengimplementasikan bimbingan teknis dan workshop yang diberikan
- UMKM belum mampu mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengembangan usahanya

2. Solusi

- Perlunya pengawasan dan pendampingan terus menerus kepada koperasi. Sosialisasi dan pelatihan manajemen perkoperasian masih perlu terus menerus dilakukan.
- Merubah metode bimtek dan workshop melalui on the job training dan pendampingan. pemanfaatan teknologi informasi harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas produk dan peningkatan akses pasar bagi UMKM

B.12. PENANAMAN MODAL DAERAH

Penyelenggara Urusan Penanaman Modal Daerah di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

B.12.1.1. Program dan Kegiatan

- Pengembangan investasi
- Pengembangan Pelayanan Perijinan



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

B.12.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Pengembangan investasi

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan investasi	3.409.250.000	3.057.807.469	89,69%
Peningkatan Jalur Kerjasama dan Promosi Potensi Investasi daerah	2.672.780.000	2.477.751.469	92,70%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	197.336.000	165.420.000	83,83%
Pengembangan Penanaman Modal	539.134.000	414.636.000	76,91%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN	37 PMA & 12 PMDN	60 PMA & 20 PMDN	163%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TMT

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. Pengembangan Pelayanan Perijinan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Pelayanan Perijinan	4.987.815.500	4.570.563.112	91,63%
Penyusunan / Penyempurnaan Regulasi Perizinan	822.580.000	806.321.000	98,02%
Sosialisasi dan Publikasi Perizinan	355.735.000	342.069.000	96,16%
Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan	145.270.000	145.120.070	99,90%
Penyusunan Standar Layanan Perijinan	558.950.000	498.441.400	89,17%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Penanaman Modal	70.500.000	58.736.500	83,31%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan	344.551.400	284.192.000	82,48%
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pembangunan	282.000.000	259.000.000	91,84%
Fasilitasi Penetapan Bidang Pembangunan	220.000.000	219.163.000	99,62%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi	289.278.000	259.089.796	89,56%
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	115.000.000	115.000.000	100,00 %
Fasilitasi Penetapan Bidang Ekonomi	200.000.000	197.909.500	98,95%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Kesra	271.530.000	240.385.996	88,53%
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesra	187.186.500	51.705.500	27,62%
Fasilitasi Penetapan Bidang Kesra	64.316.200	64.219.700	99,85%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ketenagakerjaan	200.000.000	198.045.000	99,02%
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ketenagakerjaan	190.000.000	186.400.000	98,11%
Fasilitasi Penetapan Bidang Ketenagakerjaan	169.570.000	169.332.500	99,86%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Sosial Budaya	168.140.000	165.440.000	98,39%
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya	172.810.000	149.710.000	86,63%
Fasilitasi Penetapan Bidang Sosial Budaya	160.398.400	160.282.150	99,93%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 201



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap	40 Jenis Ijin	137 Jenis Ijin	343%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TMT
Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO	22 Jenis Ijin	137 Jenis Ijin	623%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TMT

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.12.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum adanya tenaga ahli yang bersertifikasi sehingga menghambat pada kegiatan Pengendalian Penanaman Modal.
- Masih diperlukannya identifikasi potensi dan promosi investasi yang lebih mengarah pada upaya percepatan peningkatan investasi di Kota Tangerang Selatan.

2. Solusi

- Peningkatan koordinasi dengan BKPM Pusat
- Kajian potensi investasi dan inovasi bentuk dan pola promosi yang lebih efektif dan efisien

B.13. KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA

Penyelenggara Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.13.1. Dinas Pemuda dan Olahraga

B.13.1.1. Program dan Kegiatan

- Program Pengembangan peran serta kepemudaan
- Program Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- Program Pengembangan manajemen dan pemasyarakatan olahraga
- Program Pengembangan sarana dan prasarana olahraga

B.13.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

1. Program Pengembangan peran serta kepemudaan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan peran serta kepemudaan	2.939.897.000	2.872.917.000	97,72%
Pembinaan SDP, IMTAQ dan Pengembangan IPTEK Bagi Pemuda	253.340.000	252.040.000	99,49%
Pengembangan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	310.382.000	260.082.000	83,79%
Lomba Kreasi dan Pameran Prestasi Pemuda	145.315.000	144.315.000	99,31%
Penyusunan Pola Kemitraan dan Pendidikan Serta Pelatihan Dasar Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	385.950.000	383.200.000	99,29%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	1.844.910.000	1.833.280.000	99,37%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

a)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan	20 OKP	20 OKP	100%	Dispora	TST

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

2. Program Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	357.850.000	355.990.000	99,48%
Perumusan kebijakan kewirausahaan dan Pelatihan bagi pemuda	357.850.000	355.990.000	99,48%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Calon Wirausaha Muda	7	7 Kelompok Calon Wirausaha	100%	Dispora	TST

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

3. Program Pengembangan manajemen dan pemasyarakatan olahraga

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan manajemen dan pemasyarakatan olahraga	2.753.289.000	2.726.307.000	99,02 %
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga	572.890.000	571.750.000	99,80 %
Pengembangan dan Peningkatan Kesegaran Jasmani, Olahraga Rekreasi dan Layanan Khusus	820.243.000	802.243.000	97,81 %
Pembinaan dan Pemassalan Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	757.134.000	757.134.000	100,00 %
Pembinaan, Peningkatan, Kemitraan dan	228.507.000	224.465.000	98,23 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan manajemen dan masyarakat olahraga	2.753.289.000	2.726.307.000	99,02 %
Penghargaan Bagi Insan dan Industri Olahraga			%
Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Daerah	374.515.000	370.715.000	98,99 %

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pembinaan Manajemen dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat	10 Cabor	18 Cabor	180%	Dispora	TMT

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

4. Program Pengembangan sarana dan prasarana olahraga

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	2.107.808.800	2.061.647.400	97,81%
Peningkatan dan Pengembangan Sarpras Olahraga Berbasis IPTEK	1.951.758.800	1.910.547.400	97,89%
Pengembangan dan Pengkajian Standarisasi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	156.050.000	151.100.000	96,83%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga	15	16	107%	Dispora	TMT
Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga	10	10	100%	Dispora	TST

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

B.13.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Sarana prasarana yang ditingkatkan belum sesuai dengan standar sarana prasarana olahraga yang dikeluarkan oleh Kemenpora (Lampiran II Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2016).
- Pada Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Daerah, target pendampingan kejurmas tidak tercapai dikarenakan kurangnya data event kejurmas
- Belum terfokusnya peningkatan sarana prasarana olahraga di Kota Tangsel.

2. Solusi

- Memfokuskan 1 sarana prasarana untuk ditingkatkan dengan memberikan anggaran secara maksimal.
- Melakukan koordinasi dan pendataan kembali dengan cabang olahraga.



B.14. STATISTIK

Penyelenggara Urusan Statistik di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika.

B.14.1. Badan Perencanaan Pembangunan

B.14.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan data dan informasi

B.14.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan data dan informasi

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan data dan informasi	108,785,450.00	104,306,250.00	95.88%
Penyusunan dan pengembangan data dan Informasi	108,785,450.00	104,306,250.00	95.88%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan	4 dokumen	4 dokumen	100%	Bappeda	TST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika., Tahun 2018

B.14.2. Dinas Komunikasi dan Informatika

B.14.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan data dan informasi

B.14.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan data dan informasi

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan data dan informasi	400.000.000.00	400.000.000.00	100%
Pengumpulan, kompilasi, penyusunan dan diseminasi data dan statistik daerah	400.000.000.00	400.000.000.00	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika., Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan data dan informasi SKPD	100%	100%	100%	Diskominfo	TST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika., Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

B.15. PERSANDIAN

Penyelenggara Urusan Persandian di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.15.1. Dinas Komunikasi dan Informatika

B.15.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Optimalisasi Sistem Persandian

B.15.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Optimalisasi Sistem Persandian

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Optimalisasi Sistem Persandian	300.000.000	280.821.500	93,61%
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	300.000.000	280.821.500	93,61%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST
Cakupan Penyiapan, Pemanfaatan dan Pengembangan SDM Sandi, Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, tahun 2018

B.16. KEBUDAYAAN

Penyelenggara Urusan Kebudayaan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.16.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B.16.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan kebudayaan

B.16.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Nilai Budaya	1.342.110.000	1.206.697.840	89,91%
Pelestarian dan Kuantitas Cagar Budaya	364.000.000	297.856.000	81,83%
Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal	415.800.000	360.540.000	86,71%
Penyelenggaraan Pekan Seni/Budaya	562.310.000	548.301.840	97,51%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jenis Budaya Yang Dilestarikan	4	4	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TST

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

B.16.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Kurangnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap Seni Budaya Dalam Daerah/ Budaya Tradisional sehingga sulit untuk menelurkan generasi penerus khususnya terhadap seni tradisi.

2. Solusi

Peningkatan penyelenggaraan gelar seni dengan melibatkan generasi muda.

B.17. PERPUSTAKAAN

Penyelenggara Urusan Perpustakaan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.17.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

B.17.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan budaya baca

B.17.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan budaya baca

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan budaya baca	1.482.915.250,00	1.444.746.250,00	95,86%
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca	315.823.200,00	302.763.200,00	95,86%
Pembinaan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat	242.851.000,00	242.753.000,00	99,96%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Penyediaan Bahan Pustaka	577.513.100,00	576.013.100,00	99,74%
Peningkatan layanan perpustakaan	195.738.000,00	179.002.600,00	91,45%
Pengolahan Bahan Pustaka	150.989.950,00	144.214.350,00	95,51%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	796.000 orang	831.000 orang	104%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	TMT
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	12.000 buku	12.311 buku	103%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	TMT

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2018

B.17.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum memadainya perlengkapan penunjang seperti jaringan khusus *e-library* termasuk gedung sebagai prasarana utamanya, maka pembuatan *e-Library* tidak dapat dilaksanakan.
- Tidak adanya aplikasi *e-library*, maka pengadaan *e-Book* tidak dapat dilaksanakan

2. Solusi

- Mengoptimalkan jaringan khusus E-library termasuk gedung sebagai prasarana utama.
- Membuat aplikasi *e-library*.

B.18. KEARSIPAN

Penyelenggara Urusan Kearsipan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.18.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

B.18.1.1. Program dan Kegiatan

- Program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan

B.18.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	1.795.972.800,00	1.627.483.550,00	96,66%
Pengadaan sarana penyimpanan	186.705.000,00	186.705.000,00	100,00%
Pembinaan Kearsipan	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan	410.222.200,00	396.528.100,00	96,66%
Pembangunan Sistim Keamanan Penyimpanan Data	150.181.400,00	148.481.000,00	98,87%
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	80.140.000,00	76.260.000,00	95,16%
Akuisisi Arsip/Dokumen Daerah	275.000.000,00	212.776.000,00	77,37%
Penduplikatan Dokumen/ Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	-	-	
Penelusuran Arsip	44.871.800,00	35.701.800,00	79,56%
Pelayanan Kearsipan	62.900.000,00	55.280.000,00	87,89%
Sistem Pelayanan Informasi, Multimedia dan Otomasi	569.452.400,00	499.251.650,00	87,67%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tertatanya arsip seluruh perangkat daerah dan unit kerja	0,25	0,2063	83%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	TT

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2018

b. RINGKASAN URUSAN PILIHAN

1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

- 1) SEKRETARIAT DAERAH;**
- 2) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;**
- 3) DINAS PARIWISATA;**
- 4) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;**
- 5) DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG;**

B.1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggara Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.1.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

B.1.1.1. Program dan Kegiatan

- 1. Program Pengembangan Perikanan,**



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

B.1.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Perikanan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	
Program Pengembangan Perikanan	2.049.358.300	1.954.499.500	95,37%
Pengembangan bibit ikan unggul	406.147.000	393.203.400	96,81%
Pembinaan dan pengembangan perikanan	409.095.000	400.402.500	97,88%
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan	538.688.000	504.051.000	93,57%
Promosi hasil produksi perikanan unggulan daerah	405.653.100	376.013.400	92,69%
Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan	118.750.000	116.872.000	98,42%
Peningkatan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	62.858.600	55.790.600	88,76%
Pengembangan Teknologi Pengolahan Ikan	108.166.600	108.166.600	100,00%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan	101,50%	101,50%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tahun 2018

B.2. PARIWISATA

Penyelenggara Urusan Pariwisata di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.2.1. Dinas Pariwisata

B.2.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan destinasi pariwisata
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

B.2.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan destinasi pariwisata

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan destinasi pariwisata	8.532.405.500	3.568.498.480	42%
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	2.445.904.500	2.364.434.480	97%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	5.944.301.000	1.061.864.000	18%
Penataan Kualitas Destinasi Wisata	142.200.000	142.200.000	100%

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah PAD dari sektor pariwisata	278.147.684.366	283.122.146.291	102%	Dinas Pariwisata	TMT

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.457.537.000	3.072.481.700	88.86%
Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	2.726.600.000	2.374.030.600	87.07%
Penataan Sistem Usaha Kepariwisata	730.937.000	698.451.100	95.56%

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Kunjungan Wisatawan	327.309	544.206	166%	Dinas Pariwisata	TMT

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	2.514.575.000	2.294.760.000	91.26%
Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	1.976.625.000	1.811.510.000	91.65%
Fasilitasi dan Kemitraan Kelembagaan Pariwisata	537.950.000	483.250.000	89.83%

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	30	143	477%	Dinas Pariwisata	TMT

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.2.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- a. Kurangnya kajian tentang pemasaran sehingga target pasar kurang fokus.
- b. Belum optimalnya Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Tujuan Wisata
- c. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 21,127,036,716.- realisasi mencapai Rp. 15,157,026,235.- (71.74%), dengan demikian terdapat deviasi anggaran sebesar Rp 5,970,010,481.- atau (28.26%). Adanya deviasi ini diakibatkan karena :
 - Kegiatan tetap dilaksanakan tetapi menggunakan dana sponsor sehingga keuangan tidak terserap sebesar Rp 2,730,452,286.- (12.92%).
 - Kegiatan Tangsel Street Parade festival dan Live Report Media Elektronik tidak dilakukan karena keterbatasan waktu, Sehingga terjadi SILPA sebesar Rp 1,750,785,714.- (8.29%).

2. Solusi

- a. Mengoptimalkan Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Tujuan Wisata
- b. Peningkatan koordinasi terkait perencanaan kegiatan baik dari segi anggaran maupun waktu pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal.
- c. Untuk tahun-tahun berikutnya kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan bantuan sponsor, perencanaan penganggarnya harus diperhitungkan dengan cermat untuk menekan SILPA.

B.3. PERTANIAN

Penyelenggara Urusan Pertanian di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.3.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

B.3.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan pertanian,

B.3.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Program Pengembangan pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pertanian,	2.314.832.900	2.188.080.950	94,52%
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	343.083.500	324.758.500	94,66%
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	383.227.000	383.192.000	99,99%
Pameran Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	231.060.000	222.586.000	96,33%
Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pelaku Usaha Pertanian	136.660.000	124.166.000	90,86%
Pengembangan Penanganan Pasca Panen Bidang Peternakan	185.458.500	178.991.000	96,51%
Fasilitasi Kesehatan Hewan	320.360.000	299.195.650	93,39%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani	36.250.000	35.705.000	98,50%
Pengembangan Produksi Peternakan	232.591.900	226.937.300	97,57%
Fasilitasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	446.142.000	392.549.500	87,99%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	101,50%	101,50%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
Presentase Kesehatan Hewan	0,8	0,8	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	78,00%	78,00%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2018

B.3.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke penggunaan nonpertanian seperti pemukiman dan kawasan bisnis.

2. Solusi

Memanfaatkan lahan-lahan pekarangan terutama di kawasan perkotaan untuk budidaya pertanian.

B.4. PERDAGANGAN

Penyelenggara Urusan Perdagangan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2) Sekretariat Daerah dan 3) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.

B.4.1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

B.4.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3. Program Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional

B.4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.206.745.500	1.965.614.379	89,07%
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	250.000.000	220.050.000	88,02%
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	961.600.000	897.164.279	93,30%
Monitoring dan Evaluasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	107.237.500	107.237.500	100,00%
Pendaftaran Wajib Daftar Perusahaan	163.200.000	163.200.000	100,00%
Fasilitasi Penyediaan Bahan Pokok	124.708.000	124.708.000	100,00%
Uji Petik dan Pendampingan Tera/Tera Ulang UTTP	300.000.000	156.452.000	52,15%
Sosialisasi Daerah Tertib Ukur	300.000.000	296.802.600	98,93%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

Indikator Jumlah UTTP yang diawasi, dari target sebesar 8500 UTTP, pada tahun 2017 terrealisasi sekitar 5814 UTTP atau baru 68%. Belum terpenuhinya target terkendala pencairan sehingga kegiatan selama Triwulan II tidak terlaksana.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase Pengawasan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST
Stabilitas harga kebutuhan pokok	9 Komoditas	9 Komoditas	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST
Peningkatan Kesadaran Perijinan Perdagangan	40	100	250%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TMT
Jumlah UTTP yang diawasi	8500	5814	68%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TT

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

Keterangan :

TST : Tercapai Sesuai Target
TMT : Tercapai Melebihi Target
TT : Tidak Tercapai

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3.213.854.100	3.085.903.500	96,02%
Pengembangan Potensi Produk Ekspor	534.954.100	519.522.600	97,12%
Promosi dan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah untuk Mengikuti Pameran Dalam dan Luar Negeri	2.678.900.000	2.566.380.900	95,80%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah produk yang dipasarkan	2	24	1200%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TMT

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

3. Program Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional	4.643.036.700	3.942.126.000	84,90%
Operasional UPT Pasar	1.252.566.700	1.192.464.000	95,20%
Pengembangan Pasar Diatribusi Barang/Produk	3.390.470.000	2.749.662.000	81,10%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah kawasan perdagangan tradisional yang dikelola	5	5	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

B.4.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Pelaku usaha yang mempunyai Kontrak dagang dengan eksportir masih sedikit, Kecilnya pelaku usaha dalam menggunakan bank devisa dalam bertransaksi, sehingga keberadaan Kontrak dagang dengan eksportir pun menjadi sedikit.
- Masih sedikitnya pelaku usaha yang belum memiliki sistim perencanaan secara formal dalam kegiatan ekspor.

2. Solusi

- Meningkatkan sistim perencanaan secara formal dalam kegiatan ekspor
- Meningkatkan motivasi menjadi eksportir langsung.
- Menghasilkan produk yang sesuai dengan standar Negara tujuan ekspor.

B.4.2. Sekretariat Daerah

B.4.3.1. Program dan Kegiatan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

B.4.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.310.000.000,00	1.220.567.700,00	93,17%
Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	1.310.000.000,00	1.220.567.700,00	93,17%

Sumber : Sekretariat Daerah, tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Rapat Koordinasi TPID dan Jumlah pendataan/pencacahan Indeks harga Konsumen	4	4	100%	Setda	TST

Sumber : Sekretariat Daerah, tahun 2018



B.5. PERINDUSTRIAN

Penyelenggara Urusan Perindustrian di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.5.1. Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

B.5.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Industri

B.5.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Industri

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Industri	2.310.054.600	1.906.428.600	82,53%
Pengendalian dan Pelaporan Industri	84.547.000	81.047.000	95,86%
Perencanaan Pengembangan Wilayah Industri	385.350.000	379.758.000	98,55%
Pelatihan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	312.819.100	311.469.100	99,57%
Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.047.250.000	731.536.000	69,85%
Pelatihan dan Pengembangan Industri Kreatif	327.767.500	255.097.500	77,83%
Fasilitasi Dan Pengembangan Industri Kreatif	152.321.000	147.521.000	96,85%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan binaan kelompok industri	50	50	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST
Cakupan binaan kelompok industri kreatif	20	20	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST
Jumlah pelaporan informasi industri	2	2	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

B.5.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Masih terbatasnya kemampuan keahlian para pengelola IKM
- Belum optimalnya pemasaran produk IKM
- Masih terbatasnya mesin produksi IKM, atau belum memiliki keunggulan teknologi /mesin produksi untuk mengembangkan produksinya,
- Belum optimalnya investasi di sektor industri kecil dan menengah.
- Pelaku usaha yang mempunyai Kontrak dagang dengan eksportir masih sedikit, Kecilnya pelaku usaha dalam menggunakan bank devisa dalam bertransaksi, sehingga keberadaan Kontrak dagang dengan eksportir pun menjadi sedikit.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

- f. Masih sedikitnya pelaku usaha yang belum memiliki sistim perencanaan secara formal dalam kegiatan ekspor

2. Solusi

- a. Mengoptimalkan perluasan pasar baik pasar dalam negeri ataupun luar negeri.
- b. Meningkatkan penggunaan mesin peralatan produksi dengan cara menambah modal investasi untuk mesin-mesin yang memiliki keunggulan teknologi
- c. Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk meningkatkan investasi.
- d. Meningkatkan produk yang berorientasi pada pasar ekspor
- e. Meningkatkan sistim perencanaan secara formal dalam kegiatan ekspor
- f. Meningkatkan motivasi menjadi eksportir langsung.
- g. Menghasilkan produk yang sesuai dengan standar Negara tujuan ekspor.
- h. Menerapkan industri ramah lingkungan, sesuai dengan PERMEN LH No 2 tahun 2014 tentang "Pencantuman Logo Ekolabel".





c. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA.

1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

- 1) SEKRETARIAT DAERAH;
- 2) SEKRETARIAT DPRD;
- 3) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- 4) INSPEKTORAT;
- 5) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- 6) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN;
- 7) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;
- 8) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
- 9) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- 10) BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- 11) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- 12) DINAS KOPERASI DAN UKM;
- 13) DINAS PARIWISATA;
- 14) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP;
- 15) DINAS KETENAGAKERJAAN;
- 16) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- 17) DINAS PEKERJAAN UMUM;
- 18) DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG;
- 19) DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN;
- 20) DINAS PERHUBUNGAN;
- 21) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;



- 22) DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- 23) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;
- 24) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- 25) DINAS KESEHATAN;
- 26) DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- 27) DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH;
- 28) DINAS SOSIAL;
- 29) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA;
- 30) RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN;
- 31) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- 32) KECAMATAN PAMULANG;
- 33) KECAMATAN PONDOK AREN;
- 34) KECAMATAN CIPUTAT;
- 35) KECAMATAN CIPUTAT TIMUR;
- 36) KECAMATAN SERPONG;
- 37) KECAMATAN SERPONG UTARA;
- 38) KECAMATAN SETU;

C.1. PERENCANAAN

Penyelenggara Urusan Perencanaan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Seluruh OPD

C.1.1. Sekretariat Daerah

C.1.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan pemetaan Wilayah
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

C.1.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan pemetaan Wilayah



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pemetaan Wilayah	495.000.000,00	495.000.000,00	82,67%
Fasilitasi Penataan Batas Daerah	370.000.000,00	364.900.000,00	98,62%
Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi	125.000.000,00	44.300.000,00	35,44%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Penegasan Batas Daerah/Kecamatan/Kelurahan	7 kecamatan	7 kecamatan	100%	Setda	TST
Pembakuan Nama Rupabumi	1 dokumen	1 dokumen	100%	Setda	TST

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
perencanaan, pengendalian, evaluasi dan el[oran kinerja program dan kegiatan perencanaan	440.000.000,0	421.000.000,0	95,91

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

C.1.2. Badan Perencanaan Pembangunan

C.1.2.1. Program dan Kegiatan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

C.1.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6.975.768.050	6.468.078.000	92,72%
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	650.000.000	540.360.000	83,13%
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan	170.400.000	162.400.000	95,31%
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum	500.000.000	473.800.000	94,76%
Koordinasi perencanaan dan pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat	838.950.000	728.594.000	86,85%
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur	361.500.000	323.700.000	89,54%
Koordinasi perencanaan dan pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi	268.116.000	246.096.000	91,79%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	500.000.000	492.050.000	98,41%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Rencana Pembangunan Daerah			
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapori Anggaran Sementara	1.081.000.000	948.410.000	87,73%
Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan	1.469.367.500	1.469.367.500	100,00%
Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	457.600.000	450.500.000	98,45%
Penyusunan Analisa Standar Belanja	331.520.000	316.405.950	95,44%
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	347.314.550	316.394.550	91,10%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	5 dokumen	5 dokumen	100%	Bappeda	TST
Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian program RPJMD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Bappeda	TST
Tersedianya dokumen evaluasi capaian SDG's	1 dokumen	1 dokumen	100%	Bappeda	TST
Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian smart city	1 dokumen	1 dokumen	100%	Bappeda	TST

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Tahun 2018

C.2. KEUANGAN

Penyelenggara Urusan Keuangan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan seluruh OPD.

C.2.1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

C.2.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
2. Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

C.2.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	3.592.286.800	2.704.413.399	75,28
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	466.976.000	221.387.000	47,41
Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah	175.595.000	135.205.000	77,00
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.864.215.800	1.559.660.999	83,66
Pengamanan Aset Tanah	828.400.000	641.389.400	77,43
Penyusunan RKBMD/RKPBMD	95.000.000	88.315.000	92,96
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Aset Daerah	162.100.000	58.456.000	36,06

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersusunnya laporan neraca aset sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TST

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.422.049.700	9.214.432.850	88,41
Penyusunan Standar Belanja	280.000.000	272.007.350	97,15
Verifikasi DPPA dan DPA Murni	1.754.340.000	1.300.756.000	74,15
Bimbingan Teknis Penyusunan RKA/DPA	750.000.000	589.179.000	78,56
Fasilitasi Pergeseran Anggaran	385.000.000	384.801.500	99,95
Sumber Pembiayaan Belanja APBD Perubahan Murni	106.692.000	102.341.000	95,92
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	1.616.000.000	1.580.070.000	97,78
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.576.100.000	1.467.150.000	93,09
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/PPKD	255.000.000	244.587.250	95,92
Penyusunan Profil APBD Kota Tangerang Selatan	130.440.000	126.950.000	97,32
Konsolidasi dan Koordinasi Dana Perimbangan	70.000.000	42.793.050	61,13
Konsolidasi dan Koordinasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	42.500.000	23.368.000	54,98
Diseminasi dan Bimbingan Teknis Pelaporan DAK/Bantuan Keuangan	75.000.000	73.500.000	98,00
Penatausahaan Investasi Daerah	246.940.000	225.959.000	91,50
Peny. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	264.781.000	241.366.200	91,16
Peny. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	604.418.200	581.948.200	96,28
Fasilitasi Penyusunan Laporan SAP SKPD	637.070.000	489.045.000	76,76
Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	602.864.800	497.018.800	82,44
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	156.337.000	142.987.000	91,46
Peny. Posisi Kas Daerah, Cash Budget dan SPD	82.266.600	82.266.600	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan Daerah	308.858.100	299.846.900	97,08
Pemeliharaan Aplikasi Gaji dan Penyusunan Perubahan Data Gaji PNS	112.470.000	109.530.000	97,39
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	203.297.000	175.287.000	86,22
Fasilitasi Penyelenggaraan Pergeseran Surat Penyediaan Dana	50.000.000	50.000.000	100,00
Penyelenggaraan Pencocokan Data	81.160.000	81.160.000	100,00



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penerimaan, Pengeluaran dan Kontra Pos APBD			
Penyelenggaraan Pencocokan Data Pajak	30.515.000	30.515.000	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersusunnya dokumen Raperda APBD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TST
Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TST
Tersusunnya laporan pengendalian keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TST

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

C.2.2. Badan Pendapatan Daerah

C.2.2.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
2. Pengembangan pengelolaan keuangan daerah,

C.2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	14.895.511.225,00	14.175.159.584,00	95,16%
Koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah	663.822.125,00	558.398.000,00	84,12%
Penanganan Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	184.902.000,00	184.502.000,00	99,78%
Sosialisasi Penanganan Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	363.583.000,00	363.583.000,00	100,00%
Penatausahaan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB	97.150.200,00	97.150.200,00	100,00%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
dan BPHTB			
Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	1.962.500.000,00	1.895.302.000,00	96,58%
Optimalisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	175.000.000,00	140.392.800,00	80,22%
Penagihan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	338.853.000,00	322.376.500,00	95,14%
Intensifikasi Pajak Daerah dalam Bentuk Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Wilayah 1	618.116.700,00	610.564.500,00	98,78%
Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1.373.000.000,00	1.237.374.600,00	90,12%
Fasilitasi dan Optimalisasi Penerimaan BPHTB	129.048.500,00	129.048.500,00	100,00%
Pelayanan Satu Tempat BPHTB	313.500.000,00	294.908.000,00	94,07%
Sosialisasi dan Publikasi Pengelolaan BPHTB	1.475.746.000,00	1.463.244.200,00	99,15%
Penatausahaan Piutang, Rekonsiliasi dan Pelaporan data PBB	230.358.000,00	227.069.400,00	98,57%
Sosialisasi dan Publikasi Pengelolaan PBB	1.392.000.000,00	1.360.160.000,00	97,71%
Penagihan, Pelayanan Loker dan Mobil Keliling PBB	754.845.300,00	600.415.300,00	79,54%
Pendistribusian SPPT PBB	1.425.500.000,00	1.406.534.000,00	98,67%
Pelayanan Satu Tempat PBB-P2	520.287.000,00	515.496.284,00	99,08%
Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan	131.205.000,00	105.630.000,00	80,51%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	506.364.000,00	498.204.000,00	98,39%
Pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan	62.000.000,00	61.000.000,00	98,39%
Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah	238.650.400,00	233.913.400,00	98,02%
Intensifikasi Pajak Daerah dalam Bentuk Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Wilayah 2	618.116.700,00	610.564.500,00	98,78%
Intensifikasi Pajak Daerah dalam Bentuk Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Wilayah 3	687.541.700,00	678.070.200,00	98,62%
Fasilitasi dan Pengendalian Sarana Sistem Pengelolaan Pajak Daerah	633.421.600,00	581.258.200,00	91,76%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Terealisasinya target pajak daerah	1	1,1559	116%	Badan Pendapatan Daerah	TMT
Pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendalian, pengelolaan keuangan dan pajak daerah	1	1,06	106%	Badan Pendapatan Daerah	TMT

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2018

2. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	231.867.000,00	231.342.000,00	99,77%
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	231.867.000,00	231.342.000,00	100%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersusunnya dokumen Raperda APBD sesuai ketentuan	1	1	100%	Badan Pendapatan Daerah	TST

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2018

C.3. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Penyelenggara Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat Daerah dan seluruh OPD.

C.2.3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

C.2.3.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

C.2.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	2.395.702.700,00	2.357.428.100,00	98,40
Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS	520.100.000,00	507.600.000,00	97,60
Pemberian Layanan Administrasi ASN	614.685.900,00	603.902.000,00	98,25%
Fasilitasi dan Penelitian Pensiun	170.412.500,00	170.412.500,00	100,00%
Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	505.142.000,00	499.338.000,00	98,85%
Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara (ASN)	585.362.300,00	576.175.600,00	98,43%

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase ASN yang terlayani dalam data dan informasi manajemen ASN	1	1	100%	BKPP	TST

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2018

C.2.4. Sekretariat Daerah

C.2.4.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Sistem Manajemen sumber daya aparatur

C.2.4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Sistem Manajemen sumber daya aparatur



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Sistem Manajemen sumber daya aparatur	9.454.294.000,00	8.885.746.826,00	93,99%
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	1.730.102.000,00	1.685.215.400,00	97,41%
Fasilitasi /Workshop/Penyusunan Analisis Manajemen Sdm Aparatur (ASN)	600.000.000,00	572.743.136,00	95,46%
Fasilitasi evaluasi capaian pengembangan sistem manajemen sdm aparatur	82.400.000,00	42.805.300,00	51,95%
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	7.041.792.000,00	6.584.982.990,00	93,51%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersedianya kebijakan tentang penataan SDM/ASN	100%	100%	100%	Setda	TST

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

C.2.4.3. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan:
 - Program/kegiatan fasilitasi/workshop/penyusunan analisis manajemen SDM aparatur ASN realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat efisiensi.
 - Program/kegiatan fasilitasi evaluasi capaian pengembangan sistem manajemen SDM aparatur realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat efisiensi.
- Solusi
 - Penyusunan anggaran yang lebih matang

C.4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penyelenggara Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan.

C.4.1. Badan Perencanaan Pembangunan

C.2.4.1. Program dan Kegiatan

- Program Penelitian dan Pengembangan

C.2.4.2. pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Program Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penelitian dan Pengembangan	2.179.221.950	1.960.166.578	89,95%
Penyelenggaraan Penelitian dan	1.629.221.950	1.486.983.828	91,27%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Pengembangan Daerah			
Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000	238.335.000	79,45%
Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan	250.000.000	234.847.750	93,94%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah kajian penelitian dan pengembangan	5	5	100%	Bappeda	TST
Jumlah koordinasi penelitian dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan	4	4	100%	Bappeda	TST
Terwujudnya pengembangan inovasi daerah	2	2	100%	Bappeda	TST

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Tahun 2018

C.5. SEKRETARIAT DPRD

Penyelenggara Urusan Sekretariat DPRD di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

C.4.2. Sekretariat DPRD

C.2.4.3. Program dan Kegiatan

1. Program Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan,

C.2.4.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan	29.069.164.850	26.062.893.700	89,66%
Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Anggaran	8.073.892.150	7.640.577.000	94,63%
Penyusunan Risalah Pembahasan Anggaran dan Pengawasan	1.103.562.700	722.323.000	65,45
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.990.960.400	5.923.103.000	84,73%
Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan DPRD Kota Tangerang Selatan	2.232.358.000	1.876.983.200	84,08%
Penyusunan Risalah Pembahasan Rancangan Produk Hukum	1.096.733.600	503.916.000	45,95
Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan	9.571.658.000	9.395.991.500	98,16

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
-------------------	--------	-----------	---------	-----	-------



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD	TST
Persentase Fasilitasi Pembahasan Perda / Non Perda	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD	TST
Persentase Fasilitasi Fungsi Pengawasan	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD	TST

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2018

C.2.4.5. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Belum optimalnya pencapaian target penyusunan Risalah Pembahasan Rancangan Produk Hukum disebabkan terdapat efisiensi beberapa kode rekening belanja yang tidak digunakan sehingga mengurangi capaian realisasi Keuangan, hal ini diakibatkan karena penyediaan belanja dimaksud sifatnya antisipatif.
- b) Penyusunan Risalah Pembahasan Rancangan Produk Hukum terealisasi sebesar 65% disebabkan terdapat efisiensi beberapa kode rekening belanja yang tidak digunakan sehingga mengurangi capaian realisasi Keuangan, hal ini diakibatkan karena penyediaan belanja dimaksud sifatnya antisipatif.
- c) Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD terealisasi sebesar 87.61% disebabkan terdapat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD khususnya Bintek yang diselenggarakan oleh Partai Politik.
- d) Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Protokol DPRD dan Sekretariat DPRD sebesar 88.06% disebabkan terdapat efisiensi hari untuk pengadaan surat kabar
- e) Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran sebesar 85.91% disebabkan terdapat beberapa Belanja barang yang tidak jadi dibelanjakan karena tidak tercantum dalam E-catalog, terkait dengan hal tersebut maka kedepan dalam menyusun kebutuhan akan disesuaikan dengan ketersediaan informasi E-Katalog
- f) Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DPRD terealisasi sebesar 84.94% disebabkan terdapat tolok Ukur Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Penyusunan DPA Sekretariat DPRD TA. 2018 dikarenakan Pembahasan Anggaran 2018 dengan DPRD waktunya sudah terlalu Sempit menjelang Akhir bulan November, terkait dengan hal tersebut maka akan menyesuaikan dengan Agenda Badan Anggaran DPRD.

2. Solusi

- 1) Optimalisasi perencanaan secara selektif, sehingga mengurangi resiko capaian realisasi keuangan

C.6. SEKRETARIAT DAERAH

Penyelenggara Urusan Sekretariat Daerah di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh:
1) Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan 2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

C.6.1. Sekretariat Daerah

C.6.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah,



2. Program Kerjasama pembangunan dan kewilayahan
3. Program Penataan peraturan perundang-undangan
4. Program Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
6. Program Manajemen Perubahan

C.6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Penguatan Kelembagaan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 625.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 617.110.777,- (98,74%), deviasi ini karena terdapat beberapa anggaran yang tidak terserap karena adanya efesiensi penawaran dan jumlah pegawai yang ditugaskan perjalanan dinas, adapun kode rekening belanja diantaranya pada :
 1. Belanja makan minuman sub kegiatan Fasilitas Evaluasi/Kajian Penataan Kelembagaan UPTD
 2. Belanja perjalanan dinas Luar daerah
 3. Belanja jasa konsultasi penelitian
 4. Belanja jasa konsultasi software
 5. Belanja penggandaan

Keberhasilan

Keberhasilan di tahun 2017 pada subbagian Kelembagaan diantaranya :

1. Terbangunnya Sistem berbasis Web yakni e-Organisasi dengan alamat e-org-tangerangselatankota.go.id
2. Terbangunnya Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
3. Tersusunnya Kebijakan Daerah dibidang Penataan Kelembagaan UPT 6 (Enam) Rancangan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
4. Tersusunnya Kebijakan Daerah dalam penyempurnaan Kelembagaan Perangkat Daerah 8 (enam) Peraturan Walikota/Rancangan Walikota tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Sekretariat Daerah serta Inspektorat.

Adapun program tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan 6 (enam) subkegiatan dengan keberhasilan diantaranya :

- a. Terbangunnya Sistem berbasis web e-organisasi yang memberikan informasi berbasis online kepada seluruh perangkat daerah, pegawai dan masyarakat luas tentang Produk Hukum yang disusun bagian organisasi, data pejabat, tugas dan fungsi seluruh pejabat Eselon, II, III dan IV se Kota Tangerang Selatan serta link terkait dengan sistem yang dibangun Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur, adapun alamat domain sistem adalah <http://e-org.tangerangselatankota.go.id>



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- b. tersusunnya Dokumen Kajian Penataan Kelembagaan UPT dan Rancangan Kebijakan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- c. Tersusunnya Dokumen Evaluasi RB di Bidang Kelembagaan fokus keberhasilan pada indikator ini adalah Penyempurnaan Perwal SOTK pada Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB
- d. Terbangunya sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berbasis web dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pelaksanaan perencanaan.
- e. Indikator pembahasan penguatan tugas, fungsi dan SOTK perangkat Daerah difokuskan pada pembahasan daftar inventarisasi masalah dan tersusunnya rancangan penyusunan perubahan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah serta Inspektorat.

Permasalahan

1. Tidak dilaksanakannya kegiatan Sub kegiatan Layanan Utama dan Layanan Pendukung berdasarkan Urusan karena sampai dengan Pertengahan Tahun belum ditetapkan regulasi tentang RPP pelaksanaan Urusan oleh Pemerintah Pusat, informasi dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Pembangunan Daerah RPP tentang Pelaksanaan Urusan belum dapat ditetapkan karena masi tahap harmonisasi sehingga kami mengusulkan perubahan/pergeseran sub kegiatan/indikator pada P-APBD Tahun 2017.
2. Belum ditetapkannya Regulasi kelembagaan RSUD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta belum adanya perubahan Regulasi Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Belum tersedianya SDM/Aparatur pada Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidang Teknologi Informatika yang mengelola Sistem yang sudah dibangun.

Solusi

1. Mengusulkan Perubahan dan Penambahan Sub kegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2017;
2. Melalui Kepala Daerah sudah mengusulkan Kepada Kementerian terkait agar adanya percepatan penetapan Regulasi Kelembagaan RSUD, Badan Kesbangpol dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atau Bagian Keuangan dan Perencanaan terkait usulan Penambahan SDM dibidang IT

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penguatan Kelembagaan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah	625.000.000,00	617.110.777,00	98,74%
Fasilitasi/Internalisasi/Workshop/Evaluasi/Sosialisasi/Seminar/Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja	625.000.000,00	617.110.777,00	98,74%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah	1	6	600%	Setda	TMT

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

2. Program Kerjasama pembangunan dan kewilayahan



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Kerjasama pembangunan dan kewilayahan	1.974.656.000,00	1.663.354.537,00	84,24%
Koordinasi Kerjasama Daerah	400.000.000,00	366.080.000,00	91,52%
Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemda dan Instansi Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00%
Fasilitasi Pengembangan Forum Ekonomi Daerah	700.000.000,00	468.042.737,00	66,86%
Fasilitasi Pembinaan BUMD dan BLUD	574.656.000,00	529.231.800,00	92,10%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ekonomi Daerah	4	4	100%	Setda	TST
Jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan BUMD dan BLUD	4	4	100%	Setda	TST
Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	11 kali	41 kali	373%	Bappeda dan Setda	TST

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

3. Program Penataan peraturan perundang-undangan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penataan peraturan perundang-undangan	2.579.000.000,00	2.211.331.500,00	85,74%
Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan Daerah	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00%
Fasilitasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Daerah	420.000.000,00	377.545.000,00	89,89%
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	265.000.000,00	256.807.200,00	96,91%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	95.000.000,00	93.432.100,00	98,35%
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	1.735.000.000,00	1.419.547.200,00	81,82%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Program Pembentukan Peraturan Daerah	12	12	100%	Setda	TST
Terlaksananya Pembahasan RAPERWAL antara SKPD pemrakarsa dengan Tim Asistensi Pembahasan RAPERWAL	36	36	100%	Setda	TST
Harmonisasi dan Sinkronisasi RAKEPWAL	248	248	100%	Setda	TST
Terlaksananya Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	7	3 sosialisasi	43%	Setda	TST
Terlaksananya Fasilitasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1	1 12, 36 Perwal dan 248Kepwal	100%	Setda	TST
Terlaksananya Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan Daerah	1	1 12, 36Perwal dan 248Kepwal	100%	Setda	TST
Terlaksananya program Pemerintah Pusat di Kota Tangerang Selatan	1	Sisialisasi 1, dan Kepwal melalui teknologi	100%	Setda	TST



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

		informasi			
--	--	-----------	--	--	--

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

4. Program Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	992.345.000,00	874.834.400,00	88,16%
Sosialisasi dan Desiminasi RANHAM SKPD Kota Tangerang Selatan	160.000.000,00	151.895.000,00	94,93%
Penanganan Perkara Pemerintah Daerah	832.345.000,00	722.939.400,00	86,86%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Terlaksananya Bimbingan Teknis Hukum Formil Aparatur	120	120	100%	Setda	TST
Terselenggaranya Sosialisasi dan Desiminasi RANHAM SKPD Kota Tangerang Selatan	200	200	100%	Setda	TST
Terselenggaranya penyuluhan Hukum	500	350	70%	Setda	TST
Tertanganinya perkara hukum di lingkungan pemerintahan	15	10 Pembahasan Perkara & 10	100%	Setda	TST
Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum	20	0	0%	Setda	

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	74.187.115.000,00	61.158.668.110,00	82,44%
Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12.697.551.401,00	9.134.101.771,00	71,94%
Koordinasi Internal dan Eksternal Serta Audiensi Dengan Masyarakat	1.450.000.000,00	1.382.284.401,00	95,33%
Fasilitasi Kegiatan Kunjungan/Inspeksi KDH/WKDH	2.500.000.000,00	2.202.824.708,00	88,11%
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	11.807.313.599,00	8.662.174.549,00	73,36%
Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	22.186.860.000,00	18.081.460.101,00	81,50%
Fasilitasi Pelayanan Sarana Aparatur Sekretariat Daerah	17.623.846.000,00	16.679.399.580,00	94,64%
Fasilitasi Pelayanan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah	5.921.544.000,00	5.016.423.000,00	84,71%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100%	100%	100%	Setda	TST
Terlaksananya Koordinasi Internal dan Eksternal Serta Audiensi Dengan Masyarakat	100%	100%	100%	Setda	TST

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

6. Program Manajemen Perubahan



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Manajemen Perubahan	452.600.000,00	412.829.365,00	91,21%
Pembentukan Agen/Internalisasi Manajemen Perubahan	300.000.000,00	292.424.965,00	97,47%
Fasilitasi Evaluasi Capaian Manajemen Perubahan	152.600.000,00	120.404.400,00	78,90%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur (ASN)	0,05	0,05	100%	BKPP dan Setda	TST
Meningkatnya penerapan/internalisasi kode etik dan Kode Prilaku dalam Penguatan Budaya Kerja	20%	20%	100%	BKPP dan Setda	TT

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

C.6.2. Badan Perencanaan Pembangunan daerah

C.6.2.1. Program dan Kegiatan

1. Program Kerjasama pembangunan dan kewilayahan

C.6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Kerjasama pembangunan dan kewilayahan,

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Kerjasama pembangunan dan kewilayahan	1,000,000,000.00	925,100,000.00	92.51%
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembangunan	1,000,000,000.00	925,100,000.00	92.51%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	11 kali	11 kali	100%	Bappeda dan Setda	TST

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahun 2018

C.6.3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

C.6.3.1. Program dan Kegiatan

1. Program Manajemen Perubahan

C.6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Manajemen Perubahan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Manajemen Perubahan	3.123.664.400	2.912.589.700	93,24%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	487.974.100	421.974.100	86,47%
Pengembangan Pola Karir PNS	26.024.600	-	0,00%
Penyusunan Kode Etik PNS	30.000.000	29.999.900	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan	2.579.665.700	2.460.615.700	95,39

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan., tahun 2018

.INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur (ASN)	50%	50%	100%	BKPP dan Setda	TST
Meningkatnya penerapan/internalisasi kode etik dan Kode Prilaku dalam Penguatan Budaya Kerja	20%	10%	50%	BKPP dan Setda	TT

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan., tahun 2018

C.6.3.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Pengambilan Sumpah Jabatan JPT Pratama/ Administrator/Pengawas (Belum Ada Pengangkatan dalam Jabatan JPT Pratama/ Administrator/Pengawas)
- Pengangkatan Sumpah Jabatan JPT Pratama/ Administrator/Pengawas (Belum Ada Pengangkatan dalam Jabatan JPT Pratama/ Administrator/Pengawas)
- Kompetensi Jabatan P2UPD (P2UPD merupakan jabatan fungsional yang kompetensinya dinilai oleh Instansi Pembina yaitu Kementerian Dalam Negeri)
- Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu (Belum ada Pengangkatan dalam JF Tertentu)
- Pengangkatan Jabatan Fungsional tertentu/ Jabatan Pimpinan Tinggi/ Administrator/ Pengawas (Belum ada pengangkatan dalam Jabatan JPT Pratama/ Administrator/ Pengawas)

2. Solusi

- Rencana di Tahun 2018 bagian layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Menyusun FORMASI dan Tetap dianggarkan di Tahun 2018 setelah ada formasi Jabatan Fungsional tertentu PBJ
- Akan mengusulkan melalui e-formasi dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara terkait perekrutan CPNS
- Tetap dianggarkan di Tahun Anggaran 2018, Mengantisipasi terbitnya aturan turunan dari UU ASN

C.7. INSPEKTORAT

Penyelenggara Urusan Inspektorat di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Inspektorat



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

C.7.1. Inspektorat

C.7.3.1. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan

C.7.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	12.938.908.100,00	10.774.126.735	83,27
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	4.433.081.310,00	3.814.017.350	86,04
Inventarisasi Temuan Pengawasan	132.000.000,00	118.650.000	89,89
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	89.500.000,00	35.286.000	39,43
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	1.170.001.500,00	768.743.400	65,70
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.201.029.290,00	942.795.600	78,50
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	251.689.000,00	239.676.000	95,23
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	4.066.896.000,00	3.629.796.901	89,25
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	1.594.711.000,00	1.225.161.484	76,83

Sumber : Inspektorat, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	HASIL
Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	TST
Prosentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90%	90%	100%	TST
Jumlah SKPD yang predikat sakin minimal B	20	23	115%	TMT
Level Implementasi SPIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	2	3	150%	TMT
Level Implementasi SPIP SKPD	Level 3	level 3	100%	TST
Level Implementasi SPIP SKPD (jumlah)	15	20	133%	TMT
Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	100%	TST
Prosentase Pejabat Yang melaporkan LHKPN	100%	100%	100%	TST
Prosentase ASN yang melaporkan LHKASN	50%	50%	100%	TST
Indeks Persepsi Korupsi	2	2	100%	TST

Sumber : Inspektorat, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

C.7.3.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Efisiensi anggaran;
- b. Kurang tenaga Auditor karena terbatasnya kuota diklat yang dilaksanakan oleh BPKP;



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- c. Tidak adanya diklat pengembangan bagi P2UPD oleh Kemendagri;
2. Solusi
 - a. Perencanaan penyusunan anggaran di rencanakan dengan baik;
 - b. Berkoordinasi dengan BPKP tentang kepastian jadwal diklat dan kuotanya
 - c. Berkoordinasi dengan Kemendagri tentang kepastian jadwal diklat dan kuotanya.

C.8. KECAMATAN

Penyelenggara Urusan Kecamatan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Seluruh Kecamatan dan Sekretariat Daerah.

C.8.1. Kecamatan Ciputat

C.8.3.1. Program dan Kegiatan

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
2. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
4. Penataan Administrasi Kependudukan
5. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Pengembangan Data dan Informasi
6. Perencanaan Pembangunan Daerah

C.8.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Urusan Kecamatan			
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	268.000.000,00	267.500.000,00	100%
Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat	128.000.000,00	127.500.000,00	100%
Fasilitasi Pengembangan USaha Kecil Menengah	140.000.000,00	140.000.000,00	100%
Urusan Pemerintahan Umum			
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	3.199.694.500,00	3.127.220.000,00	98%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas RT RW	2.133.000.000,00	2.062.160.000,00	97%
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	311.654.500,00	310.020.000,00	99%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Pemberian Insentif Guru Ngaji, Amil dan Marbot	755.040.000,00	755.040.000,00	100%
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	496.000.000,00	495.859.000,00	100%
Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	496.000.000,00	495.859.000,00	100%
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	76.000.000,00	76.000.000,00	100%
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	76.000.000,00	76.000.000,00	100%
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	95.000.000,00	94.574.000,00	100%
Penyusunan Profile Daerah	95.000.000,00	94.574.000,00	100%
Urusan Perencanaan			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.058.000.000,00	1.031.462.000,00	97%
Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	484.000.000,00	467.400.000,00	97%
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	574.000.000,00	564.062.000,00	98%

Sumber : Kecamatan Ciputat, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	HASIL
Cakupan peran kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	100%	100%	100%	TST
Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ciputat	B	B	100%	TST
Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	TST
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan	17,33%	17,33%	100%	TST
Persentase Peran serta Lembaga/Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	70%	70%	100%	TST
Cakupan data dan informasi Kecamatan Ciputat	100%	100%	100%	TST
Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST

Sumber : Kecamatan Ciputat, Tahun 2018

C.8.3.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas RT, RW dengan anggaran sejumlah Rp. 2.133.000.000,- terealisasi sebesar Rp.2.062.160.000,- (97%), dengan demikian terdapat deviasi anggaran sebesar Rp. 70.840.000,- atau (-3.0%). Adanya deviasi ini karena dari target 649 orang Ketua RT dan RW yang akan dibayarkan, hanya terbayarkan sebanyak 626 orang, dan sisanya sekitar 23 orang ketua RT dan RW tidak menyerahkan Rekening Bank.
- Belum optimalnya realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (tingkat penyerapan kurang dari 100%) disebabkan oleh belanja



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

sewa ruang rapat/pertemuan yang tidak diserap pada saat pelaksanaan kegiatan Musrenbang kecamatan.

- c. Belum optimalnya realisasi anggaran kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran disebabkan dari efisiensi belanja barang/jasa dan belanja modal.

2. Solusi

- a. Peningkatan koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan baik sisi anggaran maupun administrasi
b. Optimalisasi perencanaan pada komposisi kegiatan dan belanja secara lebih terukur.

C.8.2. Kecamatan Ciputat Timur

C.8.2.1. Program dan Kegiatan

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
2. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
4. Penataan Administrasi Kependudukan
5. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan,
6. Pengembangan Data dan Informasi
7. Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Pengembangan Pemetaan Wilayah
9. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur
11. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran

C.8.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Urusan Pemerintahan Umum			
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	2.614.760.000,00	2.497.660.000,00	95,52%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas RT RW	1.758.100.000,00	1.662.830.000,00	93,89%
Pemberian Insentif Guru Ngaji, Amil dan Marbot	856.660.000,00	847.060.000,00	98,88%
Urusan Kecamatan			
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan	840.850.000,00	787.226.400,00	93,62%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Kelurahan			
Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat	650.000.000,00	648.200.000,00	99,72%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	130.850.000,00	101.126.400,00	62,53%
Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	60.000.000,00	57.200.000,00	95,33%
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	223.272.700,00	168.763.200,00	75,59%
Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	223.272.700,00	213.272.700,00	75,59%
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	100.240.000,00	85.240.000,00	85,04%
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	50.240.000,00	35.240.000,00	70,14%
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	579.500.000,00	556.040.000,00	95,95%
Pembinaan dan Pengembangan Kemasyarakatan	579.500.000,00	556.040.000,00	95,95%
Urusan Statistik			
Program Pengembangan Data dan Informasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
Penyusunan Profile Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
Urusan Perencanaan			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.323.240.000,00	871.286.000,00	65,84%
Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	365.000.000,00	299.400.000,00	82,03%
Perencanaan Lingkungan Pemukiman berbasis kewilayahan	397.440.000,00	190.650.000,00	47,97%
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	560.800.000,00	381.236.000,00	67,98%
Program Pengembangan Pemetaan Wilayah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
Fasilitasi Penataan Batas Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
Urusan Keuangan			
Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	143.855.000,00	120.848.500,00	84,01%
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	143.855.000,00	120.848.500,00	84,01%
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	280.000.000,00	278.800.000,00	99,57%
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	280.000.000,00	278.800.000,00	99,57%
Urusan Sekretariat Umum			
Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	7.174.282.300,00	6.630.283.040,00	92,42%
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	7.174.282.300,00	6.725.063.569,00	92,42%

Sumber : Kecamatan Ciputat Timur, Tahun 2018



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	HASIL
Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ciputat Timur	B	B	100%	TST
Cakupan peran kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	100%	100%	100%	TST
Cakupan peran kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	100%	100%	100%	TST
Presentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	TST
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	17.33%	17.33%	100%	TST
Presentase peran serta lembaga/kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	TST
cakupan data dan informasi SKPD	100%	100%	100%	TST
cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Penegasan Batas Daerah/Kecamatan/Kelurahan	100%	100%	100%	TST
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD	100%	100%	100%	TST
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	TST

Sumber : Kecamatan Ciputat Timur, Tahun 2018

C.8.3. Kecamatan Pamulang

C.8.3.1. Program dan Kegiatan

- 1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik**
- 2. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan**
- 3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan**
- 4. Penataan Administrasi Kependudukan**
- 5. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan,**
- 6. Pengembangan Data dan Informasi**
- 7. Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 8. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 9. Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur**
- 10. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran**

C.8.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
URUSAN KECAMATAN			
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	4.205.640.000,00	4.101.573.200,00	97,53%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas RT RW	3.000.000.000,00	2.933.565.000,00	97,79%
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	180.000.000,00	148.822.200,00	82,68%
Pemberian Insentif Guru Ngaji, Amil dan Marbot	1.025.640.000,00	1.019.186.000,00	99,37%
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	970.000.000,00	914.876.600,00	94,32%
Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat	720.000.000,00	703.939.600,00	97,77%
Fasilitasi Pengembangan USaha Kecil Menengah	250.000.000,00	210.937.000,00	84,37%
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	296.750.000,00	261.559.700,00	88,14%
Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	296.750.000,00	261.559.700,00	88,14%
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	100.000.000,00	91.432.000,00	91,43%
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	100.000.000,00	91.432.000,00	91,43%
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	170.000.000,00	142.795.000,00	84,00%
Pembinaan dan Pengembangan Kemasyarakatan	170.000.000,00	142.795.000,00	84,00%
URUSAN STATISTIK			
Program Pengembangan Data dan Informasi	200.000.000,00	162.398.600,00	81,20%
Penyusunan dan pengembangan data dan Informasi	200.000.000,00	162.398.600,00	81,20%
URUSAN PERENCANAAN			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	731.760.000,00	674.957.000,00	92,24%
Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	500.000.000,00	471.092.000,00	94,22%
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	231.760.000,00	203.865.000,00	87,96%
URUSAN KEUANGAN			
Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	91.720.000,00	67.100.000,00	73,16%
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	91.720.000,00	67.100.000,00	73,16%
URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	309.000.000,00	257.903.800,00	83,46%
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	309.000.000,00	257.903.800,00	83,46%
URUSAN SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD			
Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	9.360.770.000,00	8.136.394.844,00	86,92%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	9.360.770.000,00	8.136.394.844,00	86,92%

Sumber : Kecamatan Pamulang, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	HASIL
Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pamulang	B	B	100%	TST
Cakupan peran kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	100%	100%	100%	TST
Presentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	TST
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	100%	100%	100%	TST
Presentase peran serta lembaga/kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	TST
cakupan data dan informasi SKPD	100%	100%	100%	TST
cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD	100%	100%	100%	TST
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	TST

Sumber : Kecamatan Pamulang, Tahun 2018

C.8.4. Kecamatan Serpong

C.8.5.1. Program dan Kegiatan

- 1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik**
- 2. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan**
- 3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan**
- 4. Penataan Administrasi Kependudukan**
- 5. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan,**
- 6. Pengembangan Data dan Informasi**
- 7. Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 8. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 9. Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur**
- 10. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran**



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

C.8.5.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

ROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
URUSAN KECAMATAN			
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	2.467.929.000	2.447.629.000	99,18%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas RT RW	1.674.729.000	1.655.629.000	98,86%
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	161.000.000	161.000.000	100,00%
Pemberian Insentif Guru Ngaji, Amil dan Marbot	632.200.000	631.000.000	99,81%
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	1.528.128.000	1.457.108.000	95,35%
Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat	1.009.083.500	1.009.083.500	100,00%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	519.044.500	448.024.500	86,32%
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	184.968.000	184.968.000	100,00%
Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	184.968.000	184.968.000	100,00%
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	30.000.000	30.000.000	100,00%
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	30.000.000	30.000.000	100,00%
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	1.273.681.000	1.244.621.000	97,72%
Pembinaan dan Pengembangan Kemasyarakatan	1.273.681.000	1.244.621.000	97,72%
URUSAN STATISTIK			
Program Pengembangan Data dan Informasi	263.290.000	263.290.000	100,00%
Penyusunan dan pengembangan data dan Informasi	263.290.000	263.290.000	100,00%
URUSAN PERENCANAAN			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	508.431.000	502.843.000	98,90%
Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	357.080.000	357.080.000	100,00%
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	151.351.000	145.763.000	96,31%
URUSAN KEUANGAN			
Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	84.321.000	84.321.000	100,00%
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	84.321.000	84.321.000	100,00%
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	315.000.000	313.931.250	99,66%
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	315.000.000	313.931.250	99,66%
Urusan Sekretariat Umum			
Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	8.415.572.000	8.002.730.950	95,09%
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa	8.415.572.000	8.002.730.950	95,09%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

ROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Perkantoran			

Sumber : Kecamatan Serpong, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	HASIL
Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Kecamatan Serpong	B	B	100%	TST
Cakupan peran Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	100%	100%	100%	TST
Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	TST
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan	17,33%	17,33%	100%	TST
Persentase Peran serta Lembaga/Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	100%	100%	TST
Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan data dan informasi SKPD	100%	100%	100%	TST
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD	100%	100%	100%	TST
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	TST

Sumber : Kecamatan Serpong, Tahun 2018

C.8.5.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum optimalnya realisasi anggaran kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah disebabkan oleh adanya efisiensi pada belanja barang dan jasa
- Belum optimalnya realisasi anggaran kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kemasyarakatan disebabkan oleh adanya efisiensi pada belanja barang dan jasa
- Belum optimalnya realisasi anggaran kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, disebabkan tidak terserapnya anggaran verifikasi DPA Tahun Anggaran 2018, karena verifikasi dilaksanakan bulan januari tahun 2018.
- Belum optimalnya realisasi anggaran kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran disebabkan oleh adanya efisiensi pada belanja modal, barang dan jasa.

2. Solusi

- Optimalisasi mekanisme perencanaan program dan kegiatan, serta tidak lagi mengganggu kegiatan verifikasi dalam DPA.
- Mengoptimalkan realisasi anggaran pada program dan kegiatan berikutnya.



C.8.5. Kecamatan Serpong Utara

C.8.6.1. Program dan Kegiatan

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
2. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
4. Penataan Administrasi Kependudukan
5. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
6. Pengembangan Data dan Informasi
7. Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur
10. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran

C.8.6.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
URUSAN KECAMATAN			
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	1.459.315.000,00	1.353.344.250,00	92,88%
Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat	1.069.315.000,00	985.337.000,00	92,15%
Fasilitasi Pengembangan USaha Kecil Menengah	390.000.000,00	368.007.250,00	94,87%
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	2.308.320.000,00	2.259.720.000,00	98,18%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas RT RW	1.600.000.000,00	1.561.000.000,00	97,56%
Pemberian Insentif Guru Ngaji, Amil dan Marbot	708.320.000,00	698.720.000,00	99,59%
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	309.000.000,00	290.798.000,00	94,92%
Pengendalian Keamanan Lingkungan	150.000.000,00	141.448.000,00	94,30%
Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	159.000.000,00	149.350.000,00	95,50%
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	883.000.000,00	875.525.000,00	99,15%
Pembinaan dan Pengembangan Kemasyarakatan	883.000.000,00	875.525.000,00	99,15%
Program Pengembangan Data dan Informasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
Penyusunan dan pengembangan data dan Informasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
URUSAN STATISTIK			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	831.827.000,00	781.549.200,00	96,63%
Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	270.000.000,00	248.000.000,00	91,85%
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	561.827.000,00	533.549.200,00	98,93%
URUSAN KEUANGAN			
Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	40.396.000,00	40.396.000,00	100,00%
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	40.396.000,00	40.396.000,00	100,00%
URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	280.670.000,00	262.850.000,00	100,00%
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	280.670.000,00	262.850.000,00	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT UMUM			
Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	6.943.803.000,00	6.798.425.105,00	97,91%
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	6.943.803.000,00	6.795.699.526,00	97,91%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	HASIL
Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Serpong Utara	B	B	100%	TST
Cakupan peran kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	100%	100%	100%	TST
Presentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	TST
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	17.33%	17.33%	100%	TST
Presentase peran serta lembaga/kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	TST



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

cakupan data dan informasi SKPD	100%	100%	100%	TST
cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD	100%	100%	100%	TST
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	TST

Sumber : Kecamatan Serpong Utara, Tahun 2018

C.8.6. Kecamatan Setu

C.8.4.1. Program dan Kegiatan

- 1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik**
- 2. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan**
- 3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan**
- 4. Penataan Administrasi Kependudukan**
- 5. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Pengembangan Data dan Informasi**
- 6. Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 7. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 8. Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur**
- 9. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran**

C.8.4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
URUSAN KECAMATAN			
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	2.160.720.000,00	2.105.121.700,00	97,43%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas RT RW	1.270.000.000,00	1.243.050.000,00	97,88%
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	335.000.000,00	307.251.700,00	91,72%
Pemberian Insentif Guru Ngaji, Amil dan Marbot	555.720.000,00	554.820.000,00	99,84%
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	2.050.000.000,00	2.017.790.000,00	98,43%
Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat	1.440.000.000,00	1.432.040.000,00	99,45%
Fasilitasi Pengembangan USaha Kecil Menengah	610.000.000,00	585.750.000,00	96,02%
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN			



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
MASYARAKAT			
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	500.000.000,00	495.800.000,00	99,16%
Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	500.000.000,00	495.800.000,00	99,16%
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	300.000.000,00	298.800.000,00	99,60%
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	300.000.000,00	298.800.000,00	99,60%
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	580.000.000,00	572.369.250,00	98,68%
Pembinaan dan Pengembangan Kemasyarakatan	580.000.000,00	579.369.250,00	98,68%
URUSAN STATISTIK			
Program Pengembangan Data dan Informasi	390.000.000,00	389.400.000,00	99,85%
Penyusunan Profile Daerah	390.000.000,00	389.400.000,00	99,85%
URUSAN PERENCANAAN			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	885.000.000,00	858.091.120,00	96,96%
Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	490.000.000,00	485.380.000,00	99,06%
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	395.000.000,00	372.711.120,00	94,36%
URUSAN KEUANGAN			
Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	330.000.000,00	285.814.100,00	86,61%
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	330.000.000,00	285.814.100,00	86,61%
URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	900.000.000,00	877.147.500,00	97,46%
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	900.000.000,00	877.147.500,00	97,46%
URUSAN SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD			
Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	8.944.280.000,00	8.314.299.621,00	92,96%
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	8.944.280.000,00	8.314.299.621,00	92,96%

Sumber : Kecamatan Setu, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	HASIL
Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Setu	B	B	100%	TST
Cakupan peran kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	100%	100%	100%	TST
Presentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	TST
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	17.33%	17.33%	100%	TST
Presentase peran serta lembaga/keompok pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	TST



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

cakupan data dan informasi SKPD	100%	100%	100%	TST
cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD	100%	100%	100%	TST
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	TST

Sumber : Kecamatan Setu, Tahun 2018

C.8.7. Kecamatan Pondok Aren

C.8.7.1. Program dan Kegiatan

- 1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik**
- 2. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan**
- 3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan**
- 4. Penataan Administrasi Kependudukan**
- 5. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**
- 6. Pengembangan Data dan Informasi**
- 7. Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 8. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 9. Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur**
- 10. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran**

C.8.7.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
URUSAN KECAMATAN			
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	494.246.600	480.097.100	97,14%
Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat	391.347.800	379.657.600	97,01%
Fasilitasi Pengembangan USaha Kecil Menengah	102.898.800	100.439.500	97,61%
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	4.440.161.550	4.116.897.050	92,72%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas RT RW	2.882.681.550	2.592.705.550	89,94%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	120.000.000	115.206.000	96,01%
Pemberian Insentif Guru Ngaji, Amil dan Marbot	1.437.480.000	1.408.985.500	98,02%
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	227.209.950	212.339.950	93,46%
Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	227.209.950	212.339.950	93,46%
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	280.000.000	268.576.000	95,92%
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	280.000.000	268.576.000	95,92%
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	694.543.200	694.212.200	99,95%
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa/ Kelurahan	450.000.000	449.876.000	99,97%
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan	244.543.200	244.336.200	99,92%
URUSAN STATISTIK			
Program Pengembangan Data dan Informasi	58.000.000	57.239.500	98,69%
Penyusunan Profile Daerah	58.000.000	57.239.500	98,69%
URUSAN PERENCANAAN			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.360.468.500	1.338.266.000	98,37%
Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	725.000.000	722.457.500	99,65%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	253.000.000	253.000.000	100,00%
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	382.468.500	362.808.500	94,86%
URUSAN KEUANGAN			
Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	40.000.000	39.638.000	99,10%
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	40.000.000	39.638.000	99,10%
URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	113.868.800	113.868.800	100,00%
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	113.868.800	113.868.800	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD			
Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	9.158.981.400	8.507.677.530	92,89%
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	9.158.981.400	8.507.677.530	92,89%

Sumber : Kecamatan Pondok Aren, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	HASIL
Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Setu	B	B	100%	TST
Cakupan peran kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan	100%	100%	100%	TST



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

fungsinya				
Presentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	TST
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	17.33%	17.33%	100%	TST
Presentase peran serta lembaga/kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	TST
cakupan data dan informasi SKPD	100%	100%	100%	TST
cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	TST
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD	100%	100%	100%	TST
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	TST

Sumber : Kecamatan Pondok Aren, Tahun 2018

C.8.8. Sekretariat Daerah

C.8.8.1. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

C.8.8.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	920.000.000,00	684.419.000,00	74,39%
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	380.000.000,00	247.500.000,00	65,13%
Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	540.000.000,00	436.919.000,00	80,91%

Sumber : Sekretariat Daerah., Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan wilayah peningkatan kapasitas pemerintahan dan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan	0,7	0,7	100%	Setda	TST

Sumber : Sekretariat Daerah., Tahun 2018



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

C.9. PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Seluruh Kecamatan dan Seluruh OPD

C.9.1. Sekretariat Daerah

C.9.1.1. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Program Penguatan tata laksana

C.9.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	800.000.000,00	755.496.665,00	94,44%
Penataan Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan	740.000.000,00	707.611.665,00	95,62%
Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Honorarium Ketua RT/RW	60.000.000,00	47.885.000,00	79,81%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di masing-masing SKPD	B	B	100%	Setda dan seluruh OPD	TST

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

2. Program Penguatan tata laksana

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penguatan tata laksana	500.000.000,00	431.143.407,00	86,23%
Peningkatan Tatalaksana Manajemen Perangkat Daerah dan Unit Kerja	500.000.000,00	431.143.407,00	86,23%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersedianya SOP Teknis dan administrasi pemerintah	1	1	100%	Setda	TST

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018



C.9.2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas

C.9.2.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pendidikan politik masyarakat
2. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

C.9.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pendidikan politik masyarakat

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pendidikan politik masyarakat	1.146.769.000,00	1.101.159.800,00	96,02%
Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	310.476.500,00	310.476.500,00	100%
Pembinaan Partai Politik	555.551.000,00	530.876.000,00	95,56%
Fasilitasi Penyelenggaraan Demokrasi	280.741.500,00	259.807.300,00	92,54%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Pembinaan Politik Masyarakat	10 kali	10 kali	100%	Kesbangpol	TST

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2018

2. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan wawasan kebangsaan	3.115.292.000,00	3.105.902.400,00	99,70%
Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Akn Nilai-nilai Luhur budaya Bangsa	606.975.500,00	605.985.400,00	99,84%
Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Aliran-aliran Kepercayaan di Kalangan Masyarakat	516.739.000,00	511.940.500,00	99,07%
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	719.942.100,00	719.347.100,00	99,92%
Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	732.570.000,00	731.152.000,00	99,81%
Kemitraan Wawasan Kebangsaan	214.565.400,00	213.365.400,00	99,44%
Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	324.500.000,00	324.112.000,00	99,88%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Pembinaan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Toleransi Kerukunan dan Kerjasama antar Umat Beragama, Nilai-nilai religius, sosial dan solidaritas serta Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa	40 kali	40 kali	100%	Kesbangpol	TST

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

C.9.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.997.000.000,00,- realisasi mencapai Rp. 8.831.500.381,00,- (98,16%), dengan demikian terdapat deviasi anggaran sebesar Rp.165.499.619,00,-atau (1,84%). Adanya deviasi ini karena terdapat beberapa anggaran yang tidak terserap yaitu :
 - Efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan yang sifatnya *real cost* sebesar Rp. 64.003.719,- (0,71%) yang sebagian besar terdapat pada Belanja Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran;
 - Sisa hasil kontrak akomodasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan urusan pemerintahan umum sebesar Rp. 95.505.800,- (1,06%);
 - Adanya 1 (satu) sub kegiatan yang tidak dilaksanakan, yakni Fasilitasi Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah dikarenakan kegiatan tersebut bersifat situasional sebesar Rp. 5.990.100,- (0,07%).

2. Solusi

- a. Mengoptimalkan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

C.10. SEKRETARIAT UMUM

Penyelenggara Urusan Sekretariat Umum di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program urusan penunjang sebagai penunjang operasional OPD dengan 4 kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.
- b. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran.
- c. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.
- d. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan.

Tabel Error! No text of specified style in document..1. Realisasi Anggaran Belanja Penunjang Urusan

NO	PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	Persen
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	9.505.702.403	6.568.084.514	69,10%
2	Dinas Kesehatan	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	50.862.003.000	47.870.649.181	94,12%
3	Rumah Sakit Umum	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	19.519.047.700	18.149.282.376	92,98%
4	Dinas Pekerjaan Umum	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	14.964.582.600	14.351.194.219	95,90%
5	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	17.005.872.200	15.255.007.108	89,70%
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	10.433.667.000	8.769.313.370	84,05%
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	4.291.912.700	3.774.441.131	87,94%
8	Badan Penanggulangan	Pelayanan administrasi dan sarana	3.339.001.310	3.245.709.059	97,21%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

NO	PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	Persen
	Bencana Daerah	prasarana perkantoran			
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	2.116.812.300	2.031.919.554	95,99%
10	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	546.437.000	499.883.503	91,48%
11	Dinas Sosial	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	4.943.718.000	4.865.924.246	98,43%
12	Dinas Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	3.640.486.000	3.557.624.966	97,72%
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	6.941.803.000	6.575.904.041	94,73%
14	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	6.903.409.000	5.311.610.662	76,94%
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	9.028.170.870	8.800.188.034	97,47%
16	Dinas Perhubungan	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	8.974.140.500	8.482.675.527	94,52%
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	5.704.613.250	5.070.738.862	88,89%
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	4.656.691.100	3.873.826.175	83,19%
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	9.278.811.500	8.533.909.452	91,97%
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	4.967.063.900	4.688.917.693	94,40%
21	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	6.096.750.400	5.275.594.446	86,53%
22	Dinas Pariwisata	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	3.022.338.900	2.886.593.642	95,51%
23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	3.920.064.000	3.570.085.283	91,07%
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	3.706.123.950	3.266.339.678	88,13%
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	6.233.507.250	5.179.374.831	83,09%
26	Badan Pendapatan Daerah	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	8.064.169.750	7.723.786.099	95,78%
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	5.742.175.050	5.041.388.555	87,80%
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	5.865.812.200	5.382.666.646	91,76%
29	Sekretariat DPRD	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	45.984.781.450	43.143.847.192	93,82%
30	Inspektorat	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	3.609.251.480	3.289.888.403	91,15%
31	Kecamatan Ciputat	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	7.356.345.500	7.116.688.605	96,74%
32	Kecamatan Ciputat Timur	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	7.174.282.300	6.725.063.569	93,74%
33	Kecamatan Pamulang	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	9.360.770.000	8.136.394.844	86,92%
34	Kecamatan Serpong	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	8.415.572.000	8.002.730.950	95,09%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

NO	PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	PERSEN
35	Kecamatan Serpong Utara	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	6.943.803.000	6.795.699.526	97,87%
36	Kecamatan Pondok Aren	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	9.158.981.400	8.507.677.530	92,89%
37	Kecamatan Setu	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	8.944.280.000	8.314.299.621	92,96%





BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

A. URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A.1. PENDIDIKAN

Penyelenggara Urusan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 2) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

A.1.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

A.1.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal**, program ini diarahkan pada pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini terdiri dari :
 - a. Peningkatan mutu dan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, 20 kegiatan.
 - b. Peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan, 8 kegiatan.
 - c. Peningkatan mutu dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 13 kegiatan.
2. **Program Pendidikan Dasar**, program ini diarahkan pada peningkatan pemerataan dan perluasan layanan pendidikan dasar yang bermutu juga meningkatkan sarana dan prasarana. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini terdiri dari :
 - a. Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD), 20 kegiatan.
 - b. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), 8 kegiatan.
 - c. Penyelenggaraan BOSDA SDN dan MIN di 157 SD Negeri dan 2 MI Negeri.
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana SD, 14 kegiatan.
3. **Program Pendidikan Menengah Pertama**, program ini diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan menengah pertama dalam upaya mewujudkan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

rintisan wajib belajar pendidikan menengah 9 (sembilan) tahun. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini terdiri dari :

- a. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 19 kegiatan.
 - b. Penyelenggaraan BOSDA SMP di 22 SMP Negeri dan 1 MTs Negeri.
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP, 12 kegiatan.
 - d. Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 7 kegiatan.
4. **Program Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan**, program ini diarahkan pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini terdiri dari :
- a. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 19 kegiatan.
 - b. Peningkatan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 41 kegiatan.
 - c. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 9 kegiatan.

A.1.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (0-6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.211.401.410,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.147.022.200,- atau 82,86%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.	6.211.401.410	5.147.022.200	82,86%.
Peningkatan mutu dan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat	2.453.349.000	1.860.210.500	75,82%
Peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan	1.032.499.000	790.677.000	76,58%
Peningkatan mutu dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.725.553.410	2.496.134.700	91,58%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal berhasil meningkatkan Harapan Lama Sekolah dari yang ditargetkan 14,04 tahun tercapai menjadi 14,18 tahun atau berhasil mencapai target 101%. Indikator kinerja



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

tersebut berhasil dicapai antara lain karena adanya peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat kepada sekitar 8.980 peserta salahsatunya melalui kegiatan sosialisasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan penyelenggaraan *Try Out* Paket B dan Paket C Tingkat Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian target ini, yaitu terselenggaranya peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan kepada lebih dari 1.182 orang sepanjang tahun 2017.

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan program PAUD terutama untuk usia 3-6 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, dari target sebesar 25,20% dapat terealisasi sesuai target bahkan melebihi, yaitu sebesar 30,20%. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target ini adalah adanya peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diantaranya melalui peningkatan Gugus PAUD dalam Peningkatan Kualitas PAUD kepada 114 peserta, pembinaan dan penguatan serta Bimtek Akreditasi Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal kepada sekitar 600 peserta, serta yang tidak kalah pentingnya adalah terselenggaranya manajemen pengelola Lembaga Formal dan Non Formal kepada 300 peserta. Disamping itu, sebagai aktualisasi keberhasilan program ini telah dilaksanakan Lomba Mutu Lembaga gugus dan kinerja Pendidikan Formal dan Non Formal kepada sekitar 150 peserta sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Harapan Lama Sekolah	14,04 tahun	14,18 tahun	101%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TMT
APM PAUD	25,20%	30,20%	120%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TMT

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2 Program Pendidikan Sekolah Dasar

Program Pendidikan Sekolah Dasar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 172.173.277.511,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.600.037.549,- atau 53,20%. dengan demikian terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 80.573.239.962,- atau (46,80%).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pendidikan Sekolah Dasar	172.173.277.511	91.600.037.549	53,20%
Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	999.265.000	927.507.000	92,82%
Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	1.120.524.500	988.065.200	88,18%
Penyelenggaraan BOSDA SD/MIN (159 kegiatan)	43.602.693.150	37.399.179.549	85,77%
Peningkatan Sarana dan Prasarana SD	55.188.845.033	52.285.285.800	94,74%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Dilihat dari capaian kinerja memberikan gambaran sangat baik di atas 99,99%, bisa dilihat dari data Pokok Pendidikan Usia Siswa 7-12 Tahun sebesar 132.001 siswa (112.736 SD dan 19.265 MI) dibagi dengan jumlah Penduduk usia 7-12 tahun sebesar 129.606 siswa, maka diperoleh hasil 101,85%, secara keseluruhan jumlah siswa SD sebanyak 140.793 dan jumlah 7-12 tahun 129.606 siswa, maka diperoleh hasil 108,63% jadi APM SD/MI sudah mencapai target 101,85% dengan nilai APK sebesar 108,63%.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target salah satunya adanya kegiatan peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) kepada sekitar 1.538 Sekolah Dasar (SD), serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD) kepada lebih 1.283 peserta baik melalui pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN), dan *International Mathematics and Science Olympiade* (IMSO), pelatihan siswa berprestasi sampai kepada lomba kinerja sekolah tingkat sekolah dasar telah berhasil dilaksanakan. Faktor pendukung lainnya adalah terlaksananya pelatihan bahan ajar tingkat Sekolah Dasar (SD) yang berhasil diberikan kepada 400 peserta sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	99,99%	99,99%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TST

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3 Program Pendidikan Menengah Pertama.

Program Pendidikan Menengah Pertama mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 72.211.535.472,- realisasi mencapai Rp. 62.561.850.540,- (86,64%), dengan demikian terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 9.649.684.932,- atau (13,36%).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pendidikan Menengah Pertama	72.211.535.472	62.561.850.540	86,64%
Penyelenggaraan Bosda di 22 SMP N dan 1 MTPN	28.741.580.000	25.210.521.720	87,71%
Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.562.446.168	1.199.483.000	76,77%
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	12.573.058.072	10.364.289.600	82,43%
Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	592.871.232	577.034.500	97,33%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Kinerja APM (Angka Partisipasi Murni 13 s.d 15 tahun) SMP/MTS dari target 96,80% tercapai 93,73%, target ini belum tercapai disebabkan banyaknya jumlah siswa SMP/MTS berusia dibawah 13 tahun yang sudah bersekolah ke jenjang SMP/MTS, yaitu sebanyak 3.394 siswa, selain itu banyaknya siswa yang melanjutkan diluar wilayah Kota Tangerang Selatan. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya Angka Partisipasi Murni pada tahun 2017.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Namun, secara keseluruhan untuk jenjang siswa SMP/MTS sudah memperoleh nilai APK (Angka Partisipasi Kasar) sebesar 99,09%, angka tersebut berarti setiap 100 orang terdapat 99 orang yang bersekolah, kekurangan 1% (1 orang) tersebut diprediksi bersekolah diluar wilayah Kota Tangerang Selatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS	96,80%	93,73%	97%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dan TT

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

4 Program Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan.

Program Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 41.145.297.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.317.645.050,- atau 95,56%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Pendidikan	41.145.297.850	39.317.645.050	95,56%
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	38.502.468.050	37.245.476.050	96,74%
Peningkatan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.759.061.200	1.398.982.000	79,53%
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan	883.768.600	673.187.000	76,17%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Program ini diarahkan pada mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan keterampilan, dengan indikator uji kompetensi guru, dari target sebesar 70 dapat terealisasi sebesar 65,12. Target ini belum tercapai di karenakan pengembangan diri keprofesian berkelanjutan (PKB) melalui simPKB secara online belum familier dan penguasaan IT belum maksimal, hasilnya melalui Uji Kompetensi Guru (PKG) Usaha yang telah dilakukan dengan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan pada komunitas gugus untuk guru TK, KKG untuk guru SMP/ Mata Pelajaran, Pelaksanaan PKB yang menggunakan APBD Kegiatan bidang pembinaan kepegawaian (PK) Untuk TK, 2 Kelas Guru 40 orang, SD 5 Kelas jumlah guru 100 orang dan SMP 5 kelas jumlah 100 guru dengan berbagai MGMP pelaksanaan PKB melalui APBN melalaui swakelola dan bantuan pemerintah pusat melalui p4tk sebanyak TK 400 orang, SD 500 orang, SMP 60 orang, Kepala Sekolah 20 Orang.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Uji Kompetensi Guru	70	65,12	93%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TT

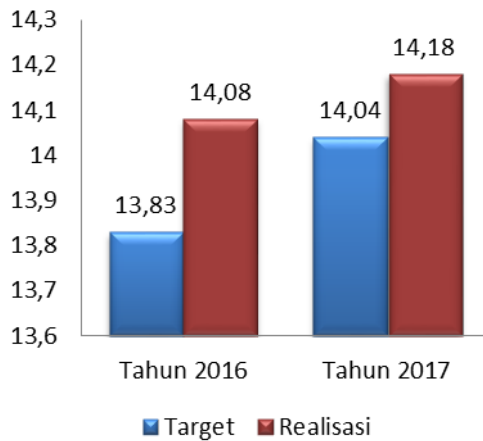
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

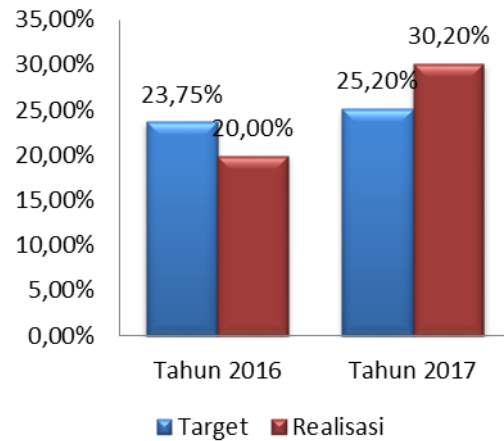


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

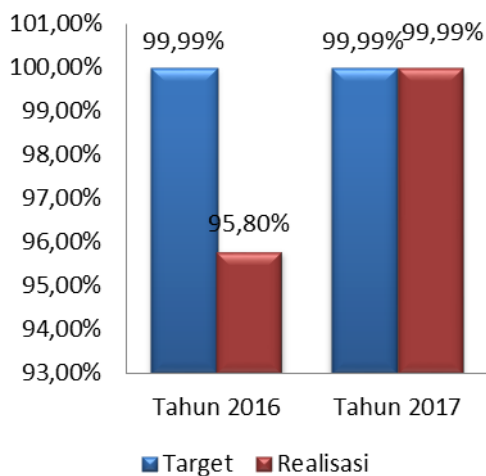
Grafik Error! No text of specified style in document.-2. Realisasi dan Target Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2017



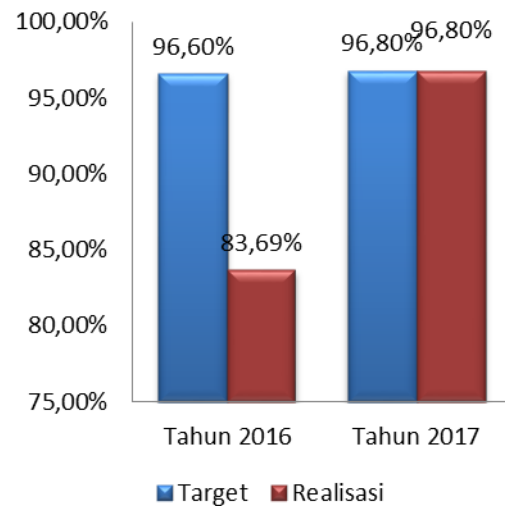
Grafik Error! No text of specified style in document.-2.Realisasi dan Target Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Tahun 2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-4. Realisasi dan Target Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2016-2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-4. Realisasi dan Target APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS Tahun 2016-2017



A.1.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Penyerepan DAK Pendidikan di triwulan pertama tidak bisa mencapai 20% di sebabkan oleh: (1) penerima DAK adalah Pihak Swasta sedangkan Rekening berada di belanja modal (seharusnya di belanja hibah), (2) keterlambatan aturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat terkait dana DAK memberikan konsekuensi dana DAK di triwulan berikutnya tidak bisa diajukan kembali.
- Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan.



2. Solusi

- Merencanakan DAK sesuai dengan kebutuhan dan dituangkan dalam DPA sesuai dengan kode rekening.
- Optimalisasi kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

A.1.2. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

A.1.2.1. Program dan Kegiatan

- Program Pendidikan Sekolah Dasar**, program ini diarahkan pada Sekolah Dasar yang berhasil dibangun, dilaksanakan melalui 8 kegiatan pembangunan tambah ruang kelas Sekolah Dasar di 7 kecamatan serta peningkatan sarana dan prasarana SD melalui dana DAK.
- Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**, program ini diarahkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berhasil dibangun, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama dan Peningkatan sarana dan Prasarana SMP.

A.1.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1 Program Pendidikan Dasar.

Program Pendidikan Dasar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.124.058.843.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.466.788.499,- atau 97,91%. Adapun target capaian keuangan yang tidak tercapai disebabkan oleh efisiensi kontrak, penyusunan nilai HPS yang disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pendidikan Sekolah Dasar	124.058.843.500	121.466.788.499	97,91
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Ciputat	19.985.630.200	18.831.453.754	94,22
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Ciputat Timur	21.688.870.200	21.610.290.600	99,64
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Pamulang	21.224.699.000	20.559.899.900	96,87
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Setu	10.342.084.600	9.905.998.545	95,78
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Serpong	5.045.847.000	5.029.630.200	99,68
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Serpong Utara	15.705.364.200	15.665.331.200	99,75
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Pondok Aren	26.814.348.300	26.749.126.300	99,76



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pendidikan Sekolah Dasar	124.058.843.500	121.466.788.499	97,91
Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (DAK)	3.252.000.000	3.115.058.000	95,79

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai Program Pendidikan Sekolah Dasar berhasil meningkatkan jumlah ruang kelas Sekolah Dasar yang dibangun dari yang ditargetkan 17 sekolah tercapai sebanyak 19 atau berhasil mencapai target 112%. Faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pembangunan tambah ruang kelas Sekolah Dasar yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan, meliputi: 1) Kecamatan Ciputat penambahan, sebanyak 7 ruang kelas SD, 2) Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 4 ruang kelas SD, 3) Kecamatan Pamulang sebanyak 4 ruang kelas SD, 4) Kecamatan Setu sebanyak 6 ruang kelas SD, 5) Kecamatan Serpong sebanyak 1 ruang kelas SD, 6) Kecamatan Serpong Utara sebanyak 4 ruang kelas SD, dan 7) Kecamatan Pondok Aren sebanyak 5 ruang kelas SD.

Selain itu, terselenggaranya peningkatan Sarana dan Prasarana SD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berhasil dialokasikan untuk pembangunan tambah ruang kelas baru dan perabotnya di SDN Pondok Kacang Barat 03.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Sekolah Dasar terbangun	17	19	112%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TMT

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2 Program Pendidikan Menengah Pertama.

Program Pendidikan Menengah Pertama, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.642.876.500,- realisasi mencapai Rp. 14.286.200.600,- (97,56). Adapun Target capaian keuangan yang tidak tercapai disebabkan oleh efisiensi kontrak, penyusunan nilai HPS yang di sesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.642.876.500	14.286.200.600	97,56
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama	14.642.876.500	14.286.200.600	97,56

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun pada tahun 2017 tidak ditargetkan, namun karena adanya program nasional melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yaitu pembangunan tambah ruang kelas di SMPN 8 Kota Tangerang Selatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun	0	5	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

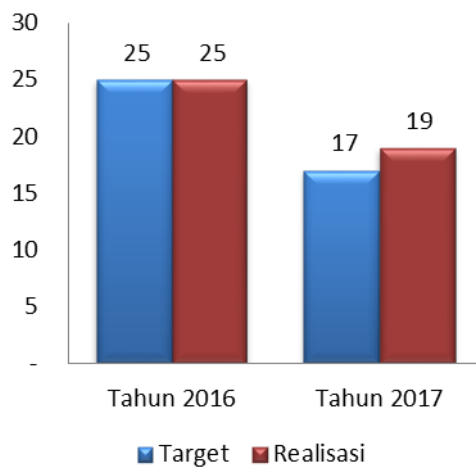
Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

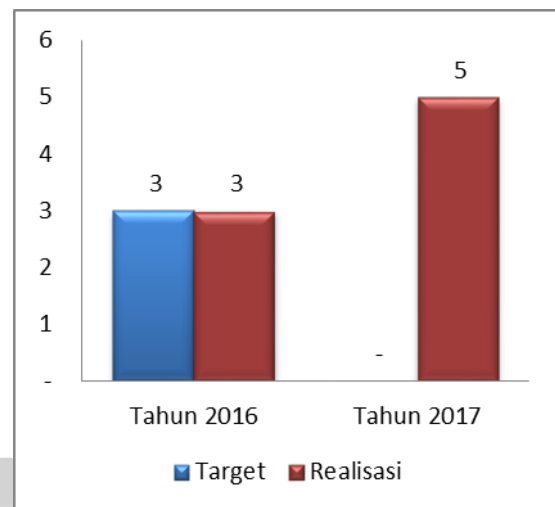


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Grafik Error! No text of specified style in document.-6. Realisasi dan Target Jumlah Sekolah Dasar terbangun Tahun 2016-2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-6. Realisasi dan Target Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun Tahun 2016-2017



A.1.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
 - a. Sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan masih perlu ditingkatkan.
 - b. Pembangunan Tambah Ruang Kelas ada yang dilaksanakan secara bertahap.
2. Solusi
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan.
 - b. Menganggarkan dan melanjutkan pembangunan tambah ruang kelas di tahun berikutnya hingga dapat berfungsi.



A.2. KESEHATAN

Penyelenggara Urusan Kesehatan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kesehatan, 2) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang dan 3) Rumah Sakit Umum. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

A.2.1. Dinas Kesehatan

A.2.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan pelayanan kesehatan**, program ini diarahkan pada Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas dan akreditasi unit Labkesda, melalui 2 kegiatan, yaitu (1) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar, (2) Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah.
2. **Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan**, program ini diarahkan pada pengadaan alat kesehatan sesuai standar, melalui 1 kegiatan, yaitu pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan.
3. **Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan** program ini diarahkan pada reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda, serta ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu (1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, (2) Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya, dan (3) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
4. **Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga**, program ini diarahkan pada penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup, serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita, cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat, cakupan pelayanan lansia dan cakupan pelayanan kesehatan remaja, melalui 11 kegiatan peningkatan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan
5. **Program perbaikan gizi masyarakat**, program ini diarahkan pada balita gizi buruk mendapat perawatan, Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan dan Remaja putri yang mendapat TTD, dilaksanakan melalui 6 kegiatan pelayanan dan perbaikan gizi bagi bayi, ibu hamil dan ibu menyusui.
6. **Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**, program ini diarahkan pada peningkatan cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif serta cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan, dilaksanakan melalui 3 kegiatan pengembangan promosi, dan kemitraan kesehatan.



7. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan**, program ini diarahkan pada peningkatan cakupan SDM Kesehatan yang terlatih, melalui 1 kegiatan peningkatan kapasitas SDM kesehatan.
8. **Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular**, program ini diarahkan pada peningkatan cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional, anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap, serta terpenuhinya sinyal kewaspadaan dini yang direspon, dilaksanakan melalui 12 kegiatan peningkatan dan pelayanan serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
9. **Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer**, program ini diarahkan pada peningkatan cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, cakupan Pelayanan kesehatan rujukan, cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan, cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS, cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial, yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan, serta peningkatan cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, kegiatan ini dilaksanakan melalui 32 kegiatan pelayanan dan penyediaan jasa serta biaya operasional di setiap UPT Puskesmas.
10. **Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD**, program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan di sejumlah Puskesmas BLUD, dilaksanakan melalui 1 kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas.
11. **Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat**, program ini diarahkan pada penduduk yang memiliki akses terhadap Air minum berkualitas, tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan, cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar, serta terpenuhinya sejumlah kelurahan yang melaksanakan STBM. Dilaksanakan melalui 8 kegiatan pengawasan, penyusunan dokumen serta penyehatan lingkungan sehat.
12. **Pelayanan jaminan kesehatan nasional**, program ini diarahkan pada masyarakat Tangerang Selatan yang menggunakan JKN, yang dilaksanakan melalui 26 kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di setiap FKTP Puskesmas.

A.2.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengembangan pelayanan kesehatan,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.859.997.400,- dengan realisasi sebesar Rp 2.532.524.901,- (88,55%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Kesehatan Daerah. Rendahnya realisasi keuangan yang mencapai 88,55% terjadi pada kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar 90,29% hal ini disebabkan efisiensi dari biaya akomodasi surveyor yang mulanya disiapkan biaya akomodasi untuk surveyor dari luar kota, namun oleh Pemerintah Pusat peserta ditentukan dari Kota Tangerang Selatan, sehingga ada efisiensi dari belanja makan minum, dan kegiatan rapat mulai dari persiapan sampai dengan penilaian akreditasi Puskesmas.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pelayanan kesehatan	2.859.997.400	2.527.420.901	88,37%
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	2.559.997.400	2.306.268.401	90,09%
Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	300.000.000	221.152.500	73,72%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas, dari target sebesar 11 Puskesmas dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi Pendampingan Pasca Akreditasi sebanyak 21 kegiatan, Survey Akreditasi, Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Pendamping Akreditasi Puskesmas sampai kepada pelaksanaan Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen serta Workshop Keselamatan Pasien yang dilaksanakan masing-masing 44 kegiatan sepanjang tahun 2017.

Persentase akreditasi unit Labkesda dari target sebesar 30% dapat terealisasi sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dilaksanakannya kegiatan peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan daerah berupa penyelenggaraan ISO 17025 dan ISO 15189.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas	11	11	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase akreditasi unit Labkesda	30%	30%	100%	Dinas Kesehatan	TST

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. Program Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 32.631.629.600,- dengan realisasi sebesar Rp 28.317.303.306,- (86,78%), kurang optimalnya capaian keuangan disebabkan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan sebesar 86,78% hal ini disebabkan adanya perbedaan harga pada alat kesehatan di e-katalog saat penyusunan anggaran dengan pembelanjaan saat pelaksanaan, dimana harga saat pembelanjaan lebih rendah dari pada saat perencanaan anggaran dan efisiensi dari margin/sisa kontrak pengadaan alat kesehatan. Namun capaian indikator kinerja kegiatan ini telah mencapai target dari yang telah ditetapkan.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	32.631.629.600	28.490.677.021	87,31%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	32.631.629.600	28.490.677.021	87,31%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Kinerja Persentase alat kesehatan sesuai standar berhasil meningkatkan 70% dari yang ditargetkan 70% atau berhasil mencapai target sejumlah 100%, meliputi Pengadaan Sarana Perlengkapan Posyandu, Posbindu, UKS dan UKGS (e-katalog / non e-katalog, Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pengadaan Alat Laboratorium Puskesmas dan Labkesda masing-masing 1 paket. Faktor pendorong pencapaian target adalah dilaksanakannya kegiatan penunjang yang bersumber dari DAK, yaitu Pengadaan alkes Pengolahan Darah dan Pengadaan Alat Kesehatan 4 Puskesmas.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase alat kesehatan sesuai standar	70%	70%	100%	Dinas Kesehatan	TST

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3. Program Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 21.282.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp 19.242.299.181,- (90,42%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu (1) kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, (2) Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya, dan (3) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	21.282.160.000	19.380.068.505	91,06%
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	15.204.460.000	13.614.624.270	89,54%
Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya	6.011.700.000	5.699.604.235	94,81%
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	66.000.000	65.840.000	99,76%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Persentase ketersediaan reagen dan BMHP laboratorium di Puskesmas dan Labkesda dari target sebesar 95% dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi Pengadaan Reagen Labkesda dan Jaringannya sebanyak 4 paket, Pengadaan BMHP Labkesda dan Jaringannya 2 paket, pemeriksaan NAPZA Pegawai Pemkot Tangsel kepada 600 pegawai, pemantauan Keamanan Pangan dan Peredaran Pangan di Masyarakat Menjelang Hari Raya (sidak) di 4



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

lokasi, Penyuluhan Keamanan Pangan Untuk IRTP serta pemantauan dan pembinaan PIRT¹ di 15 lokasi Kota Tangerang Selatan.

Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringan, dari target sebesar 90% berhasil meningkatkan ketersediaan obat dan pebekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebesar 111%. Keberhasilan peningkatan target ini tidak terlepas dari pelaksanaan ketersediaan bahan Medis Pakai Habis E Katalog di Puskesmas, tersedianya Bahan Medis Pakai Habis Non E Katalog di Puskesmas, tersedianya Obat Non E Katalog di Puskesmas serta tersedianya Obat Pelayanan Dasar di Puskesmas. Selain itu, faktor pendorong pencapaian target lainnya adalah dilaksanakannya kegiatan penunjang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa penyediaan Obat E Katalog di Puskesmas.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda	95%	95%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringan	90%	100	111%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

4. Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.569.515.250,- dengan realisasi sebesar Rp 3.998.866.250,- (87,51%), yang dilaksanakan sekitar 11 kegiatan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga,	4.569.515.250	3.998.866.250	87,51%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan	650.861.000	648.761.000	99,68%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	237.360.000	237.360.000	100,00%
Pelayanan Kesehatan Remaja	156.535.000	156.535.000	100,00%
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	116.060.000	115.955.000	99,91%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi	74.950.000	74.950.000	100,00%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah	55.115.250	54.115.250	98,19%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BAgi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)	1.237.979.000	943.360.000	76,20%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BAgi BAyi dan Balita (DAK)	1.208.345.000	1.009.880.000	83,58%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BAgi Anak Sekolah (DAK)	183.060.000	143.700.000	78,50%
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	448.160.000	417.760.000	93,22%

¹ PIRT merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan secara manual hingga semi otomatis yang memperoleh sertifikat PIRT melalui penyuluhan keamanan pangan, dimana sertifikat produk berlaku selama lima tahun.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga, (DAK)	4.569.515.250	3.998.866.250	87,51%
Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK)	201.090.000	196.490.000	97,71%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Salah satu indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup tidak tercapai dari target 38, indikator ini berhasil apabila nilai realisasi lebih kecil dari targetnya. Namun bila dibandingkan dengan target Kementerian Kesehatan yakni sebesar 306/100.000 Kelahiran Hidup, Angka tersebut didapat dari Renstra Kemenkes RI Tahun 2015-2019 di bab II tujuan dan sasaran strategis. Faktor penghambat ketidakberhasilan pencapaian target ini adalah kompetensi petugas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan bayi baru lahir belum maksimal, akan tetapi capaian tersebut secara Nasional sudah melebihi target.

Berikutnya untuk indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup tidak tercapai dari target 1,2, indikator ini berhasil apabila nilai realisasi lebih kecil dari targetnya. Namun bila dibandingkan dengan target Kementerian Kesehatan yakni sebesar 24/1.000 Kelahiran Hidup, Tangerang Selatan masih rendah untuk Angka Kematian Bayi. Angka tersebut didapat dari Renstra Kemenkes RI Tahun 2015-2019 di bab II tujuan dan sasaran strategis. Faktor penghambat rendahnya pencapaian target disebabkan pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir masih kurang, akan tetapi capaian tersebut sudah melebihi target angka Nasional.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	38	48		Dinas Kesehatan	TT
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	1,2	1,5		Dinas Kesehatan	TT
Cakupan pelayanan kesehatan balita	0,97	0,972	100%	Dinas Kesehatan	TMT
Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan pelayanan lansia	9	9	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan pelayanan kesehatan remaja	0,8	0,8764	110%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

5. Program perbaikan gizi masyarakat,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.3.163.355.200,- dengan realisasi sebesar Rp 3.037.010.600,- (96,01%), yang dilaksanakan sekitar 6 kegiatan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program perbaikan gizi masyarakat	3.163.355.200	3.037.010.600	96,01%
Pelayanan Gizi Masyarakat	174.473.500	173.425.300	99,40%
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	428.371.500	424.152.900	99,02%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita	2.034.500.500	1.989.285.700	97,78%
Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK)	66.320.000	46.640.000	70,33%
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)	59.640.000	48.929.200	82,04%
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)	400.049.700	354.577.500	88,63%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Seluruh Indikator kinerja dari program perbaikan gizi masyarakat, dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi Pelayanan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan melalui PMT anak sekolah sebanyak 18.000 buah, Sosialisasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Pada Petugas Kesehatan, Kader, dan Sektor Terkait. Untuk mendukung peningkatan gizi buruk Dinas Kesehatan juga membentuk Duta Remaja Anti Anemia kepada sekitar 20 orang. Faktor pendorong pencapaian target berikutnya adalah dilaksanakannya kegiatan penunjang yang bersumber dari DAK melalui kegiatan pelayanan gizi pada wanita usia subur diberikan kepada 300 orang. Tidak hanya itu, hendaknya upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan Peran Serta masyarakat dan tokoh masyarakat (*stakeholders*) dalam hal deteksi dini dan pelacakan (*surveillance*) balita gizi/buruk yang dilakukan oleh petugas puskesmas harus terus dilakukan.

Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan berhasil meningkatkan persentase ibu hamil KEK untuk mendapat makanan tambahan dari yang ditargetkan 65% tercapai sebanyak 88% atau berhasil mencapai target 135%. Keberhasilan ini dicapai karena diberikannya makanan bagi Bumil KEK/Anemia kepada sekitar 550 bumil KEK, didukung juga dengan Sosialisasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan di 7 Kecamatan pada ibu hamil, serta yang tidak kalah pentingnya adalah jalinan koordinasi kerja bagi TPG dan bidan koordinator. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya akselerasi kelompok pendukung ASI bagi masyarakat dan petugas kesehatan sebanyak 83 orang sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	65%	88%	135%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase Remaja putri yang mendapat TTD	20%	21%	105%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

6. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.937.189.300,- dengan realisasi sebesar Rp 9.272.210.800,- (93,31%), yang dilaksanakan sekitar 3 kegiatan, yaitu Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat, Peningkatan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Kemitraan Promosi Kesehatan, Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
	9.937.189.300	9.272.210.800	93,31%
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat	8.643.120.000	8.113.062.000	93,87%
Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan	431.750.000	428.055.000	99,14%
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK)	862.319.300	731.093.800	84,78%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Indikator kinerja cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif berhasil mencapai target sejumlah 104%, Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah dana/anggaran yang diberikan kepada 54 Kelurahan Sehat dengan pendekatan keluarga sehat tersedia mencukupi, ditunjang juga dengan kegiatan-kegiatan seperti UKBM melalui Posyandu Aktif, kampanye gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan peningkatan kualitas kader kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat.

Berikut pula dengan cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan dari target sebesar 53% dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi penyebarluasan informasi kesehatan melalui kemitraan, meningkatnya kualitas UKS dan terlaksananya pembinaan ranting SBH. Faktor pendorong pencapaian target ini adalah dilaksanakannya kegiatan penunjang yang bersumber dari DAK, meliputi 1) Penyelenggaraan Kelurahan Sehat/Kelurahan Siaga Aktif di 54 kelurahan, 2) Peningkatan Kelurahan yang melaksanakan 5 tema kampanye gerakan masyarakat tersebar di 54 kelurahan dan 3) peningkatan jumlah pembinaan kader diberikan kepada 5.287 kader.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif	52 kelurahan	52 kelurahan	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	53%	53%	100%	Dinas Kesehatan	TST

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.015.439.300,- dengan realisasi sebesar Rp.812.702.646,- (80,03%), dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan. Indikator kinerja Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih, dari target sebesar 60% dapat terealisasi sebesar 60%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1.015.439.300	812.702.646	80,03%
Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	1.015.439.300	812.702.646	80,03%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

8. **Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular**, terdapat 11 kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dengan alokasi anggaran Rp. 6.828.030.944,- dengan realisasi Rp. 6.315.102.479,-(92,49%).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	6.828.030.944	6.315.102.479	92,49%
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	684.209.000	683.483.400	99,89%
Peningkatan Imunisasi	652.136.194	648.557.200	99,45%
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	772.992.400	752.175.800	97,31%
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.927.752.000	2.844.271.225	97,15%
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	963.000.000	701.801.004	72,88%
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)			
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)	604.175.750	467.863.250	77,44%
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)	101.150.600	95.750.600	94,66%
Peningkatan Imunisasi (DAK)	52.030.000	50.930.000	97,89%
Pelayanan Kesehatan Jiwa	49.660.000	49.345.000	99,37%
Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)	20.925.000	20.925.000	0,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Salah satu indikator cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan Standar Nasional dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 69,23%, semua ada 13 program, yang mencapai target 9 program, yang tidak mencapai ada 4 program. Belum tercapainya target disebabkan Ketersediaan sumber daya yang belum terlatih sesuai standart kementerian kesehatan, Sarana dan prasana program yang belum optimal, Dukungan pembiayaan yang belum memadai dan Manajemen mencatatkan pelaporan yg belum dilakukan dengan disiplin dan berkesinambungan. Sedangkan untuk dua indikator lainnya dapat terealisasi sesuai target.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional	100%	69,00%	69%	Dinas Kesehatan	TT
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	0,92	92,00%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	0,75	1	133%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

9. **Program Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer**, terdapat 3 kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dengan alokasi anggaran Rp.23.755.337.550,- realisasi baru mencapai Rp.12.376.279.874,- (52,10%).



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	23.755.337.550	12.376.279.874	52,10%
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	127.921.000	123.319.000	0,00%
Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan	4.034.956.100	799.888.700	19,82%
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	261.116.000	238.796.000	91,45%
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	741.206.100	732.532.900	98,83%
Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu	3.768.040.400	904.888.600	24,01%
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus	184.720.000	174.532.500	94,48%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Setu	191.658.000	164.338.492	85,75%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Keranggan	393.954.000	352.549.158	89,49%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Bakti Jaya	342.036.900	326.702.031	95,52%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Serpong I	373.751.000	342.931.321	91,75%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Serpong II	348.646.000	317.604.088	91,10%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Rawa Buntu	299.669.000	236.294.444	78,85%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pamulang	340.525.000	307.820.314	90,40%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Benda	393.485.700	297.596.436	75,63%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Benda Baru	361.663.000	360.596.415	99,71%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Ciputat	198.097.000	167.973.032	84,79%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Kampung Sawah	370.000.000	361.370.956	97,67%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Jombang	299.389.300	260.873.069	87,14%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Situ Gintung	158.165.000	151.251.059	95,63%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Ciputat Timur	393.476.500	306.431.708	77,88%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pisangan	161.776.000	151.251.059	93,49%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Rengas	337.268.400	287.747.873	85,32%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Ranji	278.638.500	188.279.217	67,57%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Aren	340.916.000	298.241.049	87,48%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Jurang Mangu	434.640.000	382.241.983	87,94%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Parigi	234.176.500	226.735.206	96,82%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Betung	293.301.200	221.226.879	75,43%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Pucung	295.831.000	250.911.255	84,82%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur	329.075.800	288.506.790	87,67%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Jagung	381.283.000	366.504.504	96,12%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Paku Alam	376.386.000	373.346.865	99,19%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Sawah Baru	269.406.000	231.396.769	85,89%
Penyelenggaraan Operasional UPT Farmasi	516.675.400	350.548.647	67,85%
Penyelenggaraan Operasional UPT Labkesda	690.788.500	671.721.444	97,24%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Lengkong Wetan	50.000.000	30.541.567	61,08%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Cabe Ilir	50.000.000	33.333.200	66,67%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Bambu Apus	50.000.000	34.338.044	68,68%
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	2.769.660.000	273.351.000	9,87%
Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK	1.234.725.250	623.058.800	50,46%
Jaminan Persalinan (DAK)	922.222.000	31.333.500	3,40%
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)	13.510.000	13.510.000	100%
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)	142.582.000	119.864.000	84,07%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Salah satu Indikator cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS belum tercapai dari target yang telah ditetapkan sebesar 50%. Hal ini disebabkan belum selesainya petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan SOP pencairan jasa pelayanan darah serta penandatanganan MoU antara Dinas Kesehatan, PMI dan Rumah Sakit se-Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk indikator lainnya dapat terealisasi sesuai target.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan	80%	80%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan	32,%	55,78%	174%	Dinas Kesehatan	TMT
Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS	50,%	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan	TT
Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan	62%	91,59%	148%	Dinas Kesehatan	TMT
Cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	47%	47%	100%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

10. **Program Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 271.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 271.030.000,- (99,79%), yang dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	271.600.000	271.030.000	99,79%
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	271.600.000	271.030.000	99,79%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Indikator Jumlah puskesmas BLUD, dari target sebesar 1 Puskesmas belum dapat terealisasi. Namun pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan melakukan pendampingan dengan 4 puskesmas dan hasil penilaian akan diumumkan pada tahun 2018. Ke 4 puskesmas tersebut adalah Puskesmas Pamulang, Puskesmas Benda Baru, Puskesmas Pondok Aren dan Puskesmas Ciputat.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah puskesmas BLUD	1	0	0%	Dinas Kesehatan	TT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

11. **Program Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat**, terdapat 8 kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dengan alokasi anggaran Rp. 1.441.380.200,- dengan realisasi mencapai Rp. 1.275.512.500,- (88,49%).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	1.441.380.200	1.275.512.500	88,49%
Pengawasan Air Bersih di Masyarakat	153.440.000	150.920.000	98,36%
Penyehatan Tempat-tempat Umum	436.020.000	406.362.500	93,20%
Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas	179.230.000	174.180.000	97,18%
Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan	79.850.000	77.850.000	97,50%
Penyehatan Lingkungan Pemukiman	26.120.000	23.120.000	88,51%
Pengamanan Limbah Medis	211.900.000	211.900.000	100,00%
Peningkatan STBM	60.840.000	59.920.000	98,49%
Pengendalian Lingkungan Sehat (DAK)	293.980.200	171.260.000	58,26%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Apabila dilihat dari kinerja program maka, semua indikator dari program Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas, Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar dan Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	40%	67%	168%	Dinas Kesehatan	TMT



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	54%	85%	157%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	65%	80%	124%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	85%	100	118%	Dinas Kesehatan	TMT
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	10	16	160%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

12. Program Pelayanan jaminan kesehatan nasional, dianggarkan sebesar Rp 37.366.137.202,- realisasi anggaran Rp 29.918.395.153,- atau sebesar 80,07%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pelayanan jaminan kesehatan nasional	37.366.137.202	29.918.395.153	80,07%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru	1.842.563.330	1.672.764.160	90,78%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat	3.828.985.424	2.863.152.214	74,78%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur	1.257.046.084	922.769.281	73,41%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang	1.973.093.450	1.464.669.370	74,23%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu	1.313.781.850	1.146.748.110	87,29%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah	1.211.316.200	967.995.416	79,91%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan	530.768.290	471.991.209	88,93%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam	841.860.880	746.086.650	88,62%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang	4.210.517.892	3.504.454.179	83,23%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi	1.145.174.260	1.004.872.259	87,75%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan	784.680.799	698.262.756	88,99%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren	3.057.980.266	2.647.075.982	86,56%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda	1.822.547.157	1.485.893.166	81,53%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung	1.275.056.250	1.126.994.848	88,39%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung	1.421.000.875	1.046.308.759	73,63%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur	1.140.845.507	930.850.447	81,59%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung	647.095.049	533.759.837	82,49%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji	1.058.396.560	701.350.945	66,27%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu	1.333.288.871	1.116.421.542	83,73%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas	790.774.683	638.974.448	80,80%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong	2.899.109.370	2.022.865.940	69,78%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II	475.069.250	380.327.850	80,06%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu	631.951.502	497.017.635	78,65%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gantung	956.709.329	689.977.850	72,12%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya	774.900.074	636.810.300	82,18%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru	141.624.000	-	0,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Kinerja Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN dari target 52% tercapai 115%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN	52%	59,90%	115%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.2.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun Permasalahan yang dihadapi sehingga 5 indikator tidak tercapai adalah karena:

- 1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
 - a) Kompetensi petugas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan ibu (hamil, bersalin, nifas) dan bayi baru lahir belum maksimal.
 - b) Target yang terlalu rendah dari tahun sebelumnya
- 2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
 - a) Pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda bahaya pada bayi (0-11 bulan) masih kurang.
 - b) Target yang terlalu rendah dari tahun sebelumnya.
- 3) Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar Nasional
 - a) Ketersediaan sumber daya yang belum terlatih sesuai standart kementerian kesehatan
 - b) Sarana dan prasana program yang belum optimal
 - c) Dukungan pembiayaan yang belum memadai
 - d) Manajemen mencatatkan pelaporan yg belum dilakukan dengan disiplin dan berkesinambungan.



- 4) Jumlah puskesmas BLUD
 - a) Penetapan puskesmas BLUD baru dapat diketahui pada tahun 2018, namun pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada 4 puskesmas yaitu Puskesmas Ciputat, Puskesmas Pondok Aren, Puskesmas Benda barudan Puskesmas Pamulang
- 5) Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS
 - a) Hal ini disebabkan masih dalam proses tahapan penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan SOP pencairan jasa pelayanan darah serta penandatanganan MOU antara Dinas Kesehatan, PMI dan Rumah Sakit Se Kota Tangerang Selatan.

2. Solusi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

- 1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
 - a) Lebih meningkatkan kompetensi petugas kesehatan melalui peningkatan kompetensi kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir melalui pelatihan, bimtek dan OJT adalah upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan dalam rangka menekan angka kematian ibu.
- 2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
 - a) Lebih meningkatkan penyebarluasan informasi melalui media penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya pada bayi (0-11 bulan) kepada masyarakat
- 3) Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar Nasional
 - a) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang terjadi di tingkat puskesmas yang sesuai dengan kondisi masing
 - b) Melakukan intervensi atau kegiatan tindak lanjut dalam mengatasi masalah yang telah teridentifikasi diatas`
 - c) Melakukan pembinaan dan pendampingan pada kegiatan program yg menemui permasalahan
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur dan terjadwal
 - e) Menyusun laporan hasil kegiatan untuk di analisa dan dilaporkan kepada pimpinan untuk di ambil langkah-langkah kebijakan bila diperlukan demi tercapainya sasaran dan target program yg belum tercapai pada tahun berikutnya.
 - f) seluruh kegiatan tersebut diatas telah tercermin atau terimplemasikan pada kegiatan yg ada pada DPA kegiatan program seksi P2PM Tahun anggaran 2018.
- 4) Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS
 - a) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan darah.



- b) Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaksanaan pembiayaan darah
- c) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PMI Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Rumah Sakit SeKota Tangerang Selatan
- d) Sosialisasi mengenai pelaksanaan Pelayanan Darah

A.2.2. Rumah Sakit Umum

A.2.2.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan pelayanan kesehatan**, program ini diarahkan pada pelayanan yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu (1) Penyediaan, Pemeliharaan Bank Darah RS, (2) Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit, (3) Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit, (4) Pengelolaan Jasa Pelayanan dan (5) Pelayanan Kesehatan Rujukan RS / Sarana Lanjutan.
2. **Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan**, program ini diarahkan untuk memenuhi tingkat instrumen akreditasi rumah sakit, dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu (1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, (2) Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, (3) Pemeliharaan Laundry dan Kebersihan Rumah Sakit, (4) Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit, (5) Pengadaan Sarana Prasarana Keperawatan Rumah Sakit, dan (6) Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit.
3. **Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan**, program ini diarahkan pada resep yang sesuai dengan formularium, dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Pengadaan Obat, makanan dan perbekalan rumah sakit.
4. **Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**, program ini diarahkan pada pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit, dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.
5. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan**, program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan melalui pelatihan minimal 20 jam per tahun yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu (1) Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis, (2) Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat dan Bidan, dan (3) Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang.
6. **Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD**, program ini diarahkan untuk mendapatkan kepuasan pasien yang disurvei, dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD.



7. **Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat**, program ini diarahkan pada pengelolaan limbah rumah sakit yang sesuai standar, dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Pembangunan, Pemeliharaan Pengolahan Limbah Rumah Sakit.

A.2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, menghasilkan kinerja program sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan pelayanan kesehatan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 32.817.574.420 dengan realisasi sebesar Rp 31.933.284.934 (97,31%).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pelayanan kesehatan	32.817.574.420	31.933.284.934	97,31%
Penyediaan, Pemeliharaan Bank Darah RS	1.734.628.420,00	1.635.320.680,00	94,27%
Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit	308.266.000,00	206.013.900,00	66,83%
Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	131.628.000,00	125.903.500,00	95,65%
Pengelolaan Jasa Pelayanan	28.979.082.000,00	28.314.939.754,00	97,71%
Pelayanan Kesehatan Rujukan RS / Sarana Lanjutan	1.663.970.000,00	1.651.107.100,00	99,23%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit, dari target sebesar 14 jenis pelayanan dapat terealisasi sesuai target, yaitu 15 jenis pelayanan yang sudah sesuai SPM pengembangan pelayanan di dalamnya didukung oleh 5 kegiatan, salah satunya kegiatan penyediaan dan pemeliharaan bank darah rumah sakit. Hal tersebut menjadi faktor pendorong keberhasilan pencapaian target karena RSU mampu mengelola darah dengan lebih baik berkat adanya BDRS sehingga yang tadinya layanan transfusi darah belum sesuai standar sekarang sudah memenuhi standar.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit	14	15	107%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. **Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,**

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 30.767.769.394,- dengan realisasi sebesar Rp 29.775.861.910 (96,78%), yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,	30.767.769.394	29.775.861.910	96,78%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	752.561.000,00	547.598.888,00	72,76%
Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	1.474.554.722,00	1.350.099.491,00	91,56%
Pemeliharaan Laundry dan Kebersihan Rumah Sakit	2.471.699.272,00	2.449.272.150,00	99,09%
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit	4.080.760.900,00	3.633.309.276,00	89,04%
Pengadaan Sarana Prasarana Keperawatan Rumah Sakit	1.106.121.000,00	1.080.418.887,00	97,68%
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	20.882.072.500,00	20.715.163.218,00	99,20%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit, dari target sebesar 4 tingkat dasar (4 bab) dapat terealisasi sesuai target 12, yaitu meliputi pemeliharaan fasilitas gedung Rumah Sakit, pemeliharaan alkes dan tersedianya alat kedokteran. Faktor pendorong pencapaian target adalah dilaksanakannya kegiatan penunjang yang bersumber dari DAK, meliputi penyediaan alat kedokteran gawat darurat Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Alat untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA) Kelas III (DAK) dan Alat Kesehatan Ruang Operasi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit	4	12	300%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3. Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan.

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 35.816.720.941,- dengan realisasi sebesar Rp 34.951.975.535 (97,59%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Obat, makanan dan perbekalan rumah sakit.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	35.816.720.941	34.951.975.535	97,59%
Pengadaan Obat, makanan dan perbekalan rumah sakit.	35.816.720.941,00	34.951.975.535,00	97,59%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Persentase resep sesuai dengan formularium, dari target sebesar 70% dapat terealisasi sesuai target, yaitu 95,67%. Faktor pendorong pencapaian target adalah resep yang di buat sesuai dengan formularium RSU. Formularium rumah sakit merupakan penerapan konsep obat esensial di rumah sakit yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase resep sesuai dengan formularium	70%	96%	137%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 713.154.000,- dengan realisasi sebesar Rp 569.900.248,- (**79,91%**), yang dilaksanakan melalui kegiatan Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, namun dengan demikian terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 143.253.752,- atau (20,09%), hal ini terjadi karena di pertengahan tahun pihak ke tiga memutuskan kontrak disebabkan Advetorial *online* Nasional yang tidak dapat melanjutkan kerjasamanya (karena proses pembayaran yang harus dilakukan di muka bukan setelah kwitansi dan SPJ), secara keseluruhan hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerja.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	713.154.000	569.900.248	79,91%
Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	713.154.000,00	569.900.248,00	79,91%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit, dari target sebesar 55% dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi penyediaan Bahan Pendukung Sosialisasi Pelayanan Rumah Sakit sebanyak 12.170 unit. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari tersedianya publikasi advetoriaal dan media informasi Rumah Sakit serta keluaran dari Sosialisasi promosi kesehatan yang dilakukan kurang lebih sebanyak 12 kegiatan sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit	55%	55%	100%	Rumah Sakit Umum	TST

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.434.669.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.092.101.169,- (76,12%), yang dilaksanakan melalui kegiatan 3 kegiatan. Belum optimalnya realisasi anggaran yang baru mencapai 76,12% disebabkan adanya efisiensi pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis, (Pagu Rp.814.210.000,- terrealisasi Rp.587.524.279,-) di karenakan banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah, menyebabkan banyak tiket pesawat yang tidak terserap.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1.434.669.000	1.092.101.169	76,12%
Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis	814.210.000,00	587.524.279,00	72,16%
Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat dan Bidan	450.519.000,00	399.173.220,00	88,60%
Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang	169.940.000,00	105.403.670,00	62,02%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20%, dapat terealisasi sesuai target 50%. Faktor keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya pengiriman pelatihan bagi tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis serta tenaga Rumah Sakit lainnya, pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga medis, tenaga perawat dan bidan serta tenaga penunjang.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	20%	50%	249%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

6. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 24.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 21.995.437.520,- (89,78%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	24.500.000.000	21.995.437.520	89,78%
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	24.500.000.000	21.995.437.520	89,78%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Persentase kepuasan pasien yang disurvei 72%, dapat terealisasi sesuai target 77,84%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD, rumah sakit lebih fleksibel dalam mengelola pendapatan yang dipakai untuk membiayai operasional rumah sakit, sehingga banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien dapat segera diatasi dengan memanfaatkan anggaran BLUD.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase kepuasan pasien yang disurvei	72%	78%	108%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

7. Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat,



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.789.561.300,- dengan realisasi sebesar Rp.767.183.289,- (97,17%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Pengolahan Limbah Rumah Sakit.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	789.561.300	767.183.289	97,17%
Pembangunan, Pemeliharaan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	789.561.300,00	767.183.289,00	97,17%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target, yaitu 100%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena adanya pengolahan Limbah Rumah Sakit Gedung 1 dan pengadaan bahan habis pakai pengolahan limbah.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar	100%	100%	100%	Rumah Sakit Umum	TST

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.2.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum optimalnya realisasi fisik dan keuangan yang direncanakan terjadi pada rapat rutin akreditasi mingguan 1080 orang 540 & rapat rutin akreditasi bulanan sebanyak 550 orang yang terealisasi sebanyak 367 orang
- Rendahnya realisasi keuangan kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit yang direncanakan sebanyak Rp. 308.266.000 terealisasi sebanyak Rp. 206.013.900 Belum terpenuhinya target tersebut disebabkan Rapat Rutin Akreditasi Mingguan & Rapat Rutin Akreditasi Bulanan diserap sesuai kebutuhan, karena di pertengahan tahun akreditasi memakai jasa pihak ketiga.
- Program Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan target 70% Realisasi 95,67% . Resep yang di buat sesuai dengan formularium RSU. Formularium rumah sakit merupakan penerapan konsep obat esensial di rumah sakit yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya
- Program Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD melebihi targer capaian dengan target 72% Realisasi 77,84% karena dengan diterapkannya pola pengelolaan keuangan BLUD, rumah sakit lebih fleksibel dalam mengelola pendapatan yang dipakai untuk membiayai operasional rumah sakit, sehingga banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien dapat segera diatasi dengan memanfaatkan anggaran BLUD
- Program Pengembangan pelayanan kesehatan tahun 2017 ditargetkan 14 Jenis Pelayanan yang akan sesuai SPM terrealisasi 15 pelayanan yang sudah sesuai SPM pengembangan pelayanan di dalamnya didukung oleh 5 kegiatan, salah satunya



kegiatan penyediaan dan pemeliharaan bank darah rumah sakit dengan adanya kegiatan tersebut RSUD mampu mengelola darah dengan lebih baik berkat adanya BDRS sehingga tadinya layanan transfusi darah belum sesuai standar sekarang sudah memenuhi standar

- f. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis, Pagu Rp. 814.210.000 Realisasi Rp. 587.524.279 di karenakan Efisiensi, Banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah banyaknya tiket pesawat yang tidak terserap
 - g. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat dan Bidan Rp.450.519.000 Realisasi 399.173.220, Banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah banyaknya tiket pesawat yang tidak terserap
 - h. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang Pagu Rp. 169.940.000 Realisasi Rp 105.403.670 Banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah banyaknya tiket pesawat yang tidak terserap
 - i. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit tidak mencapai target di indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit target 4 paket realisasi 1 Paket dan realisasi Keuangan Pagu Rp. 752.561.000 realisasi Rp. 547.598.888 karena Penataan ruang kasir tidak dilaksanakan berkaitan masih dalam proses renovasi oleh Dinas bangunan melalui pihak ke-3 nya sampai dengan 31 desember 2017
 - j. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit pagu Rp. 4080760900 realisasi Rp. 3633309276 (89,04%) di karenakan menyesuaikan kebutuhan efisiensi dari Bahan Bakar Minyak/ Gas Penunjang Pelayanan target 13.612 liter realisasi 10.421 liter.
 - k. Kegiatan Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Efisiensi indikator Tersedianya Publikasi Advetoriaal dan Media Informasi Rumah Sakit target 1 Paket realisasi 1 paket di pertengahan tahun pihak ke tiga putus kontrak karena Advetoriaal online nasional yang tidak dapat dilanjutkan kerjasama karena proses pembayaran yang harus dilakukan di muka bukan setelah kwitansi dan SPJ tetapi secara capaian sudah tercapai
 - l. Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Rumah Sakit terjadi efisiensi pagu Rp. 95.990.000 realisasi Rp. 79.204.100 pada makan minum kegiatan dan penggandaan dokumen.
2. Solusi
 - a. Optimalisasi perencanaan dan pengangan.
 - b. Melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia secara bertahap disesuaikan dengan daya tampung gedung yang ada.

A.2.3. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

A.2.2.4. Program dan Kegiatan

1. **Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan** program ini diarahkan pada terbangunnya sejumlah puskesmas, posyandu, bangunan



puskesmas yang dikembangkan, puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan, Lanjutan pembangunan PPKT, lanjutan pembangunan Gedung 2 dan pembangunan Gedung 3 RSUD Kota Tangerang Selatan serta Puskesmas yang direhabilitasi. Dilaksanakan melalui 5 kegiatan yaitu (1) Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pelayanan Kesehatan, (2) Rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan, (3) Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 2, (4) Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 3, dan (5) Pembangunan Gedung PPKT.

A.2.2.5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 119.714.559.538,- dengan realisasi sebesar Rp 55.130.787.613 (46,05%), yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan. Dengan realisasi sebesar 46,05%, terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 64.583.771.925,- atau (53,95%). Beberapa anggaran yang tidak terserap yaitu :

- Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 3 dengan anggaran sebesar Rp. 58.948.611.538,- dikarenakan kegiatan tersebut merupakan Pekerjaan *multy years*, sampai dengan saat ini kegiatan tersebut dalam proses rekomendasi dari TABG oleh MK.
- Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 2, realisasi fisik mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp. 19.174.105.000,- (86,94 %).

Target capaian keuangan yang tidak tercapai disebabkan oleh efisiensi kontrak, penyusunan nilai HPS yang di sesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	119.714.559.538	55.130.787.613	46,05
Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pelayanan Kesehatan	2.218.550.000	2.074.407.400	93,50
Rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	1.913.800.000	1.796.533.000	93,87
Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 2	22.054.426.000	18.235.499.213	82,68
Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 3	58.948.611.538	-	0,00
Pembangunan Gedung PPKT	34.579.172.000	33.024.348.000	95,50

Sumber : Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Indikator kinerja program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, yaitu sebagai berikut.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah puskesmas yang terbangun	31	30	97%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Jumlah bangunan posyandu yang dibangun	47	30	64%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Jumlah puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan	3	2	67%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Jumlah Bangunan PPKT	0,39	0,44	113%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TMT
Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	7	3	43%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Bangunan RSUD (Gedung 3)	2%	0%	0%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Bangunan Gedung 2 RSU Tangsel	100%	100%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.2.2.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Target capaian keuangan yang tidak tercapai pada kegiatan Pembangunan RSU kota Tangerang Selatan Gedung 2 disebabkan oleh efisiensi kontrak, penyusunan nilai HPS yang disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan.
- Belum optimalnya penyerapan paket pekerjaan *multy years* pada Kegiatan Pembangunan RSU kota Tangerang Selatan Gedung 3, dikarenakan masih dalam tahap rekomendasi dari TABG oleh Konsultan MK.
- Tidak adanya ketersediaan lahan (aset pemerintah kota) untuk pembangunan puskesmas atau posyandu yang diusulkan sesuai dengan data usulan musrenbang kelurahan.

2. Solusi

- Peningkatan koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan baik sisi anggaran maupun teknis kegiatan untuk Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.
- Melaksanakan perencanaan serta manajemen kegiatan dengan lebih baik serta melanjutkan paket pekerjaan *multy years* pada kegiatan ditahun selanjutnya untuk mengatasi permasalahan kegiatan Pembangunan RSU Kota Tangerang Selatan Gedung 3.
- Mengoptimalkan kegiatan Koordinasi Pembangunan RSU Kota Tangerang Selatan Gedung 3
- Meningkatkan koordinasi antara Dinas Bangunan dan Penataan Ruang dengan Dinas terkait lainnya.



- e. Mensyaratkan ketersediaan lahan milik pemerintah kota untuk kebutuhan pembangunan
- f. Mengupayakan penyelesaian permasalahan teknis pembangunan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan lebih maksimal
- h. Pelaksanaan pekerjaan dirancang lebih optimal dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu pelaksanaan.

A.3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh; 1) Dinas Pekerjaan Umum, 2) Bappeda, dan 3) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.

A.3.1. Dinas Pekerjaan Umum

A.3.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**, program ini diarahkan pada pembangunan jalan dan jembatan serta jalan lingkungan dalam kondisi baik, dan terbangunnya pedestrian jalan, melalui kegiatan peningkatan kualitas pembangunan jalan, baik jalan inspeksi, jalan lingkungan dan jalan wilayah I s/d III, pemeliharaan jalan lingkungan di 7 kecamatan serta pembangunan pedestrian.
2. **Pengendalian banjir**, Program ini diarahkan pada pengurangan luas genangan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan dengan kegiatan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir, Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane, Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Angke, Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Pesanggrahan, Penanganan Banjir. Diharapkan dengan program ini maka banjir yang ada di bisa dikendalikan dengan baik.
3. **Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya**, program ini diarahkan pada pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku serta menjaga kapasitas debit sungai /tandon, melalui kegiatan pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku, serta menjadi kapasitas debit sungai /tandon, melalui kegiatan pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan di 6 Kecamatan, Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Air, Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir, Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane, Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Angke, Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Pesanggrahan, Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air.
4. **Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong**, Program ini diarahkan pada menjaga kapasitas Debit Saluran, melalui kegiatan pembangunan



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

drainase/gorong-gorong di 7 kecamatan, perencanaan, pengawasan dan pembangunan Drainase Kota.

Selama Tahun 2017, menghasilkan kinerja program sebagai berikut :

- 1 **Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**, dilaksanakan melalui 54 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.412.326.906,- dan ter-realisasi sebesar Rp. 207.699.273.615,- atau 93,81%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	221.412.326.906,00	207.699.273.615,00	93,81%
Inspeksi Kondisi Jalan	1.451.785.300,00	1.042.054.900,00	71,78%
Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)	722.960.940,00	691.150.570,00	95,60%
Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	89.500.000,00	87.810.000,00	98,11%
Pengendalian Pemanfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air	6.160.267.300,00	6.157.700.850,00	99,96%
Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi & Peraturan Lainnya yang terkait	116.470.200,00	116.470.200,00	100,00 %
Pembangunan Jalan Wilayah I	17.606.154.232,00	16.489.674.400,00	93,66%
Pembangunan Jalan Wilayah II	12.772.944.500,00	12.030.539.500,00	94,19%
Pembangunan Jalan Wilayah III	25.734.066.480,00	24.650.451.480,00	95,79%
Pembangunan Jembatan	10.601.576.200,00	10.502.450.700,00	99,06%
Pengawasan Pembangunan Jembatan	307.739.500,00	307.347.500,00	99,87%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat	6.568.071.100,00	6.553.769.100,00	99,78%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur	8.145.039.529,00	8.127.554.100,00	99,79%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong	7.905.245.068,00	7.879.636.900,00	99,68%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong Utara	6.803.352.509,00	6.785.705.900,00	99,74%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Setu	6.566.211.053,00	6.506.844.100,00	99,10%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren	7.688.099.848,00	7.586.977.800,00	98,68%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang	8.920.535.047,00	8.901.123.500,00	99,78%
Perencanaan Pembangunan Jalan Kota	1.200.000.000,00	1.166.633.000,00	97,22%
Perencanaan Pembangunan Jembatan	900.000.000,00	883.600.400,00	98,18%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Bidang Bina Marga	440.000.000,00	435.500.900,00	98,98%
Pemeliharaan Jalan	13.918.604.000,00	13.900.627.404,00	99,87%
Pemeliharaan Jembatan	4.150.000.000,00	4.105.703.100,00	98,93%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat	2.750.000.000,00	2.746.636.200,00	99,88%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur	2.750.000.000,00	2.739.035.600,00	99,60%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong	3.397.000.000,00	3.394.306.500,00	99,92%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong Utara	3.000.000.000,00	2.996.541.800,00	99,88%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Setu	2.750.000.000,00	2.736.489.900,00	99,51%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren	3.700.000.000,00	3.692.923.700,00	99,81%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang	3.500.000.000,00	3.487.625.800,00	99,65%
Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Kontruksi	96.704.000,00	96.680.660,00	99,98%
Pengembangan dan Pengolahan Teknologi Informasi	380.000.000,00	369.360.000,00	97,20%
Penyusunan Data Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air	766.000.000,00	762.775.000,00	99,58%
Pengujian dan Penunjang Kegiatan Laboratorium Kebinamargaan	685.950.000,00	658.754.000,00	96,04%
Pemeliharaan Peralatan Pengujian Laboratorium Kebinamargaan	153.700.000,00	130.783.585,00	85,09%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah I	150.000.000,00	149.614.800,00	99,74%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah II	150.000.000,00	149.400.000,00	99,60%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah III	200.000.000,00	157.880.000,00	78,94%
Pengawasan Pembangunan Jalan Wilayah I,II,III	1.216.802.000,00	1.201.485.100,00	98,74%
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah I	922.064.000,00	902.933.200,00	97,93%
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah II	762.017.000,00	743.627.000,00	97,59%
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah III	1.490.937.000,00	1.447.144.500,00	97,06%
Pembangunan Turap Jalan	2.340.060.100,00	2.136.392.100,00	91,30%
Pemeliharaan Turap Jalan	1.500.000.000,00	1.231.387.716,00	82,09%
Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan	19.000.000.000,00	11.972.052.500,00	63,01%
Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah I	733.854.000,00	723.601.700,00	98,60%
Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah II	741.000.000,00	738.217.000,00	99,62%
Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah III	1.485.823.000,00	1.477.078.000,00	99,41%
Perencanaan Pedestrian Saluran dan Jalan	1.500.000.000,00	1.499.489.700,00	99,97%
Pemeliharaan Pedestrian Saluran dan Jalan	1.500.000.000,00	1.499.448.900,00	99,96%
Pengawasan Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan	621.793.000,00	617.629.000,00	99,33%
Pembangunan Jembatan (Ban.Keu Prov)	4.100.000.000,00	3.977.832.800,00	97,02%
Pembangunan Jalan (Ban.Keu Prov)	3.000.000.000,00	2.793.606.800,00	93,12%
Perencanaan Jalan (Ban.Keu Prov)	300.000.000,00	286.917.250,00	95,64%
Pembangunan Pedestrian (Ban.Keu Prov)	7.000.000.000,00	5.272.296.500,00	75,32%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai yaitu Jalan dan jembatan dalam kondisi baik berhasil meningkatkan 96% dari yang ditargetkan 84%. Begitu pula dengan kinerja Jalan lingkungan dalam kondisi baik dan Pedestrian jalan yang dibangun dari target masing-masing sebesar 5% dan 2% pedestrian jalan yang dibangun dapat terealisasi sesuai target. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
-------------------	--------	-----------	---------	-----	-------



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	84%	96%	115%	Dinas Pekerjaan Umum	TMT
Jalan lingkungan dalam kondisi baik	50%	50%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST
Pedestrian jalan yang dibangun	2%	2%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

- 2 **Program Pengendalian Banjir**, dilaksanakan melalui 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.690.401.900,- dan ter-realisis sebesar Rp. 36.059.682.982,- atau 95,67%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengendalian Banjir,	37.690.401.900,00	36.059.682.982,00	95,67%
Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir	4.756.911.800,00	4.751.298.722,00	99,88%
Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane	3.511.661.500,00	3.510.868.900,00	99,98%
Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Angke	10.925.828.600,00	10.917.619.800,00	99,92%
Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Pesangrahan	7.200.000.000,00	7.041.033.160,00	97,79%
Penanganan Banjir (Ban.Keu Prov)	11.296.000.000,00	9.838.862.400,00	87,10%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai yaitu persentase luas genangan yang tereduksi adalah berhasil meningkatkan 34% dari yang ditargetkan 34% atau berhasil mencapai target sejumlah 100 %. Faktor keberhasilan pencapaian target antara lain karena kegiatan yang dilaksanakan 99,39% berhasil dilaksanakan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
luas genangan yang tereduksi	34%	34%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

- 3 **Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya**, dilaksanakan melalui 14 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.615.100.701,- dan ter-realisis sebesar Rp. 52.295.708.300,- atau 99,39%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	52.615.100.701,00	52.295.708.300,00	99,39%
Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan di 7 Kecamatan	11.200.000.000,00	11.151.170.700,00	99,56%
Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Air	3.700.000.000,00	3.681.842.500,00	99,51%
Pengawasan Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air	858.104.400,00	768.746.900,00	89,59%
Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir	12.163.777.000,00	12.147.483.000,00	99,87%
Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane	15.282.559.681,00	15.161.466.600,00	99,21%
Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Angke	5.257.659.620,00	5.246.481.600,00	99,79%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Pesanggrahan	1.293.000.000,00	1.289.551.400,00	99,73%
Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	2.860.000.000,00	2.848.965.600,00	99,61%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Salah satu indikator Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku dan indikator Kapasitas debit sungai /tandon, dari target masing-masing sebesar 14% dan 34% dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendorong pencapaian target ini adalah kegiatan yang dilaksanakan 98,88% berhasil dilaksanakan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku	14%	14%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST
Kapasitas debit sungai /tandon	34%	34%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

- 4 Program Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong, dilaksanakan melalui 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.963.518.133,- dan ter-realisis sebesar Rp. 57.097.231.100,- atau 98,51%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong	57.963.518.133,00	57.097.230.700,00	98,51%
Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan di 7 Kecamatan	33.511.289.633,00	33.338.126.500,00	99,48%
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kota	2.700.000.000,00	2.699.255.500,00	99,97%
Pengawasan Pembangunan Saluran Lingkungan Wilayah I, II & III	2.017.465.600,00	1.986.200.800,00	98,45%
Pengawasan Peningkatan Penanganan Drainase Kota	706.581.000,00	681.709.000,00	96,48%
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Wil.I, II & III	2.854.025.000,00	2.826.778.000,00	99,05%
Pembangunan Drainase Kota	6.820.156.900,00	6.795.242.200,00	99,63%
Pemeliharaan Saluran Drainase Kota	4.050.000.000,00	4.044.349.900,00	99,86%
Pembangunan Drainase Kota (Ban.Keu Prov)	5.304.000.000,00	4.725.569.200,00	89,09%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja yang dihasilkan sangat baik sudah mencapai 100%, bisa dilihat dari rata-rata pelaksanaan kegiatan yang diperoleh 98,55% terlaksana.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Kapasitas Debit Saluran	40%	40%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

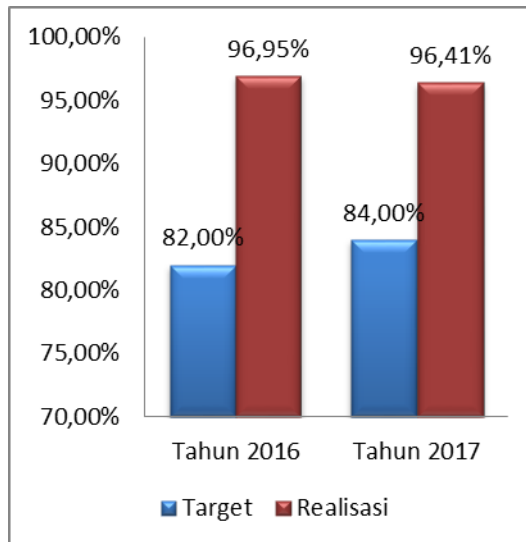
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

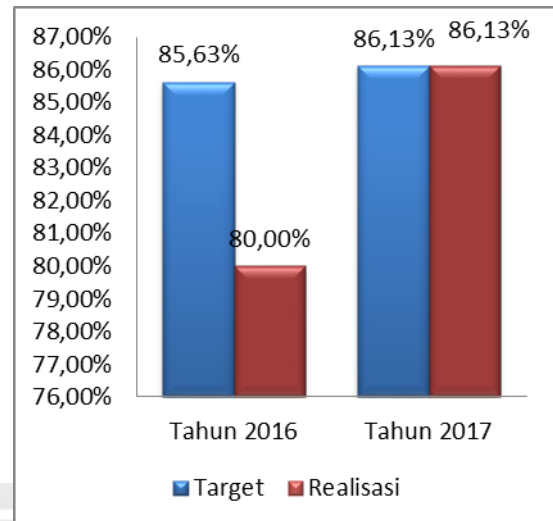


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Grafik Error! No text of specified style in document.-8. Realisasi dan Target Jalan dan jembatan dalam kondisi baik Tahun 2016-2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-8. Realisasi dan Target persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Tahun 2016-2017



A.3.1.2. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Pelaksanaan pada kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh tidak diserapnya Perjalanan Dinas dan kegiatan Monitoring Utilitas, Survey Rekomendasi Utilitas dan Sinkronisasi dan koordinasi Lintas Sektor terkait jaringan utilitas tidak dilaksanakan dikarenakan ketersediaan waktu yang tidak mencukupi.
- Rendahnya Realisasi Keuangan pada Kegiatan Penanganan Banjir (Bankeu. Prov) disebabkan oleh efisiensi atau sisa kontrak pekerjaan, adapun fisik dilapangan dilaksanakan 100%.
- Rendahnya Realisasi Keuangan pada kegiatan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Laboratorium Kebinamargaan dikarenakan pemeliharaan alat Hummer tes tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya alat yang memenuhi spesifikasi dan pembuatan kolam tampungan untuk pengujian tidak dilaksanakan dikarenakan ketersediaan lahan yang digunakan untuk kepentingan lainnya (Depo Arsip).
- Rendahnya Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah III disebabkan oleh efisiensi anggaran, adapun Pemeliharaan Alat sudah dilaksanakan 100%.
- Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan terkendala oleh Pembebasan Lahan dan utilitas PLN belum dipindahkan namun pelaksanaan Pekerjaan Fisik dapat dilaksanakan 100%.

- f) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pedestrian (Bankeu. Prov) terkendala oleh lokasi dilapangan terbatas untuk pembangunan Saluran pembuang, tetapi pelaksanaan Pekerjaan Fisik dapat dilaksanakan 100%.
- g) Rendahnya Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pembangunan Drainase Kota (Bankeu. Prov) disebabkan oleh efisiensi anggaran, adapun Pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan sudah dilaksanakan 100%.

2. Solusi

- a) Terkait Kegiatan Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan akan dilakukan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait (PLN) agar utilitas tersebut dapat segera dipindahkan dan terkait lahan akan di koordinasikan kembali dengan badan pertanahan agar segera untuk di bebaskan lahannya.

A.3.2. Badan Perencanaan Pembangunan

A.3.2.1. Program dan Kegiatan

- 1. **Perencanaan Tata Ruang**, program ini diarahkan pada informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan

A.3.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program perencanaan tata ruang menghasilkan kinerja sebagai berikut :

- 1 **Program Perencanaan Tata Ruang**, dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,457,700,000,- dan ter-realisasi sebesar Rp. 1,403,100,000,- atau 96.25%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perencanaan Tata Ruang	1,457,700,000.00	1,403,100,000.00	96.25%
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	1,457,700,000.00	1,403,100,000.00	96.25%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Tahun 2018

Indikator kinerja Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah dari target masing-masing sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendorong pencapaian target ini adalah dilaksanakannya seluruh kegiatan dengan capaian 96.25%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	100%	100%	100%	BEPEDA	TST

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



A.3.3. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

A.3.3.1. Program dan Kegiatan

1. **Pengembangan Sarana Air Minum dan Air Limbah**, program ini diarahkan pada penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dan pelayanan air minum, melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air limbah serta penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat.
2. **Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung**, program ini diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana gedung perkantoran, sarana dan prasarana gedung non perkantoran serta terlayannya masyarakat dalam pengurusan kajian dan rekomendasi teknis serta sertifikat laik fungsi, melalui kegiatan penyediaan dan pembangunan Gedung Kantor/ Sarpras di 7 Kecamatan, pemeliharaan serta pembangunan Gedung milik pemerintah, meliputi gedung DPRD, Masjid Raya, Depo Arsip, Gedung Pelayanan Perizinan Masyarakat, kantor Ketahanan Masyarakat, Gedung Parkir Puspem tahap 3, gedung galeri Koperasi dan UKM, pembangunan RSU gedung 3, serta Gelanggang Budaya.
3. **Pengedalian dan Pemanfaatan Ruang**, program ini diarahkan pada masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan, melalui kegiatan Penyusunan Pedoman Pengendalian Ruang Kota, dan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Ruang.
4. **Perencanaan Tata Ruang**, program ini diarahkan pada Rencana Teknis Ruang Kawasan, Survey Dan Pemetaan, serta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang kepada masyarakat.

A.3.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, kinerja program yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut :

- 1 **Pengembangan Sarana Air Minum dan Air Limbah**, dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.421.360.000,- dan ter-realisasi sebesar Rp8.026.019.000,- atau 95,31%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Sarana Air Minum dan Air Limbah	8.421.360.000	8.026.019.000	95,31
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	3.603.500.000	3.458.380.500	95,97
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat	4.817.860.000	4.567.638.500	94,81

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai yang ditargetkan 86,13% berhasil mencapai target sebesar 86,13% hal ini menunjukkan adanya pemenuhan cakupan penduduk yang terlayani untuk sistem air limbah secara memadai. Begitu pula dengan Persentase pelayanan air minum berhasil dicapai sesuai target 100%. Faktor pendorong pencapaian target ini adalah dilaksanakannya seluruh kegiatan dengan rata-rata realisasi 95,39%.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	86,13%	86,13%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST
Persentase pelayanan air minum	83,50%	83,50%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung, dilaksanakan melalui 33 kegiatan, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 288.194.302.877,- realisasi mencapai Rp. 177.001.521.924,- (61,42%), dengan demikian terdapat deviasi anggaran sebesar Rp. 111.192.780.953.atau (-38,58%). Besaran deviasi disebabkan oleh pekerjaan pembangunan & MK *Multy Years* total sebesar Rp. 108.018.934.945,- dan efisiensi pekerjaan sebesar Rp. 3.173.846.008,-. Berikut beberapa anggaran kegiatan yang tidak penuh terserap:

- Efisiensi pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan, Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan dengan penyerapan, serta Pembangunan Sarpras Penunjang Perkotaan yang tidak terlaksana sehingga pekerjaan pengawasan tidak terlaksana juga.
- Efisiensi pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah, dan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor/Sarpras Perkantoran yang tidak terlaksananya sehingga pekerjaan pengawasan tidak terlaksana juga.
- Efisiensi pekerjaan Pengujian Material Struktur Bangunan/Infrastruktur, serta adanya Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium dan Pengujian Konstruksi yang tidak terlaksana dikarenakan alat uji belum terdaftar di e-catalog.
- Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, belum terlaksananya untuk pekerjaan Pembangunan Interior Ruang Walikota (*common room*) dan Pekerjaan Podium dan Interior Balaikota dikarenakan masih dalam proses reviu desain.
- Efisiensi Pembangunan Gedung Kantor/Sarpras di Kecamatan Serpong.
- Efisiensi Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Ciputat Timur,
- Efisiensi Pembangunan Gedung Kantor/Sarpras di Kecamatan Ciputat,
- Efisiensi Pembangunan Gedung Kantor/Sarpras di Kecamatan Serpong Utara, deviasi anggaran merupakan hasil efisiensi selisih pagu dengan nilai kontrak pekerjaan.
- Pembangunan Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan, belum terlaksananya pekerjaan Pengadaan Lift, Genset, Furniture/Meubeler, dan Pekerjaan Interior disebabkan oleh gagal lelang karena peserta lelang tidak memenuhi persyaratan dan masih dalam pekerjaan akhir pembangunan.
- Pembangunan Sarpras Penunjang Perkotaan, rendahnya capaian realisasi sebesar 45,70% disebabkan tidak terlaksananya paket pekerjaan Pengadaan Videotron



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Gerbang Batas Kota dengan Kota Tangerang dikarenakan gagal lelang dimana peserta tidak memenuhi persyaratan sehingga Pembangunan Tugu Batas Kota Tangerang Selatan Tahap 3 juga tidak dapat dilaksanakan. Serta tidak terlaksanakannya Pembangunan Pos Pantau Lalu Lintas dikarenakan telah dilaksanakan oleh pihak swasta.

- k. Pengendalian Teknis Bangunan gedung dan Bangunan Lainnya, rendahnya capaian realisasi sebesar 30,23% pada kegiatan Pengendalian Teknis Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya disebabkan oleh jumlah permohonan pembangunan reklame yang tidak banyak sehingga berdampak kepada pelaksanaan jasa konsultasi pengawasan bangunan reklame
- l. Efisiensi Pembangunan Masjid Raya Tangerang Selatan.
- m. Pembangunan Gedung Pelayanan Perizinan Masyarakat, kegiatan merupakan Pekerjaan Multi Years. Dalam proses rekomendasi dari TABG oleh MK
- n. Efisiensi Pembangunan Gedung Parkir Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan TAHAP 3.
- o. Pembangunan gedung galeri koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, kegiatan merupakan Pekerjaan *Multy Years*. Dalam proses rekomendasi dari TABG oleh MK
- p. Penataan Bangunan Gedung, rendahnya capaian realisasi sebesar 49,36% pada kegiatan penataan bangunan disebabkan tidak banyaknya jumlah permohonan rekomendasi ke TABG dari yang telah direncanakan sehingga berdampak kepada pelaksanaan jumlah sidang dan honorarium TABG
- q. Manajemen Konstruksi pembangunan RSUD kota tangerang selatan gedung 3, merupakan paket pekerjaan *Multy Years*. Pelaksanaan pekerjaan dalam tahap pemeriksaan desain gedung oleh TABG dan reviu dimana selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan dokumen pengadaan.
- r. Manajemen Konstruksi pembangunan gedung galeri koperasi dan UKM kota tangerang selatan, merupakan paket pekerjaan *Multy Years*. Pelaksanaan pekerjaan dalam tahap pemeriksaan desain gedung oleh TABG dan reviu dimana selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan dokumen pengadaan.
- s. Manajemen Konstruksi pembangunan gedung pelayanan perizinan masyarakat, merupakan paket pekerjaan *Multy Years*. Pelaksanaan pekerjaan dalam tahap pemeriksaan desain gedung oleh TABG dan reviu dimana selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan dokumen pengadaan.
- t. Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Perkantoran, target Capaian keuangan yang tidak terpenuhi dikarenakan adanya efisiensi selisih pagu dengan hasil penawaran kontrak dan belum dapat terlaksananya Penyusunan Reviu Dokumen Perencanaan Gedung Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dikarenakan dokumen DED masih belum selesai. Serta Penyusunan Dokumen Perencanaan *Rooftop* Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan yang harus menunggu pekerjaan fisik selesai terlebih dahulu.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan dan Gedung	288.194.302.877	177.001.521.924	61,42
Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan, Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan	979.160.700	324.189.900	33,11
Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Gedung Sekolah	3.608.072.920	3.249.737.420	90,07
Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah	7.936.653.400	5.288.580.500	66,63
Pengujian Material Struktur Bangunan / Infrastruktur	5.200.890.000	3.256.545.000	62,62
Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	39.260.198.750	33.163.765.350	84,47
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Pondok Aren	4.853.448.600	4.552.320.000	93,80
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Serpong	5.280.675.000	4.560.618.000	86,36
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Ciputat Timur	1.530.000.000	1.251.161.500	81,78
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Ciputat	5.162.909.000	4.263.034.000	82,57
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Setu	210.000.000	203.910.000	97,10
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Pamulang	1.230.000.000	1.158.677.000	94,20
Pembangunan Gedung Kantor / Sarpras di Kecamatan Serpong Utara	6.435.000.000	5.690.738.700	88,43
Pembangunan Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan	66.898.803.400	33.410.813.400	49,94
Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah	1.400.000.000	1.341.205.600	95,80
Pembangunan Sarpras Penunjang Perkotaan	9.667.378.400	4.417.516.640	45,70
Penataan Sarana dan Prasarana Halaman Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	8.000.000.000	7.517.558.000	93,97
Pengendalian teknis Bangunan gedung dan Bangunan Lainnya	780.570.000	235.932.250	30,23
Pembangunan Masjid Raya Tangerang Selatan	6.000.000.000	5.418.511.880	90,31
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data/Informasi Capaian Target Kinerja	121.341.300	116.152.000	95,72
Pembangunan Gedung Pelayanan Perizinan Masyarakat	20.830.260.719	31.840.400	0,15
Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu	25.020.150.000	23.238.290.000	92,88
Pembangunan kantor Ketahanan Masyarakat	1.753.880.000	1.606.153.000	91,58
Pembangunan Gedung Parkir Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	15.000.000.000	13.373.440.850	89,16
TAHAP 3			
Pembangunan gedung galeri koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan	26.374.219.688	3.046.100	0,01



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penataan Bangunan Gedung	3.523.461.600	1.739.314.434	49,36
Manajemen Konstruksi pembangunan RSU kota tangerang selatan gedung 3	886.738.600	1.627.400	0,18
Manajemen Konstruksi pembangunan gedung galeri koperasi dan UKM kota tangerang selatan	549.800.000	1.735.000	0,32
Manajemen Konstruksi pembangunan gedung pelayanan perizinan masyarakat	469.678.000	2.124.700	0,45
Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Perkantoran	4.084.462.100	3.392.602.600	83,06
Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Non Perkantoran	8.196.490.200	7.731.516.000	94,33
Pembangunan Gelanggang Budaya	6.950.060.500	6.458.864.300	92,93

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran yang ditargetkan 10 unit bertambah menjadi 9 unit gedung atau berhasil mencapai target sebesar 190%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah gedung perkantoran yang dibangun pada tahun 2017. Begitupula dengan sarana dan prasarana gedung non perkantoran bertambah sebanyak 4 unit atau 300% pada tahun 2017. Sedangkan untuk 3 indikator lainnya belum mencapai target.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran	10	19	190%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TMT
Tersedianya sarana dan prasarana gedung non perkantoran	2	6	300%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TMT
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan kajian dan rekomendasi teknis serta sertifikat laik fungsi	1	1	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

- Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang**, dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan ter-realisis sebesar Rp. 222.150.000,- atau 74,05%, dengan demikian terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 77.850.000,- atau (25,95%). Belum optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan efisiensi sub kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Keterangan Peruntukan Ruang yang menyesuaikan dengan pengajuan rekomendasi peruntukan lahan oleh masyarakat dan tidak terlaksananya sub kegiatan Fasilitas Pengaduan Masyarakat dikarenakan tidak adanya pengaduan serta efisiensi kegiatan Penyusunan Sistem Katalog Surat Keterangan Peruntukan Ruang.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	300.000.000	222.150.000	74,05
Penyusunan Pedoman Pengendalian Ruang Kota	70.000.000	65.350.000	93,36
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Ruang	230.000.000	156.800.000	68,17

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Terlayannya masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan, dari target sebesar 50% dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah telah dilaksanakannya penyusunan instrumen pengendalian ruang kota sebanyak 1 dokumen. Sedangkan dalam Kebijakan pengendalian ruang telah diterbitkan sebanyak 600 dokumen surat keterangan peruntukan ruang dan arahan pemanfaatan ruang selama tahun 2017, dari sisi fasilitasi pengaduan pemanfaatan ruang telah dilaksanakan sebanyak 13 kali serta untuk menunjang kebijakan pengendalian ruang telah disediakan satu sistem aplikasi katalog surat keterangan peruntukan ruang

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Kesesuaian program pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	71%	71%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan	100%	100%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

- 4 Perencanaan Tata Ruang**, dilaksanakan melalui 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.078.000.000,- dan ter-realisasi sebesar Rp. 886.062.000,- atau 82,19%, dengan demikian terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 191.938.000,- atau (17,81%). Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh efisiensi selisih pagu dengan nilai kontrak pekerjaan dan belum terlaksananya Sosialisasi Perda RDTR dikarenakan dalam proses pelengkapan dokumen pendukung perda.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Perencanaan Tata Ruang	1.078.000.000	886.062.000	82,19
Rencana Teknis Ruang Kawasan	300.000.000	273.127.000	91,04
Survey dan Pemetaan	578.000.000	541.360.000	93,66
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	200.000.000	71.575.000	35,79

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Ketersediaan rencana tata ruang beserta rencana detail dan rencana teknis, dari target sebesar 50% dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah telah dilaksanakannya Penyusunan rencana tata ruang kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebanyak 2 dokumen. Sedangkan dalam Kegiatan Survey Dan Pemetaan telah dilaksanakannya Penyusunan Peta Landuse yang Up to Date Tahun 2017, Tersusunnya Peta Dasar di 7 (tujuh) Kecamatan yang update sesuai kondisi eksisting sebanyak 7 dokumen serta Bimbingan Teknis Pelatihan Pemetaan Tematik Berbasis SIG Tingkat Dasar (Lanjutan).



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Ketersediaan rencana tata ruang beserta rencana detail dan rencana teknis	50%	50%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST
Ketersediaan NSPK Bidang Tata Ruang	30%	30%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.3.3.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Terdapat kegiatan yang gagal lelang karena tidak ada penyedia jasa yang melakukan penawaran, dan paket yang batal lelang dikarenakan dokumen perencanaan yang belum dapat direview (menunggu hasil appraisal),
- Terdapat pengadaan barang yang tidak dapat dilaksanakan karena belum tersedia dalam E-katalog.
- Tidak adanya ketersediaan lahan (aset pemerintah kota) untuk pembangunan yang diusulkan sesuai dengan data usulan musrenbang kelurahan.
- Adanya edaran mengenai moratorium pemberian hibah dan bansos dari Bawaslu Provinsi Banten terkait pembangunan yang berada pada lahan milik masyarakat

2. Solusi

- Melakukan penganggaran kembali ditahun berikutnya untuk kegiatan yang gagal lelang setelah dilakukan kajian/telaahan/evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya
- Mengusulkan pengadaan barang yang belum tersedia pada E-katalog
- Mensyaratkan ketersediaan lahan milik pemerintah kota untuk kebutuhan pembangunan
- Mengupayakan penyelesaian permasalahan teknis pembangunan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan lebih maksimal
- Pelaksanaan pekerjaan dirancang lebih optimal dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu pelaksanaan.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah dan pusat mengenai kelengkapan dokumen yang harus disusun.



A.4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penyelenggara Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

A.4.1. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

A.4.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Penataan Lingkungan Terpadu**, program ini diarahkan pada pengurangan luasan permukiman kumuh di perkotaan, pembangunan sarana penunjang permukiman, Penyediaan rumah susun sederhana sewa serta perbaikan Rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
2. **Pengembangan infrastruktur permukiman**, program ini diarahkan pada masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil, penyediaan data rumah dan perumahan, terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun, terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak, serta tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset.
3. **Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman**, program ini diarahkan pada Pengembangan dan Pembangunan TPU, terpeliharanya sarana TPU, serta pembinaan kelembagaan pengelolaan TPU.
4. **Pengembangan Penyediaan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)**, program ini diarahkan pada penambahan jumlah PJU terbangun serta terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU.

A.4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, kinerja program yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut :

1 Program Penataan Lingkungan Terpadu,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 28.466.879.000,- dengan realisasi sebesar Rp 23.087.202.176,-- (81,10%), yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penataan Lingkungan Terpadu	28.466.879.000,00	23.087.202.176,00	81%
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	517.175.000,00	448.486.400,00	87%
Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan	725.407.000,00	685.379.600,00	94%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Perbaikan rumah umum tidak layak huni	15.677.790.000,00	12.727.070.300,00	81%
Pembangunan Sarana Penunjang Permukiman	6.619.500.000,00	4.831.184.876,00	72%
Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan	4.927.007.000,00	4.395.081.000,00	89%

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan seluas 335,4 Ha, berkurang 112,53 Ha menjadi 222,87 Ha di tahun 2017, dimana target capaian kinerja ini dapat terealisasi 34%, hal ini menunjukkan adanya pengurangan presentase luas kawasan kumuh sekitar 66,45%.

Terbangunnya sarana penunjang permukiman yang ditargetkan 30 unit bertambah menjadi 39 unit atau berhasil mencapai target sebesar 130%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan sarana penunjang permukiman yang telah dibangun selama tahun 2017. Penyediaan rumah susun sederhana sewa yang ditargetkan 0%, menjadi 1 unit rusun atau berhasil membangun 1 unit rusun di tahun 2017.

Rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang ditargetkan 200 Unit bertambah menjadi 206 unit atau berhasil mencapai target sebesar 103%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas rumah yang layak dihuni di tahun 2017 sebesar 206 unit

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)	335,4	112,53	34%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
Terbangunnya sarana penunjang permukiman	30	39	130%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Penyediaan rumah susun sederhana sewa (unit)	0	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni	200	206	103%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2 Pengembangan infrastruktur permukiman,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.427.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.928.064.700,- (66%), yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Infrastruktur Permukiman	4.427.350.000,00	2.928.064.700,00	66%
Koordinasi Pembangunan Perumahan Tapak dengan Lembaga/Badan	726.000.000,00	299.887.500,00	41%
Koordinasi Pembangunan Perumahan Susun dengan Lembaga/Badan	2.628.250.000,00	1.590.367.200,00	61%
Pembangunan dan Pengembangan Database dan Informasi Digital	448.300.000,00	418.715.000,00	93%
Koordinasi dan Fasilitasi Sertifikasi dan Peringatan Hari Besar Nasional	624.800.000,00	619.095.000,00	99%

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Semua Indikator kinerja program Pengembangan infrastruktur permukiman berhasil mencapai target sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil	0	0	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Tersedianya data rumah dan perumahan	0	3	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	1	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan pengesahan pertelaan rumah susun	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset	10	10	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

3 Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.491.856.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.122.195.881,- (91,77%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penyediaan Dan Pengelolaan Pemakaman	4.491.856.000,00	4.122.195.881,00	91,77%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.186.438.000,00	1.160.069.865,00	98%
Penataan Taman Pemakaman Umum (TPU)	1.247.532.000,00	1.173.366.918,00	94%
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	2.057.886.000,00	1.788.759.098,00	87%

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

Pengembangan dan Pembangunan TPU yang ditargetkan 7 TPU berhasil mencapai target sebesar 7 TPU (capaian 100%), hal ini menunjukkan upaya yang telah dilakukan adalah optimalisasi lahan TPU yang sudah ada serta mengupayakan penyediaan TPU baru berhasil dilakukan di tahun 2017. Begitu pula dengan pemeliharaan sarana TPU dan pembinaan kelembagaan untuk pengelola TPU berhasil mencapai target 100%. Terkait dengan penataan Taman Pemakaman Umum (TPU) Karena dengan luasan tersebut tidak cocok menggunakan kajian Peil banjir, maka pada saat itu merubah kajian tersebut menjadi kajian AMDAL.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pengembangan dan Pembangunan TPU	7	7	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terpeliharanya sarana TPU	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Pembinaan kelembagaan pengelolaan TPU	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

4 Pengembangan Penyediaan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU),

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 60.657.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 57.219.671.380,- (94,33%), yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	60.657.400.000,00	57.219.671.380,00	94,33%
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	17.580.000.000,00	17.331.744.500,00	99%
Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.367.400.000,00	6.293.664.700,00	99%
Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.410.000.000,00	1.316.545.258,00	93%
Penyambungan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU)	35.300.000.000,00	32.277.716.922,00	91%

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

Jumlah PJU terbangun yang ditargetkan 2250 unit bertambah menjadi 3509 unit atau berhasil mencapai target sebesar 156%. hal ini menunjukkan adanya peningkatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Utama di 2000 titik dan Jalan Lingkungan sebanyak 3389 titik. Begitupula dengan pembayaran rekening PJU berhasil mencapai target 100%. Faktor pendorong pencapaian target adalah dilaksanakannya pembayaran Rekening Videotron sebesar Rp. 30.012.500,- dan Rekening PJU selama 12 bulan sebesar Rp. 30.666.947.544,-, sedangkan penyambungan KWH Baru PJU sebanyak 733820 VA menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1.580.756.878,-.

Peningkatan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga berhasil dilaksanakan di 7 kecamatan Kota Tangerang Selatan dengan rincian 18 unit untuk perawatan/pemeliharaan kendaraan Operasional PJU, serta pengadaan Lampu Sorot 18 unit, peningkatan alat kerja, sosialisasi dan Bimtek pemeliharaan PJU.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Penambahan jumlah PJU terbangun	2250	3509	156%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

A.4.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum optimalnya kegiatan Penataan Taman Pemakaman Umum (TPU) disebabkan tidak sesuainya penggunaan kajian Peil Banjir, yang lebih sesuai dengan menggunakan kajian AMDAL.
- Belum optimalnya kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman disebabkan data harga di e-katalog belum *ter-update* dengan harga terbaru.

2. Solusi

- Merubah kajian peil banjir menjadi kajian AMDAL.
- Mengupdate harga terbaru di e-Katalog.

A.5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggara Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 3) Satuan Polisi Pamong Praja.

A.5.1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

A.5.1.1. Program dan Kegiatan

- Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran**, program ini diarahkan pada *respon time* kebakaran serta cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda, dilaksanakan melalui 9 kegiatan penyuluhan, peningkatan pelayanan, pendidikan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran.

A.5.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran menghasilkan kinerja sebagai berikut :

- Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran**, dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.756.173.300,- dan ter-realisasi sebesar Rp. 14.694.946.925,- atau 93,26%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	15.756.173.300	14.694.946.925	93,26%
Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	304.760.000,00	302.485.000,00	99,25%
Rekrutmen Tenaga Sukarela Pencegahan Bahaya Kebakaran	127.880.000,00	127.730.000,00	99,88%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	7.146.998.300,00	6.507.330.500,00	91,05%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.285.570.000,00	1.284.648.475,00	99,93%
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	5.842.675.000,00	5.599.075.000,00	95,83%
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	191.706.000,00	48.450.000,00	25,27%
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	134.970.000,00	114.945.000,00	85,16%
Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	179.939.000,00	179.937.950,00	100,00%
Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Korban	541.675.000,00	530.345.000,00	97,91%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2018

Respon time kebakaran berhasil meningkatkan dari target < 15 Menit menjadi < 20 Menit. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari adanya Bimbingan teknis penyelamatan/rescue, Gladi Posko serta peningkatan *Skill Competition* kepada 242 peserta selama tahun 2017. Begitu pula dengan cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda dari target 100% sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Respon time kebakaran	< 15 Menit	<20 menit	133%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TMT
Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda	100%	100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TST

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.5.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum optimalnya kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB.

2. Solusi

- Optimalisasi kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB.
- Diikutsertakan dalam Tim BKPRD.



A.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

A.5.2.1. Program dan Kegiatan

1. **Penanggulangan Bencana Daerah**, program ini diarahkan pada Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana dan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) < 20 Menit terhadap Bencana.

A.5.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

- 1 **Penanggulangan Bencana Daerah**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.552.536.750,- dengan realisasi sebesar Rp 1.520.243.650,- (97,92%), yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penanggulangan Bencana Daerah	1.552.536.750,00	1.520.243.650,00	97,92%
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	691.987.850,00	684.481.850,00	98,92%
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	195.379.300,00	190.919.300,00	97,72%
Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pascabencana	384.050.000,00	379.108.900,00	98,71%
Peningkatan Penanganan, Ketersediaan data Kerugian dan Kerusakan Fisik Serta Sosial Ekonomi Pascabencana	281.119.600,00	265.733.600,00	94,53%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana yang ditargetkan 100% berhasil mencapai target sebesar 100%. Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut yaitu terbentuknya Sekolah Siaga Bencana, dan juga Komunitas Relawan Siaga Bencana yang berhasil dilatih, saat ini Kota Tangerang Selatan telah mempunyai Peta Rawan Bencana yang dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana secara tepat selama lima tahun kedepan.

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana telah dilaksanakan Bimtek kesiapsiagaan khususnya di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kelurahan Pamulang Barat dalam penanggulangan bencana, kegiatan ini ditunjang juga dengan sosialisasi dan pembentukan kelurahan siaga bencana di Kota Tangerang Selatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TST

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- 2 **Program Penanggulangan Bencana Daerah**, dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.067.440.250,- dan ter-realisasi sebesar Rp. 1.055.045.950,- atau 98,84%, dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penanggulangan Bencana Daerah	1.067.440.250,00	1.055.045.950,00	98,84%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	534.483.950,00	524.668.350,00	98,16%
Pengadaan Logistik bagi Korban Bencana	110.872.100,00	110.859.600,00	99,99%
Fasilitasi Penanganan Kedaruratan Bencana	422.084.200,00	419.518.000,00	99,39%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) < 20 Menit terhadap Bencana yang ditargetkan 100% berhasil mencapai target sebesar 100%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari adanya peralatan Penanggulangan Bencana dan kesiapan logistik bagi masyarakat korban bencana.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) < 20 Menit terhadap Bencana	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TST

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.5.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Masih perlunya peningkatan infrastruktur khususnya gedung kantor BPBD yang kurang representatif dalam menunjang pelaksanaan pelayanan pebanggulangan bencana.
- Belum optimalnya sistim pelayanan penanggulangan bencana

2. Solusi

- Diusulkan untuk dibuatkan gedung kantor baru yang representatif.
- Dalam meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana membutuhkan Sistem Infomasi kebencanaan yang tepat dan cepat.

A.5.3. Satuan Polisi Pamong Praja

A.5.3.1. Program dan Kegiatan

- Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota**, program ini diarahkan pada Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal.
- Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan**, program ini diarahkan pada Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban, Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang, serta Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih



A.5.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1 Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.094.667.600,- dengan realisasi sebesar Rp 2.801.139.938,- (90,52%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota,	3.094.667.600	2.801.139.938	90,52%
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.944.667.600,00	2.651.148.938,00	90,03%
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penyelenggaraan Kantrantibum	150.000.000,00	149.991.000,00	99,99%

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal yang ditargetkan 98% berhasil mencapai target sebesar 98% hal ini menunjukkan optimalisasi Penegakan Perda dan /atau Perwal yang berhasil di laksanakan selama tahun 2017. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut adalah konsistensi dalam penegakan Perda dan Perwal Kota Tangerang Selatan, melakukan Pendataan Bangunan Liar dan PKL diatas lahan Fasos Fasum, pendataan menara pemancar/tower tak berijin dan melaksanakan sosialisasi SISKAMSWAKARSA.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	98%	98%	100%	Satpol PP	TMT

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2 Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.936.982.500,- dengan realisasi sebesar Rp 8.812.277.500,- (98,60%), yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan,	8.936.982.500	8.812.277.500	98,60%
Pengendalian Satlinmas Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	726.593.427,00	720.253.427,00	99,13%
Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.394.994.073,00	1.347.552.073,00	96,60%
Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	201.000.000,00	196.790.000,00	97,91%
Penyelenggaraan Bina Potensi Masyarakat	159.000.000,00	153.964.000,00	96,83%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Aparatur	6.045.805.000,00	6.000.420.000,00	99,25%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satpol PP	409.590.000,00	393.298.000,00	96,02%

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat yang ditargetkan 30 kali dapat terealisasi sebesar 30 kali (capaian 100%). Begitu pula dengan 3 indikator lainnya berhasil mencapai target masing-masing 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	30 kali	30 kali	100%	Satpol PP	TST
Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	Satpol PP	TST
Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang	62%	62%	100%	Satpol PP	TST
Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih	100%	100%	100%	Satpol PP	TST

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.5.3.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Sidang TIPIRING yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 7 Kegiatan terealisasi sebanyak 2 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan untuk menjaga iklim investasi, sehingga pelaku pelanggaran perda diarahkan mengurus ijin dan tidak masuk ke ranah pidana karena yang bersangkutan menyelesaikan perijinannya, dan penyidikan dihentikan.
- Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Gelar Perkara yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 5 Kegiatan terealisasi sebanyak 4 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan tidak semua pelanggaran perda dilakukan gelar perkara, hanya permasalahan rumit dan melibatkan opd lain yang membutuhkan dilaksanakannya gelar perkara.
- Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Pengamanan Demonstrasi masa yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 9 Kegiatan terealisasi sebanyak 6 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan Kegiatan demonstrasi masa bersifat insidentil, sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kejadian.

2. Solusi

- Melaksanakan Perencanaan serta manajemen kegiatan dengan lebih baik.
- Penyediaan anggaran untuk kegiatan sidang tipiring, gelar perkara serta kegiatan demonstrasi masa dan kegiatan insidentil tetap diperlukan karena berdasarkan data, kejadian masih sering terjadi bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.



A.6. SOSIAL

Penyelenggara Urusan Sosial di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Sosial dan 2) Sekretariat Daerah.

A.6.1. Dinas Sosial

A.6.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**, program ini diarahkan pada persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar.
2. **Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial**, program ini diarahkan pada Persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan.
3. **Bantuan dan Jaminan Sosial**, program ini diarahkan pada persentase rumah tangga/individu sasaran yang mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial.

A.6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.893.575.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.881.740.000,- (99,37%), yang dilaksanakan melalui kegiatan 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,	1.893.575.000	1.881.740.000	99,37%
Peningkatan dan Penanganan Penyandang Disabilitas	685.600.000,00	675.050.000,00	98,46%
Penanganan Penyandang Masalah Tuna Sosial	430.275.000,00	430.190.000,00	99,98%
Peningkatan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia	527.700.000,00	527.700.000,00	100,00 %
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial	250.000.000,00	248.800.000,00	99,52%

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar dari target sebesar 50% dapat terealisasi sesuai target. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya peningkatan dan penanganan penyandang disabilitas berhasil dilaksanakan kepada 320 orang melalui pelatihan dan pemberian keterampilan Baca Al-qur'an Braille, tata rias, keterampilan komputer, steam motor dan seni angklung. Total sebanyak 310 orang telah mendapatkan penyuluhan sosial bahaya Narkoba dan HIV/AIDS, dan penyuluhan sosial bagi waria dalam rangka penanganan penyandang masalah tuna sosial di Kota Tangerang Selatan.

Peningkatan dan penanganan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia diberikan kepada 410 orang melalui pelatihan service handphone, sablon serta sosialisasi Sistem Nasional Pengasuhan Anak. Bagi Lansia selain mereka diberikan pendamping juga



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

diberikan pelatihan kerajinan tangan terutama di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pondok Benda Bambu, Apus, Serpong, Pamulang Timur, Jombang.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar	50%	50%	100%	Dinas Sosial	TST

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

- Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.630.048.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.436.976.000,- (88,16%), yang dilaksanakan melalui kegiatan 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	1.630.048.000	1.436.976.000	88,16%
Peningkatan Pemberdayaan bagi Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial	420.748.000,00	395.936.000,00	94,10%
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	813.700.000,00	656.740.000,00	80,71%
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	395.600.000,00	384.300.000,00	97,14%

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan memperoleh hasil 100%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya peningkatan kuantitas dan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan melalui pemberdayaan bagi Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial dengan menyediakan Buku Monev Raskin (E Voucher Pangan) Semester I dan Semester II sebanyak 4 buku, Pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui pelaksanaan Bimbingan Sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi, Keluarga Miskin, serta penyuluhan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan total 580 orang.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan	0,25	0,25	100%	Dinas Sosial	TST

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

- Bantuan dan Jaminan Sosial**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.199.905.000,- (99,98%), yang dilaksanakan melalui kegiatan 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Bantuan dan Jaminan Sosial	1.200.100.000	1.199.905.000	99,98%
Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Rentan	300.000.000,00	299.900.000,00	99,97%
Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	457.200.000,00	457.105.000,00	99,98%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Perlindungan Sosial Terhadap Keperintisan dan Nilai-nilai Pahlawan	442.900.000,00	442.900.000,00	100,00%
--	----------------	----------------	---------

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Persentase rumah tangga/individu sasaran yang mendapatkan bantuan dan jaminan sosial yang ditargetkan 80% dapat terealisasi sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain: Realisasi perlindungan sosial bagi keluarga rentan melalui pelatihan dan Bimtek Usaha Mandiri serta peningkatan keterampilan adalah sebanyak 271 orang berhasil direalisasikan sesuai target, dan untuk penyediaan Sarana Bantuan Bagi Korban Bencana sebanyak 5 unit serta penanganan Penanganan Trauma Pasca Bencana terealisasi sebanyak 20 orang.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase Rumah Tangga/Individu Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial	0,8	0,8	100%	Dinas Sosial	TST

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

A.6.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Terbatasnya jumlah Tenaga Ahli bidang Kesehatan seperti Dokter Spesialis Kejiwaan, Psikologi dan Psikiater
- Terbatasnya Sarana Rumah Singgah.
- Kurang optimalnya koordinasi terkait pemulangan orang terlantar ke luar daerah

2. Solusi

- Menyediakan Tenaga Ahli dalam Bidang Kesehatan
- Menyediakan Tenaga Ahli Khusus Untuk ODK
- membuat SOP & MOU untuk pengantaran orang terlantar ke luar daerah (Dinsos Provinsi, Kementerian Sosial, Dishub, PO Bus AKAP, PT KAI, PT PELNI)
- Meningkatkan sarana dan prasarana rumah singgah

A.6.2. Sekretaris Daerah

A.6.2.1. Program dan Kegiatan

- Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial**, program ini diarahkan pada Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan, Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat serta Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

A.6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

1. **Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.254.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.806.456.700,- (86,24 %), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	3.254.160.000,00	2.806.456.700,00	86,24%
Pembinaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	906.886.400,00	782.696.400,00	86,31%
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	1.730.471.100,00	1.546.298.100,00	89,36%
Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	616.802.500,00	477.462.200,00	77,41%

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018

Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan yang ditargetkan 4 dapat terealisasi sebesar 3 dokumen/laporan atau hanya berhasil sekitar 75%. Berlum tercapainya target ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang dihilangkan didalam anggaran perubahan, kegiatan tersebut yaitu Peringatan Tahun Baru Islam / 1 Muharrom 1439 H Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 M, Koordinasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan	4	3	75%	Setda	TT
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	7	7	100%	Setda	TST
Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	2	2	100%	Setda	TST

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2018



B. URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

B.1. KETENAGAKERJAAN

Penyelenggara Urusan Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

B.1.1. Dinas Ketenagakerjaan

B.1.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja**, program ini diarahkan pada Persentase tenaga kerja siap pakai.
2. **Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha**, program ini diarahkan pada Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
3. **Kerjasama Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan**, program ini diarahkan pada Menurunnya Angka perselisihan hubungan industrial.

B.1.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2,100,430,000,- dengan realisasi sebesar Rp2,062,322,515,- (98,19%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	2,100,430,000	2,062,322,515	98,19
Peningkatan Produktivitas tenaga kerja	336,930,000.00	332,212,515.00	98,60
Peningkatan Jejaring Kerjasama Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	289,400,000.00	267,530,000.00	92,44
Pelatihan Keterampilan dan Keahlian	1,474,100,000.00	1,462,580,000.00	99,22

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

Persentase tenaga kerja siap pakai dari target 10% dapat terealisasi sebesar 10%. Faktor keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja kepada pelaku tenaga kerja, yang dilakukan melalui kegiatan Bimtek Standarisasi Kelembagaan, Penyelenggaraan Pelatihan dan Bimtek Sertifikasi Asesor Kompetensi kepada peserta 240 peserta. Pendataan Lembaga Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi kepada 50 lembaga dalam rangka meningkatkan jejaring kerjasama lembaga pelatihan tenaga kerja.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Guna menunjang keterampilan dan keahlian telah dilakukan pelatihan dari mulai pelatihan menjahit, sablon service barang elektornik, perbengkelan dan konstruksi dengan total peserta sebanyak 200 orang selama tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase tenaga kerja siap pakai	10%	10%	100%	Dinas Ketenagakerjaan	TST

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

- Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,777,250,000,- dengan realisasi sebesar Rp 1,753,726,000,- (98,68%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	1,777,250,000	1,753,726,000	98,68
Penyusunan dan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	1,185,350,000.00	1,172,450,000.00	98,91
Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	243,400,000.00	243,376,000.00	99,99
Persiapan penempatan dan pembinaan transmigrasi regional	348,500,000.00	337,900,000.00	96,96

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 persentase penduduk yang masuk dalam usia kerja dan aktif dalam bekerja dan mencari pekerjaan (TPAK) di Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar 65%. Angka tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa ada sekitar 65% dari penduduk usia kerjadi Kota Tangerang Selatan yang berpotensi untuk mendapatkan pendapatan/penghasilan, walaupun di dalamnya termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Salah satu yang telah dilakukan melalui penyebarluasan Bursa Informasi Tenaga Kerja (*Job Fair*) sebanyak 10.000 lowongan dan Bursa Kerja Online.

Dalam rangka pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) Umum untuk pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, demikian halnya dengan perlindungan tenaga kerja wanita dan anak telah disosialisasikan kepada kepada 60 perusahaan. serta pemberian penghargaan *zero accident* kepda lebih 30 perusahaan yang beroperasi di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65%	65%	100%	Dinas Ketenagakerjaan	TST

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

- Kerjasama Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,628,942,000,- dengan realisasi sebesar Rp



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

1,604,623,000,- (98,651%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Kerjasama Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1,628,942,000	1,604,623,000	98,51
Fasilitasi Persyaratan Kerja	473.245.000	473.245.000	100,00
Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	246.300.000,00	239,360,000.00	97,18
Fasilitasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	909.397.000,00	892,018,000.00	98,09

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

Menurunnya Angka perselisihan Industrial yang ditargetkan 28 kasus berhasil mencapai target sebesar 100%, hal ini menunjukkan adanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bentuk penyelesaian yang dilakukan melalui Rapat LKS Tripartit selama tahun 2017, Penyelesaian Demonstrasi, Kompetisi Futsal dalam Rangka Peringatan MAYDAY dengan total peserta sebanyak 314 orang.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Menurunnya Angka perselisihan Industrial	28 kasus	28 kasus	100%	Dinas Ketenagakerjaan	TST

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.1.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Belum selesainya revisi Perda Ketenagakerjaan disebabkan Perda Ketenagakerjaan Provinsi Banten yang mengatur pembagian tugas Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan belum tersedianya.

2. Solusi

Peningkatan koordinasi terkait percepatan penyusunan Perda Disnaker Provinsi Banten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B.2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:



B.1.2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

B.1.1.4. Program dan Kegiatan

1. **Peningkatan peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan**, program ini diarahkan pada Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, dilaksanakan melalui 2 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.
2. **Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak**, program ini diarahkan pada Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas, dilaksanakan melalui 2 kegiatan Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan di daerah dan kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
3. **Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak**, program ini diarahkan pada IPG dan IDG, IPG dan IDG dan Jumlah Kelurahan Ramah Anak, dilaksanakan melalui 3 kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak.

B.1.1.5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Peningkatan peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.712.790.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.628.229.000,- (95,06%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan , yaitu sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Peningkatan peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan,	1.712.790.000	1.628.229.000	95,06%
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender	1.046.900.000	984.834.100	94,07%
Pembinaan Organisasi Perempuan	665.890.000	643.394.900	96,62%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Tahun 2018

Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang ditargetkan 630 orang bertambah menjadi 652 orang atau berhasil mencapai target sebesar 103%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya pembinaan, monitoring dan evaluasi salah satunya terhadap program P2WKSS di sebagian kelurahan Kota Tangerang Selatan. Begitupun dengan berjalannya proses peningkatan keterampilan khususnya perempuan dalam keterampilan tata boga, menjahit dan tata rias pengantin, bina kreatifitas perempuan dalam internet marketing dipandang dapat meningkatkan produktivitas



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

keluarga sepanjang tahun 2017, belum lagi ditunjang dengan pelaksanaan pameran pemberdayaan usaha rumahan.

Faktor pendukung lainnya adalah terlaksananya pembinaan penyulaman tanaman sebanyak 72 orang. Penguatan juga dilakukan kepada sejumlah Organisasi Perempuan se-Kota Tangerang Selatan sebanyak 62 organisasi selama tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	630 (orang)	652 (orang)	103%	DPMPPPAKB	TMT

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

- Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 693.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 641.675.000,- (92,59%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan , yaitu sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	693.000.000	641.675.000	92,59%
Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan di daerah	543.000.000	530.695.000	97,73%
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	150.000.000	110.980.000	73,99%

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas berhasil mencapai target 100%, Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain terlaksananya RAKOR jejaring tim gugus tugas tindak pidana perdagangan orang kepada 75 orang, Jambore 10 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (POKJA I) 35 orang, pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar Bagi Anggota DWP Kota Tangerang Selatan. tidak hanya itu, penyelenggaraan legalisasi pernikahan juga terlaksana kepada 100 pasangan rumah tangga untuk melindungi kaum perempuan dalam pernikahannya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	100%	100%	100%	DPMPPPAKB	TST

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

- Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.386.675.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.301.185.900,- (96,42%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan , yaitu sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	2.386.675.000	2.301.185.900	96,42%
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	477.591.000	423.912.000	88,76%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	970.196.000	962.386.000	99,20%
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	938.888.000	914.887.900	97,44%

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

Jumlah Kelurahan Ramah Anak yang ditargetkan 8 Kelurahan berhasil mencapai target sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
IPG dan IDG	IPG 93,50-93,78% ; IDG 64,26-64,47%	IPG 92,59 IDG 63.17	IPG 99.03% IDG 98.30%	DPMPPPAKB	TT
Jumlah Kelurahan Ramah Anak	8	8	100%	DPMPPPAKB	TST

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.1.1.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Tidak tercapainya IPG dan IDG dikarenakan ada perubahan cara perhitungan IPM, laju peningkatan indeks IPM laki-laki jauh lebih meningkat secara signifikan dibandingkan dengan IPM Perempuan
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pengarusutamaan gender (PUG) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta penjualan anak dan remaja.

2. Solusi

- Untuk Semua OPD yang terkait Peningkatan IPM, diharapkan memperhatikan komponen-komponen peningkatan IPM Perempuan
- Peningkatan sosialisasi dan motivasi melalui jaring aspirasi dan tutor sebaya (lembaga peduli yang ada di masyarakat).

B.3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana



B.3.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

B.3.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan**, program ini diarahkan pada Pemanfaatan Inovasi TTG Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Persentase Peran serta Lembaga/Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan serta dilaksanakan oleh 3 kegiatan, meliputi (1) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan, (2) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan dan (3) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa/ Kelurahan.

B.3.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan** mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.648.318.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.565.003.600- (94,95%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan , yaitu sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1.648.318.000	1.565.003.600	94,95%
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa/ Kelurahan	460.000.000	412.516.600	89,68%
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan	710.000.000	697.940.000	98,30%
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa/ Kelurahan	478.318.000	454.547.000	95,03%

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

Pemanfaatan Inovasi TTG Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang ditargetkan 4 inovasi bertambah menjadi 7 inovasi atau berhasil mencapai target sebesar 175%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna dalam pemberdayaan masyarakat. hal ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan melalui pelatihan masyarakat dalam Inovasi TTG kepada 120 orang selama tahun 2017.

Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna juga berhasil dilaksanakan sekaligus penyelenggaraan Posyantek Tk. Kota Tangerang Selatan di 7 kecamatan. Begitupula dengan persentase peran serta lembaga/kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang ditargetkan 70% bertambah menjadi 98,34% atau berhasil mencapai target sebesar 140%,.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pemanfaatan Inovasi TTG Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Inovasi)	4	7	175%	DPMPPPAKB	TMT



Persentase Peran serta Lembaga/Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	70%	98,34%	140%	DPMPPPAKB	TMT
--	-----	--------	------	-----------	-----

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

B.3.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Belum maksimalnya pemanfaatan wadah Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) di tingkat kecamatan.

2. Solusi

Optimalisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta melaksanakan pembinaan terhadap 7 POSYANTEK di 7 Kecamatan Kota Tangerang Selatan.

B.4. PANGAN

Penyelenggara Urusan Pangan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

A.4.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

A.4.1.1. Program dan Kegiatan

- Peningkatan Ketahanan Pangan**, program ini diarahkan pada Penguatan cadangan pangan, Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, AKG dan AKP, Keamanan Pangan, Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan dan Manajemen Logistik, dilaksanakan melalui 11 kegiatan.

A.4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.608.872.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.167.570.047,- (87,77% %), yang dilaksanakan melalui 12 (dua belas) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Peningkatan Ketahanan Pangan	3.608.872.000	3.167.570.047	87,77%
Kerjasama Antar Daerah/Lembaga	142.900.000	114.762.840	80,31%
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	542.696.900	502.394.340	92,57%
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	154.975.000	146.935.000	94,81%
Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	294.925.000	285.014.500	96,64%
Peningkatan Mutu Pangan	196.170.000	184.770.000	94,19%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan	60.450.000	59.271.600	98,05%
Peningkatan Keamanan Pangan	693.862.500	639.865.835	92,22%
Koordinasi peningkatan ketahanan pangan daerah Kota Tangerang Selatan	413.662.600	234.911.000	56,79%
Promosi Ketahanan Pangan Daerah	927.030.000	851.273.532	91,83%
Pengembangan Informasi Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan	150.775.000	117.221.400	77,75%
Penyusunan Database Potensi Produk Pangan	31.425.000	31.150.000	99,12%

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2018

Belum optimalnya realisasi anggaran pada Kegiatan Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Kota Tangerang Selatan yang hanya mencapai 56,79%, disebabkan oleh perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga mempengaruhi jadwal pembahasan Program Legeslasi Daerah (Prolegda), pada tahun berjalan, akibatnya pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang direncanakan. Beberapa solusi yang disampaikan terkait permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kegiatan Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Kota Tangerang Selatan
- Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi dalam rangka Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Kota Tangerang Selatan
- Penyediaan anggaran untuk kegiatan Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Kota Tangerang Selatan tetap diperlukan karena berdasarkan data, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan masih membutuhkan dan merencanakan Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Belum optimalnya realisasi anggaran pada kegiatan Pengembangan Informasi Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan, yang hanya mencapai kurang dari 77,75% dengan demikian terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 33.553.600,- atau (22,25%). Anggaran yang tidak terserap, disebabkan oleh (1) Efisiensi belanja barang dan jasa dari honorarium narasumber sebesar Rp. 6.000.000,-dikarenakan tidak hadirnya narasumber dikarenakan berhalangan; (2) Efisiensi Belanja barang dan jasa dari perjalanan dinas luar daerah dan belanja perlengkapan kegiatan sebesar Rp. 27.553.600,-, Namun, apabila dilihat dari realisasi fisik pencapaian tersebut sudah 100% tercapai. Untuk mengatasi persoalan ini, dirumuskan solusi sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kegiatan Pengembangan Informasi Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan
- Meningkatkan koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan dengan pihak-pihak yang berwenang dalam Pengembangan Informasi Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan, seperti Pasar-pasar, Bulog, Kepolisian, TNI dan lain-lain.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

- c. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi dalam rangka Pengembangan Informasi Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan
- d. Penyediaan anggaran untuk kegiatan Pengembangan Informasi Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan tetap diperlukan karena berdasarkan data, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan masih membutuhkan dan merencanakan Pengembangan Informasi Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan untuk meningkatkan Validasi data dan Informasi dalam Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan khususnya Ketahanan Pangan di Kota Tangerang Selatan.

Tingkat penyerapan pada kegiatan Kerjasama Antar Daerah/Lembaga sebesar 80,31% sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.28.137.160,- (19,69%), kurang optimalnya realisasi anggaran disebabkan oleh Efisiensi belanja barang dan jasa dari makan minum sub kegiatan sebesar Rp.5.606.700,- serta Efisiensi Belanja barang dan jasa dari makan minum, perjalanan dinas luar daerah dan belanja honorarium narasumber sebesar Rp. 22.530.460,-. Solusi terkait dengan persoalan ini adalah (1) Bantuan Keuangan APBD Provinsi diperlukan kontribusinya sebagai upaya percepatan program/kegiatan Kerjasama Antar Daerah/Lembaga untuk memenuhi standar pelayanan., (2) Mengoptimalkan kegiatan Kerjasama Antar Daerah/Lembaga dan (3) Penyediaan anggaran untuk kegiatan Kerjasama Antar Daerah/Lembaga tetap diperlukan karena berdasarkan data, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan masih membutuhkan dan merencanakan Kerjasama dengan Daerah atau Lembaga lain untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Tidak optimalnya serapan anggaran Kegiatan Peningkatan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan disebabkan tidak terserapnya anggaran di sub kegiatan Pengujian Bahan Berbahaya pada Produk Perikanan Pasca Panen sebesar Rp. 7.068.000,-. menjadikan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.790.600,- (88,76%). dan anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 7.068.000,- (11,24%), dikarenakan Efisiensi belanja barang dan jasa dari belanja bahan sample dan perjalanan dinas luar daerah. Namun, apabila dilihat dari realisasi Fisik sudah 100% tercapai.

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai Program Peningkatan Ketahanan Pangan berhasil mencapai target sejumlah 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	85%	85%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
AKG dan AKP	87%	87%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
Keamanan Pangan	81%	81%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
Manajemen Logistik (dokumen)	2	2	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Disperindag	TST

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2018



A.4.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Pada tahun 2017 terdapat perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga mempengaruhi jadwal pembahasan Program Legeslasi Daerah (Prolegda), akibatnya pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang direncanakan.

2. Solusi

- a. Peningkatan koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan baik sisi anggaran maupun teknis kegiatan
- b. Melaksanakan perencanaan serta manajemen kegiatan dengan lebih baik serta mengajukan kegiatan ditahun yang akan datang untuk mengatasi permasalahan program/kegiatan
- c. Bantuan Keuangan APBD Provinsi diperlukan kontribusinya sebagai upaya percepatan program/kegiatan untuk memenuhi standar pelayanan.
- d. Mendukung dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan untuk pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- e. Perlu adanya peningkatan kemampuan Kepegawaian dan Teknis Lapangan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- f. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya dan Sarana Prasarana bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- g. Mengoptimalkan setiap kegiatan
- h. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan dengan pihak swasta/lembaga lain.
- i. Penyediaan anggaran untuk kegiatan tetap diperlukan karena berdasarkan data, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan masih membutuhkan dan merencanakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

B.5. PERTANAHAN

Penyelenggara Urusan Pertanahan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.5.1. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

B.5.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,** program ini diarahkan pada terlaksananya pengadaan tanah



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

B.5.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,** mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 186.101.298.055,- dengan realisasi sebesar Rp124.189.219.675,- (66,73%), yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	186.101.298.055,00	124.189.219.675,00	66,73%
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar	92.437.298.055,00	62.831.916.614,00	68%
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur Dasar	91.264.000.000,00	60.085.163.061,00	66%
Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar	400.000.000,00	204.200.000,00	51%
Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran	400.000.000,00	179.210.000,00	45%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	1.200.000.000,00	558.330.000,00	47%
Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Pengadaan Tanah	300.000.000,00	230.400.000,00	77%
Inventarisasi Kebutuhan Tanah Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100%
Pengendalian Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	100%

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur dasar tidak mencapai target, disebabkan oleh, antara lain: (1) SMPN 24 masih tahap kajian atau usulan dari instansi yang memerlukan pengadaan tanah yaitu Dinas Pendidikan serta Perluasan pasar Ciputat masih dalam tahap perencanaan pada instansi yang memerlukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tersusunnya laporan kebutuhan lahan	0	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terfasilitasinya dan pendampingan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan	0	6	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Terlaksananya pengadaan tanah untuk : kantor kelurahan, kawasan pertanian terpadu, dan Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	1	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terlaksananya pengadaan tanah untuk : Infrastruktur Dasar, Kawasan Perdagangan dan Lapangan Olah Raga	0	2	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran	2	4	200%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Terlaksananya Fasilitas dan Pendampingan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar dan Non Gedung Perkantoran	2	4	200%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar	2	3	150%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Terlaksananya Fasilitas dan Pendampingan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran/ fasilitas pemerintah bagi masyarakat dan Non Infrastruktur Dasar	2	3	150%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah	1	3	300%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Tersusunnya dokumen teknis rencana pengadaan tanah	1	2	200%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TMT
Tersusunnya laporan kebutuhan lahan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Untuk Pembangunan	1	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi Tahapan Pengadaan Tanah	1	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TST
Terfasilitasinya Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup Pemerintah Kota tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan	3	2	67%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	TT

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

B.5.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum optimalnya fasilitasi dan pendampingan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah gedung perkantoran, terkendala oleh pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Bhayangkara yang masih dalam tahap perencanaan.
- Pengadaan tanah untuk Lapangan Bola terkendala nilai ganti kerugian yang belum disepakati.



- c) Terjadi efisiensi pagu pada pengadaan tanah untuk perluasan lahan Cipeucang dikarenakan penyesuaian harga dengan appraisal.
 - d) Perluasan pasar ciputat masih dalam tahap perencanaan.
2. Solusi
- a) Menganggarkan kembali program pengadaan tanah di tahun berikutnya.
 - b) Melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang belum menyetujui.
 - c) Mengoptimalkan kegiatan perencanaan dan kegiatan di tahun berikutnya.

B.6. LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.6.1. Dinas Lingkungan Hidup

B.6.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**, program ini diarahkan pada persentase penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan, Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan, Pengendalian dan pengawasan terhadap B3 dan limbah B3, dan Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup, dilaksanakan melalui 6 kegiatan.
2. **Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam**, program ini diarahkan pada Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan dan Pilot Project kampung iklim (kampung Hijau di 7 kecamatan), dilaksanakan melalui 2 kegiatan.
3. **Program Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup**, program ini diarahkan pada Jumlah peningkatan partisipasi aktif masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup, Fasilitasi Peningkatan Nilai ADIPURA dan Jumlah penghargaan Nasional maupun lokal terkait pelestarian lingkungan hidup, dilaksanakan melalui 3 kegiatan.
4. **Program Pengembangan pengelolaan persampahan**, program ini diarahkan pada Persentase pengangkutan sampah, dilaksanakan melalui 3 kegiatan.
5. **Program Pengelolaan Sampah terpadu**, program ini diarahkan pada Persentase pengurangan sampah melalui 3R, dilaksanakan melalui 2 kegiatan.
6. **Program Pengelolaan RTH**, program ini diarahkan pada Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya, Persentase taman terpelihara dan Persentase



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami, dilaksanakan melalui 5 kegiatan.

B.6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.939.785.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.815.484.349,- (96,84%), yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	3.939.785.000	3.815.484.349	96,84%
Pengawasan Dokumen Izin Lingkungan	340.000.000,00	326.194.000,00	95,94%
Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	218.100.000,00	199.959.000,00	91,68%
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap B3 dan Limbah B3	325.635.000,00	318.180.000,00	97,71%
Optimalisasi Fungsi Analisis Laboratorium Lingkungan	1.896.500.000,00	1.839.810.349,00	97,01%
Pengawasan dan pengendalian pencemaran	713.500.000,00	700.467.000,00	98,17%
Fasilitasi Dokumen AMDAL,UKL UPL dan SPPL, KLHS/RPPLH	446.050.000,00	430.874.000,00	96,60%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Persentase penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan yang ditargetkan 78 bertambah menjadi 144 Titik pantau atau berhasil mencapai target sebesar 185%. hal ini menunjukkan adanya peningkatan persentase titik pantau selama tahun 2017 sebanyak 46% atau 66 titik pantau.

Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan baru terealisasi sebesar 53% dari yang ditargetkan sebesar 70%, sehingga indikator ini capaiannya baru 74%.

Pengendalian dan pengawasan terhadap B3 dan limbah B3 yang ditargetkan 50% bertambah menjadi 80% atau berhasil mencapai target sebesar 160%. Begitupula dengan Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup yang ditargetkan 30 berhasil mencapai target 30 Alat Terkalibrasi, dan 10 Alat Laboratorium Terperlihara.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
persentase penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan	78 Titik pantau	144 Titik pantau	185%	Dinas Lingkungan Hidup	TMT
Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan	70%	52%	74%	Dinas Lingkungan Hidup	TT
Pengendalian dan pengawasan	50%	80%	160%	Dinas	TMT



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

terhadap B3 dan limbah B3				Lingkungan Hidup	
Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup	30	30 Alat Terkalibrasi, 10 Alat Laboratorium Terperlihara	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

2. **Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 887.583.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 860.643.000,- (96,96%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam,	887.583.000,00	860.643.000,00	96,96%
perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	486.283.000,00	464.253.000,00	95,47%
Fasilitasi Program Perubahan Iklim	401.300.000,00	396.390.000,00	98,78%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai pada indikator program luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih berhasil mencapai target yang dilaksanakan di Kecamatan Serpong seluas 500 m³, dan juga untuk kegiatan *Pilot Project* kampung iklim (Kampung hijau) berhasil dilaksanakan di Kecamatan Pondok Aren.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan	500	500	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Pilot Project kampung iklim (kampung Hijau di 7 kecamatan)	1	1 (Kecamatan Pondok Aren)	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

3. **Program Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.214.234.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.104.314.500,- (90,95%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	1.214.234.500,00	1.104.314.500,00	90,95%
Fasilitasi Peningkatan Nilai Adipura	489.220.000,00	455.945.000,00	93,20%
Pemberdayaan Masyarakat Peduli Lingkungan	369.472.500,00	330.372.500,00	89,42%
Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup	355.542.000,00	317.997.000,00	89,44%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Jumlah peningkatan partisipasi aktif masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup, berhasil dilaksanakan sesuai target 100%, bergitu juga dengan Fasilitasi Peningkatan Nilai ADIPURA, kegiatan yang dimulai dengan penyusunan dokumen SLHD, Lomba Adipura Tingkat Kelurahan sampai dengan kegiatan Seminar pendidikan lingkungan berhasil dilaksanakan sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah peningkatan partisipasi aktif masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup	40%	40%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Fasilitasi Peningkatan Nilai ADIPURA	73	73	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Jumlah penghargaan Nasional maupun lokal terkait pelestarian lingkungan hidup	1 orang	1 orang	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

4. **Program Pengembangan pengelolaan persampahan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 41.658.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.938.833.484,- (95,87%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pengelolaan persampahan	41.658.450.000	39.938.833.484	95,87%
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kebersihan	19.551.010.000,00	18.646.425.703,00	95,37%
Edukasi Pengelolaan Persampahan	3.277.500.000,00	3.243.291.000,00	98,96%
Peningkatan Operasi Persampahan	18.829.940.000,00	18.049.116.781,00	95,85%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Persentase pengangkutan sampah yang ditargetkan 50% bertambah menjadi 55,30% atau berhasil mencapai target sebesar 111%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan presentase pengangkutan sampah sebanyak 5,30%. Jumlah peningkatan ini terbagi antara sampah yang diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar 30,9% dengan jumlah sampah yang diangkut oleh Swasta sebesar 24,4%. Upaya yang tidak kalah pentingnya dalam menangani sampah adalah melakukan edukasi pengelolaan sampah, upaya ini telah dilaksanakan dengan memberikan pemahaman dan pengajaran kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) serta mendorong partisipasi masyarakat agar senantiasa peduli terhadap kebersihan dan melaksanakan pola 3R dalam penanganan sampah di 7 kecamatan. Didukung juga dengan media promosi sosialisasi memberikan penyampaian pengelolaan sampah semakin efektif dan menyeluruh di hampir 54 keluarahan di Kota Tangerang Selatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase pengangkutan sampah	50%	55,30%	111%	Dinas Lingkungan Hidup	TMT

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

5. **Program Pengelolaan Sampah terpadu**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.342.768.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.025.831.528,- (96,61%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengelolaan Sampah terpadu	9.342.768.000,00	9.025.831.528,00	96,61%
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	3.416.400.000,00	3.401.833.400,00	99,57%
Operasional dan Pengelolaan TPA Cipeucang	5.926.368.000,00	5.623.998.128,00	94,90%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Persentase pengurangan sampah melalui 3R yang ditargetkan 10% berhasil mencapai target sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah serta terimplementasinya kegiatan masyarakat Tempat Pengelolaan Sampah dan Percontohan terbina dalam hal pengelolaan sampah yang dilaksanakan di hampir 16 lokasi Kota Tangerang Selatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase pengurangan sampah melalui 3R	10%	10,00%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

6. **Program Pengelolaan RTH**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.713.285.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.526.209.146,- (90,66%), yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

7.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengelolaan RTH,	12.713.285.000,00	11.526.209.146,00	90,66%
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.023.360.000,00	6.468.841.194,00	92,10%
Pemeliharaan Taman Koridor Jalan Utama	3.013.213.000,00	2.542.721.679,00	84,39%
Pemeliharaan Taman Lingkungan	1.587.312.000,00	1.441.739.773,00	90,83%
Penanaman Ruang Terbuka Hijau dan pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati	1.089.400.000,00	1.072.906.500,00	98,49%
Pembangunan Hutan Kota Serpong Utara (Ban.Keu Prov)	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai adalah 1) Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya berhasil dilaksanakan di 7 Kecamatan. 2) Persentase taman terpelihara dapat terealisasi sesuai target, dan 3) Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami berhasil dilaksanakan sepanjang 1,3 km.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	7 kecamatan	7 KEcamatan	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Persentase taman terpelihara	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami	1,3 Km	1,3 Km	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

B.6.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Dilihat dari jumlah anggaran kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 253.141.000,- realisasi mencapai Rp. 74.800.000,- (29,55%) dan dilihat dari belum optimalnya realisasi fisik kegiatan dengan realisasi 84,42% dari target 100% disebabkan oleh: 1) efisiensi anggaran paket diklat, 2) Jabatan fungsional lingkungan hidup masih memerlukan kajian lebih lanjut di internal dinas sehingga draft perwal belum disusun
- Dilihat dari jumlah anggaran kegiatan Pengendalian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 6.903.409.000,- realisasi mencapai Rp. 5.311.610.662,- (76,94%) dan dilihat dari belum optimalnya realisasi fisik kegiatan dengan realisasi 97,17% dari target 100% disebabkan oleh: 1) efisiensi dari proses pengadaan, 2) tidak terserapnya anggaran di SPPD luar daerah akibat keterbatasan undangan, 3) adanya efisiensi dari gaji Non PNS.
- Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengolahan sampah.

2. Solusi

- meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi rutin terkait perencanaan dan penganggaran serta realisasi dan jadwal pelaksanaan sehingga optimalisasi pelaksanaan pekerjaan tercapai
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan reduksi timbulan sampah dengan pola 3 R
- Membuat perencanaan Diklat/Pengembangan SDM dengan koordinasi atau informasi dengan BKPP dan lembaga/penyelenggara lainnya.

B.7. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:



B.7.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

B.7.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Penataan Administrasi Kependudukan**, program ini diarahkan pada Cakupan Penerbitan KK, Cakupan penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian, Rasio Pasangan Berakta Perkawinan, Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan dan Jumlah Data dan Informasi Pendudukan yang akurat. Sekitar 8 kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini, meliputi : (1) Pelayanan Pencatatan Kelahiran, (2) Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, (3) Penataan Arsip Dokumen Catatan Sipil, (4) Pelayanan Pendaftaran Penduduk, (5) Pelayanan Pencatatan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian, (6) Pengolahan Dalam Penyusunan Informasi Kependudukan, (7) Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan, dan (8) Inovasi Pelayanan.

B.7.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Penataan Administrasi Kependudukan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.871.655.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.787.890.880,- (98,28%), yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.871.655.800 ,00	4.787.890.880 ,00	98,28%
Pelayanan Pencatatan Kelahiran	612.620.000,00	608.415.000,00	99,31%
Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	204.457.000,00	189.984.000,00	92,92%
Penataan Arsip Dokumen Catatan Sipil	632.972.700,00	626.822.700,00	99,03%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3.127.865.800,00	3.070.043.880,00	98,15%
Pelayanan Pencatatan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	60.528.900,00	60.526.900,00	100,00 %
Pengolahan Dalam Penyusunan Informasi Kependudukan	104.281.400,00	103.668.400,00	99,41%
Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan	78.030.000,00	78.030.000,00	100,00 %
Inovasi Pelayanan	50.900.000,00	50.400.000,00	99,02%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018

Cakupan Penerbitan KK bertambah menjadi 81,64% dari yang ditargetkan sebesar 74,26%, bertambahnya cakupan penerbitan KK disebabkan oleh beberapa diantara



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

faktor tingginya arus perpindahan penduduk pindah datang dari luar Tangsel ke tangsel sehingga penerbitan KK meningkat serta adanya pelayanan keliling pembuatan KK pada hari libur sampai tingkat RW.

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran yang ditargetkan 80,43% bertambah menjadi 82,48% atau berhasil mencapai target sebesar 103%, Faktor pendorong pencapaian target yaitu terlaksananya Pelayanan Keliling Pembuatan Akta Kelahiran sampai tingkat RW dengan jumlah 22.140 Akta Kelahiran serta tersedianya bantuan dokumen kependudukan bagi warga kurang mampu kepada 500 orang.

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian bertambah menjadi 49,24% Faktor pendorong pencapaian target adalah terlaksananya pelayanan pembuatan Akta Kematian dari 800 Akta yang ditargetkan menjadi 1.722 Akta Kematian yang telah dikeluarkan sepanjang tahun 2017, kemudian didukung juga dengan kegiatan sosialisasi tentang pencatatan sipil sebanyak 1 kali.

Jumlah data dan informasi pendudukan yang tersedia telah berhasil melampaui target 110%, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah terlaksananya MoU dengan pemerintah/swasta terkait kependudukan, serta ketersediaan data kependudukan ini telah dimanfaatkan oleh sekitar 5 OPD di Kota Tangerang Selatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Penerbitan KK	74,26%	81,64%	110%	Disdukcapil	TMT
Cakupan penerbitan KTP	73,15%	75,03%	103%	Disdukcapil	TMT
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	80,43%	82,48%	103%	Disdukcapil	TMT
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	42,19%	55,20%	131%	Disdukcapil	TMT
Rasio Pasangan Berakta Perkawinan	53,93%	55,79%	103%	Disdukcapil	TMT
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan	17,33%	17,33%	100%	Disdukcapil	TST
Jumlah Data dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1220802	1341844	110%	Disdukcapil	TMT

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.7.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Masih adanya Penduduk Kota Tangerang Selatan yang belum memahami tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2. Solusi



Melaksanakan sosialisasi dan pelayanan keliling pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

B.8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penyelenggara Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPMPPAKB). Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.8.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

B.8.1.1. Program dan Kegiatan

- 1. Program Pengendalian Penduduk**, program ini diarahkan pada pengendalian urbanisasi penduduk, dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu, kegiatan Operasi Yustisi dan Bina Kependudukan.

B.8.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

- 1. Program Pengendalian Penduduk**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 568.985.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 567.686.700,- (99,77%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Operasi Yustisi dan Bina Kependudukan dan Pendataan Kependudukan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengendalian Penduduk.	568.985.000,00	567.686.700,00	99,77%
Operasi Yustisi dan Bina Kependudukan	257.151.300,00	257.151.300,00	100,00%
Pendataan Kependudukan	311.833.700,00	310.535.400,00	99,58%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018

Pengendalian Urbanisasi Penduduk yang ditargetkan 500 orang berhasil mencapai target sebesar 100%. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target adalah terlaksananya Operasi Yustisi dan Bina Kependudukan di 7 kecamatan, didukung dengan pendataan penduduk Pindah Datang Pasca Idul Fitri maupun pendataan penduduk WNA yang berhasil didata sekitar 300 orang sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pengendalian Urbanisasi Penduduk	500	500	100%	Disdukcapil	TMT

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



B.8.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Perlu diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk WNA hasil pendataan terdata 586 WNA yang terdata di Kota Tangerang Selatan, dari data tersebut menunjukkan masih ada beberapa WNA yang belum mempunyai dokumen administrasi kependudukan

2. Solusi

Melaksanakan sosialisasi kepada WNA tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan.

B.8.2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

B.8.2.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Keluarga Berencana**, program ini diarahkan pada Proporsi Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 Tahun, Menurunnya Unmet Need, Meningkatnya Kesertaan ber- KB, Meningkatnya Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Ber-KB dan Meningkatnya Produk Unggulan UPPKS, dilaksanakan melalui 6 kegiatan.

B.8.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Keluarga Berencana**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.696.366.400,- dengan realisasi sebesar Rp 4.001.400.000,- (92,38%), yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Keluarga Berencana	4.001.400.000	3.696.366.400	92,38%
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	642.000.000	502.516.100	78,27%
Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi)	887.330.000	840.728.100	94,75%
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	317.000.000	308.667.500	97,37%
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	1.607.770.000	1.513.102.700	94,11%
Pembinaan Generasi Berencana	245.500.000	242.250.000	98,68%
Pengumpulan Data dan Sosialisasi Data Mikro Keluarga	301.800.000	289.102.000	95,79%

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai untuk seluruh indikator berhasil mencapai target sebesar 100%.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Proporsi Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 Tahun	2,20%	2,20%	100%	DPMPPPAKB	TST
Menurunnya Unmet Need	6,50%	6,50%	100%	DPMPPPAKB	TST
Meningkatnya Kesertaan ber- KB	70,50%	74,60%	106%	DPMPPPAKB	TMT
Meningkatnya Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Ber-KB	89,50%	90,98%	102%	DPMPPPAKB	TMT
Meningkatnya Produk Unggulan UPPKS	60,00%	61,00%	102%	DPMPPPAKB	TMT

Sumber : DPMPPPAKB, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.8.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Berlum meratanya tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan kader Keluarga Berencana.

2. Solusi

Optimalisasi pembinaan kader KB melalui orientasi dan pelatihan Program Keluarga Berencana.

B.9. PERHUBUNGAN

Penyelenggara Urusan Perhubungan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.9.1. Dinas Perhubungan

B.9.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan pelayanan angkutan**, program ini diarahkan pada Jumlah uji kir.
2. **Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas**, program ini diarahkan pada Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas.
3. **Program Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan**, program ini diarahkan pada Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi.
4. **Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan**, program ini diarahkan pada Peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas.



5. **Program Peningkatan Transportasi Massal**, program ini diarahkan pada Peningkatan sarana prasarana transportasi massal.

B.9.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Pengembangan pelayanan angkutan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.088.573.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.060.969.000,- (97,46%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pelayanan angkutan	1.088.573.000	1.060.969.000	97,46%
Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	717.618.000,00	702.356.000,00	97,87%
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	226.823.000,00	221.973.000,00	97,86%
Perencanaan Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas	144.132.000,00	136.640.000,00	94,80%

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Jumlah uji kir yang ditargetkan 35.500 unit, terealisasi sebesar 34.732 unit atau kurang mencapai target (98%). Belum optimalnya realisasi Jumlah uji kir disebabkan sejumlah perusahaan taksi konvensional yang pailit karena berkembangnya angkutan berbasis online, hal ini sedikit berpengaruh kepada jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kir kendaraannya, ditambah lagi dengan beberapa perusahaan yang tidak melaporkan kendaraannya ke unit pkb ketika kendaraan tersebut di lelang, rubah status, dijual ataupun berpindah kepemilikan ke alamat daerah lain.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah uji kir	35.500 unit	34.732 unit	98%	Dinas Perhubungan	TT

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

2. **Pengendalian dan pengamanan lalu lintas**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.548.989.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.490.014.000,- (99,31%), yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	8.548.989.000	8.490.014.000	99,31%
Bimbingan Keselamatan Jalan	360.168.000,00	352.368.000,00	97,83%
Inventarisasi Data Kecelakaan	100.267.000,00	86.916.000,00	86,68%
Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas	7.032.530.000,00	6.999.656.000,00	99,53%
Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari-hari Tertentu	656.024.000,00	652.024.000,00	99,39%
Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas	350.000.000,00	349.150.000,00	99,76%
Peningkatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80%

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

Kinerja yang dicapai untuk Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas berhasil mencapai target sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas	40	40	100%	Dinas Perhubungan	TST

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

3. **Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 490.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 485.174.000,- (99,02%), yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan	490.000.000	485.174.000	99,02%
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	220.000.000,00	218.425.000,00	99,28%
Rehabilitasi / Pemeliharaan perlengkapan Lalu Lintas	50.000.000,00	49.928.000,00	99,86%
Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL	150.000.000,00	146.954.000,00	97,97%
Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS	20.000.000,00	19.877.000,00	99,39%
Monitoring Evaluasi Pelaporan Fasilitas LLAJ	50.000.000,00	49.990.000,00	99,98%

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai untuk Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi berhasil mencapai target sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain: pemeliharaan seluruh Rambu-Rambu Lalu Lintas di jalan raya, Cermin Tikungan APILL begitupula dengan pemeliharaan *Area Traffic Control System* di beberapa titik sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi	77%	77%	100%	Dinas Perhubungan	TMT

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

4. **Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.577.566.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.462.403.300,- (96,78%), yang dilaksanakan melalui 11 (sebelas) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3.577.566.500	3.462.403.300	96,78%
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	202.500.000,00	197.785.000,00	97,67%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Lalu Lintas	320.000.000,00	285.279.800,00	89,15%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Zona Selamat Sekolah	268.125.000,00	260.425.000,00	97,13%
Pengadaan dan pemasangan Rambu-rambu lalu Lintas	270.000.000,00	268.245.000,00	99,35%
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Lalu Lintas	130.000.000,00	129.210.000,00	99,39%
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	374.000.000,00	372.770.000,00	99,67%
pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)	1.529.963.500,00	1.529.343.500,00	99,96%
Perencanaan dan Pengembangan Perparkiran dan Terminal	305.660.000,00	245.570.000,00	80,34%
Pelayanan Perparkiran dan Terminal	100.000.000,00	99.217.000,00	99,22%
Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas	50.000.000,00	47.240.000,00	94,48%
Monitoring Evaluasi Pelaporan Perparkiran dan Terminal	27.318.000,00	27.318.000,00	100,00 %

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai untuk Peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas berhasil mencapai target sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas	33%	33%	100%	Dinas Perhubungan	TST

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

5. **Pengembangan Transportasi Massal Program Penataan Administrasi Kependudukan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.248.534.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.216.045.500,- (97,40%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Transportasi Massal Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.248.534.000	1.216.045.500	97,40%
Perencanaan dan Pengembangan Transportasi	551.835.000,00	550.358.500,00	99,73%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan	191.530.000,00	176.423.000,00	92,11%
Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Angkutan	505.169.000,00	489.264.000,00	96,85%

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Peningkatan sarana prasarana transportasi massal yang ditargetkan 45%, berhasil mencapai target sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan sarana prasarana transportasi massal	45%	45%	100%	Dinas Perhubungan	TST

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018



B.9.1.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dari uraian diatas, dapat terlihat kegiatan yang pencapaian realisasi keuangannya kurang dari 100% dan realisasi fisiknya kurang dari 98% adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pelayanan Angkutan target jumlah uji kir tahun 2017 sebanyak 35.500 unit kendaraan realisasi 34.732 unit kendaraan (98%). Dalam hal ini tidak mencapai target 100% dikarenakan :
 - a. Banyak perusahaan taksi konvensional yang pailit karena berkembangnya angkutan berbasis online, sehingga berdampak pada bangkrutnya/tutupnya usaha taksi konvensional dan tidak lagi melaksanakan uji kir kendaraannya.
 - b. Adanya beberapa perusahaan yang tidak melapor ke unit PKB ketika kendaraan tersebut dilelang, rubah status, dijual /berpindah kepemilikan ke alamat daerah lain.
2. Kegiatan Inventarisasi Data Kecelakaan, jumlah anggaran sebesar Rp. 100.267.000,- realisasi mencapai Rp. 86.916.000,- atau (86,68%) dan capaian realisasi fisik sebesar 85,66%. Hal ini dikarenakan pada sub kegiatan terdatanya dan tertanganinya kecelakaan lalu lintas di kota Tangerang selatan dilakukan efisiensi pelaksanaan rapat yang semula per triwulan menjadi per semester, sehingga terjadi silpa efisiensi belanja barang jasa makan minum dan narasumber sebesar Rp. 13.351.000,-.
3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.675.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 46.595.000,- atau (65,93) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. pada sub kegiatan forum lalu lintas dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 34.615.200,-.
4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 191.530.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 176.423.000,- atau (92,11%) dan capaian realisasi fisik sebesar 98,03%. Dalam hal ini tidak mencapai realisasi 100% dikarenakan pada sub kegiatan pembangunan halte tidak dapat dilaksanakan (0%) dikarenakan terdapat duplikasi output pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan yang dapat mengakomodir output lebih banyak dari sub kegiatan pembangunan halte pada Dinas Perhubungan yaitu 14 halte. Sehingga sesuai hasil kesepakatan bersama anggaran pembangunan halte pada sub kegiatan pembangunan halte Dinas Perhubungan dialihkan pada APBD-P 2017.

Solusi

1. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi target uji kir yang belum tercapai antara lain :
 - Melakukan pendataan kendaraan bermotor wajib uji dan kendaraan non aktif;
 - Melakukan operasi penertiban terhadap angkutan umum/kota yang belum melakukan uji keur berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan evaluasi penentuan target kegiatan uji kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan wajib uji yang ada di Kota Tangerang Selatan.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

2. Upaya yang dilakukan kedepan dalam mengatasi permasalahan poin 2 s.d 6 adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses awal perencanaan kegiatan diantaranya :
 - Melakukan survey HPS terlebih dahulu dalam merencanakan anggaran suatu pekerjaan, sehingga meminimalisir terjadinya belanja barang/jasa yang terlalu besar;
 - Membuat dan mengkaji ulang ROK dan KAK/TOR pada setiap kegiatan.

B.9.2. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

B.9.2.1. Program dan Kegiatan

1. **Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan** program ini diarahkan pada pembangunan Terminal Pondok Cabe. Dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Terminal Pondok Cabe.

B.9.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 40.020.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp 37.642.751.000,- (94,06%).

Target capaian keuangan yang tidak tercapai disebabkan oleh efisiensi kontrak, penyusunan nilai HPS yang disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	40.020.150.000	37.642.751.000	94,06
Pembangunan Terminal Pondok Cabe	40.020.150.000	37.642.751.000	94,06

Sumber : Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Indikator kinerja program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, yaitu sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase bangunan terminal selesai dibangun	100%	100%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT

Sumber : Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

B.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggara Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan seluruh OPD.



B.10.1. Dinas Komunikasi dan Informatika

B.10.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa**, program ini diarahkan pada Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik, Persentase Penyebaran Informasi, Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD.
2. **Pengembangan Teknologi dan Informasi**, program ini diarahkan pada Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi, Peningkatan Tata Kelola Teknologi dan Informasi dan Peningkatan SDM Teknologi dan Informasi

B.10.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.929.730.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.351.499.000,- (92,71%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	7.929.730.000	7.351.499.000	92,71%
Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan dan Pelayanan Publik	482.130.000	335.529.500	69,59%
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	6.307.260.000	5.998.872.500	95,11%
Pendokumentasian Pimpinan Daerah	1.140.340.000	1.017.097.000	89,19%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2018

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai untuk seluruh indikator Program Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa berhasil mencapai target sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST
Persentase Penyebaran Informasi	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

2. **Pengembangan Teknologi dan Informasi**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 23.380.232.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.885.334.333,- (72,22%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Teknologi dan Informasi	23.380.232.350	16.885.334.333	72,22%
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	1.859.537.350	1.780.841.850	95,77%
Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Teknologi dan Informasi	18.180.277.050	12.576.295.317	69,18%
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	473.700.000	65.866.600	13,90%
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	2.509.812.950	2.113.280.566	84,20%
Pembinaan Layanan Publik Secara Elektronik	356.905.000	349.050.000	97,80%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2018

Peningkatan Tata Kelola Teknologi dan Informasi yang ditargetkan 20% berhasil mencapai target sebesar 100%, demikian halnya dengan kinerja Peningkatan SDM Teknologi dan Informasi yang ditargetkan 20% berhasil mencapai target sebesar 100%. Namun, untuk kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi yang ditargetkan 20% tidak tercapai dan hanya terealisasi sebesar 15%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi	20%	15%	79%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TT
Peningkatan Tata Kelola Teknologi dan Informasi	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST
Peningkatan SDM Teknologi dan Informasi	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2018

B.10.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Kegiatan pembangunan data center belum dapat dilaksanakan karena tidak ada penyedia yang memenuhi spesifikasi sehingga kegiatan tersebut akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

2. Solusi

- a) Kegiatan pembangunan data center akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.



B.11. KOPERASI DAN UMKM

Penyelenggara Urusan Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.11.1. Dinas Koperasi dan UMKM

B.11.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Pengembangan Koperasi**, program ini diarahkan pada Jumlah SDM Koperasi yang dibina, Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP, Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP dan Jumlah koperasi yang terfasilitasi
2. **Pengembangan UMKM**, program ini diarahkan pada Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM, Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM, Pembinaan wirausaha UMKM dan Calon Wirausaha UMKM, Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM, Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM dan Pengawasan, Pengembangan Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi
3. **Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**, program ini diarahkan pada Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi

B.11.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Koperasi**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.226.449.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.990.416.400,- (94,42%), yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Koperasi	4.226.449.000	3.990.416.400	94,42%
Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi	235.850.000	165.254.000	70,07%
Peningkatan Fasilitas Koperasi	956.004.000	890.014.000	93,10
Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi	1.903.455.000	1.827.741.000	96,02
Peningkatan dan Penilaian Mutu Koperasi	1.131.140.000	1.107.407.400	97,90

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai Program Pengembangan Koperasi adalah berhasil meningkatkan Jumlah SDM Koperasi yang dibina dari yang ditargetkan 1695 orang tercapai 1750 orang, atau berhasil mencapai target Jumlah SDM Koperasi yang dibina



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

sejumlah 103%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi sebanyak 1320 Pengurus koperasi

Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP dari yang ditargetkan tahun 2017 adalah 210 koperasi tercapai 210 koperasi dengan demikian target tahun 2017 tercapai 100%. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan dukungan kegiatan Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi yang telah dilaksanakan, yaitu :

- Fasilitasi Pembentukan/ Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ke Notaris sebanyak 57 koperasi.
- verifikasi Kelembagaan Koperasi di Kota Tangerang Selatan sebanyak 420 koperasi, dan
- Koordinasi dengan instansi / SKPD Terkait di Kkota Tangerang Selatan sebanyak 33 orang.

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP berhasil mencapai target sebesar 100%,

Jumlah koperasi yang terfasilitasi belum berhasil meningkatkan jumlah koperasi yang terfasilitasi dari yang ditargetkan 50 koperasi tercapai 58% atau baru 29 koperasi yang berhasil difasilitasi, kondisi ini disebabkan kurangmaksimalnya dalam proses pendaftaran serta sering terjadinya perubahan AD/ART koperasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pengurusannya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah SDM Koperasi yang dibina	1695 SDM Koperasi	1750 SDM Koperasi	103%	Dinas Koperasi dan UKM	TMT
Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP	210	210	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	420	434	103%	Dinas Koperasi dan UKM	TMT
Jumlah koperasi yang terfasilitasi	50	29	58%	Dinas Koperasi dan UKM	TT

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018

- Pengembangan UMKM**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.883.466.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.595.825.400,- (88,17%), yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan UMKM	10.883.466.500	9.595.825.400	88,17%
Fasilitasi Pengembangan Produk UMKM	432.526.000	362.054.000	83,71



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Fasilitasi Pembiayaan UMKM	380.650.000	365.623.500	96,05
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1.093.220.000	1.071.046.000	97,97
Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi UMKM	100.000.000	100.000.000	100,00
Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	2.800.000.000	2.741.474.400	97,91
Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	2.219.370.000	1.732.180.000	78,05
Peningkatan Peluang Wirausaha Mikro Kecil Menengah	1.750.000.000	1.721.990.900	98,40
Pengolahan Data dan Informasi	657.700.500	566.922.500	86,20
Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	850.000.000	359.244.100	42,26
Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	600.000.000	575.290.000	95,88

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai Program Pengembangan UMKM berhasil mencapai target sebesar 100%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- Fasilitasi Pengembangan Produk UMKM, sebanyak 218 peserta
- Fasilitasi Pembiayaan UMKM, sebanyak 401 Pelaku UMKM
- Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah, sebanyak 11 lokasi
- Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi UMKM, sebanyak 100 UMKM
- Pengembangan Pemasaran Produk UMKM, sebanyak 450 Produk UMKM
- Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk Usaha Mikro Kecil Menengah, sebanyak 74 UMKM Sertifikasi dan katalog
- Peningkatan Peluang Wirausaha Mikro Kecil Menengah, sebanyak 730 UMKM dan 1 lokasi
- Pengolahan Data dan Informasi, sebanyak 3 dokumen
- Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif, sebanyak 297 Pelaku UMKM
- Pengawasan dan Pengendalian KUMKM, sebanyak 320 korasi dan UMKM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM	200	200	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	400	400	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Pembinaan wirausaha UMKM dan Calon Wirausaha UMKM	1390	1390	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	7	7	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	371	371	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Pengawasan, Pengembangan Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi	3	3	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018

3. **Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 351.478.500,- (93,73), yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	375.000.000	351.478.500	93,73
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	375.000.000	351.478.500	93,73

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018

Indikator kinerja Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dan Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi, dari target masing-masing sebesar 1 lokasi dapat terealisasi sesuai target sebesar 100%. Faktor pendorong pencapaian target ini adalah dilaksanakannya seluruh kegiatan Penataan UMKM Informal PKL/Asongan dan Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon tangsel sebanyak 30 pelaku ekonomi kreatif.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1 lokasi	1 lokasi	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST
Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	Dinas Koperasi dan UKM	TST

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2018

B.11.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Masih banyak koperasi yang belum menerapkan regulasi koperasi dalam pengelolaan kelembagaan dan usahanya
- b) Pengurus dan Pengawas Koperasi sebagian besar belum memiliki kemampuan dalam mengelola Koperasi
- c) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengimplementasikan bimbingan teknis dan workshop yang diberikan
- d) UMKM belum mampu mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengembangan usahanya

2. Solusi

- a) Perlunya pengawasan dan pendampingan terus menerus kepada koperasi. Sosialisasi dan pelatihan manajemen perkoperasian masih perlu terus menerus dilakukan.
- b) Merubah metode bimtek dan workshop melalui on the job training dan pendampingan.



pemanfaatan teknologi informasi harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas produk dan peningkatan akses pasar bagi UMKM

B.12. PENANAMAN MODAL DAERAH

Penyelenggara Urusan Penanaman Modal Daerah di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

B.12.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Pengembangan investasi**, program ini diarahkan pada Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN
2. **Pengembangan Pelayanan Perijinan**, program ini diarahkan pada Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap, dan Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO

B.12.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Pengembangan investasi**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.409.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.057.807.469,- (89,69%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan investasi	3.409.250.000	3.057.807.469	89,69%
Peningkatan Jalur Kerjasama dan Promosi Potensi Investasi daerah	2.672.780.000	2.477.751.469	92,70%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	197.336.000	165.420.000	83,83%
Pengembangan Penanaman Modal	539.134.000	414.636.000	76,91%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai Program Pengembangan investasi berhasil meningkatkan Jumlah Investasi PMA & PMDN dari yang ditargetkan 37 PMA & 12 PMDN tercapai sebanyak 60 PMA & 20 PMDN. Hal ini tidak terlepas dari upaya pendataan investor penanaman modal dalam negeri.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian target ini, yaitu terselenggaranya Promosi dan Kerjasama Investasi Kota Tangerang Selatan (2 kali pameran dalam daerah, 4 kali pameran luar daerah, 1 kali pameran luar negeri & 3 media cetak), sebanyak 10 kali dalam setahun, upaya tersebut



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan jumlah investasi PMA & PMDN di Kota Tangerang Selatan sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN	37 PMA & 12 PMDN	60 PMA & 20 PMDN	163%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TMT

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

2. **Pengembangan Pelayanan Perijinan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.987.815.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.570.563.112,- (91,63%), yang dilaksanakan melalui 20 (dua puluh) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Pelayanan Perijinan	4.987.815.500	4.570.563.112	91,63%
Penyusunan / Penyempurnaan Regulasi Perizinan	822.580.000	806.321.000	98,02%
Sosialisasi dan Publikasi Perizinan	355.735.000	342.069.000	96,16%
Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan	145.270.000	145.120.070	99,90%
Penyusunan Standar Layanan Perijinan	558.950.000	498.441.400	89,17%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Penanaman Modal	70.500.000	58.736.500	83,31%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan	344.551.400	284.192.000	82,48%
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pembangunan	282.000.000	259.000.000	91,84%
Fasilitasi Penetapan Bidang Pembangunan	220.000.000	219.163.000	99,62%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi	289.278.000	259.089.796	89,56%
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	115.000.000	115.000.000	100,00 %
Fasilitasi Penetapan Bidang Ekonomi	200.000.000	197.909.500	98,95%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Kesra	271.530.000	240.385.996	88,53%
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesra	187.186.500	51.705.500	27,62%
Fasilitasi Penetapan Bidang Kesra	64.316.200	64.219.700	99,85%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ketenagakerjaan	200.000.000	198.045.000	99,02%
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ketenagakerjaan	190.000.000	186.400.000	98,11%
Fasilitasi Penetapan Bidang Ketenagakerjaan	169.570.000	169.332.500	99,86%
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Sosial Budaya	168.140.000	165.440.000	98,39%
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya	172.810.000	149.710.000	86,63%
Fasilitasi Penetapan Bidang Sosial Budaya	160.398.400	160.282.150	99,93%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap yang ditargetkan 40 Jenis Ijin bertambah menjadi 137 Jenis Ijin atau berhasil mencapai target sebesar 343%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan jenis ijin sebanyak 97 jenis ijin atau meningkat sebanyak 71%, Faktor pendorong pencapaian target adalah adanya pendelegasian kewenangan perijinan dan non perijinan.

Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO berhasil meningkatkan jenis ijin dari yang ditargetkan 22 tercapai sebanyak 137 atau berhasil mencapai target 623%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena semua pendelegasian perijinan sudah mendapatkan sertifikat ISO.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap	40 Jenis Ijin	137 Jenis Ijin	343%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TMT
Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO	22 Jenis Ijin	137 Jenis Ijin	623%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TMT

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.12.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum adanya tenaga ahli yang bersertifikasi sehingga menghambat pada kegiatan Pengendalian Penanaman Modal.
- Masih diperlukannya identifikasi potensi dan promosi investasi yang lebih mengarah pada upaya percepatan peningkatan investasi di Kota Tangerang Selatan.

2. Solusi

- Peningkatan koordinasi dengan BKPM Pusat
- Kajian potensi investasi dan inovasi bentuk dan pola promosi yang lebih efektif dan efisien

B.13. KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA

Penyelenggara Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:



B.13.1. Dinas Pemuda dan Olahraga

B.13.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan peran serta kepemudaan**, program ini diarahkan pada Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan
2. **Program Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**, program ini diarahkan pada Jumlah Calon Wirausaha Muda
3. **Program Pengembangan manajemen dan pemasyarakatan olahraga**, program ini diarahkan pada Pembinaan Manajemen dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat
4. **Program Pengembangan sarana dan prasarana olahraga**, program ini diarahkan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga

B.13.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan peran serta kepemudaan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.939.897.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.872.917.000,- (97,72%), yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan peran serta kepemudaan	2.939.897.000	2.872.917.000	97,72%
Pembinaan SDP, IMTAQ dan Pengembangan IPTEK Bagi Pemuda	253.340.000	252.040.000	99,49%
Pengembangan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	310.382.000	260.082.000	83,79%
Lomba Kreasi dan Pameran Prestasi Pemuda	145.315.000	144.315.000	99,31%
Penyusunan Pola Kemitraan dan Pendidikan Serta Pelatihan Dasar Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	385.950.000	383.200.000	99,29%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	1.844.910.000	1.833.280.000	99,37%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai Program Pengembangan peran serta kepemudaan berhasil meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan dari yang ditargetkan 20 OKP tercapai 100% atau berhasil mencapai target. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

- a) Pembinaan SDP, IMTAQ dan pengembangan IPTEK bagi pemuda kepada 300 orang.
- b) Pengembangan peran serta pemuda dalam pembangunan sebanyak 180 orang
- c) Lomba kreasi dan pameran prestasi pemuda melalui LTUB di 30 sekolah.
- d) Penyusunan pola kemitraan dan pendidikan serta pelatihan dasar kepemimpinan dan kepeloporan pemuda sebanyak 194 orang, serta pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan	20 OKP	20 OKP	100%	Dispora	TST

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

2. **Program Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 357.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 355.990.000,- (99,48%), yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	357.850.000	355.990.000	99,48%
Perumusan kebijakan kewirausahaan dan Pelatihan bagi pemuda	357.850.000	355.990.000	99,48%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

Jumlah calon wirausaha muda berhasil meningkatkan 7 Kelompok Calon Wira Usaha atau berhasil mencapai target 100%. Faktor keberhasilan pencapaian target adalah terlaksananya budidaya burung puyuh bagi pemuda di 7 Kelompok selama kegiatan tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Calon Wirausaha Muda	7	7 Kelompok Calon Wira Usaha	100%	Dispora	TST

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

3. **Program Pengembangan manajemen dan pemasyarakatan olahraga**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.753.289.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.726.307.000,- (99,02%), yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan manajemen dan pemasyarakatan olahraga	2.753.289.000	2.726.307.000	99,02 %
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga	572.890.000	571.750.000	99,80 %
Pengembangan dan Peningkatan Kesegaran Jasmani, Olahraga Rekreasi dan Layanan Khusus	820.243.000	802.243.000	97,81 %
Pembinaan dan Pemassalan Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	757.134.000	757.134.000	100,0 0%
Pembinaan, Peningkatan, Kemitraan dan Penghargaan Bagi Insan dan Industri Olahraga	228.507.000	224.465.000	98,23 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan manajemen dan pemasyarakatan olahraga	2.753.289.000	2.726.307.000	99,02 %
Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Daerah	374.515.000	370.715.000	98,99 %

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

Pembinaan Manajemen dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat yang ditargetkan 10 Cabor bertambah menjadi 18 Cabor atau berhasil mencapai target sebesar 180% hal ini menunjukkan adanya peningkatan 8 Cabor yang dipertandingan selama tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pembinaan Manajemen dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat	10 Cabor	18 Cabor	180%	Dispora	TMT

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

4. **Program Pengembangan sarana dan prasarana olahraga**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.107.808.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.061.647.400,- (97,81%), yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	2.107.808.800	2.061.647.400	97,81%
Peningkatan dan Pengembangan Sarpras Olahraga Berbasis IPTEK	1.951.758.800	1.910.547.400	97,89%
Pengembangan dan Pengkajian Standarisasi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	156.050.000	151.100.000	96,83%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga berhasil meningkatkan Sarana dan Prasarana olahraga dari yang ditargetkan 15 bertambah sebanyak 16 tercapai 107%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu peningkatan sarana prasarana olahraga 16 terdiri 4 Prasarana dan 12 Sarana Olahraga, serta terlaksananya seminar penerapan sains olahraga kepada 200 orang dan terciptanya satu aplikasi sistem informasi berbasis teknologi inovatif.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga	15	16	107%	Dispora	TMT
Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga	10	10	100%	Dispora	TST

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2018

B.13.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- a) Sarana prasarana yang ditingkatkan belum sesuai dengan standar sarana prasarana olahraga yang dikeluarkan oleh Kemenpora (Lampiran II Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2016).
- b) Pada Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Daerah, target pendampingan kejurnas tidak tercapai dikarenakan kurangnya data event kejurnas
- c) Belum terfokusnya peningkatan sarana prasarana olahraga di Kota Tangsel.

2. Solusi

- a) Memfokuskan 1 sarana prasarana untuk ditingkatkan dengan memberikan anggaran secara maksimal.
- b) Melakukan koordinasi dan pendataan kembali dengan cabang olahraga.

B.14. STATISTIK

Penyelenggara Urusan Statistik di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika.

B.14.1. Badan Perencanaan Pembangunan

B.14.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan data dan informasi**, diarahkan pada Ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan

B.14.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan data dan informasi**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 108,785,450,- dengan realisasi sebesar Rp. 104,306,250,- (95.88%), yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan data dan informasi	108,785,450.00	104,306,250.00	95.88%
Penyusunan dan pengembangan data dan Informasi	108,785,450.00	104,306,250.00	95.88%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Tahun 2018

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai Program Pengembangan data dan informasi berhasil menyediakan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan dari yang ditargetkan 4 dokumen berhasil mencapai target 100%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan diseminasi data dan statistik daerah yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a) Penyusunan buku saku profil Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 dokumen



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- b) Penyusunan dokumen profil Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 dokumen
- c) Penyusunan dokumen indikator ekonomi daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 dokumen
- d) Penyusunan dokumen indikator kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 dokumen
- e) pelaksanaan input data SIPD sebanyak 1 kali
- f) pelaksanaan pemetaan elemen data SIPD sebanyak 1 kali
- g) Penyusunan dokumen pengumpulan data lingkup bidang ekonomi, sosial dan kemasyarakatan sebanyak 1 dokumen
- h) Penyusunan dokumen pengumpulan data lingkup bidang fisik dan prasarana sebanyak 1 dokumen
- i) Penyusunan dokumen pengumpulan data lingkup bidang litbang dan pemerintahan sebanyak 1 dokumen
- j) Pelaksanaan sosialisasi data makro Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 kali
- k) Pelaksanaan sosialisasi hasil sensus ekonomi BPS Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 kali
- l) Pelaksanaan bimtek penyusunan dan pengembangan data/informasi sebanyak 1 kali
- m) Pelaksanaan Forum data sebanyak 2 kali

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan	4 dokumen	4 dokumen	100%	Bappeda	TST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika., Tahun 2018

B.14.2. Dinas Komunikasi dan Informatika

B.14.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan data dan informasi**, diarahkan pada Cakupan data dan informasi SKPD di Pemerintah Kota Tangerang Selatan

B.14.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan data dan informasi**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 400.000.000,- (100%), yang dilaksanakan melalui 1(satu) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan data dan informasi	400.000.000.00	400.000.000.00	100%
Pengumpulan, kompilasi, penyusunan dan	400.000.000.00	400.000.000.00	100%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

diseminasi data dan statistik daerah

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika., Tahun 2018

Kinerja Cakupan data dan informasi SKPD dari yang ditargetkan 100% tercapai 100% dengan demikian target tahun 2017 tercapai 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan data dan informasi SKPD	100%	100%	100%	Diskominfo	TST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika., Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

B.15. PERSANDIAN

Penyelenggara Urusan Persandian di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.15.1. Dinas Komunikasi dan Informatika

B.15.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Optimalisasi Sistem Persandian**, program ini diarahkan pada Cakupan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi dan Cakupan Penyiapan, Pemanfaatan dan Pengembangan SDM Sandi, Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi

B.15.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Optimalisasi Sistem Persandian**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 280.821.500,- (93,61%), yang dilaksanakan melalui 1(satu) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Optimalisasi Sistem Persandian	300.000.000	280.821.500	93,61%
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	300.000.000	280.821.500	93,61%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, tahun 2018

Kinerja yang dicapai Program Optimalisasi Sistem Persandian berhasil mencapai target 20% dengan capaian 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain penyelenggaraan Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali penyelenggaraan, didukung dengan sarana keamanan informasi yang memadai.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
-------------------	--------	-----------	---------	-----	-------



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Cakupan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST
Cakupan Penyiapan, Pemanfaatan dan Pengembangan SDM Sandi, Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi	20%	20%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, tahun 2018

B.16. KEBUDAYAAN

Penyelenggara Urusan Kebudayaan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.16.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B.16.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan dan Pengelolaan kebudayaan**, program ini diarahkan pada Jenis Budaya Yang Dilestarikan

B.16.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Nilai Budaya**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.342.110.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.206.697.840,- (89,91%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Nilai Budaya	1.342.110.000	1.206.697.840	89,91%
Pelestarian dan Kuantitas Cagar Budaya	364.000.000	297.856.000	81,83%
Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal	415.800.000	360.540.000	86,71%
Penyelenggaraan Pekan Seni/Budaya	562.310.000	548.301.840	97,51%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai Pengembangan Nilai Budaya berhasil meningkatkan jenis budaya yang dilestarikan dari yang ditargetkan 4 jenis tercapai 4 jenis atau berhasil mencapai target 100%. Faktor pendorong pencapaian target adalah adanya pelestarian dan kuantitas cagar budaya melalui pelestarian benda budaya, upaya inipun telah diperkuat dengan pelaksanaan Seminar cagar budaya dan *Fokus Discussion Group* (FDG) pembangunan museum Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi pendorong keberhasilan yaitu saat ini telah dihasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan, dimana pada saat



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

penyusunannya melibatkan sekitar 75 orang dari berbagai disiplin yang *concern* terhadap kebudayaan di Kota Tangerang Selatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jenis Budaya Yang Dilestarikan	4	4	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TST

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

B.16.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Kurangnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap Seni Budaya Dalam Daerah/ Budaya Tradisional sehingga sulit untuk menelurkan generasi penerus khususnya terhadap seni tradisi.

2. Solusi

Peningkatan penyelenggaraan gelar seni dengan melibatkan generasi muda.

B.17. PERPUSTAKAAN

Penyelenggara Urusan Perpustakaan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.17.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

B.17.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan budaya baca**, program ini di arahkan pada Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun dan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka

B.17.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan budaya baca**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.482.915.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.444.746.250,- (95,86%), yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan budaya baca	1.482.915.250,00	1.444.746.250,00	95,86%
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca	315.823.200,00	302.763.200,00	95,86%
Pembinaan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat	242.851.000,00	242.753.000,00	99,96%
Penyediaan Bahan Pustaka	577.513.100,00	576.013.100,00	99,74%
Peningkatan layanan perpustakaan	195.738.000,00	179.002.600,00	91,45%
Pengolahan Bahan Pustaka	150.989.950,00	144.214.350,00	95,51%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai Program Pengembangan budaya baca berhasil meningkatkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan dari yang ditargetkan 796.000 orang tercapai 831.000 orang atau berhasil mencapai target 104%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya promosi perpustakaan di berbagai media dalam rangka pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca. Selain itu, dengan melaksanakan Hari Kunjung Perpustakaan Sekolah di 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Upaya lainnya melalui kegiatan bedah buku yang dilaksanakan 2 kali sepanjang tahun 2017.

Faktor pendorong pencapaian target lainnya adalah pembinaan dan Pendampingan Perpustakaan Sekolah di 7 kecamatan dengan jumlah masing-masing 6 sekolah per-kecamatan, upaya tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan sejumlah 831 ribu orang yang mengunjungi Perpustakaan.

Jumlah Koleksi Bahan Pustaka berhasil meningkatkan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka sebanyak 12.311 buku atau berhasil mencapai target 103%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari penyediaan bahan pustaka sepanjang tahun 2017 yang berhasil di koleksi sebanyak 12.311 judul buku dari berbagai sumber dan kategori

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	796.000 orang	831.000 orang	104%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	TMT
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	12.000 buku	12.311 buku	103%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	TMT

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2018

B.17.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum memadainya perlengkapan penunjang seperti jaringan khusus *e-library* termasuk gedung sebagai prasarana utamanya, maka pembuatan *e-Library* tidak dapat dilaksanakan.
- Tidak adanya aplikasi *e-library*, maka pengadaan *e-Book* tidak dapat dilaksanakan

2. Solusi



- a. Mengoptimalkan jaringan khusus E-library termasuk gedung sebagai prasarana utama.
- b. Membuat aplikasi *e-library*.

B.18. KEARSIPAN

Penyelenggara Urusan Kearsipan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.18.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

B.18.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan**, program ini diarahkan pada Tertatanya arsip seluruh perangkat daerah dan unit kerja

B.18.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.795.972.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.627.483.550,- (96,66%), yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	1.795.972.800,00	1.627.483.550,00	96,66%
Pengadaan sarana penyimpanan	186.705.000,00	186.705.000,00	100,00%
Pembinaan Kearsipan	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan	410.222.200,00	396.528.100,00	96,66%
Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data	150.181.400,00	148.481.000,00	98,87%
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	80.140.000,00	76.260.000,00	95,16%
Akuisisi Arsip/Dokumen Daerah	275.000.000,00	212.776.000,00	77,37%
Penduplikatan Dokumen/ Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	-	-	
Penelusuran Arsip	44.871.800,00	35.701.800,00	79,56%
Pelayanan Kearsipan	62.900.000,00	55.280.000,00	87,89%
Sistem Pelayanan Informasi, Multimedia dan Otomasi	569.452.400,00	499.251.650,00	87,67%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tertatanya arsip seluruh perangkat daerah dan unit kerja	0,25	0,2063	83%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	TT

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2018

C. URUSAN PILIHAN

C.1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggara Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

C.1.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

C.1.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan Perikanan**, program ini diarahkan pada Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan.

C.1.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Perikanan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.049.358.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.954.499.500,- (95,37%), yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	
Program Pengembangan Perikanan	2.049.358.300	1.954.499.500	95,37%
Pengembangan bibit ikan unggul	406.147.000	393.203.400	96,81%
Pembinaan dan pengembangan perikanan	409.095.000	400.402.500	97,88%
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan	538.688.000	504.051.000	93,57%
Promosi hasil produksi perikanan unggulan daerah	405.653.100	376.013.400	92,69%
Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan	118.750.000	116.872.000	98,42%
Peningkatan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	62.858.600	55.790.600	88,76%
Pengembangan Teknologi Pengolahan Ikan	108.166.600	108.166.600	100,00%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Kinerja yang dicapai Program Pengembangan Perikanan berhasil meningkatkan nilai tukar pembudidaya/pelaku usaha perikanan berhasil mencapai 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain: promosi hasil produksi perikanan unggulan daerah melalui keikutsertaan para pembudidaya/pelaku pada pameran produk perikanan tingkat nasional, GEMARIKAN dan serta memfasilitasi penguatan kelembagaan FORIKAN serta kegiatan-kegiatan lainnya seperti pelatihan dinamika kelembagaan kelompok POKMASWAS 2 kali untuk 60 orang, dan temu usaha pengusaha obat dan pakan ikan dengan para pembudidaya Ikan. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas juga dari adanya dukungan Perwal tentang Usaha Perikanan Pasca Panen di keluarkan pada tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan			101,50%	101,50%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tahun 2018

C.2. PARIWISATA

Penyelenggara Urusan Pariwisata di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

C.2.1. Dinas Pariwisata

C.2.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan destinasi pariwisata**, program ini diarahkan pada Jumlah PAD dari sektor pariwisata.
2. **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**, program ini diarahkan pada Jumlah Kunjungan Wisatawan.
3. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif**, program ini diarahkan pada jumlah usaha ekonomi kreatif.

C.2.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan destinasi pariwisata**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.532.405.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,568.498.480,- (42%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan destinasi pariwisata	8.532.405.500	3.568.498.480	42%
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	2.445.904.500	2.364.434.480	97%
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	5.944.301.000	1.061.864.000	18%
Penataan Kualitas Destinasi Wisata	142.200.000	142.200.000	100%

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai program pengembangan destinasi pariwisata adalah berhasil meningkatkan jumlah PAD dari sektor pariwisata dari yang ditargetkan Rp. 278.147.684.366,- tercapai sebanyak Rp. 283.122.146.291,- atau berhasil mencapai target 102%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena adanya pengembangan jenis dan paket wisata unggulan melalui beberapa kegiatan festival yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017 (festival Situ Bungur, festival Lenong Tangerang Selatan dan festival panggung kebanggaan, Tangsel Jazz Festival, dll.). Disamping itu penghargaan Adhikarya Wisata 2017 juga berhasil diberikan kepada usaha pariwisata di Kota Tangerang Selatan (penghargaan dibagi dalam 10 kategori).

Pengembangan objek pariwisata unggulan juga menjadi faktor penyumbang keberhasilan pencapaian target, seperti dukungan jejaring komunitas/asosiasi kepariwisataan serta penataan kualitas destinasi wisata dengan menampilkan pelaku seni dilokasi daya tarik wisata, dimana pada saat itu 48 kali penampilan berhasil ditampilkan. Faktor serta upaya tersebut diatas secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan investasi sarana wisata di Kota Tangerang Selatan sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah PAD dari sektor pariwisata	278.147.684.366	283.122.146.291	102%	Dinas Pariwisata	TMT

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.457.537.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.072.481.700,- (88.86%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.457.537.000	3.072.481.700	88.86%
Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	2.726.600.000	2.374.030.600	87.07%
Penataan Sistem Usaha Kepariwisata	730.937.000	698.451.100	95.56%

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai program pengembangan pemasaran pariwisata berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari yang ditargetkan 327.309 wisatawan tercapai 544.206 wisatawan atau berhasil mencapai target sejumlah 166%. Keberhasilan peningkatan target ini tidak terlepas dari adanya pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata melalui pameran potensi pariwisata yang dilaksanakan diluar



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

daerah, maupun dari dukungan media seperti videotron, pagelaran budaya dan ekspose ciri khas Tangsel seperti batik dll.

Faktor pendorong lainnya adalah dilaksanakannya kegiatan penataan sistem usaha kepariwisataan melalui pembinaan, pengawasan dan monitoring penyelenggaraan usaha kepariwisataan, pencetakan dan penggandaan sarana rekomendasi teknis tanda daftar usaha pariwisata, serta pemutakhiran data usaha pariwisata yang selalu diperbaharui/di *up-date* setiap bulan selama tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Kunjungan Wisatawan	327.309	544.206	166%	Dinas Pariwisata	TMT

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

3. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.514.575.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.294.760.000,- (91.26%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	2.514.575.000	2.294.760.000	91.26%
Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	1.976.625.000	1.811.510.000	91.65%
Fasilitasi dan Kemitraan Kelembagaan Pariwisata	537.950.000	483.250.000	89.83%

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai program pengembangan ekonomi kreatif berhasil meningkatkan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif dari yang ditargetkan 30 pelaku usaha ekonomi kreatif tercapai 143 pelaku usaha ekonomi kreatif atau berhasil mencapai target sejumlah 477%. Keberhasilan peningkatan target ini tidak terlepas dari adanya pengembangan SDM ekonomi kreatif melalui pembinaan, workshop, pemilihan duta wisata, inventarisasi pelaku ekonomi kreatif, maupun pemberian ruang yang lebih luas kepada Pelaku ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata, seperti *car free day* dan bazar-bazar pada festival-festival yang diadakan oleh Dinas Pariwisata.

Faktor pendorong lainnya adalah dilaksanakannya penguatan terhadap lembaga ekonomi kreatif melalui pembentukan lembaga ekonomi kreatif, kemitraan kepada pelaku ekonomi kreatif dan fasilitasi pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan HKI.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	30	143	477%	Dinas Pariwisata	TMT

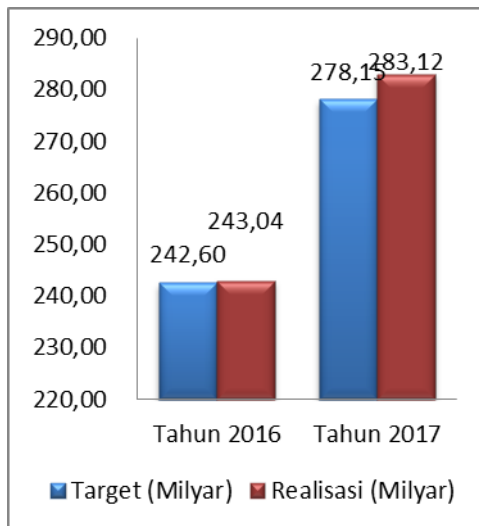
Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

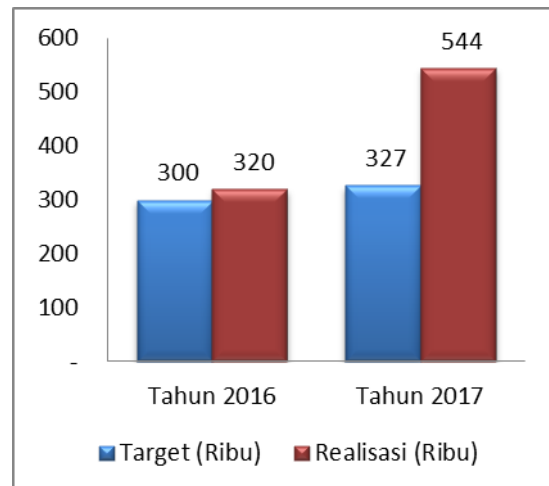


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

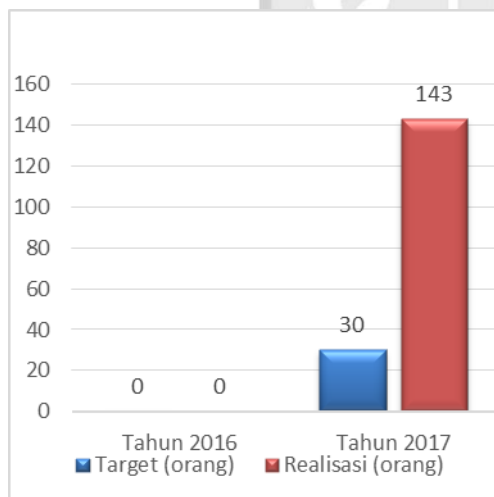
Grafik Error! No text of specified style in document.-2. Realisasi dan Target Jumlah PAD dari sektor pariwisata Tahun 2016-2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-2. Realisasi dan Target Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-3. Realisasi dan Target Jumlah pelaku ekonomi kreatif Tahun 2016-2017



C.2.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Kurangnya kajian tentang pemasaran sehingga target pasar kurang fokus.
- Belum optimalnya Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Tujuan Wisata



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

- c. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 21,127,036,716.- realisasi mencapai Rp. 15,157,026,235.- (71.74%), dengan demikian terdapat deviasi anggaran sebesar Rp 5,970,010,481.- atau (28.26%). Adanya deviasi ini diakibatkan karena :
- Kegiatan tetap dilaksanakan tetapi menggunakan dana sponsor sehingga keuangan tidak terserap sebesar Rp 2,730,452,286.- (12.92%).
 - Kegiatan Tangsel Street Parade festival dan Live Report Media Elektronik tidak dilakukan karena keterbatasan waktu, Sehingga terjadi SILPA sebesar Rp 1,750,785,714.- (8.29%).

2. Solusi

- a. Mengoptimalkan Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Tujuan Wisata
- b. Peningkatan koordinasi terkait perencanaan kegiatan baik dari segi anggaran maupun waktu pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal.
- c. Untuk tahun-tahun berikutnya kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan bantuan sponsor, perencanaan penganggarnya harus diperhitungkan dengan cermat untuk menekan SILPA.

C.3. PERTANIAN

Penyelenggara Urusan Pertanian di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

C.3.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

C.3.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan pertanian**, program ini diarahkan pada Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian, Presentase Kesehatan Hewan dan Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH.

C.3.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan pertanian**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.314.832.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.188.080.950,- (94,52%), yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pertanian,	2.314.832.900	2.188.080.950	94,52%
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	343.083.500	324.758.500	94,66%
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	383.227.000	383.192.000	99,99%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pameran Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	231.060.000	222.586.000	96,33%
Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pelaku Usaha Pertanian	136.660.000	124.166.000	90,86%
Pengembangan Penanganan Pasca Panen Bidang Peternakan	185.458.500	178.991.000	96,51%
Fasilitasi Kesehatan Hewan	320.360.000	299.195.650	93,39%
Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani	36.250.000	35.705.000	98,50%
Pengembangan Produksi Peternakan	232.591.900	226.937.300	97,57%
Fasilitasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	446.142.000	392.549.500	87,99%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2018

Capaian yang dihasilkan pada Program Pengembangan pertanian, sudah sesuai target, yaitu sebesar 100%, yaitu meliputi nilai tukar petani/pelaku usaha pertanian, presentase kesehatan hewan dan presentase bahan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	101,50%	101,50%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
Presentase Kesehatan Hewan	0,8	0,8	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST
Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	78,00%	78,00%	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	TST

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2018

C.3.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke penggunaan nonpertanian seperti pemukiman dan kawasan bisnis.

2. Solusi

Memanfaatkan lahan-lahan pekarangan terutama di kawasan perkotaan untuk budidaya pertanian.

C.4. PERDAGANGAN

Penyelenggara Urusan Perdagangan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2) Sekretariat Daerah dan 3) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.



C.4.1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

C.4.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**, program ini diarahkan pada Persentase Pengawasan Barang dan Jasa, Stabilitas harga kebutuhan pokok, Peningkatan Kesadaran Perijinan Perdagangan dan Jumlah UTP yang diawasi.
2. **Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**, program ini diarahkan pada Jumlah produk yang dipasarkan
3. **Program Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional**, program ini diarahkan pada Jumlah kawasan perdagangan tradisional yang dikelola

C.4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.206.745.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.965.614.379,- (89,07%), yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.206.745.500	1.965.614.379	89,07%
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	250.000.000	220.050.000	88,02%
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	961.600.000	897.164.279	93,30%
Monitoring dan Evaluasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	107.237.500	107.237.500	100,00%
Pendaftaran Wajib Daftar Perusahaan	163.200.000	163.200.000	100,00%
Fasilitasi Penyediaan Bahan Pokok	124.708.000	124.708.000	100,00%
Uji Petik dan Pendampingan Tera/Tera Ulang UTP	300.000.000	156.452.000	52,15%
Sosialisasi Daerah Tertib Ukur	300.000.000	296.802.600	98,93%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

Indikator Jumlah UTP yang diawasi, dari target sebesar 8500 UTP, pada tahun 2017 terrealisasi sekitar 5814 UTP atau baru 68%. Belum terpenuhinya target terkendala pencairan sehingga kegiatan selama Triwulan II tidak terlaksana.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase Pengawasan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST
Stabilitas harga kebutuhan pokok	9 Komoditas	9 Komoditas	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

Peningkatan Kesadaran Perijinan Perdagangan	40	100	250%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TMT
Jumlah UTTP yang diawasi	8500	5814	68%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TT

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

Keterangan :

TST : Tercapai Sesuai Target

TMT : Tercapai Melebihi Target

TT : Tidak Tercapai

2. **Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.213.854.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.085.903.500,- (96,02%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3.213.854.100	3.085.903.500	96,02%
Pengembangan Potensi Produk Ekspor	534.954.100	519.522.600	97,12%
Promosi dan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah untuk Mengikuti Pameran Dalam dan Luar Negeri	2.678.900.000	2.566.380.900	95,80%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai program peningkatan dan pengembangan ekspor berhasil meningkatkan jumlah produk yang dipasarkan dari yang ditargetkan 2 produk tercapai 24 produk atau berhasil mencapai target 1200% selama tahun 2017. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan mengembangkan potensi produk ekspor yang dilaksanakan melalui beberapa upaya, yaitu 1) penyediaan majalah peluang pasar; 2) Sosialisasi ekspor impor serta temu usaha IKM, 3) Pelatihan ekspor impor kepada sekitar 200 orang pelaku usaha, dan 4) Fasilitasi halal kepada sekitar 35 IKM.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian target ini yaitu terlaksananya misi dagang antara Rusia dan Jepang ditunjang dengan promosi dan fasilitasi IKM untuk mengikuti pameran dalam dan luar negeri telah berhasil dilaksanakan kepada 15 IKM. Maka, secara tidak langsung upaya tersebut berdampak terhadap peningkatan jumlah produk yang dipasarkan sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah produk yang dipasarkan	2	24	1200%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TMT

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

3. **Program Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.643.036.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.942.126.000,- (84,90%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional	4.643.036.700	3.942.126.000	84,90%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Operasional UPT Pasar	1.252.566.700	1.192.464.000	95,20%
Pengembangan Pasar Diatribusi Barang/Produk	3.390.470.000	2.749.662.000	81,10%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

Sepanjang tahun 2017 kinerja jumlah kawasan perdagangan tradisional yang dikelola berhasil mencapai target sejumlah 100%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu 1) Pemenuhan operasional UPT pasar serta melaksanakan pembinaan pengelolaan pasar/distribusi barang/produk yang dilaksanakan untuk masing-masing sebanyak 7 pasar, penataan dan pembongkaran pasar dilaksanakan untuk 1 pasar dan revitalisasi pasar sebanyak 3 pasar.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah kawasan perdagangan tradisional yang dikelola	5	5	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, Tahun 2018

C.4.1.3. Permasalahan dan Solusi

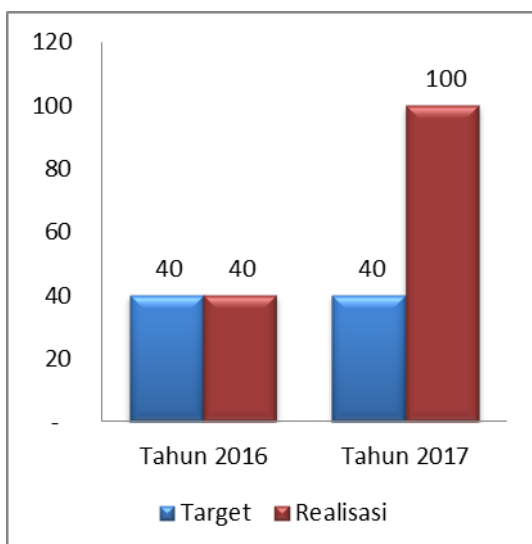
1. Permasalahan

- Pelaku usaha yang mempunyai Kontrak dagang dengan eksportir masih sedikit, Kecilnya pelaku usaha dalam menggunakan bank devisa dalam bertransaksi, sehingga keberadaan Kontrak dagang dengan eksportir pun menjadi sedikit.
- Masih sedikitnya pelaku usaha yang belum memiliki sistim perencanaan secara formal dalam kegiatan ekspor.

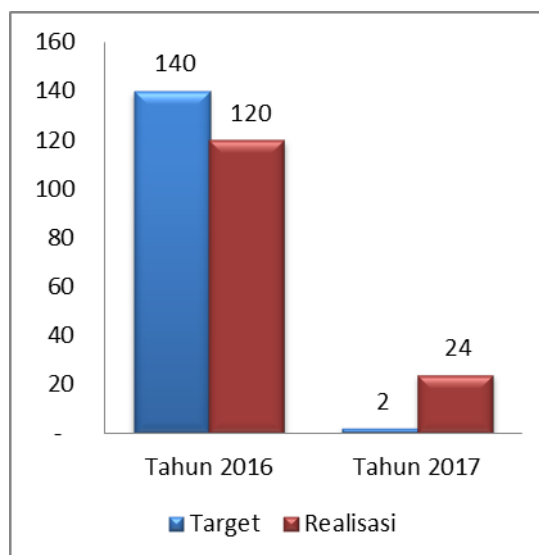
2. Solusi

- Meningkatkan sistim perencanaan secara formal dalam kegiatan ekspor
- Meningkatkan motivasi menjadi eksportir langsung.
- Menghasilkan produk yang sesuai dengan standar Negara tujuan ekspor.

Grafik Error! No text of specified style in document.-5. Realisasi dan Target Peningkatan Kesadaran Perijinan Perdagangan Tahun 2016-2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-5. Realisasi dan Target Jumlah produk yang dipasarkan (produk ekspor) Tahun 2016-2017





C.4.2. Sekretariat Daerah

C.4.3.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**, program ini diarahkan pada Jumlah Rapat Koordinasi TPID dan Jumlah pendataan/pencacahan Indeks harga Konsumen

C.4.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

4. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.310.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.220.567.700,- (93,17%), yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.310.000.000,00	1.220.567.700,00	93,17%
Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	1.310.000.000,00	1.220.567.700,00	93,17%

Sumber : Sekretariat Daerah, tahun 2018

Indikator kinerja jumlah rapat koordinasi TPID dan jumlah pendataan/ pencacahan Indeks harga Konsumen, dapat terealisasi sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain: 1) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tangerang Selatan selama Triwulan I s.d IV, 2) Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah Kota Tangerang Selatan selama Semester I s.d II, 3) Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tangerang Selatan, 4) *Capacity Building* Pengendalian Inflasi Kota Tangerang Selatan dan 5) Rekonsiliasi Pencacahan IHK Kota Tangerang Selatan selama Triwulan I s.d IV.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Rapat Koordinasi TPID dan Jumlah pendataan/pencacahan Indeks harga Konsumen	4	4	100%	Setda	TST

Sumber : Sekretariat Daerah, tahun 2018

C.5. PERINDUSTRIAN

Penyelenggara Urusan Perindustrian di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:



C.5.1. Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

C.5.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan Industri**, program ini diarahkan pada Cakupan binaan kelompok industri, Cakupan binaan kelompok industri kreatif dan Jumlah pelaporan informasi industri

C.5.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Industri**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.310.054.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.906.428.600,- (82,53%), yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Industri	2.310.054.600	1.906.428.600	82,53%
Pengendalian dan Pelaporan Industri	84.547.000	81.047.000	95,86%
Perencanaan Pengembangan Wilayah Industri	385.350.000	379.758.000	98,55%
Pelatihan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	312.819.100	311.469.100	99,57%
Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.047.250.000	731.536.000	69,85%
Pelatihan dan Pengembangan Industri Kreatif	327.767.500	255.097.500	77,83%
Fasilitasi Dan Pengembangan Industri Kreatif	152.321.000	147.521.000	96,85%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

Capaian yang dihasilkan pada program pengembangan industri sudah sesuai target, yaitu sebesar 100%, meliputi cakupan binaan kelompok industri, cakupan binaan kelompok industri kreatif dan jumlah pelaporan informasi industri. Faktor pendorong pencapaian target adalah dilaksanakannya seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pengendalian sampai kepada kegiatan fasilitasi pengembangan dan pelatihan kepada kelompok industri dan industri kreatif. Kegiatan tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan cakupan binaan kelompok industri dan industri kreatif sepanjang tahun 2017 di Kota Tangerang Selatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan binaan kelompok industri	50	50	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST
Cakupan binaan kelompok industri kreatif	20	20	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST
Jumlah pelaporan informasi industri	2	2	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TST

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

C.5.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
 - a. Masih terbatasnya kemampuan keahlian para pengelola IKM

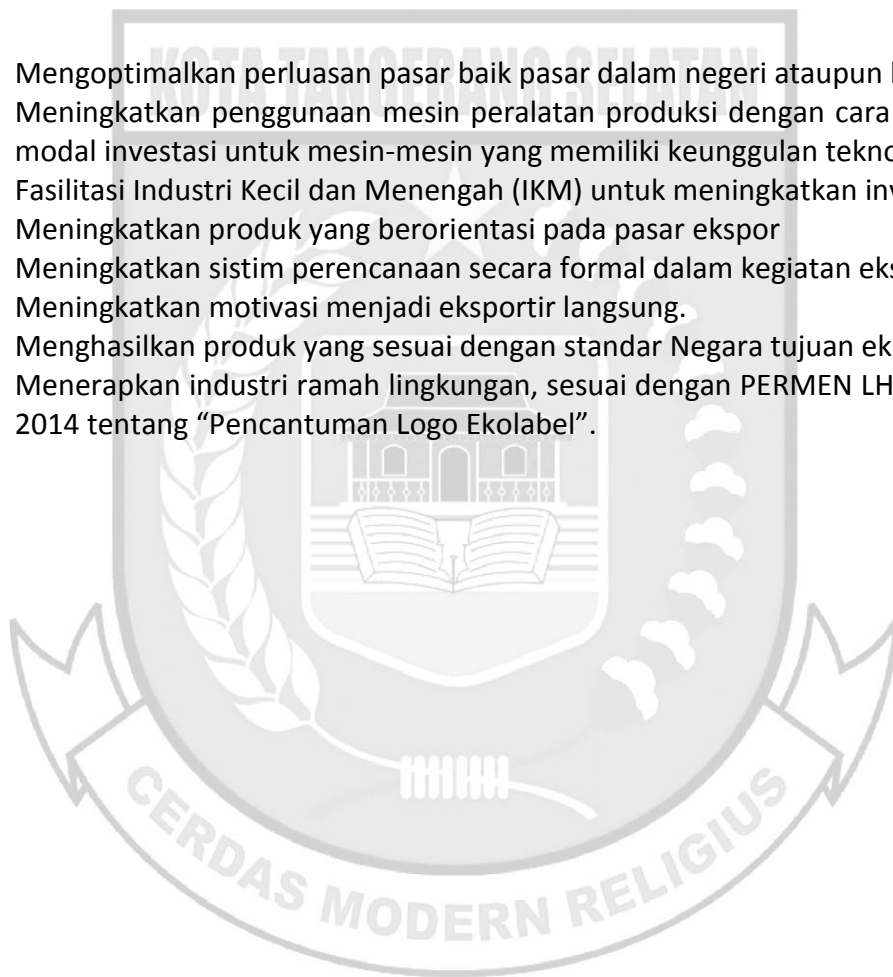


*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

- b. Belum optimalnya pemasaran produk IKM
- c. Masih terbatasnya mesin produksi IKM, atau belum memiliki keunggulan teknologi /mesin produksi untuk mengembangkan produksinya,
- d. Belum optimalnya investasi di sektor industri kecil dan menengah.
- e. Pelaku usaha yang mempunyai Kontrak dagang dengan eksportir masih sedikit, Kecilnya pelaku usaha dalam menggunakan bank devisa dalam bertransaksi, sehingga keberadaan Kontrak dagang dengan eksportir pun menjadi sedikit.
- f. Masih sedikitnya pelaku usaha yang belum memiliki sistim perencanaan secara formal dalam kegiatan ekspor

2. Solusi

- a. Mengoptimalkan perluasan pasar baik pasar dalam negeri ataupun luar negeri.
- b. Meningkatkan penggunaan mesin peralatan produksi dengan cara menambah modal investasi untuk mesin-mesin yang memiliki keunggulan teknologi
- c. Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk meningkatkan investasi.
- d. Meningkatkan produk yang berorientasi pada pasar ekspor
- e. Meningkatkan sistim perencanaan secara formal dalam kegiatan ekspor
- f. Meningkatkan motivasi menjadi eksportir langsung.
- g. Menghasilkan produk yang sesuai dengan standar Negara tujuan ekspor.
- h. Menerapkan industri ramah lingkungan, sesuai dengan PERMEN LH No 2 tahun 2014 tentang "Pencantuman Logo Ekolabel".





BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua



Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

A. Instansi Pemberi Tugas Pembantu

Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, sehingga mampu memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2017 baik yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian dan lembaga, maupun dari Pemerintah Provinsi Banten dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dengan rincian pengalokasian sebagai berikut:

A.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (0-6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.211.401.410,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.147.022.200,- atau 82,86%.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.	6.211.401.410	5.147.022.200	82,86%
Peningkatan mutu dan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat	2.453.349.000	1.860.210.500	75,82%
Peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan	1.032.499.000	790.677.000	76,58%
Peningkatan mutu dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.725.553.410	2.496.134.700	91,58%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal berhasil meningkatkan Harapan Lama Sekolah dari yang ditargetkan 14,04 tahun tercapai menjadi 14,18 tahun atau berhasil mencapai target 101%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena adanya peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat kepada sekitar 8.980 peserta salahsatunya melalui kegiatan sosialisasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan penyelenggaraan *Try Out* Paket B dan Paket C Tingkat Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian target ini, yaitu terselenggaranya peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan kepada lebih dari 1.182 orang sepanjang tahun 2017.

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan program PAUD terutama untuk usia 3-6 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, dari target sebesar 25,20% dapat terealisasi sesuai target bahkan melebihi, yaitu sebesar 30,20%. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target ini adalah adanya peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diantaranya melalui peningkatan Gugus PAUD dalam Peningkatan Kualitas PAUD kepada 114 peserta, pembinaan dan penguatan serta Bimtek Akreditasi Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal kepada sekitar 600 peserta, serta yang tidak kalah pentingnya adalah terselenggaranya manajemen pengelola Lembaga Formal dan Non Formal kepada 300 peserta. Disamping itu, sebagai aktualisasi keberhasilan program ini telah dilaksanakan Lomba Mutu Lembaga gugus dan kinerja Pendidikan Formal dan Non Formal kepada sekitar 150 peserta sepanjang tahun 2017.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Harapan Lama Sekolah	14,04 tahun	14,18 tahun	101%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TMT
APM PAUD	25,20%	30,20%	120%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TMT

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

2 Program Pendidikan Sekolah Dasar

Program Pendidikan Sekolah Dasar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 172.173.277.511,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.600.037.549,- atau 53,20%. dengan demikian terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 80.573.239.962,- atau (46,80%).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pendidikan Sekolah Dasar	172.173.277.511	91.600.037.549	53,20%
Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	999.265.000	927.507.000	92,82%
Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	1.120.524.500	988.065.200	88,18%
Penyelenggaraan BOSDA SD/MIN (159 kegiatan)	43.602.693.150	37.399.179.549	85,77%
Peningkatan Sarana dan Prasarana SD	55.188.845.033	52.285.285.800	94,74%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Dilihat dari capaian kinerja memberikan gambaran sangat baik di atas 99,99%, bisa dilihat dari data Pokok Pendidikan Usia Siswa 7-12 Tahun sebesar 132.001 siswa (112.736 SD dan 19.265 MI) dibagi dengan jumlah Penduduk usia 7-12 tahun sebesar 129.606 siswa, maka diperoleh hasil 101,85%, secara keseluruhan jumlah siswa SD sebanyak 140.793 dan jumlah 7-12 tahun 129.606 siswa, maka diperoleh hasil 108,63% jadi APM SD/MI sudah mencapai target 101,85% dengan nilai APK sebesar 108,63%.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target salah satunya adanya kegiatan peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) kepada sekitar 1.538 Sekolah Dasar (SD), serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD) kepada lebih 1.283 peserta baik melalui pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN), dan *International Mathematics and Science Olympiad* (IMSO), pelatihan siswa berprestasi sampai kepada lomba kinerja sekolah tingkat sekolah dasar telah berhasil dilaksanakan. Faktor pendukung lainnya adalah terlaksananya pelatihan bahan ajar tingkat Sekolah Dasar (SD) yang berhasil diberikan kepada 400 peserta sepanjang tahun 2017.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	99,99%	99,99%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TST

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

3 Program Pendidikan Menengah Pertama.

Program Pendidikan Menengah Pertama mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 72.211.535.472,- realisasi mencapai Rp. 62.561.850.540,- (86,64%), dengan demikian terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 9.649.684.932,- atau (13,36%).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pendidikan Menengah Pertama	72.211.535.472	62.561.850.540	86,64%
Penyelenggaraan Bosda di 22 SMP N dan 1 MTPN	28.741.580.000	25.210.521.720	87,71%
Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.562.446.168	1.199.483.000	76,77%
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	12.573.058.072	10.364.289.600	82,43%
Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	592.871.232	577.034.500	97,33%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Kinerja APM (Angka Partisipasi Murni 13 s.d 15 tahun) SMP/MTS dari target 96,80% tercapai 93,73%, target ini belum tercapai disebabkan banyaknya jumlah siswa SMP/MTS berusia dibawah 13 tahun yang sudah bersekolah ke jenjang SMP/MTS, yaitu sebanyak 3.394 siswa, selain itu banyaknya siswa yang melanjutkan diluar wilayah Kota Tangerang Selatan. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya Angka Partisipasi Murni pada tahun 2017.

Namun, secara keseluruhan untuk jenjang siswa SMP/MTS sudah memperoleh nilai APK (Angka Partisipasi Kasar) sebesar 99,09%, angka tersebut berarti setiap 100 orang terdapat 99 orang yang bersekolah, kekurangan 1% (1 orang) tersebut diprediksi bersekolah diluar wilayah Kota Tangerang Selatan.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS	96,80%	93,73%	97%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TT

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

4 Program Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan.

Program Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 41.145.297.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.317.645.050,- atau 95,56%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Pendidikan	41.145.297.850	39.317.645.050	95,56%
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	38.502.468.050	37.245.476.050	96,74%
Peningkatan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.759.061.200	1.398.982.000	79,53%
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan	883.768.600	673.187.000	76,17%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Program ini diarahkan pada mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan keterampilan, dengan indikator uji kompetensi guru, dari target sebesar 70 dapat terealisasi sebesar 65,12. Target ini belum tercapai di karenakan pengembangan diri keprofesian berkelanjutan (PKB) melalui simPKB secara online belum familier dan penguasaan IT belum maksimal, hasilnya melalui Uji Kompetensi Guru (PKG) Usaha yang telah dilakukan dengan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan pada komunitas gugus untuk guru TK, KKG untuk guru SMP/ Mata Pelajaran, Pelaksanaan PKB yang menggunakan APBD Kegiatan bidang pembinaan kepegawaian (PK) Untuk TK, 2 Kelas Guru 40 orang, SD 5 Kelas jumlah guru 100 orang dan SMP 5 kelas jumlah 100 guru dengan berbagai MGMP pelaksanaan PKB melalui APBN melalui swakelola dan bantuan pemerintah pusat melalui p4tk sebanyak TK 400 orang, SD 500 orang, SMP 60 orang, Kepala Sekolah 20 Orang.



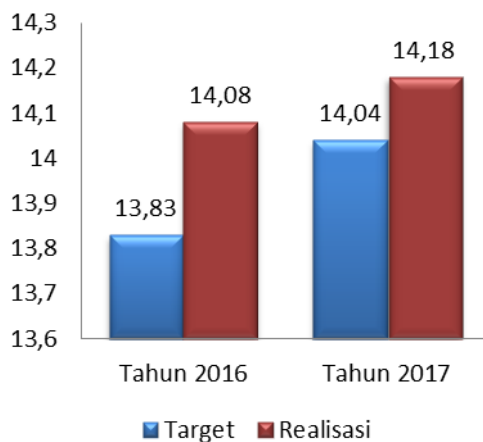
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Uji Kompetensi Guru	70	65,12	93%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TT

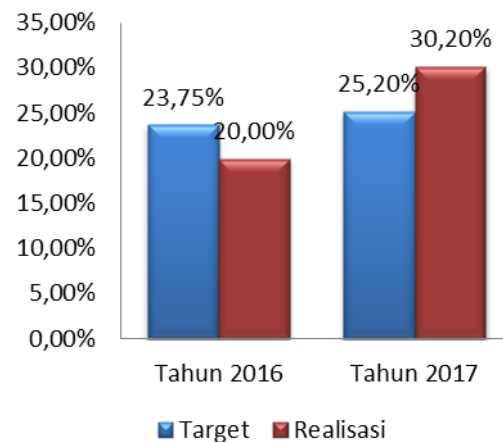
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

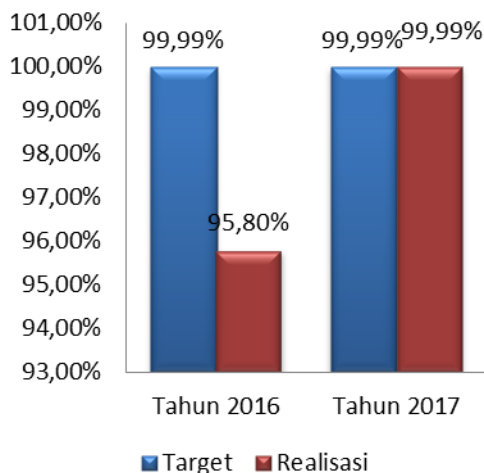
Grafik Error! No text of specified style in document.-2. Realisasi dan Target Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2017



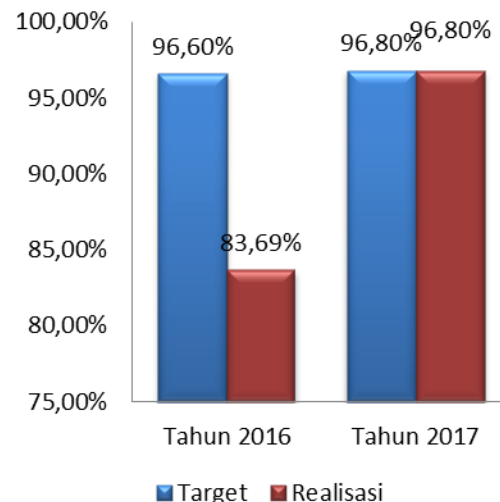
Grafik Error! No text of specified style in document.-2. Realisasi dan Target Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Tahun 2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-4. Realisasi dan Target Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2016-2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-4. Realisasi dan Target APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS Tahun 2016-2017



sebabkan oleh: (1) penerima DAK berada di belanja modal (seharusnya di belanja hibah), (2) keterlambatan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait dana DAK memberikan konsekuensi dana DAK di triwulan berikutnya tidak bisa diajukan kembali.



- b. Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan.
2. Solusi
 - a. Merencanakan DAK sesuai dengan kebutuhan dan dituangkan dalam DPA sesuai dengan kode rekening.
 - b. Optimalisasi kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

A.1.1. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

A.1.2.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pendidikan Sekolah Dasar**, program ini diarahkan pada Sekolah Dasar yang berhasil dibangun, dilaksanakan melalui 8 kegiatan pembangunan tambah ruang kelas Sekolah Dasar di 7 kecamatan serta peningkatan sarana dan prasarana SD melalui dana DAK.
2. **Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**, program ini diarahkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berhasil dibangun, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama dan Peningkatan sarana dan Prasarana SMP.

A.1.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1 Program Pendidikan Dasar.

Program Pendidikan Dasar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.124.058.843.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.466.788.499,- atau 97,91%. Adapun target capaian keuangan yang tidak tercapai disebabkan oleh efisiensi kontrak, penyusunan nilai HPS yang di sesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pendidikan Sekolah Dasar	124.058.843.500	121.466.788.499	97,91
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Ciputat	19.985.630.200	18.831.453.754	94,22
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Ciputat Timur	21.688.870.200	21.610.290.600	99,64
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Pamulang	21.224.699.000	20.559.899.900	96,87
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Setu	10.342.084.600	9.905.998.545	95,78
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di	5.045.847.000	5.029.630.200	99,68



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pendidikan Sekolah Dasar	124.058.843.500	121.466.788.499	97,91
Kecamatan Serpong			
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Serpong Utara	15.705.364.200	15.665.331.200	99,75
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Pondok Aren	26.814.348.300	26.749.126.300	99,76
Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (DAK)	3.252.000.000	3.115.058.000	95,79

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai Program Pendidikan Sekolah Dasar berhasil meningkatkan jumlah ruang kelas Sekolah Dasar yang dibangun dari yang ditargetkan 17 sekolah tercapai sebanyak 19 atau berhasil mencapai target 112%. Faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pembangunan tambah ruang kelas Sekolah Dasar yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan, meliputi: 1) Kecamatan Ciputat penambahan, sebanyak 7 ruang kelas SD, 2) Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 4 ruang kelas SD, 3) Kecamatan Pamulang sebanyak 4 ruang kelas SD, 4) Kecamatan Setu sebanyak 6 ruang kelas SD, 5) Kecamatan Serpong sebanyak 1 ruang kelas SD, 6) Kecamatan Serpong Utara sebanyak 4 ruang kelas SD, dan 7) Kecamatan Pondok Aren sebanyak 5 ruang kelas SD.

Selain itu, terselenggaranya peningkatan Sarana dan Prasarana SD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berhasil dialokasikan untuk pembangunan tambah ruang kelas baru dan perabotnya di SDN Pondok Kacang Barat 03.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Sekolah Dasar terbangun	17	19	112%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TMT

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

2 Program Pendidikan Menengah Pertama.

Program Pendidikan Menengah Pertama, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.642.876.500,- realisasi mencapai Rp. 14.286.200.600,- (97,56). Adapun Target capaian keuangan yang tidak tercapai disebabkan oleh efisiensi kontrak, penyusunan nilai HPS yang di sesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.642.876.500	14.286.200.600	97,56
Pembangunan Tambah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama	14.642.876.500	14.286.200.600	97,56

Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

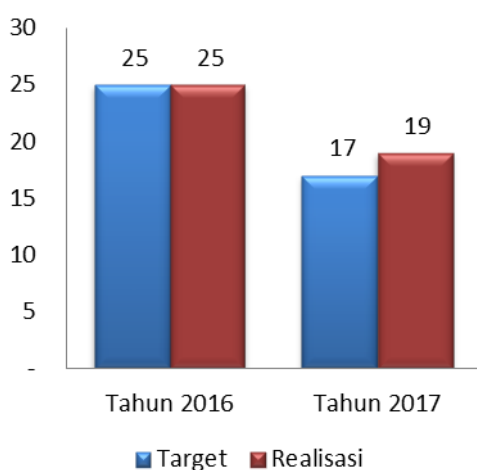
Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun pada tahun 2017 tidak ditargetkan, namun karena adanya program nasional melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yaitu pembangunan tambah ruang kelas di SMPN 8 Kota Tangerang Selatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun	0	5	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

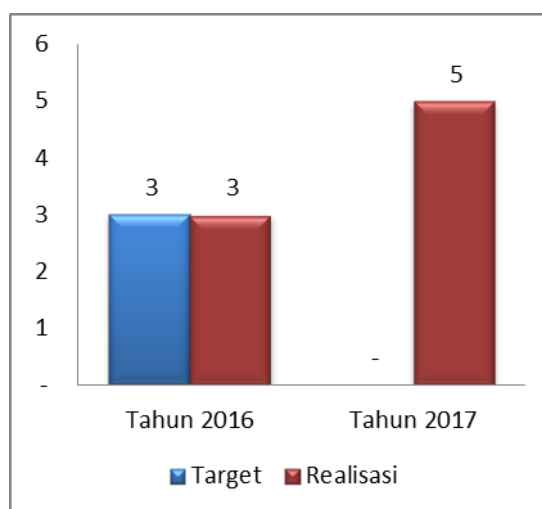
Sumber : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

Grafik Error! No text of specified style in document.-6. Realisasi dan Target Jumlah Sekolah Dasar terbangun Tahun 2016-2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-6. Realisasi dan Target Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun Tahun 2016-2017





A.1.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan masih perlu ditingkatkan.
- b. Pembangunan Tambah Ruang Kelas ada yang dilaksanakan secara bertahap.

2. Solusi

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan.
- b. Menganggarkan dan melanjutkan pembangunan tambah ruang kelas di tahun berikutnya hingga dapat berfungsi.

A.1. KESEHATAN

Penyelenggara Urusan Kesehatan di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kesehatan, 2) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang dan 3) Rumah Sakit Umum. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

A.2.1. Dinas Kesehatan

A.2.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan pelayanan kesehatan**, program ini diarahkan pada Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas dan akreditasi unit Labkesda, melalui 2 kegiatan, yaitu (1) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar, (2) Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah.
2. **Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan**, program ini diarahkan pada pengadaan alat kesehatan sesuai standar, melalui 1 kegiatan, yaitu pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan.
3. **Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan** program ini diarahkan pada reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda, serta ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu (1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, (2) Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya, dan (3) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.



4. **Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga**, program ini diarahkan pada penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup, serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita, cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat, cakupan pelayanan lansia dan cakupan pelayanan kesehatan remaja, melalui 11 kegiatan peningkatan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan
5. **Program perbaikan gizi masyarakat**, program ini diarahkan pada balita gizi buruk mendapat perawatan, Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan dan Remaja putri yang mendapat TTD, dilaksanakan melalui 6 kegiatan pelayanan dan perbaikan gizi bagi bayi, ibu hamil dan ibu menyusui.
6. **Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**, program ini diarahkan pada peningkatan cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif serta cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan, dilaksanakan melalui 3 kegiatan pengembangan promosi, dan kemitraan kesehatan.
7. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan**, program ini diarahkan pada peningkatan cakupan SDM Kesehatan yang terlatih, melalui 1 kegiatan peningkatan kapasitas SDM kesehatan.
8. **Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular**, program ini diarahkan pada peningkatan cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional, anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap, serta terpenuhinya sinyal kewaspadaan dini yang direspon, dilaksanakan melalui 12 kegiatan peningkatan dan pelayanan serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
9. **Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer**, program ini diarahkan pada peningkatan cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, cakupan Pelayanan kesehatan rujukan, cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan, cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS, cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial, yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan, serta peningkatan cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, kegiatan ini dilaksanakan melalui 32 kegiatan pelayanan dan penyediaan jasa serta biaya operasional di setiap UPT Puskesmas.



10. **Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD**, program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan di sejumlah Puskesmas BLUD, dilaksanakan melalui 1 kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas.
11. **Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat**, program ini diarahkan pada penduduk yang memiliki akses terhadap Air minum berkualitas, tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan, cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar, serta terpenuhinya sejumlah kelurahan yang melaksanakan STBM. Dilaksanakan melalui 8 kegiatan pengawasan, penyusunan dokumen serta penyehatan lingkungan sehat.
12. **Pelayanan jaminan kesehatan nasional**, program ini diarahkan pada masyarakat Tangerang Selatan yang menggunakan JKN, yang dilaksanakan melalui 26 kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di setiap FKTP Puskesmas.

A.2.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengembangan pelayanan kesehatan,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.859.997.400,- dengan realisasi sebesar Rp 2.532.524.901,- (88,55%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah. Rendahnya realisasi keuangan yang mencapai 88,55% terjadi pada kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar 90,29% hal ini disebabkan efisiensi dari biaya akomodasi surveyor yang mulanya disiapkan biaya akomodasi untuk surveyor dari luar kota, namun oleh Pemerintah Pusat peserta ditentukan dari Kota Tangerang Selatan, sehingga ada efisiensi dari belanja makan minum, dan kegiatan rapat mulai dari persiapan sampai dengan penilaian akreditasi Puskesmas.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pelayanan kesehatan	2.859.997.400	2.527.420.901	88,37%
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	2.559.997.400	2.306.268.401	90,09%
Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	300.000.000	221.152.500	73,72%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas, dari target sebesar 11 Puskesmas dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi Pendampingan Pasca Akreditasi sebanyak 21 kegiatan, Survey Akreditasi, Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Pendamping Akreditasi Puskesmas sampai kepada pelaksanaan Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen serta Workshop Keselamatan Pasien yang dilaksanakan masing-masing 44 kegiatan sepanjang tahun 2017.

Persentase akreditasi unit Labkesda dari target sebesar 30% dapat terealisasi sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dilaksanakannya kegiatan peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan daerah berupa penyelenggaraan ISO 17025 dan ISO 15189.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas	11	11	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase akreditasi unit Labkesda	30%	30%	100%	Dinas Kesehatan	TST

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

2. Program Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 32.631.629.600,- dengan realisasi sebesar Rp 28.317.303.306,- (86,78%), kurang optimalnya capaian keuangan disebabkan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan sebesar 86,78% hal ini disebabkan adanya perbedaan harga pada alat kesehatan di e-katalog saat penyusunan anggaran dengan pembelanjaan saat pelaksanaan, dimana harga saat pembelanjaan lebih rendah dari pada saat perencanaan anggaran dan efisiensi dari margin/sisa kontrak pengadaan alat kesehatan. Namun capaian indikator kinerja kegiatan ini telah mencapai target dari yang telah ditetapkan.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	32.631.629.600	28.490.677.021	87,31%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	32.631.629.600	28.490.677.021	87,31%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Kinerja Persentase alat kesehatan sesuai standar berhasil meningkatkan 70% dari yang ditargetkan 70% atau berhasil mencapai target sejumlah 100%, meliputi Pengadaan Sarana Perlengkapan Posyandu, Posbindu, UKS dan UKGS (e-katalog / non e-katalog, Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pengadaan Alat Laboratorium Puskesmas dan Labkesda masing-masing 1 paket. Faktor pendorong pencapaian target adalah dilaksanakannya kegiatan penunjang yang bersumber dari DAK, yaitu Pengadaan alkes Pengolahan Darah dan Pengadaan Alat Kesehatan 4 Puskesmas.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase alat kesehatan sesuai standar	70%	70%	100%	Dinas Kesehatan	TST

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

3. Program Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 21.282.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp 19.242.299.181,- (90,42%), yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu (1) kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, (2) Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya, dan (3) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	21.282.160.000	19.380.068.505	91,06%
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	15.204.460.000	13.614.624.270	89,54%
Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya	6.011.700.000	5.699.604.235	94,81%
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	66.000.000	65.840.000	99,76%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Persentase ketersediaan reagen dan BMHP laboratorium di Puskesmas dan Labkesda dari target sebesar 95% dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi Pengadaan Reagen Labkesda dan Jaringannya sebanyak 4 paket, Pengadaan BMHP Labkesda dan Jaringannya 2 paket, pemeriksaan NAPZA Pegawai Pemkot Tangsel kepada 600 pegawai, pemantauan Keamanan Pangan dan Peredaran Pangan di Masyarakat Menjelang Hari Raya (sidak) di 4 lokasi, Penyuluhan Keamanan Pangan Untuk IRTP serta pemantauan dan pembinaan PIRT¹ di 15 lokasi Kota Tangerang Selatan.

Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, dari target sebesar 90% berhasil meningkatkan ketersediaan obat dan pebekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebesar 111%. Keberhasilan peningkatan target ini tidak terlepas dari pelaksanaan ketersediaan bahan Medis Pakai Habis E Katalog di Puskesmas, tersedianya Bahan Medis Pakai Habis Non E Katalog di Puskesmas, tersedianya Obat Non *E Katalog* di Puskesmas serta tersedianya Obat Pelayanan Dasar di Puskesmas. Selain itu, faktor pendorong pencapaian target lainnya adalah dilaksanakannya kegiatan penunjang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa penyediaan Obat *E Katalog* di Puskesmas.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda	95%	95%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	90%	100	111%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

¹ PIRT merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan secara manual hingga semi otomatis yang memperoleh sertifikat PIRT melalui penyuluhan keamanan pangan, dimana sertifikat produk berlaku selama lima tahun.



4. Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.569.515.250,- dengan realisasi sebesar Rp 3.998.866.250,- (87,51%), yang dilaksanakan sekitar 11 kegiatan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga,	4.569.515.250	3.998.866.250	87,51%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan	650.861.000	648.761.000	99,68%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	237.360.000	237.360.000	100,00%
Pelayanan Kesehatan Remaja	156.535.000	156.535.000	100,00%
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	116.060.000	115.955.000	99,91%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi	74.950.000	74.950.000	100,00%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah	55.115.250	54.115.250	98,19%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BAGi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)	1.237.979.000	943.360.000	76,20%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BAGi BAYi dan Balita (DAK)	1.208.345.000	1.009.880.000	83,58%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BAGi Anak Sekolah (DAK)	183.060.000	143.700.000	78,50%
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)	448.160.000	417.760.000	93,22%
Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK)	201.090.000	196.490.000	97,71%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Salah satu indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup tidak tercapai dari target 38, indikator ini berhasil apabila nilai realisasi lebih kecil dari targetnya. Namun bila dibandingkan dengan target Kementerian Kesehatan yakni sebesar 306/100.000 Kelahiran Hidup, Angka tersebut didapat dari Renstra Kemenkes RI Tahun 2015-2019 di bab II tujuan dan sasaran strategis. Faktor penghambat ketidak berhasilan pencapaian target ini adalah kompetensi petugas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan bayi baru lahir belum maksimal, akan tetapi capaian tersebut secara Nasional sudah melebihi target.

Berikutnya untuk indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup tidak tercapai dari target 1,2, indikator ini berhasil apabila nilai realisasi lebih kecil dari targetnya. Namun bila dibandingkan dengan target Kementerian Kesehatan yakni sebesar 24/1.000 Kelahiran Hidup, Tangerang Selatan masih rendah untuk Angka Kematian Bayi. Angka tersebut didapat dari Renstra Kemenkes RI Tahun 2015-2019 di bab II tujuan dan sasaran strategis. Faktor penghambat rendahnya pencapaian target disebabkan pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, persalinan



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

dan nifas serta bayi baru lahir masih kurang, akan tetapi capaian tersebut sudah melebihi target angka Nasional.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	38	48		Dinas Kesehatan	TT
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	1,2	1,5		Dinas Kesehatan	TT
Cakupan pelayanan kesehatan balita	0,97	0,972	100%	Dinas Kesehatan	TMT
Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan pelayanan lansia	9	9	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan pelayanan kesehatan remaja	0,8	0,8764	110%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

5. Program perbaikan gizi masyarakat,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.3.163.355.200,- dengan realisasi sebesar Rp 3.037.010.600,- (96,01%), yang dilaksanakan sekitar 6 kegiatan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program perbaikan gizi masyarakat	3.163.355.200	3.037.010.600	96,01%
Pelayanan Gizi Masyarakat	174.473.500	173.425.300	99,40%
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	428.371.500	424.152.900	99,02%
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita	2.034.500.500	1.989.285.700	97,78%
Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK)	66.320.000	46.640.000	70,33%
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)	59.640.000	48.929.200	82,04%
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)	400.049.700	354.577.500	88,63%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Seluruh Indikator kinerja dari program perbaikan gizi masyarakat, dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi Pelayanan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan melalui PMT anak sekolah sebanyak 18.000 buah, Sosialisasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Pada Petugas Kesehatan, Kader, dan Sektor Terkait. Untuk mendukung peningkatan gizi buruk Dinas Kesehatan juga membentuk Duta Remaja Anti Anemia kepada sekitar 20 orang. Faktor pendorong pencapaian target berikutnya adalah dilaksanakannya kegiatan penunjang yang bersumber dari DAK melalui kegiatan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

pelayanan gizi pada wanita usia subur diberikan kepada 300 orang. Tidak hanya itu, hendaknya upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan Peran Serta masyarakat dan tokoh masyarakat (*stakeholders*) dalam hal deteksi dini dan pelacakan (*surveillance*) balita gizi/buruk yang dilakukan oleh petugas puskesmas harus terus dilakukan.

Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan berhasil meningkatkan persentase ibu hamil KEK untuk mendapat makanan tambahan dari yang ditargetkan 65% tercapai sebanyak 88% atau berhasil mencapai target 135%. Keberhasilan ini dicapai karena diberikannya makanan bagi Bumil KEK/Anemia kepada sekitar 550 bumil KEK, didukung juga dengan Sosialisasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan di 7 Kecamatan pada ibu hamil, serta yang tidak kalah pentingnya adalah jalinan koordinasi kerja bagi TPG dan bidan koordinator. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya akselerasi kelompok pendukung ASI bagi masyarakat dan petugas kesehatan sebanyak 83 orang sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	65%	88%	135%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase Remaja putri yang mendapat TTD	20%	21%	105%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

6. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.937.189.300,- dengan realisasi sebesar Rp 9.272.210.800,- (93,31%), yang dilaksanakan sekitar 3 kegiatan, yaitu Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat, Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan, Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat POLa Hidup Sehat (DAK).



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
	9.937.189.300	9.272.210.800	93,31%
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat	8.643.120.000	8.113.062.000	93,87%
Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan	431.750.000	428.055.000	99,14%
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK)	862.319.300	731.093.800	84,78%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Indikator kinerja cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif berhasil mencapai target sejumlah 104%, Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah dana/anggaran yang diberikan kepada 54 Kelurahan Sehat dengan pendekatan keluarga sehat tersedia mencukupi, ditunjang juga dengan kegiatan-kegiatan seperti UKBM melalui Posyandu Aktif, kampanye gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan peningkatan kualitas kader kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat.

Berikut pula dengan cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan dari target sebesar 53% dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi penyebaran informasi kesehatan melalui kemitraan, meningkatnya kualitas UKS dan terlaksananya pembinaan ranting SBH. Faktor pendorong pencapaian target ini adalah dilaksanakannya kegiatan penunjang yang bersumber dari DAK, meliputi 1) Penyelenggaraan Kelurahan Sehat/Kelurahan Siaga Aktif di 54 kelurahan, 2) Peningkatan Kelurahan yang melaksanakan 5 tema kampanye gerakan masyarakat tersebar di 54 kelurahan dan 3) peningkatan jumlah pembinaan kader diberikan kepada 5.287 kader.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif	52 kelurahan	52 kelurahan	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	53%	53%	100%	Dinas Kesehatan	TST

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.015.439.300,- dengan realisasi sebesar Rp.812.702.646,- (80,03%), dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan. Indikator kinerja Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih, dari target sebesar 60% dapat terealisasi sebesar 60%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1.015.439.300	812.702.646	80,03%
Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	1.015.439.300	812.702.646	80,03%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

8. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, terdapat 11 kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dengan alokasi anggaran Rp. 6.828.030.944,- dengan realisasi Rp. 6.315.102.479,-(92,49%).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	6.828.030.944	6.315.102.479	92,49%
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	684.209.000	683.483.400	99,89%
Peningkatan Imunisasi	652.136.194	648.557.200	99,45%
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	772.992.400	752.175.800	97,31%
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.927.752.000	2.844.271.225	97,15%
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	963.000.000	701.801.004	72,88%
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)			
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)	604.175.750	467.863.250	77,44%
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)	101.150.600	95.750.600	94,66%
Peningkatan Imunisasi (DAK)	52.030.000	50.930.000	97,89%
Pelayanan Kesehatan Jiwa	49.660.000	49.345.000	99,37%
Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)	20.925.000	20.925.000	0,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Salah satu indikator cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan Standar Nasional dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 69,23%, semua ada 13 program, yang mencapai target 9 program, yang tidak mencapai ada 4 program. Belum tercapainya target disebabkan Ketersediaan sumber daya yang belum terlatih sesuai standart kementerian kesehatan, Sarana dan prasana program yang



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

belum optimal, Dukungan pembiayaan yang belum memadai dan Manajemen mencatatkan pelaporan yg belum dilakukan dengan disiplin dan berkesinambungan. Sedangkan untuk dua indikator lainnya dapat terealisasi sesuai target.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional	100%	69,00%	69%	Dinas Kesehatan	TT
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	0,92	92,00%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	0,75	1	133%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

9. **Program Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer**, terdapat 3 kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dengan alokasi anggaran Rp.23.755.337.550,- realisasi baru mencapai Rp.12.376.279.874,- (52,10%).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	23.755.337.550	12.376.279.874	52,10%
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	127.921.000	123.319.000	0,00%
Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan	4.034.956.100	799.888.700	19,82%
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	261.116.000	238.796.000	91,45%
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	741.206.100	732.532.900	98,83%
Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu	3.768.040.400	904.888.600	24,01%
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus	184.720.000	174.532.500	94,48%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Setu	191.658.000	164.338.492	85,75%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Keranggan	393.954.000	352.549.158	89,49%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Bakti Jaya	342.036.900	326.702.031	95,52%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Serpong I	373.751.000	342.931.321	91,75%
Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Serpong II	348.646.000	317.604.088	91,10%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rawa Buntu	299.669.000	236.294.444	78,85%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pamulang	340.525.000	307.820.314	90,40%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Benda	393.485.700	297.596.436	75,63%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Benda Baru	361.663.000	360.596.415	99,71%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat	198.097.000	167.973.032	84,79%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Kampung Sawah	370.000.000	361.370.956	97,67%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jombang	299.389.300	260.873.069	87,14%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung	158.165.000	151.251.059	95,63%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur	393.476.500	306.431.708	77,88%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pisangan	161.776.000	151.251.059	93,49%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rengas	337.268.400	287.747.873	85,32%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji	278.638.500	188.279.217	67,57%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren	340.916.000	298.241.049	87,48%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jurang Mangu	434.640.000	382.241.983	87,94%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Parigi	234.176.500	226.735.206	96,82%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Betung	293.301.200	221.226.879	75,43%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Pucung	295.831.000	250.911.255	84,82%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur	329.075.800	288.506.790	87,67%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Jagung	381.283.000	366.504.504	96,12%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Paku Alam	376.386.000	373.346.865	99,19%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Sawah Baru	269.406.000	231.396.769	85,89%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penyelenggaraan Operasional UPT Farmasi	516.675.400	350.548.647	67,85%
Penyelenggaraan Operasional UPT Labkesda	690.788.500	671.721.444	97,24%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Lengkong Wetan	50.000.000	30.541.567	61,08%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Cabe Ilir	50.000.000	33.333.200	66,67%
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Bambu Apus	50.000.000	34.338.044	68,68%
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	2.769.660.000	273.351.000	9,87%
Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK	1.234.725.250	623.058.800	50,46%
Jaminan Persalinan (DAK)	922.222.000	31.333.500	3,40%
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)	13.510.000	13.510.000	100%
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)	142.582.000	119.864.000	84,07%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Salah satu Indikator cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS belum tercapai dari target yang telah ditetapkan sebesar 50%. Hal ini disebabkan belum selesainya petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan SOP pencairan jasa pelayanan darah serta penandatanganan MoU antara Dinas Kesehatan, PMI dan Rumah Sakit se-Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk indikator lainnya dapat terealisasi sesuai target.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan	80%	80%	100%	Dinas Kesehatan	TST
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan	32,%	55,78%	174%	Dinas Kesehatan	TMT
Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS	50,%	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan	TT
Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan	62%	91,59%	148%	Dinas Kesehatan	TMT



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	47%	47%	100%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

10. **Program Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 271.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 271.030.000,- (99,79%), yang dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	271.600.000	271.030.000	99,79%
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	271.600.000	271.030.000	99,79%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Indikator Jumlah puskesmas BLUD, dari target sebesar 1 Puskesmas belum dapat terealisasi. Namun pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan melakukan pendampingan dengan 4 puskesmas dan hasil penilaian akan diumumkan pada tahun 2018. Ke 4 puskesmas tersebut adalah Puskesmas Pamulang, Puskesmas Benda Baru, Puskesmas Pondok Aren dan Puskesmas Ciputat.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah puskesmas BLUD	1	0	0%	Dinas Kesehatan	TT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

11. **Program Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat**, terdapat 8 kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dengan alokasi anggaran Rp. 1.441.380.200,- dengan realisasi mencapai Rp. 1.275.512.500,- (88,49%).



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	1.441.380.200	1.275.512.500	88,49%
Pengawasan Air Bersih di Masyarakat	153.440.000	150.920.000	98,36%
Penyehatan Tempat-tempat Umum	436.020.000	406.362.500	93,20%
Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas	179.230.000	174.180.000	97,18%
Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan	79.850.000	77.850.000	97,50%
Penyehatan Lingkungan Pemukiman	26.120.000	23.120.000	88,51%
Pengamanan Limbah Medis	211.900.000	211.900.000	100,00%
Peningkatan STBM	60.840.000	59.920.000	98,49%
Pengendalian Lingkungan Sehat (DAK)	293.980.200	171.260.000	58,26%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Apabila dilihat dari kinerja program maka, semua indikator dari program Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas, Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar dan Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	40%	67%	168%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	54%	85%	157%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	65%	80%	124%	Dinas Kesehatan	TMT
Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	85%	100	118%	Dinas Kesehatan	TMT
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	10	16	160%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

12. Program Pelayanan jaminan kesehatan nasional, dianggarkan sebesar Rp 37.366.137.202,- realisasi anggaran Rp 29.918.395.153,- atau sebesar 80,07%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pelayanan jaminan kesehatan nasional	37.366.137.202	29.918.395.153	80,07%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru	1.842.563.330	1.672.764.160	90,78%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat	3.828.985.424	2.863.152.214	74,78%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur	1.257.046.084	922.769.281	73,41%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang	1.973.093.450	1.464.669.370	74,23%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu	1.313.781.850	1.146.748.110	87,29%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah	1.211.316.200	967.995.416	79,91%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan	530.768.290	471.991.209	88,93%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam	841.860.880	746.086.650	88,62%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang	4.210.517.892	3.504.454.179	83,23%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi	1.145.174.260	1.004.872.259	87,75%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan	784.680.799	698.262.756	88,99%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren	3.057.980.266	2.647.075.982	86,56%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda	1.822.547.157	1.485.893.166	81,53%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung	1.275.056.250	1.126.994.848	88,39%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung	1.421.000.875	1.046.308.759	73,63%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur	1.140.845.507	930.850.447	81,59%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung	647.095.049	533.759.837	82,49%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji	1.058.396.560	701.350.945	66,27%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu	1.333.288.871	1.116.421.542	83,73%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas	790.774.683	638.974.448	80,80%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong	2.899.109.370	2.022.865.940	69,78%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP	475.069.250	380.327.850	80,06%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Puskesmas Serpong II			
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu	631.951.502	497.017.635	78,65%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung	956.709.329	689.977.850	72,12%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya	774.900.074	636.810.300	82,18%
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru	141.624.000	-	0,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Kinerja Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN dari target 52% tercapai 115%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN	52%	59,90%	115%	Dinas Kesehatan	TMT

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

A.2.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun Permasalahan yang dihadapi sehingga 5 indikator tidak tercapai adalah karena:

- 1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
 - a) Kompetensi petugas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan ibu (hamil, bersalin, nifas) dan bayi baru lahir belum maksimal.
 - b) Target yang terlalu rendah dari tahun sebelumnya
- 2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
 - a) Pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda bahaya pada bayi (0-11 bulan) masih kurang.
 - b) Target yang terlalu rendah dari tahun sebelumnya.
- 3) Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar Nasional
 - a) Ketersediaan sumber daya yang belum terlatih sesuai standart kementerian kesehatan
 - b) Sarana dan prasana program yang belum optimal



- c) Dukungan pembiayaan yang belum memadai
- d) Manajemen mencatatkan pelaporan yg belum dilakukan dengan disiplin dan berkesinambungan.
- 4) Jumlah puskesmas BLUD
 - a) Penetapan puskesmas BLUD baru dapat diketahui pada tahun 2018, namun pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada 4 puskesmas yaitu Puskesmas Ciputat, Puskesmas Pondok Aren, Puskesmas Benda barudan Puskesmas Pamulang
- 5) Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS
 - a) Hal ini disebabkan masih dalam proses tahapan penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan SOP pencairan jasa pelayanan darah serta penandatanganan MOU antara Dinas Kesehatan, PMI dan Rumah Sakit Se Kota Tangerang Selatan.

2. Solusi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

- 1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
 - a) Lebih meningkatkan kompetensi petugas kesehatan melalui peningkatan kompetensi kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir melalui pelatihan, bimtek dan OJT adalah upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan dalam rangka menekan angka kematian ibu.
- 2) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
 - a) Lebih meningkatkan penyebarluasan informasi melalui media penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya pada bayi (0-11 bulan) kepada masyarakat
- 3) Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar Nasional
 - a) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang terjadi di tingkat puskesmas yang sesuai dengan kondisi masing
 - b) Melakukan intervensi atau kegiatan tindak lanjut dalam mengatasi masalah yang telah teridentifikasi diatas`
 - c) Melakukan pembinaan dan pendampingan pada kegiatan program yg menemui permasalahan
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur dan terjadwal
 - e) Menyusun laporan hasil kegiatan untuk di analisa dan dilaporkan kepada pimpinan untuk di ambil langkah-langkah kebijakan bila diperlukan demi

tercapainya sasaran dan target program yg belum tercapai pada tahun berikutnya.

- f) seluruh kegiatan tersebut diatas telah tercermin atau terimplemasikan pada kegiatan yg ada pada DPA kegiatan program seksi P2PM Tahun anggaran 2018.
- 4) Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS
 - a) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan darah.
 - b) Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaksanaan pembiayaan darah
 - c) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PMI Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Rumah Sakit SeKota Tangerang Selatan
 - d) Sosialisasi mengenai pelaksanaan Pelayanan Darah

A.2.2. Rumah Sakit Umum

A.2.2.1. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan pelayanan kesehatan**, program ini diarahkan pada pelayanan yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu (1) Penyediaan, Pemeliharaan Bank Darah RS, (2) Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit, (3) Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit, (4) Pengelolaan Jasa Pelayanan dan (5) Pelayanan Kesehatan Rujukan RS / Sarana Lanjutan.
2. **Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan**, program ini diarahkan untuk memenuhi tingkat instrumen akreditasi rumah sakit, dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu (1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, (2) Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, (3) Pemeliharaan Laundry dan Kebersihan Rumah Sakit, (4) Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit, (5) Pengadaan Sarana Prasarana Keperawatan Rumah Sakit, dan (6) Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit.
3. **Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan**, program ini diarahkan pada resep yang sesuai dengan formularium, dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Pengadaan Obat, makanan dan perbekalan rumah sakit.
4. **Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**, program ini diarahkan pada pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit, dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.



5. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan**, program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan melalui pelatihan minimal 20 jam per tahun yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu (1) Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis, (2) Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat dan Bidan, dan (3) Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang.
6. **Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD**, program ini diarahkan untuk mendapatkan kepuasan pasien yang disurvei, dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD.
7. **Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat**, program ini diarahkan pada pengelolaan limbah rumah sakit yang sesuai standar, dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Pembangunan, Pemeliharaan Pengolahan Limbah Rumah Sakit.

A.2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, menghasilkan kinerja program sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan pelayanan kesehatan**, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 32.817.574.420 dengan realisasi sebesar Rp 31.933.284.934 (97,31%).

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan pelayanan kesehatan	32.817.574.420	31.933.284.934	97,31%
Penyediaan, Pemeliharaan Bank Darah RS	1.734.628.420,00	1.635.320.680,00	94,27%
Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit	308.266.000,00	206.013.900,00	66,83%
Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	131.628.000,00	125.903.500,00	95,65%
Pengelolaan Jasa Pelayanan	28.979.082.000,00	28.314.939.754,00	97,71%
Pelayanan Kesehatan Rujukan RS / Sarana Lanjutan	1.663.970.000,00	1.651.107.100,00	99,23%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit, dari target sebesar 14 jenis pelayanan dapat terealisasi sesuai target, yaitu 15 jenis pelayanan yang sudah sesuai SPM pengembangan pelayanan di dalamnya didukung oleh 5 kegiatan, salah satunya kegiatan penyediaan dan pemeliharaan bank darah rumah sakit. Hal tersebut menjadi faktor pendorong keberhasilan pencapaian target karena RSU mampu mengelola darah dengan lebih baik berkat adanya BDRS sehingga yang tadinya layanan transfusi darah belum sesuai standar sekarang sudah memenuhi standar.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit	14	15	107%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

2. Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 30.767.769.394,- dengan realisasi sebesar Rp 29.775.861.910 (96,78%), yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,	30.767.769.394	29.775.861.910	96,78%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	752.561.000,00	547.598.888,00	72,76%
Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	1.474.554.722,00	1.350.099.491,00	91,56%
Pemeliharaan Laundry dan Kebersihan Rumah Sakit	2.471.699.272,00	2.449.272.150,00	99,09%
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit	4.080.760.900,00	3.633.309.276,00	89,04%
Pengadaan Sarana Prasarana Keperawatan Rumah Sakit	1.106.121.000,00	1.080.418.887,00	97,68%
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	20.882.072.500,00	20.715.163.218,00	99,20%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit, dari target sebesar 4 tingkat dasar (4 bab) dapat terealisasi sesuai target 12, yaitu meliputi pemeliharaan fasilitas gedung Rumah Sakit, pemeliharaan alkes dan tersedianya alat kedokteran. Faktor pendorong pencapaian target adalah dilaksanakannya kegiatan penunjang yang bersumber dari DAK, meliputi penyediaan alat kedokteran gawat darurat Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Alat untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA) Kelas III (DAK) dan Alat Kesehatan Ruang Operasi.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

SUMBER	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit	4	12	300%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

3. Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan.

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 35.816.720.941,- dengan realisasi sebesar Rp 34.951.975.535 (97,59%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Obat, makanan dan perbekalan rumah sakit.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	35.816.720.941	34.951.975.535	97,59%
Pengadaan Obat, makanan dan perbekalan rumah sakit.	35.816.720.941,00	34.951.975.535,00	97,59%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Persentase resep sesuai dengan formularium, dari target sebesar 70% dapat terealisasi sesuai target, yaitu 95,67%. Faktor pendorong pencapaian target adalah resep yang di buat sesuai dengan formularium RSU. Formularium rumah sakit merupakan penerapan konsep obat esensial di rumah sakit yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase resep sesuai dengan formularium	70%	96%	137%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 713.154.000,- dengan realisasi sebesar Rp 569.900.248,- (79,91%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, namun dengan demikian terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 143.253.752,- atau (20,09%), hal ini terjadi karena di pertengahan tahun pihak ke tiga memutuskan kontrak disebabkan Advetorial *online* Nasional yang tidak dapat melanjutkan kerjasamanya (karena proses pembayaran yang harus dilakukan di muka bukan setelah kwitansi dan SPJ), secara keseluruhan hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerja.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	713.154.000	569.900.248	79,91%
Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	713.154.000,00	569.900.248,00	79,91%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit, dari target sebesar 55% dapat terealisasi sesuai target, yaitu meliputi penyediaan Bahan Pendukung Sosialisasi Pelayanan Rumah Sakit sebanyak 12.170 unit. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari tersedianya publikasi advetoriaal dan media informasi Rumah Sakit serta keluaran dari Sosialisasi promosi kesehatan yang dilakukan kurang lebih sebanyak 12 kegiatan sepanjang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit	55%	55%	100%	Rumah Sakit Umum	TST

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.434.669.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.092.101.169,- (76,12%), yang dilaksanakan melalui kegiatan 3 kegiatan. Belum optimalnya realisasi anggaran yang baru mencapai 76,12% disebabkan adanya efisiensi pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis, (Pagu Rp.814.210.000,- terrealisasi Rp.587.524.279,-) di karenakan banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah, menyebabkan banyak tiket pesawat yang tidak terserap.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1.434.669.000	1.092.101.169	76,12%
Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis	814.210.000,00	587.524.279,00	72,16%
Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat dan Bidan	450.519.000,00	399.173.220,00	88,60%
Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang	169.940.000,00	105.403.670,00	62,02%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

Capaian kinerja dengan indikator Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20%, dapat terealisasi sesuai target 50%. Faktor keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya pengiriman pelatihan bagi tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis serta tenaga Rumah Sakit lainnya, pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga medis, tenaga perawat dan bidan serta tenaga penunjang.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	20%	50%	249%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

6. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 24.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 21.995.437.520,- (89,78%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	24.500.000.000	21.995.437.520	89,78%
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	24.500.000.000	21.995.437.520	89,78%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Persentase kepuasan pasien yang disurvei 72%, dapat terealisasi sesuai target 77,84%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD, rumah sakit lebih fleksibel dalam mengelola pendapatan yang dipakai untuk membiayai operasional rumah sakit, sehingga banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien dapat segera diatasi dengan memanfaatkan anggaran BLUD.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase kepuasan pasien yang disurvei	72%	78%	108%	Rumah Sakit Umum	TMT

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

7. Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.789.561.300,- dengan realisasi sebesar Rp.767.183.289,- (97,17%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Pengolahan Limbah Rumah Sakit.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	789.561.300	767.183.289	97,17%
Pembangunan, Pemeliharaan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	789.561.300,00	767.183.289,00	97,17%

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja dengan indikator Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target, yaitu 100%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena adanya pengolahan Limbah Rumah Sakit Gedung 1 dan pengadaan bahan habis pakai pengolahan limbah.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar	100%	100%	100%	Rumah Sakit Umum	TST

Sumber : Rumah Sakit Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)

A.2.2.3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum optimalnya realisasi fisik dan keuangan yang direncanakan terjadi pada rapat rutin akreditasi mingguan 1080 orang 540 & rapat rutin akreditasi bulanan sebanyak 550 orang yang terealisasi sebanyak 367 orang
- Rendahnya realisasi keuangan kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit yang direncanakan sebanyak Rp. 308.266.000 terealisasi sebanyak Rp. 206.013.900 Belum terpenuhinya target tersebut disebabkan Rapat Rutin Akreditasi Mingguan & Rapat Rutin Akreditasi Bulanan diserap sesuai kebutuhan, karena di pertengahan tahun akreditasi memakai jasa pihak ketiga.
- Program Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan target 70% Realisasi 95,67% . Resep yang di buat sesuai dengan formularium RSU. Formularium rumah sakit merupakan penerapan konsep obat esensial di rumah sakit yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya



- d. Program Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD melebihi target capaian dengan target 72% Realisasi 77,84% karena dengan diterapkannya pola pengelolaan keuangan BLUD, rumah sakit lebih fleksibel dalam mengelola pendapatan yang dipakai untuk membiayai operasional rumah sakit, sehingga banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien dapat segera diatasi dengan memanfaatkan anggaran BLUD
- e. Program Pengembangan pelayanan kesehatan tahun 2017 ditargetkan 14 Jenis Pelayanan yang akan sesuai SPM terrealisasi 15 pelayanan yang sudah sesuai SPM pengembangan pelayanan di dalamnya didukung oleh 5 kegiatan, salah satunya kegiatan penyediaan dan pemeliharaan bank darah rumah sakit dengan adanya kegiatan tersebut RSUD mampu mengelola darah dengan lebih baik berkat adanya BDRS sehingga tadinya layanan transfusi darah belum sesuai standar sekarang sudah memenuhi standar
- f. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis, Pagu Rp. 814.210.000 Realisasi Rp. 587.524.279 di karenakan Efesinsi, Banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah banyaknya tiket pesawat yang tidak terserap
- g. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat dan Bidan Rp.450.519.000 Realisasi 399.173.220, Banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah banyaknya tiket pesawat yang tidak terserap
- h. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang Pagu Rp. 169.940.000 Realisasi Rp 105.403.670 Banyaknya pelatihan yang di rencanakan di luar daerah dan pelaksanaan di dalam daerah banyaknya tiket pesawat yang tidak terserap
- i. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit tidak mencapai target di indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit target 4 paket realisasi 1 Paket dan realisasi Keuangan Pagu Rp. 752.561.000 realisasi Rp. 547.598.888 karena Penataan ruang kasir tidak dilaksanakan berkaitan masih dalam proses renovasi oleh Dinas bangunan melalui pihak ke-3 nya sampai dengan 31 desember 2017
- j. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit pagu Rp. 4080760900 realisasi Rp. 3633309276 (89,04%) di karenakan menyesuaikan kebutuhan efesiensi dari Bahan Bakar Minyak/ Gas Penunjang Pelayanan target 13.612 liter realisasi 10.421 liter.
- k. Kegiatan Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Efesiensi indikator Tersedianya Publikasi Advetoriaal dan Media Informasi Rumah Sakit target 1 Paket realisasi 1 paket di pertengahan tahun pihak ke tiga putus kontrak karena Advetoriaal online nasional yang tidak dapat dilanjutkan kerjasama karena



proses pembayaran yang harus dilakukan di muka bukan setelah kwitansi dan SPJ tetapi secara capaian sudah tercapai

- l. Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Rumah Sakit terjadi efisiensi pagu Rp. 95.990.000 realisasi Rp. 79.204.100 pada makan minum kegiatan dan penggandaan dokumen.

2. Solusi

- a. Optimalisasi perencanaan dan pengangan.
- b. Melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia secara bertahap disesuaikan dengan daya tampung gedung yang ada.

A.2.3. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

A.2.2.4. Program dan Kegiatan

1. **Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan**
program ini diarahkan pada terbangunnya sejumlah puskesmas, posyandu, bangunan puskesmas yang dikembangkan, puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan, Lanjutan pembangunan PPKT, lanjutan pembangunan Gedung 2 dan pembangunan Gedung 3 RSUD Kota Tangerang Selatan serta Puskesmas yang direhabilitasi. Dilaksanakan melalui 5 kegiatan yaitu (1) Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pelayanan Kesehatan, (2) Rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan, (3) Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 2, (4) Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 3, dan (5) Pembangunan Gedung PPKT.

A.2.2.5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan,**

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 119.714.559.538,- dengan realisasi sebesar Rp 55.130.787.613 (46,05%), yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan. Dengan realisasi sebesar 46,05%, terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 64.583.771.925,- atau (53,95%). Beberapa anggaran yang tidak terserap yaitu :

- a. Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 3 dengan anggaran sebesar Rp. 58.948.611.538,- dikarenakan kegiatan tersebut merupakan Pekerjaan *multy years*, sampai dengan saat ini kegiatan tersebut dalam proses rekomendasi dari TABG oleh MK.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

- b. Pembangunan RSU kota Tangerang Selatan Gedung 2, realisasi fisik mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp. 19.174.105.000,- (86,94 %).

Target capaian keuangan yang tidak tercapai disebabkan oleh efisiensi kontrak, penyusunan nilai HPS yang di sesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	119.714.559.538	55.130.787.613	46,05
Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pelayanan Kesehatan	2.218.550.000	2.074.407.400	93,50
Rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	1.913.800.000	1.796.533.000	93,87
Pembangunan RSU kota Tangerang Selatan Gedung 2	22.054.426.000	18.235.499.213	82,68
Pembangunan RSU Kota Tangerang Selatan Gedung 3	58.948.611.538	-	0,00
Pembangunan Gedung PPKT	34.579.172.000	33.024.348.000	95,50

Sumber : Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Indikator kinerja program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, yaitu sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah puskesmas yang terbangun	31	30	97%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Jumlah bangunan posyandu yang dibangun	47	30	64%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Jumlah puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan	3	2	67%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Jumlah Bangunan PPKT	0,39	0,44	113%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TMT
Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	7	3	43%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Bangunan RSUD (Gedung 3)	2%	0%	0%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TT
Bangunan Gedung 2 RSU Tangel	100%	100%	100%	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	TST

Sumber : Bangunan dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)



A.2.2.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Target capaian keuangan yang tidak tercapai pada kegiatan Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 2 disebabkan oleh efisiensi kontrak, penyusunan nilai HPS yang disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan.
- b. Belum optimalnya penyerapan paket pekerjaan *multy years* pada Kegiatan Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 3, dikarenakan masih dalam tahap rekomendasi dari TABG oleh Konsultan MK.
- c. Tidak adanya ketersediaan lahan (aset pemerintah kota) untuk pembangunan puskesmas atau posyandu yang diusulkan sesuai dengan data usulan musrenbang kelurahan.

2. Solusi

- a. Peningkatan koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan baik sisi anggaran maupun teknis kegiatan untuk Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.
- b. Melaksanakan perencanaan serta manajemen kegiatan dengan lebih baik serta melanjutkan paket pekerjaan *multy years* pada kegiatan ditahun selanjutnya untuk mengatasi permasalahan kegiatan Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 3.
- c. Mengoptimalkan kegiatan Koordinasi Pembangunan RSUD Kota Tangerang Selatan Gedung 3
- d. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Bangunan dan Penataan Ruang dengan Dinas terkait lainnya.
- e. Mensyaratkan ketersediaan lahan milik pemerintah kota untuk kebutuhan pembangunan
- f. Mengupayakan penyelesaian permasalahan teknis pembangunan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan lebih maksimal
- h. Pelaksanaan pekerjaan dirancang lebih optimal dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu pelaksanaan.



A.2. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh; 1) Dinas Pekerjaan Umum, 2) Bappeda, dan 3) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.

A.3.1. Dinas Pekerjaan Umum

A.3.1.1. Program dan Kegiatan

1. **Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**, program ini diarahkan pada pembangunan jalan dan jembatan serta jalan lingkungan dalam kondisi baik, dan terbangunnya pedestrian jalan, melalui kegiatan peningkatan kualitas pembangunan jalan, baik jalan inspeksi, jalan lingkungan dan jalan wilayah I s/d III, pemeliharaan jalan lingkungan di 7 kecamatan serta pembangunan pedestrian.
2. **Pengendalian banjir**, Program ini diarahkan pada pengurangan luas genangan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan dengan kegiatan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir, Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane, Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Angke, Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Pesanggrahan, Penanganan Banjir. Diharapkan dengan program ini maka banjir yang ada di bisa dikendalikan dengan baik.
3. **Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya**, program ini diarahkan pada pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku serta menjaga kapasitas debit sungai /tandon, melalui kegiatan pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku, serta menjadi kapasitas debit sungai /tandon, melalui kegiatan pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan di 6 Kecamatan, Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Air, Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir, Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane, Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Angke, Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Pesanggrahan, Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air.
4. **Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong**, Program ini diarahkan pada menjaga kapasitas Debit Saluran, melalui kegiatan pembangunan drainase/gorong-gorong di 7 kecamatan, perencanaan, pengawasan dan pembangunan Drainase Kota.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

Selama Tahun 2017, menghasilkan kinerja program sebagai berikut :

- 1 **Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**, dilaksanakan melalui 54 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.412.326.906,- dan terrealisasi sebesar Rp. 207.699.273.615,- atau 93,81%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	221.412.326.906,00	207.699.273.615,00	93,81%
Inspeksi Kondisi Jalan	1.451.785.300,00	1.042.054.900,00	71,78%
Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)	722.960.940,00	691.150.570,00	95,60%
Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	89.500.000,00	87.810.000,00	98,11%
Pengendalian Pemanfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air	6.160.267.300,00	6.157.700.850,00	99,96%
Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi & Peraturan Lainnya yang terkait	116.470.200,00	116.470.200,00	100,00%
Pembangunan Jalan Wilayah I	17.606.154.232,00	16.489.674.400,00	93,66%
Pembangunan Jalan Wilayah II	12.772.944.500,00	12.030.539.500,00	94,19%
Pembangunan Jalan Wilayah III	25.734.066.480,00	24.650.451.480,00	95,79%
Pembangunan Jembatan	10.601.576.200,00	10.502.450.700,00	99,06%
Pengawasan Pembangunan Jembatan	307.739.500,00	307.347.500,00	99,87%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat	6.568.071.100,00	6.553.769.100,00	99,78%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur	8.145.039.529,00	8.127.554.100,00	99,79%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong	7.905.245.068,00	7.879.636.900,00	99,68%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong Utara	6.803.352.509,00	6.785.705.900,00	99,74%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Setu	6.566.211.053,00	6.506.844.100,00	99,10%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren	7.688.099.848,00	7.586.977.800,00	98,68%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang	8.920.535.047,00	8.901.123.500,00	99,78%
Perencanaan Pembangunan Jalan Kota	1.200.000.000,00	1.166.633.000,00	97,22%
Perencanaan Pembangunan Jembatan	900.000.000,00	883.600.400,00	98,18%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Bidang Bina Marga	440.000.000,00	435.500.900,00	98,98%
Pemeliharaan Jalan	13.918.604.000,00	13.900.627.404,00	99,87%
Pemeliharaan Jembatan	4.150.000.000,00	4.105.703.100,00	98,93%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat	2.750.000.000,00	2.746.636.200,00	99,88%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur	2.750.000.000,00	2.739.035.600,00	99,60%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong	3.397.000.000,00	3.394.306.500,00	99,92%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong Utara	3.000.000.000,00	2.996.541.800,00	99,88%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Setu	2.750.000.000,00	2.736.489.900,00	99,51%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren	3.700.000.000,00	3.692.923.700,00	99,81%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang	3.500.000.000,00	3.487.625.800,00	99,65%
Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Kontruksi	96.704.000,00	96.680.660,00	99,98%
Pengembangan dan Pengolahan Teknologi Informasi	380.000.000,00	369.360.000,00	97,20%
Penyusunan Data Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air	766.000.000,00	762.775.000,00	99,58%
Pengujian dan Penunjang Kegiatan Laboratorium Kebinamargaan	685.950.000,00	658.754.000,00	96,04%
Pemeliharaan Peralatan Pengujian Laboratorium Kebinamargaan	153.700.000,00	130.783.585,00	85,09%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah I	150.000.000,00	149.614.800,00	99,74%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah II	150.000.000,00	149.400.000,00	99,60%
Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah III	200.000.000,00	157.880.000,00	78,94%
Pengawasan Pembangunan Jalan Wilayah I,II,III	1.216.802.000,00	1.201.485.100,00	98,74%
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah I	922.064.000,00	902.933.200,00	97,93%
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah II	762.017.000,00	743.627.000,00	97,59%
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah III	1.490.937.000,00	1.447.144.500,00	97,06%
Pembangunan Turap Jalan	2.340.060.100,00	2.136.392.100,00	91,30%
Pemeliharaan Turap Jalan	1.500.000.000,00	1.231.387.716,00	82,09%
Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan	19.000.000.000,00	11.972.052.500,00	63,01%
Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah I	733.854.000,00	723.601.700,00	98,60%
Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah II	741.000.000,00	738.217.000,00	99,62%
Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah III	1.485.823.000,00	1.477.078.000,00	99,41%
Perencanaan Pedestrian Saluran dan Jalan	1.500.000.000,00	1.499.489.700,00	99,97%
Pemeliharaan Pedestrian Saluran dan Jalan	1.500.000.000,00	1.499.448.900,00	99,96%
Pengawasan Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan	621.793.000,00	617.629.000,00	99,33%
Pembangunan Jembatan (Ban.Keu Prov)	4.100.000.000,00	3.977.832.800,00	97,02%
Pembangunan Jalan (Ban.Keu Prov)	3.000.000.000,00	2.793.606.800,00	93,12%
Perencanaan Jalan (Ban.Keu Prov)	300.000.000,00	286.917.250,00	95,64%
Pembangunan Pedestrian (Ban.Keu Prov)	7.000.000.000,00	5.272.296.500,00	75,32%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai yaitu Jalan dan jembatan dalam kondisi baik berhasil meningkatkan 96% dari yang ditargetkan 84%. Begitu pula dengan kinerja Jalan lingkungan dalam kondisi baik dan Pedestrian jalan yang dibangun dari target masing-



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

masing sebesar 5% dan 2% pedestrian jalan yang dibangun dapat terealisasi sesuai target. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	84%	96%	115%	Dinas Pekerjaan Umum	TMT
Jalan lingkungan dalam kondisi baik	50%	50%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST
Pedestrian jalan yang dibangun	2%	2%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

2 Program Pengendalian Banjir, dilaksanakan melalui 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.690.401.900,- dan ter-realisis sebesar Rp. 36.059.682.982,- atau 95,67%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengendalian Banjir,	37.690.401.900,00	36.059.682.982,00	95,67%
Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir	4.756.911.800,00	4.751.298.722,00	99,88%
Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane	3.511.661.500,00	3.510.868.900,00	99,98%
Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Angke	10.925.828.600,00	10.917.619.800,00	99,92%
Operasi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air DAS Pesanggrahan	7.200.000.000,00	7.041.033.160,00	97,79%
Penanganan Banjir (Ban.Keu Prov)	11.296.000.000,00	9.838.862.400,00	87,10%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Kinerja yang dicapai yaitu persentase luas genangan yang tereduksi adalah berhasil meningkatkan 34% dari yang ditargetkan 34% atau berhasil mencapai target sejumlah 100 %. Faktor keberhasilan pencapaian target antara lain karena kegiatan yang dilaksanakan 99,39% berhasil dilaksanakan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
luas genangan yang tereduksi	34%	34%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya, dilaksanakan melalui 14 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.615.100.701,- dan ter-realisis sebesar Rp. 52.295.708.300,- atau 99,39%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	52.615.100.701,00	52.295.708.300,00	99,39%
Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan di 7 Kecamatan	11.200.000.000,00	11.151.170.700,00	99,56%
Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Air	3.700.000.000,00	3.681.842.500,00	99,51%
Pengawasan Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air	858.104.400,00	768.746.900,00	89,59%
Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir	12.163.777.000,00	12.147.483.000,00	99,87%
Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane	15.282.559.681,00	15.161.466.600,00	99,21%
Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Angke	5.257.659.620,00	5.246.481.600,00	99,79%
Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Pesangrahan	1.293.000.000,00	1.289.551.400,00	99,73%
Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	2.860.000.000,00	2.848.965.600,00	99,61%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Salah satu indikator Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku dan indikator Kapasitas debit sungai /tandon, dari target masing-masing sebesar 14% dan 34% dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendorong pencapaian target ini adalah kegiatan yang dilaksanakan 98,88% berhasil dilaksanakan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku	14%	14%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST
Kapasitas debit sungai /tendon	34%	34%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target),
TT (Tidak Tercapai)



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

- 4 **Program Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong**, dilaksanakan melalui 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.963.518.133,- dan ter-realisis sebesar Rp. 57.097.231.100,- atau 98,51%.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong	57.963.518.133,00	57.097.230.700,00	98,51%
Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan di 7 Kecamatan	33.511.289.633,00	33.338.126.500,00	99,48%
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kota	2.700.000.000,00	2.699.255.500,00	99,97%
Pengawasan Pembangunan Saluran Lingkungan Wilayah I, II & III	2.017.465.600,00	1.986.200.800,00	98,45%
Pengawasan Peningkatan Penanganan Drainase Kota	706.581.000,00	681.709.000,00	96,48%
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Wil.I, II & III	2.854.025.000,00	2.826.778.000,00	99,05%
Pembangunan Drainase Kota	6.820.156.900,00	6.795.242.200,00	99,63%
Pemeliharaan Saluran Drainase Kota	4.050.000.000,00	4.044.349.900,00	99,86%
Pembangunan Drainase Kota (Ban.Keu Prov)	5.304.000.000,00	4.725.569.200,00	89,09%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Capaian kinerja yang dihasilkan sangat baik sudah mencapai 100%, bisa dilihat dari rata-rata pelaksanaan kegiatan yang diperoleh 98,55% terlaksana.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Kapasitas Debit Saluran	40%	40%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	TST

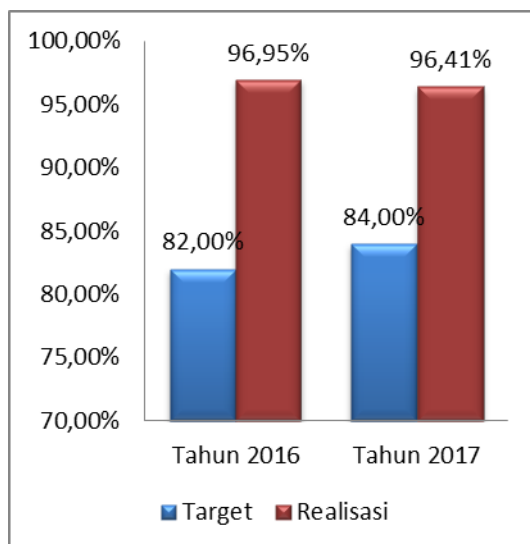
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

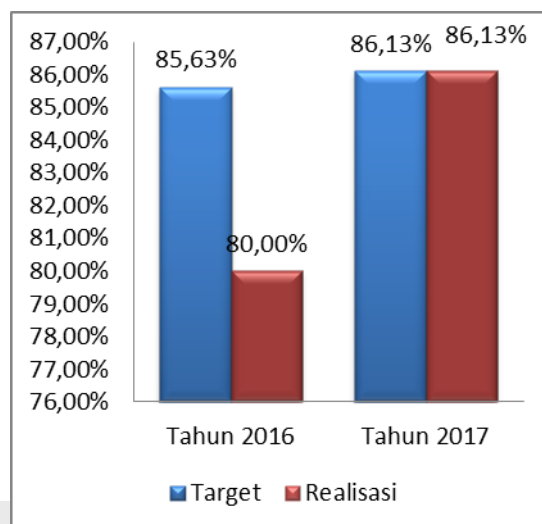


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Grafik Error! No text of specified style in document.-8. Realisasi dan Target Jalan dan jembatan dalam kondisi baik Tahun 2016-2017



Grafik Error! No text of specified style in document.-8. Realisasi dan Target persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Tahun 2016-2017



A.3.1.2. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Pelaksanaan pada kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh tidak diserapnya Perjalanan Dinas dan kegiatan Monitoring Utilitas, Survey Rekomendasi Utilitas dan Sinkronisasi dan koordinasi Lintas Sektorial terkait jaringan utilitas tidak dilaksanakan dikarenakan ketersediaan waktu yang tidak mencukupi.
- Rendahnya Realisasi Keuangan pada Kegiatan Penanganan Banjir (Bankeu. Prov) disebabkan oleh efisiensi atau sisa kontrak pekerjaan, adapun fisik dilapangan dilaksanakan 100%.
- Rendahnya Realisasi Keuangan pada kegiatan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Laboratorium Kebinamargaan dikarenakan pemeliharaan alat Hummer tes tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya alat yang memenuhi spesifikasi dan pembuatan kolam tampungan untuk pengujian tidak dilaksanakan dikarenakan ketersediaan lahaanya yang digunakan untuk kepentingan lainnya (Depo Arsip).
- Rendahnya Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat Wilayah III disebabkan oleh efisiensi anggaran, adapun Pemeliharaan Alat sudah dilaksanakan 100%.



- e) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan terkendala oleh Pembebasan Lahan dan utilitas PLN belum dipindahkan namun pelaksanaan Pekerjaan Fisik dapat dilaksanakan 100%.
- f) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pedestrian (Bankeu. Prov) terkendala oleh lokasi dilapangan terbatas untuk pembangunan Saluran pembuang, tetapi pelaksanaan Pekerjaan Fisik dapat dilaksanakan 100%.
- g) Rendahnya Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pembangunan Drainase Kota (Bankeu. Prov) disebabkan oleh efisiensi anggaran, adapun Pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan sudah dilaksanakan 100%.

2. Solusi

- a) Terkait Kegiatan Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan akan dilakukan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait (PLN) agar utilitas tersebut dapat segera dipindahkan dan terkait lahan akan di koordinasikan kembali dengan badan pertanahan agar segera untuk di bebaskan lahannya.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah propinsi Banten dengan total anggaran sebesar Rp. 1.008.472.600,- . Bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp. 2.384.338.206,-. telah dialokasikan dan direalisasikan oleh SKPD terkait dalam program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD Provinsi Banten dan APBN Tahun Anggaran 2016

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum memadainya perlengkapan penunjang seperti jaringan khusus *e-library* termasuk gedung sebagai prasarana utamanya, maka pembuatan *e-Library* tidak dapat dilaksanakan.
- b. Tidak adanya aplikasi *e-library*, maka pengadaan *e-Book* tidak dapat dilaksanakan

2. Solusi

- a. Mengoptimalkan jaringan khusus E-library termasuk gedung sebagai prasarana utama.
- b. Membuat aplikasi *e-library*.



B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana salah satu bentuk tugas pembantuan diberikan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 (Lima) Desa Menjadi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada pertengahan tahun 2012, sebanyak 5 (lima) desa di Kecamatan Setu telah berubah status menjadi kelurahan. Dengan tidak adanya desa di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, maka sejak tahun 2012 tidak ada lagi Tugas Pembantuan yang diberikan. Demikian juga pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 dimana masih ada 5 (lima) desa, juga tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.

Penyelenggaraan azas Tugas Pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.





BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Berdasarkan asas otonomi, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri yaitu meliputi Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 meliputi :

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara eksplisit merupakan bagian dari Misi kelima pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016–2021, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi, melalui program Kerjasama pembangunan dan kewilayahan. Adapun kegiatan kerjasama daerah dapat dicermati dari RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Tabel. 6.1 Kegiatan Kerjasama

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
1.	Sekda, Bagian Pemerintahan	Kerjasama Pembangunan Dan Kewilayahan	Koordinasi Kerjasama Daerah	Sosialisasi Kerjasama Daerah	50 Orang
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Kali
				Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 Dokumen
			Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemda dan Instansi Lainnya	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja	35 Kali
2.	Badan Perencanaan Pembangunan	Kerjasama Pembangunan Dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembangunan	Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	11 kali



A.1. Daerah yang diajak Kerjasama

Kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas, sinergi dan saling menguntungkan, pada tahun 2017, diantaranya adalah.

1. Kesepahaman bersama antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan No 134.43/858-PM/2017 dan 893/005-BPSDM/2017 Tanggal 23 Maret 2017.
2. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat No 134.43/858-PM/2017 dan 893/005-BPSDM/2017 Tanggal 23 Maret 2017.
3. Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Balai Besar Pelatihan (BBPK) Ciloto Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang kerjasama diklat manajemen tata usaha kesehatan No. 890/958/BKPP/2017 dan HK.03.01/III.2/2598/2017 Tanggal 3 April 2017.
4. Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan administrasi pemerintah daerah No. 890/3055/BKPP/2017 dan No 1001/PKS.III-B.III/2017 Tanggal 20 November 2017.
5. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Lembaga Administrasi Negara tentang kerjasama pengiriman peserta seleksi terbuka jabatan tinggi pratama melalui pelaksanaan seleksi kompetensi (Assesment) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b di lingkungan Kota Tangerang Selatan No. 027/171/SPK/BKPP/2017 dan No. 1262/PKP.1/Hkm.03; Tanggal 13 April 2017.
6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan tentang kerjasama pelayanan kesehatan peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama melalui tes kesehatan dan tes psikologi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b angkatan I di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan 027/142/SPK/BKPP/2017 dan No. 188.4 Kep.139-Yanmed/2017; tgl 5 April 2017.



7. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan tentang kerja sama pelayanan kesehatan peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama melalui tes kesehatan dan tes psikologi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b angkatan II di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan 027/674/SPK/BKPP/2017 dan No. 445.1/060- Yanmed/2017; Tanggal 5 Desember 2017.

A.2. Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan kerjasama antar daerah sebagai berikut;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama Daerah;
2. Permendagri No.22 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
3. Permendagri No, 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
6. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;



B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, maka kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan selama tahun 2017, diantaranya adalah :

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, maka kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan bersama antara Stikes Kharisma Persada dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor : 400/0671/Sekret, Nomor : 015/K-STIKes/KJS/KP/IV/2017, Tanggal 3 April 2017. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Praktik Kerja Lapangan.
2. Kesepakatan bersama antara Poltekkes Kemenkes Jakarta dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor : 400/0671/Sekret, Nomor : HK.03.01/I/1092A/2017. Tanggal 3 April 2017. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Praktik Kerja Lapangan.
3. Kesepakatan bersama antara Universitas Padjadjaran dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat No. 61/UN6.RKT/Mou/2017 dan No. 134.43/455-Pem/Setda/2017; Tanggal 9 Februari 2017.
4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BKPP Kota Tangerang Selatan dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung tentang fasilitas pelaksanaan tes kompetensi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel berbasis komputer dan android No 074/3120/BKPP/2017 dan No. 15448UG6.G/KS/2017, Tanggal 3 November 2017.



C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

C.1. Forum Koordinasi

Jenis gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kota Tangerang Selatan Selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 diantaranya adalah :

- a. Pencurian termasuk pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan kekerasan (curas);
- b. Peredaran Miras dan Narkoba;
- c. Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Bahu Jalan/Fasos Fasum;
- d. Wanita Pekerja Seks dan warung remang remang;
- e. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Anak Jalanan yang berkeliaran;
- f. Spanduk, Umbul Umbul, Baligho dan media reklame luar ruangan yang tidak tertib dan merusak K3 (ketentraan, ketertiban, dan keindahan);
- g. Penyalahgunaan Lahan Fasos Fasum;
- h. Tempat Usaha Rekreasi tak berijin;
- i. Kemacetan lalu lintas;
- j. Demonstrasi Massal;

C.2. Materi Koordinasi

Pelaksanaan bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang Selatan setiap tahunnya terus ditingkatkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Kecamatan, Polsek, Polres, Kodim, Danramil, Kejaksaan, Pengadilan, satuan pengamanan di lingkungan perumahan / perkantoran/sentral perdagangan serta pengamanan swakarsa masyarakat di tiap lingkungan.

Sebagai bentuk dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Tangerang Selatan, pada Tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan, diantaranya 1) Piket Pasar yang berlokasi di 3 pasar, yaitu Pasar Serpong, PasarJombang dan Pasar Ciputat, 2) Patroli Taman, dipusatkan di Taman Kota 1, Taman Kota 2 dan Tandon Ciater, dan 3) Monitoring Kewilayahan yang disebar di 7 kecamatan di Kota Tangeng Selatan.

C.3. Instansi Vertikal yang Terlibat

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang Selatan pada saat ini didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 314 orang, yang terdiri dari 29 orang PNS dan 285 Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :



- a. Golongan II sebanyak 5 orang;
- b. Golongan III sebanyak 20 orang;
- c. Golongan IV sebanyak 4 orang; dan
- d. Non PNS sebanyak 285 orang;

C.4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran yang dilokasikan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 12.031.650.100,- dialokasikan pada 2 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2017.

C.5. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Tangerang Selatan, pada Tahun 2017 pemerintah daerah telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan telah dibahas serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan baik aparat penegak ketertiban umum maupun masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Namun demikian tentunya peraturan daerah ini perlu disosialisasikan secara luas agar diketahui dan dimengerti oleh masyarakat luas.

Namun demikian upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang Selatan masih dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya:

- a. Belum optimalnya Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2014, sehingga masih banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman yang benar tentang Perda tersebut.
- b. Belum optimalnya koordinasi penertiban antar instansi terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Masih rendahnya kesadaran para pedagang kaki lima sehingga tidak pernah jera berjualan bukan pada tempatnya.
- d. Keterbatasan jumlah petugas Satpol PP, dibandingkan dengan tugas yang harus dilaksanakan sesuai TUPOKSI-nya.



Sedangkan upaya yang telah dilakukan sebagai upaya penanggulangan diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum secara luas, dilakukan secara intensif kepada warga secara luas.
- b. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dengan unsur pimpinan daerah baik unsur kepolisian maupun TNI dan penegak hukum lainnya, baik melalui rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah secara berkala maupun insidentil;
- c. Menangani para pedagang kaki lima secara persuasif untuk berjualan pada tempatnya.
- d. Optimalisasi SDM Satpol PP dan tenaga bantuan Satpol PP.

C.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah serta upaya-upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban, Satuan Polisi pamong Praja Kota Tangerang Selatan sebagai instansi pelaksana yang memiliki fungsi penegakan Peraturan Daerah terus didorong untuk mampu berkoordinasi dengan aparat kepolisian baik Polres Tangerang Selatan maupun Polres Kabupaten Tangerang serta unsur tokoh masyarakat dan pemuka agama terutama dalam hal kegiatan penting seperti pembongkaran bangunan tanpa ijin, penertiban PSK dan lainnya. Sementara itu, tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan dilimpahkan pada masing-masing lingkungan yang dikoordinasikan secara berjenjang oleh camat, lurah, RW dan RT serta perangkat trantib yang ada di tiap kecamatan juga aparat kepolisian yang ada di tiap polsek di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama kurun waktu 2017, masih ditangani melalui peran aktif seluruh unsur terkait, baik satuan Polisi Pamong Praja maupun unsur pengamanan organik TNI dan Kepolisian.

D. Pembinaan Batas Wilayah

D.1. Sengketa Batas Wilayah

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah serta upaya-upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban, Satuan Polisi pamong Praja Kota Tangerang Selatan sebagai instansi pelaksana yang memiliki fungsi penegakan Peraturan Daerah terus didorong untuk mampu berkoordinasi dengan aparat kepolisian baik Polres Tangerang Selatan maupun Polres Kabupaten Tangerang serta unsur tokoh masyarakat dan pemuka agama terutama dalam hal kegiatan penting seperti pembongkaran bangunan tanpa ijin, penertiban PSK dan sengketa perbatasan.



D.2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian.

Tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan dilimpahkan pada masing-masing lingkungan yang dikoordinasikan secara berjenjang oleh camat, lurah, RW dan RT serta perangkat trantib yang ada di tiap kecamatan juga aparat kepolisian yang ada di tiap polsek di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam menyelesaikan.

D.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggra pembinaan Batas Wilayah.

Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama kurun waktu 2017, masih ditangani melalui peran aktif seluruh unsur terkait, baik satuan Polisi Pamong Praja maupun unsur pengamanan organik TNI dan Kepolisian.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

E.1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulanganya

Curah hujan yang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2017 telah mengakibatkan bencana di Kota Tangerang Selatan seperti bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang. Adapun rincian kejadian bencana sebagai berikut:

Jenis Bencana	Lokasi Kecamatan	Prekwensi Bencana	Jumlah Korban	Perkiraan kerugian	Upaya penanganan
Banjir	Ciputat, Pondok Aren, Ciputat Timur, Serpong, Setu, Pamulang	55 kali kejadian	-	-	Melakukan kaji cepat dan memberikan bantuan penyedotan genangan air sejak pukul 17.00 s/d 20.00 WIB sampai air surut dan situasi normal kembali
Longsor	Setu, Serpong, Ciputat	14 kali kejadian			Melakukan kaji cepat dan melaporkan ke dinas terkait
Angin Kencang	Serpong Utara, Serpong, Setu, Ciputat Timur	9 kali kejadian	-	-	Melakukan kaji cepat dan bekerjasama dengan relawan serta instansi terkait untuk membersihkan lokasi dari reruntuhan puing bangunan.
Pohon tumbang	Setu	1 kali kejadian	-	-	Melakukan pembersihan lokasi dari pohon yang tumbang bekerjasama dengan instansi terkait (Damkar, Dinas LH, Kecamatan dan Kelurahan) dan relawan

Sumber : BPBD Kota Tangerang Selatan, Tahun 2018

E.2. Status Darurat Bencana

Status darurat bencana selama kurun waktu tahun 2017di Kota Tangerang Selatan masih dalam skala kecil yaitu berupa genangan dan limpasan air sungai, dimana ketika air sungai



surut genangan air yang terjadi ikut surut. Belum sampai dikatakan status darurat bencana karena daerah yang terkena banjir masyarakat masih bisa beraktifitas dan masyarakat belum diungsikan ketempat penampungan sementara. Begitupula dengan bencana lainnya seperti Longsor, Angin Kencang dan Pohon Tumbang. Dengan demikian Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2017 belum pernah mengeluarkan status darurat bencana.

E.3. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Dalam mengatasi bencana alam di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017, sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 yang dialokasi di BPBD dengan jumlah Rp. 2,619,977,000,-.

Jenis Bencana	Jumlah Dana (Rp)	OPD
Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang, Kekeringan	2,619,977,000,-.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : BPBD Kota Tangerang Selatan, Tahun 2018

E.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Memprediksikan kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Kota Tangerang Selatan memang bukan suatu hal yang mudah, namun demikian belajar dari pengalaman dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, maka pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah antisipatif yang dimaksudkan agar organisasi perangkat daerah yang menangani bencana memiliki kemampuan dan kesiapan menghadapi dan menanggulangi korban bencana, kapanpun itu terjadi. Selain itu juga pemerintah daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana melalui pembentukan komunitas siaga bencana dan pembinaan relawan.

Beberapa upaya dimaksud diantaranya melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Banten dan BNPB serta kerjasama dengan OPD terkait dalam memfasilitasi penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas SDM dan inventarisasai sarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah telah dilakukan, hal ini dimaksudkan agar SDM daerah memiliki keterampilan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas serta mampu memanfaatkan sarana pendukung yang ada. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di 7 (tujuh) wilayah kecamatan tentang penanggulangan bencana terutama bencana alam. Selebihnya, masyarakat secara swadaya juga memiliki kesiapan sendiri di lingkungan masing-masing melalui adat kegotyubannya sendiri-sendiri, dan bagi yang tinggal di perumahan-perumahan besar, system antisipasi dan penanggulangan bencana juga disiapkan oleh pengembang masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari sistem drainase dan wilayah resapan air yang terencana diwilayahnya serta akses jalan yang baik sehingga memudahkan jalur evakuasi korban dan mobilisasi kendaraan penanggulangan bencana.



E.5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi Bencana yang diperkirakan akan masih sulit diantisipasi terutama menjelang datangnya musim hujan adalah bencana banjir. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak faktor, terutama pendangkalan dan penyempitan sungai dan dari faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi kemudian beberapa aliran sungai berawal dari Bogor dan Depok yang memberikan sumbangan terhadap potensi bencana.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

F.1. Jenis Kawasan Khusus

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 887.583.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 860.643.000,- (96,96%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,	887.583.000,00	860.643.000,00	96,96%
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	486.283.000,00	464.253.000,00	95,47%
Fasilitasi Program Perubahan Iklim	401.300.000,00	396.390.000,00	98,78%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

F.2. Kepemilikan Kawasan

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai pada indikator program luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih berhasil mencapai target yang dilaksanakan di Kecamatan Serpong seluas 500 m3, dan juga untuk kegiatan *Pilot Project* kampung iklim (Kampung hijau) berhasil dilaksanakan di Kecamatan Pondok Aren.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan	500	500	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Pilot Project kampung iklim (kampung Hijau di 7 kecamatan)	1	1 (Kecamatan Pondok Aren)	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018



F.3. Sumber Anggaran

Program Pengelolaan RTH, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.12.713.285.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.526.209.146,- (90,66%), yang dilaksanakan melalui 5(lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengelolaan RTH,	12.713.285.000,00	11.526.209.146,00	90,66%
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.023.360.000,00	6.468.841.194,00	92,10%
Pemeliharaan Taman Koridor Jalan Utama	3.013.213.000,00	2.542.721.679,00	84,39%
Pemeliharaan Taman Lingkungan	1.587.312.000,00	1.441.739.773,00	90,83%
Penanaman Ruang Terbuka Hijau dan pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati	1.089.400.000,00	1.072.906.500,00	98,49%
Pembangunan Hutan Kota Serpong Utara (Ban.Keu Prov)	-	-	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai adalah 1) Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya berhasil dilaksanakan di 7 Kecamatan. 2) Persentase taman terpelihara dapat terealisasi sesuai target, dan 3) Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami berhasil dilaksanakan sepanjang 1,3 km.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	7 kecamatan	7 kecamatan	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Persentase taman terpelihara	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami	1,3 Km	1,3 Km	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

F.4. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Dilihat dari jumlah anggaran kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 253.141.000,- realisasi mencapai Rp. 74.800.000,- (29,55%) dan dilihat dari belum optimalnya realisasi fisik kegiatan dengan realisasi 84,42% dari target 100% disebabkan oleh: 1) efisiensi anggaran paket diklat, 2) Jabatan fungsional lingkungan hidup masih memerlukan kajian lebih lanjut di internal dinas sehingga draft perwal



belum disusun

- b) Dilihat dari jumlah anggaran kegiatan Pengendalian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 6.903.409.000,- realisasi mencapai Rp. 5.311.610.662,- (76,94%) dan dilihat dari belum optimalnya realisasi fisik kegiatan dengan realisasi 97,17% dari target 100% disebabkan oleh: 1) efisiensi dari proses pengadaan, 2) tidak terserapnya anggaran di SPPD luar daerah akibat keterbatasan undangan, 3) adanya efisiensi dari gaji Non PNS.
- c) Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengolahan sampah.

2. Solusi

- a) meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi rutin terkait perencanaan dan penganggaran serta realisasi dan jadwal pelaksanaan sehingga optimalisasi pelaksanaan pekerjaan tercapai
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan reduksi timbulan sampah dengan pola 3 R
- c) Membuat perencanaan Diklat/Pengembangan SDM dengan koordinasi atau informasi dengan BKPP dan lembaga/penyelenggara lainnya.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

G.1. Gangguan yang Terjadi

Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan, program ini diarahkan pada Persentase Penindakan Pelanggaran Pengamanan dan Ketertiban. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh salah satu Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017, dapat disampaikan hasil Pelaksanaannya sekaligus menjadi Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan, yaitu sebagaimana berikut.

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
URUSAN KECAMATAN			
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	296.750.000,00	261.559.700,00	88,14%
Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	296.750.000,00	261.559.700,00	88,14%

G.2. Gangguan yang Terjadi



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, program ini diarahkan pada Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan, program ini diarahkan pada Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban, Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang, serta Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih. Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.094.667.600,- dengan realisasi sebesar Rp 2.801.139.938,- (90,52%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota,	3.094.667.600	2.801.139.938	90,52%
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.944.667.600,	2.651.148.938,	90,03%
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penyelenggaraan Kantrantibum	150.000.000,00	149.991.000,	99,99%

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal yang ditargetkan 98% berhasil mencapai target sebesar 98% hal ini menunjukkan optimalisasi Penegakan Perda dan /atau Perwal yang berhasil dilaksanakan selama tahun 2017. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut adalah konsistensi dalam penegakan Perda dan Perwal Kota Tangerang Selatan, melakukan Pendataan Bangunan Liar dan PKL diatas lahan Fasos Fasum, pendataan menara pemancar/tower tak berijin dan melaksanakan sosialisasi SISKAMSWAKARSA.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	98%	98%	100%	Satpol PP	TMT

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



2. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.936.982.500,- dengan realisasi sebesar Rp 8.812.277.500,- (98,60%), yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan,	8.936.982.500	8.812.277.500	98,60%
Pengendalian Satlinmas Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	726.593.427,00	720.253.427,00	99,13%
Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.394.994.073,00	1.347.552.073,00	96,60%
Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	201.000.000,00	196.790.000,00	97,91%
Penyelenggaraan Bina Potensi Masyarakat	159.000.000,00	153.964.000,00	96,83%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Aparatur	6.045.805.000,00	6.000.420.000,00	99,25%
Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satpol PP	409.590.000,00	393.298.000,00	96,02%

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat yang ditargetkan 30 kali dapat terealisasi sebesar 30 kali (capaian 100%). Bergitupula dengan 3 indikator lainnya berhasil mencapai target masing-masing 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	30 kali	30 kali	100%	Satpol PP	TST
Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	Satpol PP	TST
Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang	62%	62%	100%	Satpol PP	TST
Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih	100%	100%	100%	Satpol PP	TST

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)

G.3. Permasalahan & Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Sidang TIPIRING yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 7 Kegiatan terealisasi sebanyak 2 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan untuk menjaga iklim investasi, sehingga pelaku pelanggar perda diarahkan mengurus ijin dan tidak masuk ke ranah pidana karena yang bersangkutan menyelesaikan perijinannya, dan penyidikan dihentikan.
- b. Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Gelar Perkara yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 5 Kegiatan terealisasi sebanyak 4 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan tidak semua pelanggaran perda dilakukan gelar perkara, hanya permasalahan rumit dan melibatkan opd lain yang membutuhkan dilaksanakannya gelar perkara.
- c. Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Pengamanan Demonstrasi masa yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 9 Kegiatan terealisasi sebanyak 6 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan Kegiatan demonstrasi masa bersifat insidentil, sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kejadian.

2. Solusi

- a. Melaksanakan Perencanaan serta manajemen kegiatan dengan lebih baik.
- b. Penyediaan anggaran untuk kegiatan sidang tipiring, gelar perkara serta kegiatan demonstrasi masa dan kegiatan insidentil tetap diperlukan karena berdasarkan data, kejadian masih sering terjadi bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.



BAB VII

P E N U T U P

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Banten berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Selama tahun 2017, disamping melakukan upaya-upaya penyelesaian berbagai isu dan permasalahan yang telah disusun kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan pada RKPD 2017, target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dan dituntaskan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, pada akhirnya seluruh masyarakat dapat merasakan hasilnya sekaligus memberikan penilaian terhadap hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Segala masukan dari masyarakat dan DPRD akan menjadi *feedback* yang bermanfaat untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

Capaian Indikator Makro Daerah selama kurun waktu 2011-2016 telah mencerminkan tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang baik. Secara keseluruhan tingkat capaian yang di tunjukan oleh Indikator Makro, Kota Tangerang Selatan berada di atas rata-rata Provinsi Banten.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Provinsi Banten, nilai PDRB terus tumbuh dari tahun ke tahun yang di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel restoran dan real estate. Demikian pula dengan jumlah penduduk miskin 1,67 % di Tahun 2016 terendah di Provinsi Banten, Angka Harapan Hidup (AHH) 72,14 tahun mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik, laju pertumbuhan ekonomi tinggi, PDRB



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

per kapita telah mencapai Rp. 37,33 Juta, sedangkan angka tingkat pengangguran cukup fluktuatif dan diakhir Tahun 2016 berada di angka 6,80 %.

Selama kurun waktu Tahun 2017, disamping menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala yang ada, juga Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) telah mampu meraih beberapa keberhasilan / prestasi, diantaranya: Selama kurun waktu Tahun 2017, Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) telah mampu meraih beberapa keberhasilan / prestasi, diantaranya:

- a. Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementrian Perhubungan RI.
- b. Penghargaan Pencapaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah LVL 3 (BPK Perwakilan Prov. Banten).
- c. Penyerahan Anugrah *Obsession Award* 2017 dan *Woman Obsession Award* 2017.
- d. Penghargaan Kota Layak Anak dan Perempuan Sindo.
- e. Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama.
- f. Indonesia *Attractiveness Award* 2017.
- g. Penghargaan *Top It Implementation On Digital City*.
- h. Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif.
- i. Penghargaan Satyalencana Wira Karya.
- j. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, Kategori Utama.
- k. Penghargaan Swasti Saba.
- l. Penghargaan Natamukti dan Natamukti Nindya.
- m. Penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia.
- n. Penganugerahan Tambahan RKCI dan *Talkshow Smart City*.
- o. *Inovative Government Award* 2017.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*



PENGANUGERAHAN TAMBAHAN RKCI



PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK DAN PEREMPUAN SINDO(1)



PENGHARGAAN INDEKS KONDISI KEUANGAN DAERAH TERBAIK



PENGHARGAAN NATAMUKTI NINDYA



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*



INDONESIA ATTRACTIVENESS AWARD 2017



PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH INOVATIF



PEMBERIAN WTP DARI BPK PROVINSI



PENGHARGAAN TOP IT IMPLEMENTASI ON DIGITAL CITY



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*



RATING KOTA CERDAS INDONESIA



WALIKOTA ENTREPRENEUR AWARD 2017



WOMAN OBSESSION AWARD 2017



**APRESIASI DARI MENTERI KESEHATAN RI
TENTANG PERDA LARANGAN MEROKOK**



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Banten untuk mendapatkan masukan dan sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Semoga segala upaya yang sudah dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat, Dunia Usaha dan Akademisi dalam mewujudkan visi Kota Tangerang Selatan *“terwujudnya tangsel kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi”* selama Tahun 2017, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan menjadi masyarakat yang Cerdas, Modern dan Religius, serta mendapatkan ridho Allah SWT.

Tangerang Selatan, Maret 2017

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

